



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan program dan kegiatan yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat Kabupaten Sabu Raijua dan program-program yang telah ditetapkan dalam target APBD tahun 2024.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahun 2024 telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang di bidang keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 32 yang menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) Laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut mempunyai tujuan umum untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan juga berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Secara spesifik tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi mengenai:

- a. Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Ketaatan realisasi terhadap anggarannya;



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- e. Cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; dan
- f. Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Secara umum, tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan pemerintah daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah daerah;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai pemerintah daerah;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas.

Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua merupakan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang wajib disusun pada tiap akhir tahun anggaran dengan mengacu pada regulasi-regulasi pengelolaan keuangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- g. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- i. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- k. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6177);



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- u. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- z. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- aa. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
- bb. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
 - gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 - hh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 - ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - jj. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - kk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 - mm. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 - nn. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 - oo. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rai Hawu Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24);



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- pp. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Rai Hawu Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 29);
- qq. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7);
- rr. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1);
- ss. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua pada PT Bank NTT (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 5);
- tt. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 1);
- uu. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 3);
- vv. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1);
- ww. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 2);
- xx. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 4);
- yy. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 Nomor 19 Tahun 2017);
- zz. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 28);
 - aaa. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 29);
 - bbb. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 32);
 - ccc. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 32);
 - ddd. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 26);
 - eee. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 27 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 27);
 - fff. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 28);
 - ggg. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 54);
 - hhh. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 35);
 - iii. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 24); dan
 - jjj. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 40)

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Analisis Rasio Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.3 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah Ditetapkan

- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

- Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan – LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Transfer
 - 5.1.4 Pembiayaan
 - 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - 5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
 - 5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1 Pendapatan – LO



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	5.4.2	Beban
	5.4.3	Kegiatan Non Operasional
	5.4.4	Akun Luar Biasa
	5.5	Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
	5.5.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi
	5.5.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi
	5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
	5.5.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
	5.6	Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Bab VI		Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan
		Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian mana pun dari Laporan Keuangan
Bab VII		Penutup
		Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan
Daftar Lampiran		



BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi Kabupaten Sabu Raijua tahun 2024 atau tahun sebelumnya.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar atas makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluarannya. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Persentase Penduduk Miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Tabel 2.1 Indikator Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022-2024

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun
1	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	30.000	30.430	30.980	550
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	28.73	28.37	28.13	0.24
3	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	480.844	526.831	549.947	23.116
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	4.61	5.16	5.52	0.36
5	Indeks Keparahan Kemiskinan	1.26	1.60	1.67	0.07

Sumber Dokumen: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)/BPS-Statistics Indonesia, National Economic Survey Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Indikator kemiskinan berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin sebesar 30.980 jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 28,13% mengalami penurunan sebesar 0,24% dari tahun sebelumnya sehingga mempengaruhi garis kemiskinan sebesar 549.947, indeks kedalaman kemiskinan 5,52% dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 1,67%.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Keterangan	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Peningkatan/ Penurunan (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,29	4,06	3,99	0,07
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,63	69,30	77,44	8,14

Sumber Dokumen BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025

Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan survei angkatan kerja nasional (Sakernas) pada tahun 2024 sebesar 3,99% mengalami penurunan sebesar 0,07% dari tahun 2023 dan tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami kenaikan sebesar 8,14% dari tahun sebelumnya.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi seragam (*uniform*) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, artinya distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Untuk Indeks Gini perhitungannya hanya dihitung pada tingkat Provinsi bukan untuk tingkat Kabupaten.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60);
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sabu Raijua Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 adalah sebesar 62,06 poin dengan kategori rendah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun
1	Umur Harapan Hidup (Tahun)	60,87	61,06	66,65	5,59
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,17	13,18	13,19	0,01
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	6,77	6,98	6,99	0,01
4	Pengeluaran Riil Per kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	5.558	5.899	6.207	308
5	IPM	60,35	61,37	62,06	0,69

Sumber Dokumen BPS Kab. Sabu Raijua Tahun 2025

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sabu Raijua adalah sebesar 62,06 poin, dibandingkan Tahun 2023 sebesar 61,37 poin mengalami kenaikan sebesar 0,69 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 66,65 tahun pada tahun 2024, lebih cepat satu tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 6,99 tahun dengan harapan lama sekolah 0,01 tahun. Sementara Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp6,20 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp308 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Sabu Raijua 62,04 poin pada saat ini berada pada urutan 22 dari 22 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

No.	Kategori	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,43	1,81	4,92	2,72	3,30
2	Pertambangan dan Penggalian	3,43	4,58	3,10	1,32	4,34
3	Industri Pengolahan	-3,35	-1,73	6,74	8,98	8,07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,24	2,51	6,42	11,53	8,44
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,34	7,38	3,49	1,67	1,51
6	Konstruksi	-7,96	7,53	-0,24	4,27	0,70
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,78	3,39	3,46	2,42	5,49
8	Transportasi dan Pergudangan	-7,98	0,80	8,55	2,05	8,85
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-22,02	3,95	3,65	6,69	11,23
10	Informasi dan Komunikasi	10,45	6,71	3,57	1,80	3,47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,35	5,10	0,92	1,34	7,65
12	Real Estate	-2,00	1,94	1,50	1,13	3,30
13	Jasa Perusahaan	-32,29	-8,39	2,15	4,56	7,45
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,08	-8,32	-2,92	0,24	4,81
15	Jasa Pendidikan	1,48	-1,98	-0,44	1,08	3,63
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,23	10,19	0,87	2,29	1,67
17	Jasa Lainnya	-16,83	-2,96	2,08	1,41	0,27
PDRB		4,47	-1,11	1,70	2,62	3,79

Sumber Dokumen: BPS Kab. Sabu Raijua Tahun 2025

Selama kurun waktu Tahun 2020-2024 perekonomian Kabupaten Sabu Raijua mengalami penurunan rata-rata 2,13%. Pada periode Tahun 2021–2022 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sabu Raijua sebesar 1,70% dan pada kurun waktu Tahun 2023–2024 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sabu Raijua sebesar 3,79%.

Laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB tahun ke-n dikurangi dengan nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan nilai tambah dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya (perkembangan berantai). Produk Domestik



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Regional Bruto Per kapita adalah Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Sabu Raijua dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

- Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Tabel 2.5 Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun
1	Umum	6,65	2,46	1,19	1,27
2	Makanan, Minuman dan Tembakau	7,52	0,08	2,15	2,07
3	Pakaian dan Alas Kaki	0,84	1,83	0,55	1,28
4	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	1,13	0,60	0,07	0,53
5	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	4,91	1,53	0,36	1,17
6	Kesehatan	2,59	4,33	0,11	4,22
7	Transportasi	21,52	0,18	0,10	0,08
8	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,58	0,27	1,27	1,00
9	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	2,2	0,01	0,34	0,33
10	Pendidikan	1,76	3,93	1,14	2,79
11	Penyediaan Makanan dan Minuman Restoran	1,52	1,41	1,41	0,00
12	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	7,92	2,21	6,26	4,05

Sumber Dokumen BPS Kab. Sabu Raijua Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Sabu Raijua

Struktur perekonomian Kabupaten Sabu Raijua dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

(Dalam miliar rupiah)

No	Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	347,16	353,44	370,83	380,90	393,49
2	Pertambangan dan Penggalian	3,25	3,40	3,50	3,55	3,70
3	Industri Pengolahan	10,54	10,36	11,05	12,05	13,02
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,20	0,21	0,23	0,25
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14
6	Konstruksi	103,25	111,03	110,76	115,49	116,31
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	123,80	128,00	132,43	135,63	143,07
8	Transportasi dan Pergudangan	29,96	30,20	32,79	33,46	36,42
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,16	5,37	5,56	5,95	6,62
10	Informasi dan Komunikasi	7,40	7,89	8,18	8,32	8,61
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,19	1,25	1,26	1,28	1,38
12	Real Estate	34,50	35,17	35,70	36,10	37,29
13	Jasa Perusahaan	0,12	0,11	0,11	0,12	0,13
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 2 dan Jaminan Sosial Wajib	92,80	85,08	82,59	82,79	86,77
15	Jasa Pendidikan	2,60	2,55	2,54	2,56	2,66
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,04	11,07	11,16	11,42	11,61
17	Jasa Lainnya	1,09	1,06	1,10	1,10	1,10
PDRB		781,83	773,18	784,69	831,09	862,56

Sumber Dokumen: BPS Kab. Sabu Raijua Tahun 2025

2.1.8 Struktur Ekonomi

Sebagian besar lahan di Sabu Raijua adalah tanah kering dan hanya 4,89% yang merupakan lahan sawah. Kondisi ini disebabkan oleh musim kemarau yang terjadi hampir sepanjang tahun. Namun demikian beberapa usaha dilakukan masyarakat untuk menjadikan lahannya dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, diantaranya dengan pembangunan irigasi dan sumur gali. Selain itu, pemanfaatan lahan kering atau lahan tidur juga ditingkatkan dengan melakukan penanaman tanaman palawija, hortikultura dan kehutanan pada lahan yang memiliki sumber daya air sekalipun saat musim kemarau, sehingga panen dapat dilakukan pada musim kemarau dimana hal seperti ini sebelumnya tidak biasa dilakukan oleh petani di Kabupaten Sabu Raijua.

Kondisi alam yang kering dengan curah hujan yang rendah berdampak pada masih rendahnya produksi berbagai tanaman pangan di Kabupaten Sabu Raijua. Tercatat, pada tahun 2024, padi merupakan tanaman pangan dengan produksi tertinggi yakni 4.780,82 ton, disusul jagung dan kacang hijau yang masing-masing sebanyak 3.905,59 ton dan 481,45 ton.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Sementara itu, hewan ternak besar yang banyak terdapat di kabupaten ini adalah kerbau, kuda dan sapi dan ternak kecil kambing, babi dan domba. Di antara ketiganya, populasi kambing merupakan yang tertinggi. Ternak-ternak tersebut, selain dikonsumsi dan untuk keperluan adat, sebagian juga dijual ke luar wilayah Kabupaten Sabu Raijua.

Di sektor perikanan, meskipun dikelilingi lautan, nelayan di Sabu Raijua yang sebagian besar masih melakukan penangkapan ikan secara tradisional yakni menangkap ikan di laut dangkal dengan menggunakan teknologi dan perahu sederhana (tanpa motor) sehingga produksinya masih rendah. Pada tahun 2024, tercatat total produksi ikan tangkap sebanyak 1.080 ton. Masih rendahnya penggunaan kapal bermotor salah satunya disebabkan masih cukup tingginya biaya bahan bakar di kabupaten ini dan di sektor perikanan, meskipun dikelilingi lautan, produksi ikan tangkap di Sabu Raijua masih rendah. Namun, hasil rumput laut yang merupakan komoditi andalan di kabupaten ini di tahun yang sama sebanyak 77.452,5 ton.

Secara umum, kabupaten-kabupaten di NTT terletak di satu daratan (satu pulau). Namun, ada empat kabupaten yang wilayahnya terpisah pulau dari kabupaten lainnya yakni Alor, Lembata, Rote Ndao, dan Sabu Raijua. Secara umum, kondisi ini memberikan tantangan pembangunan tersendiri bagi keempat kabupaten tersebut salah satunya disebabkan aksesnya ke wilayah lain tidak selancar di kabupaten daratan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen formal Rencana Keuangan Tahunan Daerah, hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah untuk melaksanakan program/kegiatan pemerintah. Pendapatan yang ditargetkan dipergunakan untuk menutup keperluan belanja atau pembiayaan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

Untuk mencapai dan menjabarkan visi, misi, serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sabu Raijua tahun 2021-2026, arah dan kebijakan pembangunan tahun 2024 didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 sebagai landasan untuk menyusun APBD tahun 2024.

Penetapan target pendapatan dan belanja dalam APBD tahun 2024 telah diarahkan pada pelaksanaan strategi kebijakan APBD berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Plafon dan Prioritas APBD (PPA) Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sabu Raijua.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Sejalan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kebijakan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja maka Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dengan persetujuan DPRD melakukan Perubahan APBD (APBD-P) baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Tabel 2.7 Perbandingan APBD dan APBD-P Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	APBD 2024	APBD-P 2024	Bertambah/ (Berkurang)
Pendapatan	649.609.803.124,00	646.682.414.738,00	(2.927.388.386,00)
Pendapatan Asli Daerah	36.783.372.800,00	24.790.582.320,00	(11.992.790.480,00)
Pendapatan Transfer	605.608.480.335,00	614.299.858.825,00	8.691.378.490,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	7.217.949.989,00	7.591.973.593,00	374.023.604,00
Belanja	690.708.311.327,00	738.332.362.739,10	47.624.051.412,10
Belanja Operasi	472.775.858.982,00	489.851.679.064,10	17.075.820.082,10
Belanja Modal	115.566.408.445,00	143.706.621.695,00	28.140.213.250,00
Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	5.200.000.000,00	2.200.000.000,00
Belanja Transfer	99.366.043.900,00	99.574.061.980,00	208.018.080,00
Surplus/(Defisit)	(41.098.508.203,00)	(91.649.948.001,10)	(50.551.439.798,10)
Pembiayaan Daerah			
Penerimaan pembiayaan daerah	48.098.508.203,00	98.649.948.001,10	50.551.439.798,10
Pengeluaran pembiayaan daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
Pembiayaan Neto	41.098.508.203,00	91.649.948.001,10	50.551.439.798,10

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan memperhatikan sumber pendapatan yang masih terbatas dan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah untuk terus berupaya dari tahun ke tahun menggali potensi daerah sebagai sumber pendapatan demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pada tahun 2023 sebesar Rp43.730.366.650,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.939.784.330,00 atau 43.31% menjadi Rp24.790.582.320,00 di tahun 2024.

Selain dari PAD, pendapatan daerah pun bersumber dari penerimaan Pendapatan Transfer yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp4.019.949.000,00, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp375.480.211.000,00, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp124.395.079.582,00, Dana Desa sebesar Rp60.575.288.000,00, Insentif Fiskal sebesar Rp27.149.169.000,00 dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp22.680.162.243,00 sehingga total anggaran pendapatan transfer sebesar Rp614.299.858.825,00. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp24.790.582.320,00, Pendapatan Hibah Rp1.315.800.000,00 dan Pendapatan lainnya Rp6.276.173.593,00 sehingga secara keseluruhan total



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan Daerah untuk tahun anggaran 2024 dianggarkan setelah perubahan APBD sebesar Rp646.682.414.738,00.

Dari gambaran proyeksi pendapatan di atas, maka pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat yang dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan umum belanja daerah adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada sisi belanja daerah tahun anggaran 2024, dari segi struktur APBD yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikenal dengan Belanja Operasi dialokasikan untuk mendanai kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, sedangkan Belanja Modal dialokasikan untuk mendanai kegiatan perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan setelah Perubahan APBD Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2024 telah dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp738.332.362.739,10 yang terbagi dalam Belanja Operasi sebesar Rp489.851.679.064,10, Belanja Modal sebesar Rp143.706.621.695,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.200.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp99.574.061.980,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Jumlah belanja operasi tersebut di atas, secara rinci dialokasi untuk:

I. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp279.472.751.098,10 diperuntukkan gaji dan tunjangan Kepala Daerah, PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua, belanja honorarium PNS serta Belanja Pegawai Dana BOS.

II. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp176.595.982.446,00 diperuntukkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, Belanja Jasa Kantor, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat serta Belanja Barang dan Jasa Dana BOS.

III. Belanja Hibah

Belanja Hibah tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp29.607.195.520,00 yang dialokasikan untuk:

- 1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp6.600.000.000,00;
- 2) Komite Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp9.810.000.000,00;
- 3) Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp250.000.000,00;
- 4) Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 5) Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp300.000.000,00;
- 6) Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp599.855.520,00;
- 7) Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp245.000.000,00;
- 8) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 9) BOP PAUD Masyarakat/Swasta sebesar Rp2.722.460.000,00;
- 10) BOP Pendidikan Kesetaraan Rp301.880.000,00;
- 11) Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp500.000.000,00;
- 12) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp930.000.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 13) Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (LPPD) Keluarga Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp123.000.000,00;
- 14) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp100.000.000,00;
- 15) Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (LP3K) Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp100.000.000,00;
- 16) Kepolisian Resor Sabu Raijua sebesar Rp3.200.000.000,00;
- 17) Politeknik Negeri Jember sebesar Rp1.500.000.000,00;
- 18) Pelayanan Kerohanian dan Pengembangan Spiritualitas sebesar Rp70.000.000,00;
- 19) Pendidikan dan Pelatihan bagi calon PMI bagi Yayasan Kusuma Cahaya Global Rp225.000.000,00; dan
- 20) Kelompok Sanggar Tari Rp30.000.000,00.

IV. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp4.175.750.000,00 yang dialokasikan untuk Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebesar Rp2.448.250.000,00, Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan sebesar Rp50.000.000,00, dan Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Rp1.677.500.000,00.

V. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp143.706.621.695,00 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang secara rinci dialokasikan untuk:

- Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar Rp19.918.656.498,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp21.804.791.354,00;
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp99.037.187.243,00; dan
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.945.986.600,00.

Selain Belanja Operasi dan Modal terdapat juga Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.200.000.000,00 untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan Belanja Transfer sebesar Rp99.574.061.980,00 yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp676.324.680,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp98.897.737.300,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Sehubungan dengan aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perindustrian, sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor pengangkutan, komunikasi dan sektor jasa-jasa, serta sektor konstruksi.

Di samping itu, penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut di atas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam target APBD tahun 2024.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggarnya pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pada sisi pembiayaan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintahan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan atau pembayaran dimaksud merupakan penerimaan atau pembayaran baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan dalam hal terjadi surplus anggaran dimanfaatkan untuk Investasi dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diperuntukkan sebagai investasi dalam bentuk kerja sama dengan pihak ketiga dan penyertaan modal kepada BUMD yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan potensi ekonomi



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

masyarakat melalui dana bergulir kepada kelompok masyarakat dan pemberian fasilitas pembiayaan kepada koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta mengembangkan operasi dan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Daerah.

Tahun anggaran 2024 kondisi APBD setelah perubahan mengalami defisit sebesar Rp91.649.948.001,10 yang merupakan selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan tahun anggaran 2024, sehingga dengan kondisi defisit tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua menganggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp98.649.948.001,10 yang berasal dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp76.329.948.001,10;
- b. Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp22.120.000.000,00; dan
- c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp200.000.000,00.

Sedangkan alokasi anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp7.000.000.000,00 pemerintah memanfaatkan surplus anggaran dari kelebihan dana penerimaan pembiayaan yang tersedia tahun 2024 untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp7.000.000.000,00.

Terkait dengan aspek pembiayaan daerah ini, maka pada sisi penerimaan pembiayaan daerah dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Di samping itu pula dalam kaitan penerimaan pembiayaan ini perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dari sisi pengeluaran pembiayaan, dimana daerah dapat memanfaatkan kelebihan dana yang ada semaksimal mungkin untuk memenuhi segala pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta untuk menunjang jalannya pemerintahan dimasa datang dengan melakukan cadangan dana pada Lembaga Keuangan dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan PAD.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Kinerja APBD merupakan uraian ringkas Indikator Kinerja Pemerintah Daerah menggunakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan pencapaian sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam suatu periode pelaporan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran (*output*) dengan masukan (*input*), sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan.

Laporan kinerja keuangan yang berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program didasarkan pada capaian Target Kinerja dan Pagu Indikatif dari masing-masing urusan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seperti yang



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Pencapaian target kinerja diukur dari perbandingan realisasi dan anggaran menurut satuan kerja pada masing-masing program yang menjadi tugas dan fungsinya. Perbandingan dan realisasi anggaran tersebut didasarkan atas Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal sesuai klasifikasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024. Jumlah realisasi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan realisasi anggaran yang dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) karena dalam LRA tidak didasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja operasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024.

2.4 **Mandatory Spending dalam Postur APBD**

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Sabu Raijua meliputi hal-hal sebagai berikut.

a) **Mandatory Spending Fungsi Kesehatan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, besaran alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Sabu Raijua Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di wilayah Kabupaten Sabu Raijua adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kesehatan, kegiatan operasional RSUD dan Puskesmas, rehabilitasi dan renovasi gedung puskesmas, penyediaan obat-obatan dan penyediaan alat-alat kesehatan di RSUD dan Puskesmas.

Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi kesehatan juga mendukung kelancaran operasional 1 RSUD dan 6 Puskesmas. Juga berdampak kepada tenaga kesehatan meliputi 275 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari 9 orang dokter PNS dan 87 orang perawat, 67 orang bidan, 3 orang apoteker, 7 orang penyuluh kesehatan, serta 102 orang tenaga kesehatan lainnya.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Dalam APBD Induk TA 2024 Kabupaten Sabu Raijua dialokasikan senilai Rp93.904.830.475,00 dari nilai belanja daerah di luar gaji Aparatur Sipil Negara senilai Rp508.154.024.241,00 atau sebesar 18,48%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Dalam APBD Perubahan TA 2024 Kabupaten Sabu Raijua dialokasikan senilai Rp97.922.091.641,00 dari nilai belanja daerah di luar Gaji ASN senilai Rp546.342.395.552,00 atau sebesar 17,92%.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.8 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan

Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
a. Belanja pada Dinas Kesehatan	67.055.170.584,00	85.135.600.734,00
1) BELANJA OPERASI		
a) Belanja Pegawai	37.029.471.854,00	53.083.919.017,00
b) Belanja Barang dan Jasa	18.621.501.730,00	19.257.235.750,00
c) Belanja Hibah	1.245.000.000,00	1.245.000.000,00
2) BELANJA MODAL		
a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.615.87.796,00	2.997.758.596,00
b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.543.359.204,00	8.551.687.371,00
c) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0,00
b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang pelaksanaan fungsi kesehatan, antara lain :	63.500.207.884,00	80.145.591.816,00
1) Administrasi keuangan perangkat daerah	36.964.911.717,00	53.025.208.158,00
2) Administrasi kepegawaian perangkat daerah	54.010.000,00	50.410.000,00
3) Administrasi umum perangkat daerah	374.391.500,00	377.981.000,00
4) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	592.465.200,00	559.026.200,00
5) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	157.620.000,00	157.620.000,00
6) Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	12.153.071.360,00	13.421.020.917,00
7) Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	7.955.401.787,00	7.954.984.497,00
8) Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	5.248.336.320,00	4.599.341.044,00
Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan	93.904.830.475,00	97.922.091.641,00
Total Belanja Daerah	690.708.311.327,00	723.350.588.739,10
Gaji ASN	182.554.287.086,00	177.008.193.187,10
Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN	508.154.024.241,00	546.342.395.552,00
Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Terhadap Belanja Daerah	18,48%	17,92%

b) Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Sabu Raijua.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Sabu Raijua adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan guru, kegiatan operasional sekolah melalui dana BOS, pembangunan gedung sekolah negeri, rehabilitasi dan renovasi gedung sekolah, pembangunan gedung perpustakaan daerah.

Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi pendidikan juga mendukung kelancaran operasional 1 PAUD Negeri, 49 SD Negeri/Inpres, 24 SMP Negeri dan 2 pendidikan kesetaraan yang berada di wilayah Kabupaten Sabu Raijua.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD Induk TA 2024 Kabupaten Sabu Raijua dialokasikan senilai Rp178.723.377.391,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp690.708.311.327,00 atau sebesar 25,88%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD Perubahan TA 2024 Kabupaten Sabu Raijua dialokasikan senilai Rp194.643.576.710,10 dari nilai belanja daerah senilai Rp723.350.588.739,10 atau sebesar 26,91%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam **Tabel 2.9**.

Tabel 2.9 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan

Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
a. Belanja pada Dinas Pendidikan	178.149.381.391,00	194.069.580.710,10
1) BELANJA OPERASI		
a) Belanja Pegawai	119.977.613.991,00	138.224.825.370,10
b) Belanja Barang dan Jasa	43.632.018.997,00	36.113.205.793,00
c) Belanja Hibah	4.324.304.000,00	4.324.340.000,00
2) BELANJA MODAL		
a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	782.840.000,00	4.370.723.100,00
b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.432.568.403,00	9.754.784.447,00
c) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	1.281.702.000,00
b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain :	573.996.000,00	573.996.000,00
1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	4.230.000,00	4.230.000,00
2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	569.766.000,00	569.766.000,00
Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	178.723.377.391,00	194.643.576.710,10
Total Belanja Daerah	690.708.311.327,00	723.350.588.739,10
Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	25,88%	26,91%



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

c) Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Sabu Raijua.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Sabu Raijua adalah adanya pembangunan jalan ruas kabupaten yang bersumber dari Dana DAK, pembangunan jaringan irigasi kabupaten dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam APBD Induk TA 2024 Kabupaten Sabu Raijua dialokasikan senilai Rp130.331.061.542,00 dari nilai Dana Transfer Umum senilai Rp376.060.549.000,00 atau sebesar 34,66%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam APBD Perubahan TA 2024 Kabupaten Sabu Raijua dialokasikan senilai Rp158.918.983.672,00 dari nilai Dana Transfer Umum senilai Rp376.060.549.000,00 atau sebesar 42,26%. Rincian lebih lanjut disajikan di bawah ini:

Tabel 2.10 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur APBD dan APBD-P TA 2024 Kabupaten Sabu Raijua

Komponen Perhitungan		APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
a)	Belanja Modal:	149.815.154.458,00	143.706.621.695,00
	1) Tanah;	0,00	0,00
	2) Peralatan Dan Mesin;	14.089.694.241,00	19.918.656.498,00
	3) Bangunan Dan Gedung;	18.287.309.357,00	21.804.791.354,00
	4) Jalan, Jaringan, Dan Irigasi;	81.356.56.500,00	99.037.187.243,00
	5) Aset Tetap Lainnya;	1.832.844.347,00	2.945.986.600,00
	6) Aset Lainnya.	0,00	0,00
b)	Belanja Pemeliharaan	14.764.653.097,00	15.212.361.977,00
Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah		130.331.061.542,00	158.918.983.672,00
Total DAU		376.060.549.000,00	376.060.549.000,00
Belanja Infrastruktur Daerah (%)		34,66%	42,26%



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

d) *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik paling sedikit 40% dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar-daerah.

Adapun capaian dari *mandatory spending* Infrastruktur Pelayanan Publik di wilayah Kabupaten Sabu Raijua adalah percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar-daerah di Kabupaten Sabu Raijua.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik Dalam APBD Induk TA 2024 Kabupaten Sabu Raijua dialokasikan senilai Rp236.536.906.971,00 dari nilai belanja daerah di kurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa senilai Rp591.342.267.427,00 atau sebesar 40%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik Dalam APBD Perubahan TA 2024 Kabupaten Sabu Raijua dialokasikan senilai Rp249.510.610.704,00 dari nilai belanja daerah di kurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa senilai Rp623.776.526.759,00 atau sebesar 40%. Rincian lebih lanjut disajikan di bawah ini:

Tabel 2.11 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik Dalam APBD dan APBD-P TA 2024 Kabupaten Sabu Raijua

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
1	Total Belanja Daerah	690.708.311.327,00	723.350.588.739,10
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	99.366.043.900,00	99.574.061.980,00
	a) Belanja bagi hasil	468.306.600,00	676.324.680,00
	b) Bantuan keuangan	98.897.77.300,00	98.897.737.300,00
	Jumlah (a+b)	99.366.043.900,00	99.574.061.980,00
3	Selisih (1-2)	591.342.267.427,00	623.776.526.759,00
	Minimal belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x selisih)	236.536.906.971,00	249.510.610.704,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

e) *Mandatory Spending* Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tujuan dari *mandatory spending* Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan, dan bantuan kepada pemerintah desa.

Adapun capaian dari *mandatory spending* Alokasi Dana Desa di wilayah Kabupaten Sabu Raijua adalah alokasi dana desa yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan para perangkat desa, membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pada Kabupaten Sabu Raijua, alokasi *mandatory spending* Alokasi Dana Desa membantu kelancaran operasional 58 desa yang berada di wilayah Kabupaten Sabu Raijua.

Sedangkan Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Alokasi Dana Desa Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk dan Perubahan Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Sabu Raijua dialokasikan senilai Rp37.595.435.300,00 dari nilai Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK senilai Rp379.500.160.000,00 atau sebesar 10%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.12 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Alokasi Dana Desa Dalam APBD dan APBD-P TA 2024 Kabupaten Sabu Raijua

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
1	Alokasi Dana Desa	37.595.435.300,00	37.595.435.300,00
2	Perhitungan Dana Perimbangan – Dana Alokasi Khusus	379.500.160.000,00	379.500.160.000,00
	Persentase Alokasi ADD	9,91%	9,91%



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Realisasi APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Realisasi pendapatan daerah tahun 2024 senilai Rp640.326.035.769,37 atau 99,02% dari anggaran Tahun 2024 yang ditargetkan senilai Rp646.682.414.738,00 sedangkan tahun anggaran 2023 terealisasi senilai Rp649.359.532.832,40 atau 97,04% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp669.186.856.329,00;
- b. Realisasi belanja tahun 2024 senilai Rp665.029.611.849,33 atau 90,07% dari anggaran setelah perubahan senilai Rp738.332.362.739,10 sedangkan realisasi belanja Tahun 2023 senilai Rp630.977.703.831,00 atau 89,99% dari anggaran setelah perubahan senilai Rp726.933.070.399,00;
- c. Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2024 senilai Rp98.518.425.724,10 atau 99,87% dari anggaran setelah perubahan Rp98.649.948.001,10,00 dan realisasi pembiayaan Tahun 2023 senilai Rp95.948.118.999,70 atau 100,21% dari anggaran setelah perubahan Rp95.746.214.070,00; dan
- d. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2024 senilai Rp7.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran setelah perubahan Rp7.000.000.000,00 dan realisasi pembiayaan tahun 2023 senilai Rp38.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran setelah perubahan Rp38.000.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Gambar realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi APBD TA. 2024 dan 2023

Uraian	Pagu APBD 2024 (Rp)	Realisasi APBD 2024 (Rp)	%	Realisasi APBD 2023 (Rp)
Pendapatan	646.682.414.738,00	640.326.035.769,37	99,02	649.359.532.832,40
Belanja dan transfer	738.332.362.739,10	665.029.611.849,33	90,07	630.977.703.831,00
Surplus (defisit)	(91.649.948.001,10)	(24.703.576.079,96)	26,95	18.381.829.001,40
Pembiayaan :				
• Penerimaan Pembiayaan	98.649.948.001,10	98.518.425.724,10	99,87	95.948.118.999,70
• Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	38.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	91.649.948.001,10	91.518.425.724,10	99,86	57.948.118.999,70
SiLPA Tahun Berjalan	0,00	66.814.849.644,14	0,00	76.329.948.001,10

a. Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp640.326.035.769,37 atau mencapai 99,02% dari target Pendapatan Daerah dalam APBD tahun 2023 sebesar Rp646.682.414.738,00. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	646.682.414.738,00	640.326.035.769,37	99,02
PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.790.582.320,00	19.052.226.319,37	76,85
Pendapatan Pajak Daerah	6.763.246.800,00	4.934.625.570,00	72,96
Pendapatan Retribusi Daerah	10.152.999.000,00	7.000.775.722,00	68,95
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.306.016.815,00	2.306.016.815,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.568.319.705,00	4.810.808.212,37	86,40
PENDAPATAN TRANSFER	614.299.858.825,00	615.361.652.553,00	100,17
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	503.895.239.582,00	506.169.841.263,00	100,45
Dana Bagi Hasil Pajak	1.923.176.000,00	2.255.257.000,00	117,27
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.096.773.000,00	2.112.952.000,00	100,77
Dana Alokasi Umum	375.480.211.000,00	373.274.825.957,00	99,41
Dana Alokasi Khusus Fisik	68.132.328.326,00	68.132.328.326,00	100,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	56.262.751.256,00	60.394.477.980,00	107,34
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	87.724.457.000,00	89.946.353.980,00	102,53
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	60.575.288.000,00	62.797.184.980,00	103,67
Insentif Fiskal	27.149.169.000,00	27.149.169.000,00	100,00
Transfer Pemerintah Provinsi	22.680.162.243,00	19.245.457.310,00	84,86
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.680.162.243,00	19.245.457.310,00	84,86
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.591.973.593,00	5.912.156.897,00	77,87
Pendapatan Hibah	1.315.800.000,00	874.951.500,00	66,50
Pendapatan Lainnya	6.276.173.593,00	5.037.205.397,00	80,26

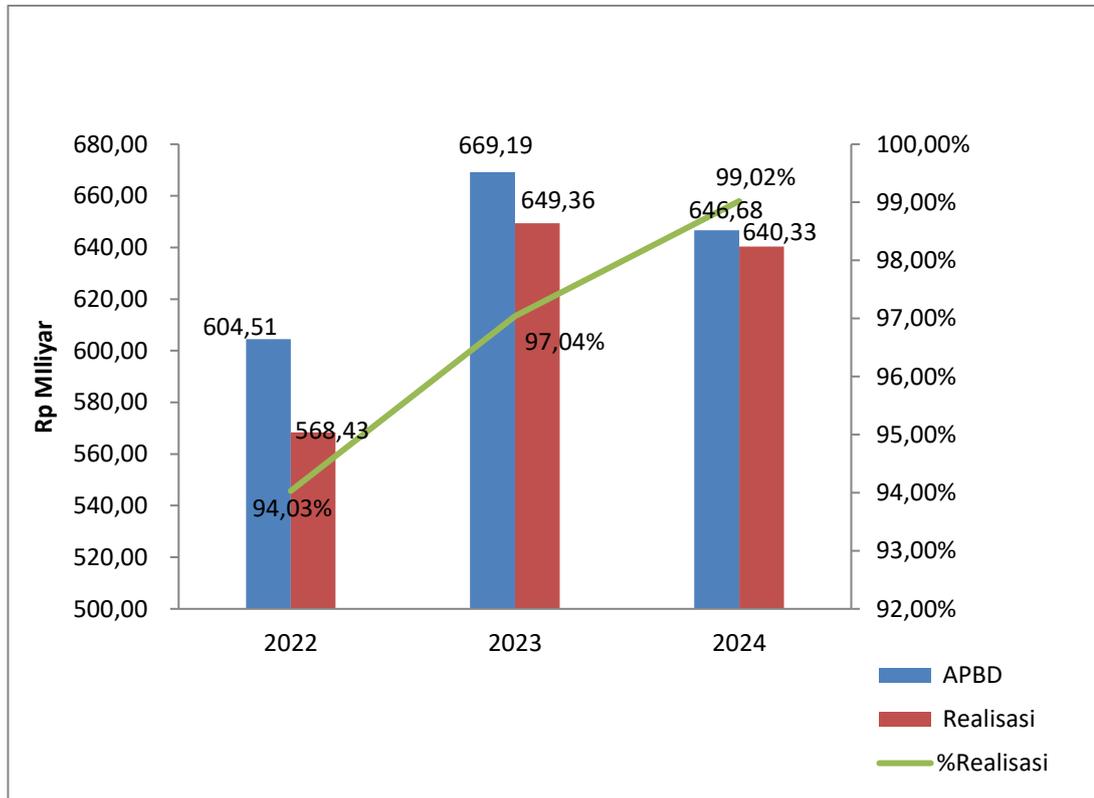


PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2022-2024 dapat dilihat bahwa secara umum tren realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua menunjukkan terus menurun dari tahun ke tahun.

Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2022-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah



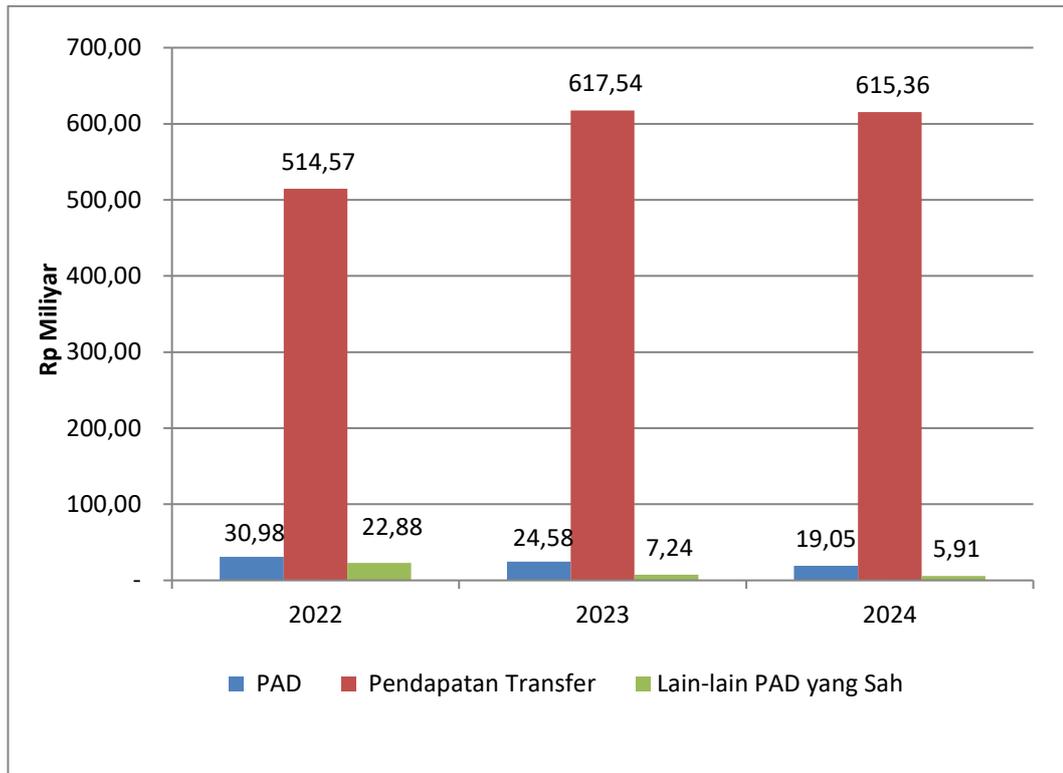
Gambar 3.1 Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah mengalami penurunan disebabkan oleh semua pendapatan mengalami penurunan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 sebesar Rp19.052.226.319,37 yang menurun sebesar Rp5.523.848.425,03 atau 22,48% dibanding realisasi tahun 2023 sebesar Rp24.576.074.744,40. Adapun Pendapatan Transfer yang juga mengalami penurunan sebesar Rp2.183.322.315,00 atau 0,35 dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp617.544.974.868,00. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2023 sebesar Rp7.238.483.220,00 menurun sebesar Rp1.326.326.323,00 menjadi Rp5.912.156.897,00 pada tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023



Gambar 3.2 Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah

Penerimaan PAD pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.523.848.425,03 atau 22,48% yang bersumber dari penurunan pada Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp43.534.034,80 atau 0,87% dibanding tahun 2023. Hal ini disebabkan penurunan penerimaan pajak tanah diatome dan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Dinas PUPR yang mengalami penurunan dikarenakan aktivitas konstruksi, pembangunan infrastruktur yang membutuhkan bahan galian golongan C menurun, sehingga menyebabkan permintaan akan bahan galian C ikut berkurang. Hal ini berdampak pada penerimaan Dinas PUPR menurun. Penerimaan Retribusi juga terjadi penurunan sebesar Rp4.715.878.846,00 atau 40,25% dibanding realisasi tahun 2023, disebabkan penerimaan garam pada Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Perdagangan yang menurun dikarenakan garam yang ada tidak laku terjual. Di tahun 2024 saldo awal persediaan garam sebanyak 828.550kg dan produksi tahun 2024 sebanyak 518.420kg sehingga total garam selama tahun 2024 sebanyak 1.346.970kg dan garam yang laku terjual tahun 2024 hanya sebanyak 427.075kg. Adapun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang juga mengalami penurunan sebesar Rp1.998.635.733,00 atau 46,43% dibanding tahun 2023 yang disebabkan menurunnya pembagian dividen atas penyertaan modal pada Bank NTT. Di sisi lain, penerimaan yang berasal dari Lain-lain PAD yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp1.234.200.188,77 sebesar 34,51% yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Bunga Bank Rekening Deposito pada



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Bank BRI dari tahun 2023 sebesar Rp640.852.412,00 meningkat sebesar Rp458.333.575,00 atau 71,52% menjadi Rp1.099.185.987,00 pada tahun 2024.

Penurunan realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2.183.322.315,00 atau 0,35% bersumber dari Dana Perimbangan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami penurunan sebesar Rp29.976.612.728,00 atau 30,55% dari tahun 2023 sebesar Rp98.108.941.054,00 menjadi Rp68.132.328.326,00 pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mendapat Insentif Fiskal sebesar Rp27.149.169.000,00 pada tahun 2024 sesuai KMK RI Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp11.542.163.000,00, dan juga berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024 yang menyatakan Kabupaten Sabu Raijua memperoleh Insentif Fiskal sebesar Rp15.607.006.000,00. Sedangkan pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tidak memperoleh Dana Insentif Daerah.

Realisasi penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan yang disebabkan oleh pendapatan Hibah Sumbangan Pihak Ketiga pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang menurun dikarenakan jumlah produksi rumput laut menurun akibat gagal panen dan karena kondisi cuaca yang tidak menentu serta harga rumput laut kering yang sangat rendah membuat sebagian besar petani rumput laut beralih profesi yang lain seperti petani, peternak, dan lain-lain. Selanjutnya penurunan Lain-lain Pendapatan yang sah disebabkan menurunnya pendapatan dana kapitasi JKN sebesar Rp841.097.463,00 atau 14,58% di sebabkan oleh BPJS memotong transferan ke masing-masing FKTP sebesar saldo yang masih tersisa di rekening FKTP. BPJS mulai memotong transferan ke puskesmas sejak bulan Oktober s.d. Desember 2024.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Sabu Raijua memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana eksternal. Hal ini dapat terlihat dari rasio Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan Daerah yang mencapai 97,02%. atau dengan kata lain operasional pemerintah daerah masih sangat tergantung pada dana dari pihak eksternal.

b. Realisasi Belanja dan Transfer Daerah

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun 2024 sebesar Rp665.029.611.849,33 atau mencapai 90,07% dari rencana belanja daerah dalam APBD tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran baik karena mencapai 90% dan secara capaian dan nilai realisasi belanja mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

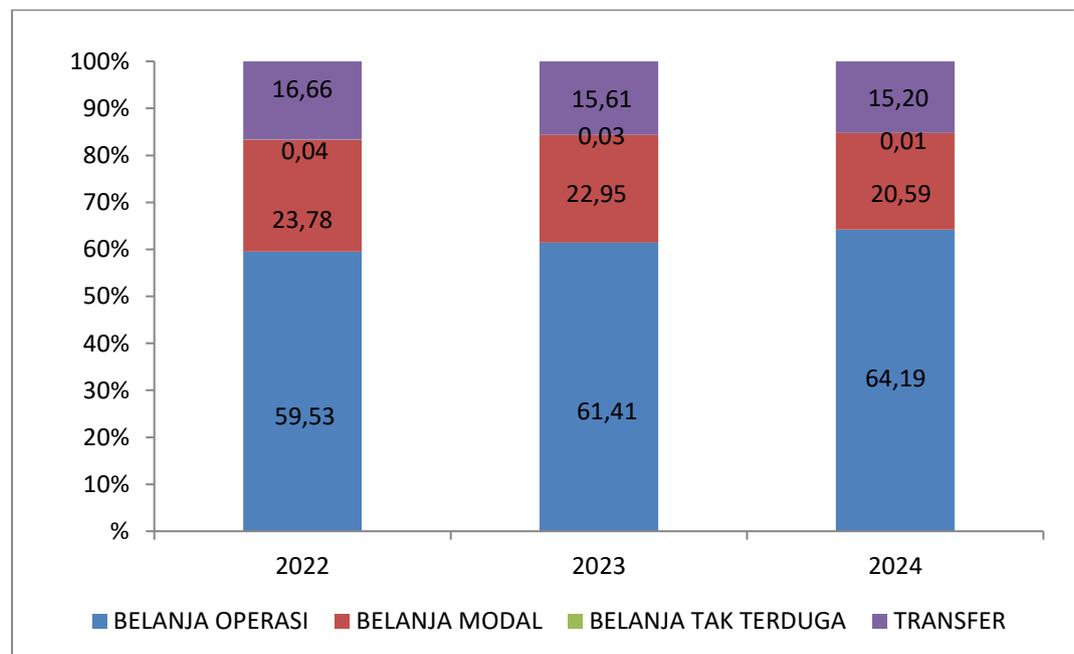
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 3.3 Ringkasan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2024

Uraian	2024				2023		2024 : 2023	
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih/(Kurang)	%	Realisasi	Kenaikan/ (Penurunan)	%	
Belanja	489.851.679.064,10	426.909.601.857,96	(62.942.077.206,14)	87,15	387.560.224.506,00	39.349.377.351,96	10,15	
Operasi								
Belanja	143.706.621.695,00	136.951.565.031,37	(6.755.056.663,63)	95,30	144.716.363.178,00	(7.764.798.146,63)	(5,37)	
Modal								
Belanja Tak	5.200.000.000,00	99.500.000,00	(5.100.500.000,00)	1,91	208.951.900,00	(109.451.900,00)	(52,38)	
Terduga								
Transfer	99.574.061.980,00	101.068.944.960,00	1.494.882.980,00	101,50	98.492.164.247,00	2.576.780.713,00	2,62	
Jumlah	738.332.362.739,10	665.029.611.849,33	(116.145.248.620,00)	90,07	630.977.703.831,00	34.051.908.018,33	5,40	

Jika dilihat pada tabel di atas, Belanja Operasi dan Transfer mengalami peningkatan pada tahun 2024, sedangkan Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga mengalami penurunan.

Pada tahun 2024, proporsi Belanja Operasi masih menjadi komponen belanja yang paling dominan dari total Belanja dan Transfer dengan rasio mencapai 61,41% sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.



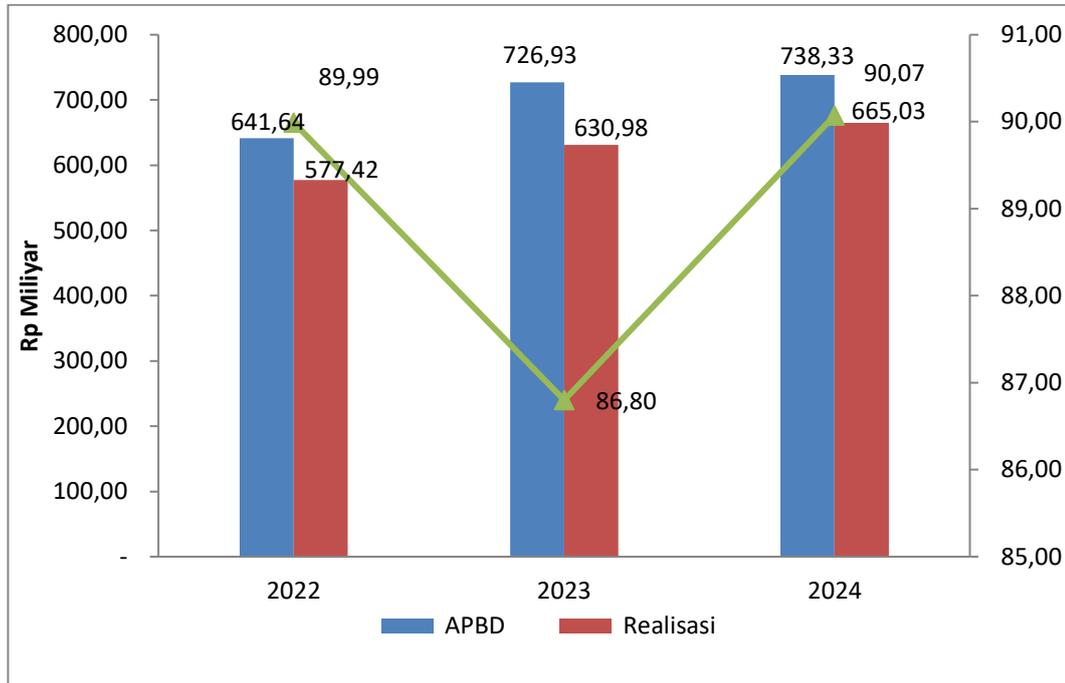
Gambar 3.3 Grafik Perkembangan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2022-2024

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua mengalami penurunan dari 89,99% pada tahun 2022 menjadi 86,80% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 90,07%. Dengan realisasi belanja yang optimal, seluruh operasional pemerintah daerah termasuk pelayanan kepada masyarakat diharapkan bisa semakin baik sehingga APBD bisa memenuhi seluruh fungsinya terutama perencanaan, fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Perkembangan realisasi belanja dan transfer selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada **Grafik 3.4**.



**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023



Gambar 3.4 Grafik Perkembangan Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2022-2024

c. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	98.649.948.001,10	98.518.425.724,10	95.948.118.999,70
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	76.329.948.001,10	76.398.425.724,10	55.025.137.051,62
Pencairan Dana Cadangan	22.120.000.000,00	22.120.000.000,00	40.922.981.948,08
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	200.000.000,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	38.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	31.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari SILPA tahun anggaran sebelumnya dan pencairan dana cadangan telah sesuai dengan target yang direncanakan.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2023 terdiri dari Penyertaan Modal Daerah. Penyertaan Modal Daerah yang terealisasi 100% dari target yang ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

3.2 Analisis Rasio Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan APBD

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan beberapa referensi, rasio kemandirian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Kemandirian	Kemampuan Keuangan
0%-25%	Rendah Sekali
25%-50%	Rendah
50%-75%	Sedang
75%-100%	Tinggi

Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 s/d 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan APBD

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4=2/3
2020	36.433.624.244,95	631.566.035.090,96	5,77
2021	28.339.245.445,35	583.834.842.657,35	4,85
2022	30.976.942.583,68	568.428.975.418,68	5,45
2023	24.576.074.744,40	649.359.532.832,40	3,78
2024	19.052.226.319,37	640.324.708.414,08	2,98
Jumlah	139.378.113.337,75	3.073.514.094.413,47	4,53
Rata-rata	27.875.622.667,55	614.702.818.882,69	4,53

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan di atas, kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih sangat rendah. Ini terlihat dari rasio kemandirian pada tabel di atas menunjukkan pada tahun 2020 sebesar 5,77%, tahun 2021 sebesar 4,85%, tahun 2022 sebesar 5,45%,

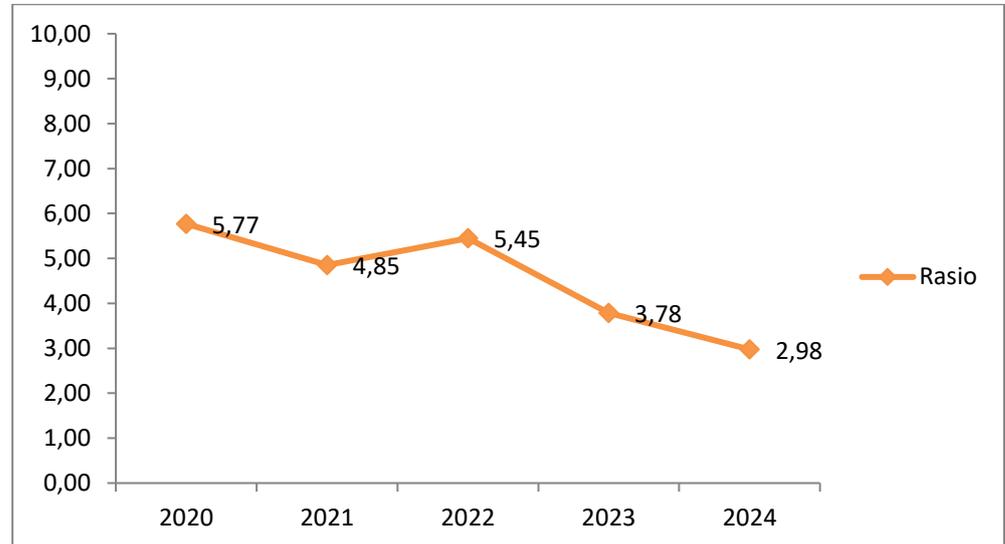


PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

tahun 2023 dengan capaian sebesar 3,78%, dan pada tahun 2024 sebesar 2,98% sebagaimana terlihat pada **Grafik 3.5**.



Gambar 3.5 Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2020-2024

Perkembangan rasio Kemandirian Kemampuan Keuangan Kabupaten Sabu Raijua cenderung masih termasuk kategori rendah sekali. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua belum menunjukkan kemandirian dan masih bergantung pada pihak eksternal, terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,91% dari 5,77% menjadi 4,85%. Pada tahun 2022 rasio kemandirian mengalami Peningkatan sebesar 0,60% menjadi 5,45%. Pada tahun 2023 dan 2024 rasio kemandirian mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,66% dan 0,81% menjadi 2,98% pada tahun 2024.

Pada tahun 2021 kemandirian keuangan kembali mengalami penurunan yang disebabkan realisasi PAD yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan sebesar 48,22%. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 5,45% yang didukung oleh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang meningkat dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 24,61% dan 249,94%. Pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 3,78% yang disebabkan PAD yang bersumber dari Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan masing-masing sebesar 12,08%, 35,48% dan 25,87% dibanding tahun 2022. Penurunan juga terjadi hingga tahun 2024 yang disebabkan oleh penurunan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan masing-masing sebesar 0,87%, 40,25%, dan 46,43% dibanding tahun 2023. Hal ini berarti bahwa



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua belum menunjukkan kemandirian dan masih bergantung pada pihak eksternal, terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi.

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi. Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal satu atau 100%.

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.6 Rasio Efektivitas

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4=3/2
2020	50.357.372.588,00	36.433.624.244,95	72,35
2021	48.266.916.159,00	28.339.245.445,35	58,71
2022	52.343.352.290,00	30.976.942.583,68	59,18
2023	43.730.366.650,00	24.576.074.744,40	56,20
2024	24.790.582.320,00	19.052.226.319,37	76,85
Jumlah	219.488.590.007,00	139.378.113.337,75	63,50
Rata-rata	43.897.718.001,40	27.875.622.667,55	63,50

Dari perhitungan rasio efektivitas dapat dilihat bahwa rasio efektivitas tahun 2020 mengalami penurunan dari 72,35% menjadi 58,71% di tahun 2021. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 59,18% yang disebabkan terjadi peningkatan tingkat realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah. Pada tahun 2023, rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 56,20% yang disebabkan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD Yang Sah mengalami penurunan. Dan tahun 2024 terjadi kenaikan rasio efektivitas menjadi 76,85% yang disebabkan realisasi Lain-lain PAD yang Sah mengalami kenaikan sedangkan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan. Jika dibanding dengan tahun 2023, target PAD mengalami penurunan yang signifikan sebesar 43,31%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sabu Raijua sudah mulai efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

c. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasional dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasional berarti Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Tabel 3.7 Rasio Belanja Operasional

Tahun	Realisasi Belanja Operasional (Rp)	Total Realisasi Belanja (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4=2/3
2020	473.602.050.617,36	639.785.809.385,36	74,03
2021	350.685.801.975,00	643.381.390.457,62	54,51
2022	343.734.501.658,70	577.424.456.047,70	59,53
2023	387.484.474.506,00	630.977.703.831,00	61,41
2023	426.909.601.857,96	665.029.611.849,33	64,19
Jumlah	1.982.416.430.615,02	3.156.598.971.571,01	62,80
Rata-rata	396.483.286.123,00	631.319.794.314,20	62,80

Berdasarkan rasio di atas diketahui bahwa belanja operasional pemerintah masih mendominasi jumlah APBD dari tahun 2020 s/d 2024. Persentase belanja operasional pada tahun 2021 menurun menjadi 54,51% dari 74,03% pada tahun 2020. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 59,53%. Namun pada tahun 2023 dan 2024 terjadi peningkatan rasio belanja operasi masing-masing sebesar 61,41% dan 64,19%.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.8 Rasio Belanja Modal

Tahun	Total Realisasi Belanja Modal (Rp)	Total Realisasi Belanja (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4=2/3
2020	152.480.443.087,00	639.785.809.385,36	23,83
2021	159.091.130.873,62	643.381.390.457,62	24,73
2022	137.291.124.197,00	577.424.456.047,70	23,78
2023	144.792.113.178,00	630.977.703.831,00	22,95
2024	136.951.565.031,37	665.029.611.849,33	20,59
Jumlah	730.606.376.366,99	3.156.598.971.571,01	23,15
Rata-rata	146.121.275.273,40	631.319.794.314,20	23,15

Rasio belanja modal pada tahun 2020 sebesar 23,83% mengalami peningkatan menjadi 24,73% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 23,78%. Selanjutnya pada tahun 2023 dan 2024 rasio belanja modal



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

mengalami penurunan masing-masing menjadi 22,95% dan 20,59%. Hal ini menunjukkan Kabupaten Sabu Raijua dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Dari data rasio di atas juga dapat disimpulkan bahwa belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua masih rendah.

d. Rasio Pengelolaan Belanja

Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus atau defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan.

$$\text{Rasio Pengelolaan Belanja} = \frac{\text{Total Realisasi Pendapatan}}{\text{Total Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3.9 Rasio Pengelolaan Belanja

Tahun	Total Realisasi Pendapatan (Rp)	Total Realisasi Belanja (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4=2/3
2020	631.781.244.412,46	639.934.784.386,36	98,73
2021	583.834.842.657,35	643.381.390.457,62	90,74
2022	568.428.975.418,68	577.424.456.047,70	98,44
2023	649.359.532.832,40	630.977.703.831,00	102,91
2024	640.326.035.769,37	665.029.611.849,33	96,29
Jumlah	3.073.730.631.090,26	3.156.747.946.572,01	97,37
Rata-rata	614.746.126.218,05	631.349.589.314,40	97,37

Berdasarkan rasio pengelolaan belanja tersebut menunjukkan bahwa jumlah realisasi belanja tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 jumlah realisasi belanja lebih tinggi dari realisasi pendapatan sehingga Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mendapatkan defisit dan akan ditambah dengan pembiayaan neto untuk menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk digunakan pada tahun anggaran berikutnya. Namun pada tahun 2023 menunjukkan realisasi pendapatan lebih tinggi dari realisasi belanja dengan rasio pengelolaan belanja sebesar 102,91%. Pada tahun 2024 realisasi pendapatan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sehingga rasio pengelolaan belanja menjadi 96,29%.

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode berikutnya. Dengan



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

1) Persentase Pertumbuhan PAD

$$\text{Persentase Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun } p - \text{PAD tahun } p-1}{\text{PAD tahun } p-1} \times 100\%$$

Tabel 3.10 Rasio Persentase Pertumbuhan PAD

Tahun	Realisasi PAD tahun p-1 (Rp)	Realisasi PAD tahun p (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4=(3-2)/4
2020	31.937.211.458,10	36.433.624.244,95	14,08
2021	36.433.624.244,95	28.339.245.445,35	(22,22)
2022	28.339.245.445,35	30.976.942.583,68	9,31
2023	30.976.942.583,68	24.576.074.744,40	(20,66)
2024	24.576.074.744,40	19.052.226.319,37	(22,48)
Jumlah	152.263.098.476,48	139.378.113.337,75	(8,46)
Rata-rata	30.452.619.695,30	27.875.622.667,55	(8,46)

Dari perhitungan di atas menunjukkan pertumbuhan PAD yang berfluktuasi. Pertumbuhan PAD Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2020 sebesar 14,08%, kemudian tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan sebesar (22,22%). Kemudian pada tahun 2022 rasio pertumbuhan PAD mengalami peningkatan menjadi 9,31%. Pada tahun 2023 rasio pertumbuhan PAD mengalami penurunan menjadi (20,66%). Selanjutnya pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi (22,48%).

2) Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan

$$\text{Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan tahun } p - \text{Pendapatan tahun } p-1}{\text{Total Pendapatan } p-1} \times 100\%$$

Tabel 3.11 Rasio Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan

Tahun	Pendapatan tahun p-1 (Rp)	Pendapatan tahun p (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4=(3-2)/2
2020	626.402.705.471,10	631.566.035.090,96	0,82
2021	631.566.035.090,96	583.834.842.657,35	(7,56)
2022	583.834.842.657,35	568.428.975.418,68	(2,64)
2023	568.428.975.418,68	649.359.532.832,40	14,24
2024	649.359.532.832,40	640.326.035.769,37	(1,39)
Jumlah	3.059.592.091.470,49	3.073.515.421.768,76	0,46
Rata-rata	611.918.418.294,10	614.703.084.353,75	0,46

Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2020 sampai dengan 2024 merupakan pertumbuhan pendapatan yang berfluktuasi. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi (7,56%) dibanding tahun 2020 yang sebesar 0,82%. Hal ini disebabkan semakin menurunnya realisasi



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

pendapatan pada semua sumber penerimaan pendapatan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang semakin menyebar. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar (2,64%) yang disebabkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.637.697.138,33 atau 9,31% dibandingkan tahun realisasi tahun 2021. Pada tahun 2023, rasio pertumbuhan pendapatan kembali mengalami peningkatan sebesar 14,24% yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan transfer sebesar Rp102.972.775.658,00 atau 20,01% dibanding tahun 2022. Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi (1,39%) dibanding tahun 2023 sebesar 14,24% yang disebabkan semakin menurunnya realisasi pendapatan yakni PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 22,48%, 0,35%, dan 18,32%.

3) Persentase Pertumbuhan Belanja Operasional

$$\text{Persentase Pertumbuhan Belanja Operasional} = \frac{\text{Belanja Operasi tahun } P - \text{Belanja Operasi tahun } p-1}{\text{Total Belanja Operasi } p-1} \times 100\%$$

Tabel 3.12 Rasio Persentase Pertumbuhan Belanja Operasional

Tahun	Belanja operasional tahun p-1 (Rp)	Belanja operasional tahun p (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4=(3-2)/2
2020	491.899.397.726,00	473.602.050.617,36	(3,72)
2021	473.602.050.617,36	350.685.801.975,00	(25,95)
2022	350.685.801.975,00	343.734.501.658,70	(1,98)
2023	343.734.501.658,70	387.484.474.506,00	12,73
2024	387.484.474.506,00	426.909.601.857,00	10,17
Jumlah	2.062.511.862.591,06	2.047.406.226.483,06	(3,17)
Rata-rata	412.502.372.518,21	409.481.245.296,61	(3,17)

Pada tahun 2021, belanja operasional mengalami penurunan menjadi (25,95%) dari tahun 2020 sebesar (3,72%). Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar (1,98%), selanjutnya pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan rasio pertumbuhan belanja operasional sebesar 12,73%. Dan pada tahun 2024 mengalami penurunan rasio pertumbuhan belanja operasional sebesar 10,17%.

4) Persentase Pertumbuhan Belanja Modal

$$\text{Persentase Pertumbuhan Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal tahun } P - \text{Belanja Modal tahun } p-1}{\text{Total Belanja Modal } p-1} \times 100\%$$



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 3.13 Rasio Persentase Pertumbuhan Belanja Modal

Tahun	Belanja modal tahun p-1 (Rp)	Belanja modal tahun p (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4=(3-2)/2
2020	156.173.945.800,00	152.480.443.087,00	(2,36)
2021	152.480.443.087,00	159.091.130.873,62	4,34
2022	159.091.130.873,62	137.291.124.197,00	(13,70)
2023	137.291.124.197,00	144.792.113.178,00	5,46
2024	144.792.113.178,00	136.951.565.031,37	(5,42)
Jumlah	749.828.757.135,62	730.606.376.366,99	(2,56)
Rata-rata	149.965.751.427,12	146.121.275.273,40	(2,56)

Pertumbuhan belanja modal pada tahun 2020 dan 2021 secara berturut-turut mengalami peningkatan masing-masing dari (2,36%) menjadi 4,36%. Pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar (13,70%). Pada tahun 2023, rasio pertumbuhan belanja modal mengalami peningkatan menjadi 5,46%. Selanjutnya pada tahun 2024 rasio pertumbuhan belanja modal mengalami penurunan menjadi (5,42%).

Dari analisis rasio pertumbuhan di atas, kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari penurunan rasio pertumbuhan pada belanja operasional dan belanja modal pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan anggaran belanja operasional dan belanja modal untuk menjalankan kegiatan dan program daerah pada belanja tak terduga yang kurang baik dan optimal yang disebabkan realisasi pendapatan tahun 2024 yang lebih rendah dari tahun 2023.

3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

3.3.1 Penjelasan terkait capaian target Pendapatan

Terdapat beberapa SKPD yang pencapaian realisasi pendapatannya rendah selama tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Dinas Penanaman Modal Dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan
Realisasi pendapatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2024 sebesar 18,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.043.526.000,00 terealisasi sebesar Rp727.695.416,00. Hal ini disebabkan oleh:
 - Minimnya pembelian garam tahun 2024 yang menyebabkan petambak beralih ke usaha lain sebagai mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhannya;
 - Cuaca yang tidak mendukung di saat musim produksi; dan
 - Adanya tambak garam yang mengalami kerusakan dan tidak diperbaiki dengan cepat.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2024 sebesar Rp1.752.290.218,00 atau 29,98% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.845.771.800,00. Terhadap pendapatan asli daerah yang tidak mencapai target realisasi pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pajak Daerah yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terdiri pajak Pasir dan kerikil, tanah diatome dan pajak mineral bukan logam dan bantuan lainnya hanya mencapai target Rp1.509.506.386,00 atau 38,50% dari anggaran Rp3.921.246.800,00 dikarenakan aktivitas konstruksi, pembangunan infrastruktur yang membutuhkan bahan galian golongan C menurun, menyebabkan permintaan akan bahan galian C ikut berkurang, sehingga mempengaruhi pendapatan SKPD ; dan
- Lain-lain PAD yang Sah dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Untuk hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan (sewa) dan Pendapatan denda Pajak MBLB hanya mencapai target Rp242.783.832,00 atau 12,62% dari pagu anggaran Rp1.924.525.000,00.

c. Dinas Perhubungan

Pada tahun 2024, realisasi pendapatan Dinas Perhubungan sebesar Rp220.540.000,00 atau 50,10% dari target yang ditetapkan sebesar Rp440.200.000,00. Hal ini disebabkan oleh:

- Hasil Kerja sama Pemanfaatan BMD (KMP. Hati Rai Hawu 641) tidak ada realisasi penerimaan dengan target sebesar Rp150.000.000,00 karena belum ada Perjanjian Kerja Sama dengan pihak ASDP untuk pengelolaan Kapal, sehingga Kapal KMP. Hati Rai Hawu 641 tidak beroperasi dan berdampak pada pendapatan;
- Retribusi pelayanan kepelabuhanan target Rp194.400.000,00 realisasi Rp137.240.000,00 atau sebesar 70,60%, target penerimaan tidak mencapai 100% karena pada tahun 2024 dilakukan renovasi Pelabuhan penyebrangan seba sehingga kegiatan bongkar muat kapal di Pelabuhan penyebrangan seba tidak berjalan sebagaimana mestinya dan pihak dinas tidak dapat melakukan pungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan; dan
- Sumbangan pihak ketiga target Rp85.000.000,00 realisasi sebesar Rp82.000.000,00 atau sebesar 95,57% hal ini disebabkan karena pengelolaan kendaraan transdes di Kelola oleh KSU Sandi Mandiri. Unit kendaraan transdes merupakan pengadaan yang sumber pembiayaan dari DAK, dan unit yang di kelola di koperasi hanya 13 unit. Pemda hanya menerima kontribusi dalam bentuk SP3 dari Koperasi Sandi Mandiri.

d. Dinas Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2024, realisasi pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp717.066.500,00 atau 59,76% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000,00. Hal ini disebabkan oleh:

- Produksi rumput laut menurun karena gagal tanam, gagal panen dan kondisi cuaca serta angin yang tidak menentu; dan



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Harga rumput laut kering yang sangat rendah sehingga membuat sebagian pembudidaya rumput laut untuk sementara tidak membudidaya rumput dan beralih profesi lain baik sebagai petani, peternak dan lain-lain.

3.3.2 Penjelasan Terkait Capaian Target Belanja

Terdapat beberapa SKPD yang pencapaian realisasi belanjanya rendah selama tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Dinas Kelautan dan Perikanan

Penyerapan anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar 52,91% dari anggaran perubahan yang ditetapkan sebesar Rp8.284.060.830,00 terealisasi sebesar Rp4.383.322.413,00. Hal tersebut disebabkan oleh sebagai berikut:

- Terdapat kegiatan pengadaan bantuan bibit rumput laut sebanyak 60.700 kg dengan persentase fisik pengadaan sebesar 24,71%, disebabkan karena sesuai hasil laporan PHO dari PPK bahwa bibit rumput laut yang diadakan banyak yang mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dibayarkan, bibit rumput laut yang masih dalam kondisi baik sebanyak 15.000kg sehingga dibayarkan sesuai dengan laporan hasil PHO PPK;
- Program pengelolaan perikanan tangkap pada Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil terdapat belanja modal aset tetap lainnya yaitu dengan pagu anggaran Rp1.664.284.600,00 dan realisasi hanya Rp23.800.000,00 atau 1,43% dikarenakan renovasi pabrik es yang tidak dapat dilaksanakan diakibatkan karena gagal tender sehingga hal ini sangat mempengaruhi penyerapan realisasi dan terealisasi hanya Jasa Konsultasi Perencanaan; dan
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran sebesar Rp1.260.000.000,00 dan realisasi Rp0,00 atau 0,00% (tidak terealisasi) karena Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang berasal dari Dana Insentif Fiskal (DIF) yang masuk pada akhir tahun anggaran 2024 dimana tidak dapat dilaksanakan karena jenis pengadaan barang berupa Perahu Ketinting sebanyak 20 Paket dan Mesin ketinting sebanyak 50 unit tidak sesuai dengan nomenklatur program yang ada. Hal ini disebabkan karena pada awal perencanaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan menggunakan program Pengelolaan Perikanan Tangkap akan tetapi terjadi perubahan pemilihan kategori menurut PMK nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 di mana kegiatan pengadaan tersebut dimasukkan dalam kategori penurunan stunting sehingga dibatasi dalam pemilihan nomenklatur



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

program dan kegiatan yaitu Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan. Pengertian Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah kegiatan yang mengubah bahan baku hasil perikanan menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan ekonomi yang lebih tinggi. Dari pengertian program tersebut maka tidak sesuai dengan jenis pengadaan berupa perahu ketinting dan mesin ketinting.

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Penyerapan anggaran belanja pada Bagian Kesejahteraan Rakyat sebesar 66,87% dari anggaran perubahan yang ditetapkan sebesar Rp4.181.598.200,00 terealisasi sebesar Rp2.796.347.522,00. Hal tersebut disebabkan oleh Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat terdapat Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yaitu Belanja Hibah kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dengan pihak Politeknik Negeri Jember di Kabupaten Sabu Raijua realisasi Rp487.568.305,00 dari pagu anggaran Rp1.820.000.000,00 atau 26,78% tidak mencapai target dengan alasan sebagai berikut:

- Keterlambatan dalam memperoleh izin operasional yang baru diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Surat Keputusan nomor: 170/A/O/2024 pada tanggal 24 Desember 2024; dan
- Persyaratan izin operasional yang rumit dan kompleks yang menyebabkan terlambatnya memperoleh izin Pembukaan Program Study di Luar Kampus Utama di Kabupaten Sabu Raijua untuk program study Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Program Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Jember.

c. Inspektorat Daerah

Penyerapan anggaran belanja Inspektorat Daerah sebesar 79,17% dari anggaran perubahan yang ditetapkan sebesar Rp3.847.447.708,00 terealisasi sebesar Rp3.045.990.354,00. Hal tersebut disebabkan oleh:

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang persentasinya di bawah 80% yaitu sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dengan realisasi Rp6.586.000,00 dari pagu Rp8.704.500,00 75,66% yang disebabkan karena adanya selisih harga dari standar harga yang ditetapkan. Standar harga yang ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar yang sesungguhnya, dan telah disesuaikan dengan kebutuhan SKPD. Selanjutnya, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pagu sebesar Rp513.272.000,00 terealisasi sebesar Rp319.772.332,00 atau 62,30% realisasi keuangan sebesar 62,30%, namun untuk realisasi fisiknya mencapai 100%, rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena adanya efisiensi biaya tiket dan penginapan serta jumlah pelaku perjalanan;



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal terdapat 4 (empat) sub kegiatan yang mengalami presentasi rendah yang bervariasi seperti: 1) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan realisasi keuangan sebesar Rp14.200.000,00 dari pagu anggaran Rp19.035.000,00 atau 74,60%, disebabkan adanya beberapa kegiatan seperti kegiatan pengawasan desa serta pelaksanaan audit kinerja yang direncanakan masing-masing sebanyak 3 kali namun hanya terealisasi sebanyak 2 kali oleh karena keterbatasan auditor dan waktu pelaksanaan. 2) Reviu Laporan Kinerja dengan realisasi sebesar Rp26.060.000,00 dari pagu anggaran Rp38.860.000,00 atau 67,25% disebabkan karena ada beberapa reviu yang tidak terlaksana yaitu Reviu LAKIP Pemda, Reviu P3DN, Reviu Tata Kelola Perijinan oleh karena tidak ada permintaan reviu dari OPD penanggung jawab. 3) Reviu Laporan Keuangan dengan realisasi sebesar Rp101.765.000,00 dari pagu anggaran Rp151.330.000,00 atau 67,25% disebabkan ada beberapa reviu yang tidak dilaksanakan karena ada beberapa sub bidang DAK yang reviunya digabung dan ada DAK Fisik yang tidak mendapat alokasi anggaran di tahun 2024, reviu dana hibah yang direncanakan 2 (dua) tahap realisasinya cuma 1 (satu) tahap disesuaikan dengan permintaan reviu dari SKPD. 4) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP realisasi keuangan sebesar Rp50.765.043,00 dari pagu anggaran Rp76.065.000,00 atau 66,74%, sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena adanya efisiensi biaya tiket dan penginapan serta jumlah pelaku perjalanan;
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu realisasi keuangan sebesar Rp42.055.000,00 dari pagu anggaran Rp110.510.000,00 atau 38,60%. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan karena kegiatan ini hanya terlaksana sebanyak 3 (tiga) kali dari rencana 14 (empat belas) kali kegiatan oleh karena tidak adanya pengaduan/perintah pimpinan serta permintaan pihak lain (APH); dan
 - Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan realisasi keuangan sebesar Rp140.991.082,00 dari pagu anggaran Rp202.696.000,00 atau 69,56%, sedangkan realisasi fisik 100%. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena adanya efisiensi biaya tiket dan penginapan serta jumlah pelaku perjalanan.
- d. Rumah Sakit Umum Daerah
Penyerapan anggaran belanja Rumah Sakit Umum Daerah sebesar 81,07% dari anggaran perubahan yang ditetapkan sebesar Rp12.786.490.907,00 terealisasi sebesar Rp10.365.378.738,00. Hal tersebut disebabkan oleh:



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi realisasi Rp27.194.321,00 dari pagu anggaran Rp83.956.000,00 atau 32,39%. Belum maksimalnya penyerapan anggarannya dikarenakan *Workshop and National Congress of Indonesian Pediatric Society* untuk Dokter Spesialis Anak telah dianggarkan sesuai dengan kebutuhan tenaga medis dalam hal ini Dokter Spesialis Anak guna menunjang pelayanan pada fasilitas kesehatan, namun tidak terlaksananya kegiatan tersebut dikarenakan Dokter mengundurkan diri sebelum kegiatan tersebut berlangsung;
- Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi Rp124.479.468,00 dari pagu anggaran Rp156.344.000,00 atau 79,62% Belum maksimalnya penyerapan anggaran karena adanya efisiensi pada tiket dan penginapan;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor realisasi Rp2.393.413.355,00 dari pagu anggaran Rp3.387.100.522,00 atau 70,66%. Belum maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan pembayaran jasa medis yang dibayarkan hanya 9 (sembilan) bulan disesuaikan dengan pendapatan dari klaim BPJS;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan realisasi Rp301.594.215,00 dari pagu Rp380.100.000,00 atau 79,35%. Belum maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan bahan bakar mobil operasional Dokter Spesialis maupun ambulans;
- Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya realisasi Rp52.467.000,00 dari pagu Rp79.945.000,00 atau 65,63%, Belum maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan terdapat efisiensi pada biaya pemeliharaan genset dan bahan bakar untuk genset;
- Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit realisasi Rp134.035.782,00 dari pagu Rp305.260.000,00 atau 43,91%. Belum maksimal dalam penyerapan anggaran dikarenakan keterlambatan dalam persetujuan PKS dari penyedia jasa layanan SIM RS sehingga hanya dapat terbayarkan 1 bulan pada bulan Desember;
- Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit realisasi Rp14.488.000,00 dari pagu anggaran Rp50.000.000,00 atau 28,98%. Belum maksimalnya dalam penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan gedung pada tahun 2024; dan
- Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar realisasi Rp1.683.844.320,00 dari pagu Rp2.395.834.400,00 atau 70,28%. Belum maksimalnya penyerapan anggaran pada kegiatan tersebut disebabkan oleh tidak tersedianya tenaga Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan Anestesi sehingga pembayaran honor dan insentif juga tidak terealisasi. Selain itu, Insentif Dokter Spesialis Anak PNS tidak realisasi karena Dokter mengundurkan diri.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

e. Dinas Perhubungan

Penyerapan anggaran belanja Dinas Perhubungan sebesar 83,94% dari anggaran perubahan yang ditetapkan sebesar Rp8.614.629.465,00 terealisasi sebesar Rp7.230.958.227,00. Hal tersebut disebabkan oleh Realisasi Belanja Pegawai hanya mencapai Rp1.386.246.165,00 atau 72,25% dari pagu anggaran Rp1.918.655.565,00. Dapat dijelaskan bahwa realisasi belanja Gaji dan Tunjangan ASN serta Belanja Tambahan Penghasilan ASN realisasinya rendah dikarenakan adanya pegawai yang purna bakti, mutasi dan dilantik dari jabatan fungsional ke jabatan struktural selama tahun 2024 sehingga belanja disesuaikan dengan kebutuhan dinas.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar periode.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

1. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
2. Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP atas:
 - a) Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam - 380 - SAP
 - b) Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Struktur akuntansi pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 10 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 189 mengatakan bahwa pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi dan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Di Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Keuangan Daerah sebagai SKPD yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan SKPD adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD sebagai entitas akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, disusun berdasarkan struktur anggaran APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Untuk menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dilakukan konversi sesuai susunan akun yang ditetapkan dalam SAP.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan laporan gabungan dari seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD sebagai Pejabat Pengelola keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dilakukan oleh entitas pelaporan pemerintah daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Produk dari entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua memiliki 39 (tiga puluh sembilan) entitas akuntansi yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan SKPD untuk dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Entitas akuntansi tersebut terdiri dari:

Tabel 4.1 Entitas Akuntansi

No	Entitas Akuntansi
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua Kelas D
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
10	Dinas Pertanian dan Pangan
11	Dinas Lingkungan Hidup
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
14	Dinas Perhubungan
15	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Dinas Kelautan dan Perikanan
19	Dinas Pariwisata
20	Bagian Pemerintahan
21	Bagian Kesejahteraan Rakyat
22	Bagian Hukum
23	Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam
24	Bagian Administrasi Pembangunan
25	Bagian Umum
26	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
27	Bagian Organisasi
28	Inspektorat Daerah
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
30	Badan Keuangan Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Entitas Akuntansi
31	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
32	Sekretariat DPRD
33	Kecamatan Sabu Barat
34	Kecamatan Sabu Timur
35	Kecamatan Sabu Liae
36	Kecamatan Hawu Mehara
37	Kecamatan Raijua
38	Kecamatan Sabu Tengah
39	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam APBD.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 berdasarkan pada peraturan yang berlaku dengan mekanisme basis akuntansi yang secara garis besar dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

- Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.
- Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asling dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
- Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.
- Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dan diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan secara Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua menyajikan saldo akun-akun tahun 2024 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sabu Raijua, namun dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah serta penyusunan laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik secara umum yang dipilih Pemerintah daerah sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan menggunakan referensi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecuali penyajian atas beberapa akun laporan keuangan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pos-pos laporan keuangan;
- b. Periode pembukuan atau periode akuntansi adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember;



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- c. Mata uang yang digunakan adalah rupiah. Bila terdapat valuta asing disetarakan dengan rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
- d. Pendapatan dan belanja diakui dengan basis akrual, yang berarti dicatat sebagai pendapatan atau belanja tanpa memperhatikan saat sudah diterima/dikeluarkan ke/dari kas daerah. Khusus untuk transaksi akhir tahun terdapat belanja yang telah dicatat pada saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan, meskipun belum dicairkan (uang belum dikeluarkan dari kas daerah);
- e. Pos-pos Neraca (Aset, Kewajiban dan Ekuitas) menggunakan basis Akrual, yaitu transaksi diakui sebagai aset/kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- f. Pelaksanaan pembukuan menganut asas bruto sehingga tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
- g. Seluruh Laporan Keuangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 disusun pada posisi 31 Desember 2024. Oleh karena itu semua penerimaan yang menjadi hak daerah sebagai penambah aset daerah, demikian pula dengan pengeluaran yang menjadi kewajiban pemerintah daerah yang diterima/dikeluarkan dari kas daerah setelah tanggal 31 Desember 2024 adalah menjadi penerimaan dan pengeluaran tahun anggaran berikutnya; dan
- h. Realisasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan realisasi angka Laporan Pertanggungjawaban yang telah diverifikasi dan disahkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam Laporan Arus Kas (LAK) diakui dan disajikan berdasarkan angka pengeluaran kas dari kas daerah.

Sehingga Ikhtisar kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang terpenting dapat disajikan sebagai berikut:

a. Entitas Pelaporan Keuangan

- 1) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
- 2) Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah;
- 3) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- 4) Entitas pelaporan keuangan daerah ialah pemerintah daerah secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dinas-dinas dan lembaga teknis daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

b. Basis Akuntansi

- 1) Transaksi atau kejadian keuangan diakui dengan basis akrual;
- 2) Yang dimaksud dengan basis akrual, adalah satu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam Laporan Keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan; dan
- 3) Basis akrual diterapkan untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas.

c. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah;
- 2) Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
- 3) Pendapatan dicatat dan diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan mencatat pengeluaran);
- 4) Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS; dan
- 5) Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan yang bersangkutan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurangan ekuitas dana lancar.

d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan idealisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*). Pengakuan pendapatan di klasifikasikan sebagai berikut:
 - a) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu :



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- PAD Melalui Penetapan
PAD yang masuk kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi;
 - PAD Tanpa Penetapan
PAD yang masuk kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah; dan
 - PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan
Diakui pada saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, pada saat tersebut Pemerintah Daerah akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan dan mengakuinya sebagai pendapatan;
- b) Pendapatan Transfer
Pemerintah pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO mengingat kepastian pendapatan tergantung pada syarat-syarat sesuai perundang-undangan pada penyaluran alokasi tersebut untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah;
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan;
- d) Pendapatan Non Operasional
Mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset non-lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan ini diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara Kegiatan telah diterima.
- 3) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

pendapatan dimaksud dan tidak dapat destinasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan

- 4) Penyajian pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam Bagan Akun Standar.

e. Kebijakan Akuntansi Belanja

- 1) Belanja ialah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- 2) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
- 3) Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan asas bruto;
- 4) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan ke dalam Pendapatan Lain-lain; dan.
- 5) Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap (Lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap).

f. Kebijakan Akuntansi Beban

- 1) Beban ialah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;
- 2) Pengakuan beban terjadi pada saat :
 - Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;
 - Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah; dan
 - Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
- 3) Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan dan dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line Item*).

g. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- 1) Pembiayaan ialah transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari pinjaman dan hasil divestasi, sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal;
- 2) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkannya dari Rekening Kas Umum Daerah; dan
- 3) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai setara kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

h. Kebijakan Akuntansi Transfer

- 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh satu entitas pelaporan dari/atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk yaitu penerimaan uang dari entitas pelaporan lain misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah daerah lainnya sedangkan transfer keluar yaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan;
- 2) Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah; dan
- 3) Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), transfer masuk dalam bentuk hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia, transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi.

i. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan;



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 2) PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya;
- 3) Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca; dan
- 4) Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

j. Kebijakan Akuntansi Piutang

- 1) Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini;
- 2) Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas: Pungutan, Perikatan, Transfer antar Pemerintahan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- 3) Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika diterbitkannya surat ketetapan/dokumen yang sah; atau telah diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakannya penagihan; atau belum dilunasinya sampai dengan akhir periode pelaporan. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila memenuhi kriteria harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas, jumlah piutang dapat di ukur, telah diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;
- 4) Piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi; dan



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 5) Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

k. Kebijakan Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Persediaan diakui: (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi;
- 3) Persediaan disajikan sebesar: (a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, (b) harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, (c) nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi dan rampasan; dan
- 4) Persediaan dicatat dengan metode perpetual dimana fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar dan metode periodik dimana fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian;
- 5) Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

l. Kebijakan Akuntansi Investasi

- 1) Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka pendek dalam rangka manajemen kas;
- 2) Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria: (a) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; (b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*); atau (c) Ketika pengakuan itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi;



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 3) Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya
 - Pengukuran investasi jangka pendek: (a) surat berharga, apabila terdapat nilai biaya perolehan maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank dan biaya lainnya dan apabila tidak terdapat biaya perolehannya maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasar (b) investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya;
 - Pengukuran investasi jangka panjang: (a) investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehan, (b) investasi dalam bentuk dana talangan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, (c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga;
 - Investasi yang diperoleh dari aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; dan
 - Investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal transaksi.
- 4) Metode penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: (a) metode biaya, (b) metode ekuitas dan (c) metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

m. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai;

3) Gedung dan Bangunan



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

4) Jalan, Irigasi dan jaringan

Jalan, irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya;

7) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap telah ditetapkan sesuai tabel masa manfaat. Sedangkan aset tetap lainnya berupa hewan dan tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati;

8) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;

9) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa manfaat masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya atau ongkos untuk dipelihara; dan
 - g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai persediaan atau aset lainnya.
- 10) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi yang menambah masa manfaat yang tidak termasuk pemeliharaan rutin atau renovasi ringan disajikan sesuai tabel tambahan masa manfaat yang telah ditetapkan.

n. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan;
- 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran;
- 3) Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap jika memenuhi kriteria: (a) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan, (b) dapat memberikan manfaat/jasa dengan tujuan perolehan;
- 4) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung; dan
- 5) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

o. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

- 1) Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran; dan
- 2) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan.

p. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

- 1) Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan; memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan;
- 2) Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas

- Tagihan jangka panjang

Terdiri dari: (a) tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah, (b) tagihan tuntutan kerugian daerah ini diakui ketika keputusan TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K);

- Kemitraan dengan pihak ketiga

Kemitraan dapat berupa: (a) kemitraan dengan pihak ketiga sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, (b) kerja sama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, (c) Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut, (d) Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada aset pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan;

- Aset tidak berwujud

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika: (a) kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan (b) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal;

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai masa manfaat 10 tahun dengan menggunakan metode garis lurus; dan



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Aset lain-lain

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Metode yang digunakan metode garis lurus (*straight line method*).

3) Pengukuran aset tetap lainnya diklasifikasikan sebagai berikut :

- Tagihan jangka panjang

Tagihan jangka panjang terdiri dari: (a) tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan, (b) tagihan tuntutan ganti rugi kerugian daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa SKTJM;

- Kemitraan dengan pihak ketiga

Terdiri dari: (a) sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan, (b) kerja sama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, (c) bangun guna serah (BGS) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut, (d) guna serah guna-BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut;

- Aset tidak berwujud

Diukur dengan harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh satu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah; dan

- Aset lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

q. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- 2) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah, atau dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah, atau pada saat kewajiban timbul; dan
- 3) Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca, penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda-beda untuk masing-masing pos kewajiban;

r. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

- 1) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset pemerintah dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan dan saldo ekuitas berasal dari Ekuitas Awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai Piutang, Koreksi nilai persediaan Koreksi nilai aset tetap, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain;
- 2) Ekuitas diakui bertambah pada saat adanya: (a) surplus-LO pada periode pelaporan;(b)koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan; dan Ekuitas diakui berkurang pada saat adanya: (a)defisit –LO pada periode pelaporan;(b)koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan; dan
- 3) Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban yang mengalami koreksi;

s. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

- 1) Koreksi kesalahan merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya, sedangkan kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam satu akun/pos;



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 2) Perlakuan atas koreksi kesalahan diklasifikasikan sebagai berikut :
 - Kesalahan tidak berulang terbagi atas: (a) kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, kesalahan jenis ini dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, (b) kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, kesalahan ini bisa saja terjadi pada saat yang berbeda yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan;
 - Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan; dan
 - Pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

t. Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

- 1) Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu: (a) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); (b) peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan
- 2) Peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan adalah Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan; dan peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan adalah entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan.

u. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

- 1) Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif;



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 3) Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika: (a) besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan (b) biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal;
- 4) Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut, apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan; dan
- 5) Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya, karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode dan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan komponen dari laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan basis kas. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II huruf B poin 4, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan Kabupaten Sabu Raijua bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2024 senilai Rp640.326.035.769,37 atau 99,02% dari target pendapatan sebesar Rp646.682.414.738,00. Jumlah ini mengalami penurunan senilai Rp9.033.497.063,03 atau 1,39% dibandingkan realisasi tahun 2023 senilai Rp649.359.532.832,40.

Pendapatan Daerah tahun 2024 yang disajikan dalam LRA Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mencakup pendapatan yang diterima melalui rekening kas umum daerah dan tidak melalui rekening umum daerah. Pendapatan non RKUD terdapat pada sekolah (dana BOSP), puskesmas (dana JKN), lembaga PAUD dan Kesetaraan (BOP) dan desa (dana desa). Pendapatan non RKUD tahun 2024 yang tidak diterima melalui kas umum daerah senilai Rp97.395.869.538,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Pendapatan dana BOSP reguler SD senilai Rp13.537.342.000,00;
2. Pendapatan dana BOSP Kinerja SD senilai Rp225.000.000,00;
3. Pendapatan dana BOSP reguler SMP senilai Rp7.766.194.124,00;
4. Pendapatan dana BOSP Kinerja SMP senilai Rp210.000.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5. Pendapatan dana kapitasi JKN senilai Rp4.926.326.564,00;
6. Pendapatan dana BOK senilai Rp4.952.441.870,00;
7. Dana desa senilai Rp62.797.184.980,00;
8. Dana BOP PAUD senilai Rp2.693.850.000,00; dan
9. Dana BOP Kesetaraan senilai Rp287.730.000,00.

Rincian realisasi pendapatan tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
PENDAPATAN	646.682.414.738,00	640.326.035.769,37	99,02	649.359.532.832,40
Pendapatan Asli Daerah	24.790.582.320,00	19.052.226.319,37	76,85	24.576.074.744,40
Pendapatan Pajak Daerah	6.763.246.800,00	4.934.625.570,00	72,96	4.978.159.604,80
Pendapatan Retribusi Daerah	10.152.999.000,00	7.000.775.722,00	68,95	11.716.654.568,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.306.016.815,00	2.306.016.815,00	100,00	4.304.652.548,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.568.319.705,00	4.810.808.212,37	86,40	3.576.608.023,60
Pendapatan Transfer	614.299.858.825,00	615.361.652.553,00	100,17	617.544.974.868,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	503.895.239.582,00	506.169.841.263,00	100,45	513.050.666.741,00
Dana Bagi Hasil Pajak	1.923.176.000,00	2.255.257.000,00	117,27	2.553.362.775,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.096.773.000,00	2.112.952.000,00	100,77	2.658.452.068,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	375.480.211.000,00	373.274.825.957,00	99,41	353.576.035.296,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	68.132.328.326,00	68.132.328.326,00	100,00	98.108.941.054,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	56.262.751.256,00	60.394.477.980,00	107,34	56.153.875.548,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	87.724.457.000,00	89.946.353.980,00	102,53	86.859.427.550,00
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	18.501.542.000,00
Dana Desa	60.575.288.000,00	62.797.184.980,00	103,67	62.145.670.550,00
Insentif Fiskal	27.149.169.000,00	27.149.169.000,00	100,00	6.212.215.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	22.680.162.243,00	19.245.457.310,00	84,86	17.634.880.577,00
Pendapatan Bagi Hasil	22.680.162.243,00	19.245.457.310,00	84,86	17.634.880.577,00
Lain-lain Pendapatan yang sah	7.591.973.593,00	5.912.156.897,00	77,87	7.238.483.220,00
Pendapatan Hibah	1.315.800.000,00	874.951.500,00	66,50	1.329.549.000,00
Pendapatan Lainnya	6.276.173.593,00	5.037.205.397,00	80,26	5.908.934.220,00

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp19.052.226.319,37 dari target anggaran senilai Rp24.790.582.320,00 atau 76,85%. Jumlah ini mengalami



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

pengurangan senilai Rp5.523.848.425,03 atau sebesar 28,99% dari realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2023 yang mencapai Rp24.576.074.744,40.

Pendapatan asli daerah tahun anggaran 2024 dan 2023 berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan realisasi PAD, terdapat dua SKPD dengan realisasi PAD yang di bawah 50% yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penyebab realisasi PAD yang rendah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan dikarenakan garam yang ada tidak laku terjual. Di tahun 2024 saldo awal persediaan garam sebanyak 828.550kg dan produksi tahun 2024 sebanyak 518.420kg sehingga total garam selama tahun 2024 sebanyak 1.346.970kg dan garam yang laku terjual tahun 2024 hanya sebanyak 427.075kg. Di sisi lain, penyebab realisasi PAD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang rendah aktivitas konstruksi, pembangunan infrastruktur yang membutuhkan bahan galian golongan C menurun, sehingga menyebabkan permintaan akan bahan galian C ikut berkurang. Realisasi pendapatan asli daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Unit Organisasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	6.763.246.800,00	4.934.625.570,00	72,96	4.978.159.604,80
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.921.246.800,00	1.509.506.386,00	38,50	2.216.219.934,00
Badan Keuangan Daerah	2.842.000.000,00	3.425.119.184,00	120,52	2.761.939.670,80
Pendapatan Retribusi Daerah	10.152.999.000,00	7.000.775.722,00	68,95	11.716.654.568,00
Rumah Sakit Umum Daerah	4.090.000.000,00	4.316.627.806,00	105,54	4.951.172.500,00
Dinas Pertanian dan Pangan	736.023.000,00	798.601.000,00	108,50	281.494.000,00
Dinas Perhubungan	204.400.000,00	138.540.000,00	67,78	47.252.500,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	4.043.526.000,00	727.695.416,00	18,00	5.289.405.617,00
Badan Keuangan Daerah	1.079.050.000,00	1.019.311.500,00	94,46	1.147.329.951,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan	2.306.016.815,00	2.306.016.815,00	100,00	4.304.652.548,00
Badan Keuangan Daerah	2.306.016.815,00	2.306.016.815,00	100,00	4.304.652.548,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	5.568.319.705,00	4.810.808.212,37	86,40	3.576.608.023,60
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.924.525.000,00	242.783.832,00	12,62	86.400.000,00
Dinas Perhubungan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Badan Keuangan Daerah	3.493.794.705,00	4.568.024.380,37	130,75	3.490.208.023,60
Jumlah	24.790.582.320,00	19.052.226.319,37	76,85	24.576.074.744,40

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	TA 2024	TA 2023
	Rp4.934.625.570,00	Rp4.978.159.604,80

Realisasi pendapatan pajak daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp4.934.625.570,00 dari target anggaran Rp6.763.246.800,00 atau 72,96%. Jumlah ini mengalami pengurangan senilai Rp43.534.034,80 atau 0,87% dari realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2023 yaitu senilai Rp4.978.159.604,80.

Penerimaan pajak tersebut bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dasar pemungutan pajak daerah sesuai uraian di atas adalah:

- Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1); dan
- Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Rincian realisasi penerimaan pajak tahun 2024 dan 2023 dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Unit Organisasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pajak Hotel	45.000.000,00	35.945.000,00	79,88	37.160.000,00
Pajak Restoran	750.000.000,00	846.485.650,00	112,86	725.960.427,80
Pajak Reklame	112.216.208,00	105.479.500,00	94,00	84.764.400,00
Pajak Penerangan Jalan	1.320.000.000,00	1.813.637.549,00	137,40	1.246.401.536,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.921.246.800,00	1.509.506.386,00	38,50	2.216.219.934,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	604.783.792,00	618.371.485,00	102,25	566.275.807,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000.000,00	5.200.000,00	52,00	101.377.500,00
Jumlah	6.763.246.800,00	4.934.625.570,00	72,96	4.978.159.604,80

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan aktivitas konstruksi, pembangunan infrastruktur yang membutuhkan bahan galian golongan C menurun, sehingga menyebabkan permintaan akan bahan galian C ikut berkurang.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	TA 2024	TA 2023
	Rp7.000.775.722,00	Rp11.716.654.568,00

Realisasi pendapatan retribusi daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp7.000.775.722,00 dari target Rp10.152.999.000,00 atau 68,95%. Jumlah ini mengalami pengurangan senilai



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rp4.715.878.846,00 atau 40,25% dari realisasi retribusi daerah tahun 2023 yaitu senilai Rp11.716.654.568,00.

Pendapatan retribusi daerah bersumber dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Dasar pemungutan retribusi daerah sesuai uraian di atas adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1).

Rincian realisasi penerimaan retribusi tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	5.696.349.000,00	5.848.955.306,00	102,68	6.131.731.201,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.600.773.000,00	5.797.668.306,00	103,52	6.044.222.451,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	10.000.000,00	1.300.000,00	13,00	3.500.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	85.576.000,00	49.987.000,00	58,41	68.068.750,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	15.940.000,00
Retribusi Jasa Usaha	4.391.650.000,00	1.055.065.050,00	24,02	5.559.628.750,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	101.000.000,00	135.200.000,00	133,86	127.300.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	40.494.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	250.000,00	1.000.000,00	400,00	200.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	20.000.000,00	12.964.000,00	64,82	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.076.000.000,00	768.661.050,00	18,86	5.363.822.250,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	194.400.000,00	137.240.000,00	70,60	27.812.500,00
Retribusi Perizinan Tertentu	65.000.000,00	96.755.366,00	148,85	25.294.617,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	25.294.617,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	65.000.000,00	96.755.366,00	148,85	0,00
Jumlah	10.152.999.000,00	7.000.775.722,00	68,95	11.716.654.568,00

Berdasarkan realisasi penerimaan retribusi di atas, terdapat realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar dan retribusi penjualan produksi usaha daerah yang rendah masing-masing mencapai 13,00%, 58,41%, dan 18,86%. Realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang rendah terjadi pada Dinas Perhubungan yang disebabkan oleh kurangnya obyek lokasi parkir di tepi jalan umum. Di sisi lain, realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dan retribusi produksi usaha daerah pada Dinas Penanaman Modal PTSP, Perindustrian dan Perdagangan yang rendah disebabkan oleh masih banyak pengguna los kios pasar belum memenuhi kewajibannya



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

untuk membayar sewa los kios pasar tahun berjalan maupun tunggakan sewa los kios tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan karena sebagian besar para pengguna los kios pasar tidak mau membayar karena adanya kenaikan sewa los kios pasar yang sebelumnya Rp200,00/hari menjadi Rp400,00/hari atau mengalami kenaikan 100%. Hal ini mereka anggap sebagai tarif baru yang memberatkan. Minimnya pembelian garam dan rendahnya harga garam tahun 2024 sebesar Rp1.000,00/kg tahun 2024 yang menyebabkan petambak mengurangi produksi garam dan beralih ke usaha lain sebagai mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhannya, dan juga banyaknya tambak garam yang mengalami kerusakan dan tidak diperbaiki dengan cepat. Rendahnya retribusi produksi hasil usaha daerah juga ada di Dinas Kelautan dan Perikanan, hal ini disebabkan karena menurunnya produksi rumput laut karena gagal tanam, gagal panen serta kondisi cuaca serta angin yang tidak menentu dan harga rumput laut kering yang sangat rendah sehingga membuat sebagian pembudidaya rumput laut untuk sementara tidak membudidaya rumput dan beralih profesi lain baik sebagai petani, peternak dan lain-lain.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	TA 2024	TA 2023
	Rp2.306.016.815,00	Rp4.304.652.548,00

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2024 senilai Rp2.306.016.815,00 atau 100,00% dari target senilai Rp2.306.016.815,00. Jumlah ini mengalami penurunan senilai Rp1.998.635.733,00 atau 46,43% dari realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2023 yaitu senilai Rp4.304.652.548,00.

Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut merupakan realisasi penerimaan dividen atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2024 pada PT Bank Pembangunan Daerah NTT senilai Rp56.492.830.000,00.

5.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah	TA 2024	TA 2023
	Rp4.810.808.212,37	Rp3.576.608.023,60

Realisasi lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2024 senilai Rp4.810.808.212,37 dari target anggaran Rp5.568.319.705,00 atau 86,40%. Jumlah ini mengalami peningkatan senilai Rp1.234.200.188,77 atau 34,51% dari realisasi lain-lain PAD yang sah tahun 2023 senilai Rp3.576.608.023,60.

Realisasi Lain-lain PAD yang sah senilai Rp4.810.808.212,37 bersumber dari hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, dan pendapatan dari pengembalian. Rincian lain-lain PAD yang sah tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.5 Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah	5.568.319.705,00	4.810.808.212,37	86,40	3.576.608.023,60
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	16.662.626,00	0,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.124.525.000,00	291.900.000,00	13,74	86.400.000,00
Jasa Giro	545.000.000,00	701.384.977,69	128,69	555.208.351,96
Pendapatan Bunga	1.200.000.000,00	2.101.524.273,76	121,74	791.279.782,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	310.000.000,00	221.249.370,21	71,37	703.046.037,67
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00	1.099.266.437,47	109,93	797.088.306,67
Pendapatan dari Pengembalian	388.794.705,00	377.936.695,24	97,21	643.585.545,30
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	883.832,00	0,00	0,00

Lain-lain PAD yang sah secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Hasil penjualan BMD yang dipisahkan senilai Rp16.662.626,00 atas bongkahan bangunan gedung Puskesmas Eimadake.
2. Hasil pemanfaatan BMD senilai Rp291.900.000,00 terdiri atas:
 - a. Penerimaan dari pemanfaatan sewa *theodolite* Rp1.250.000,00;
 - b. Penerimaan dari pemanfaatan sewa *excavator* Rp87.500.000,00;
 - c. Penerimaan dari pemanfaatan sewa *tronton* Rp62.100.000,00;
 - d. Penerimaan dari pemanfaatan sewa *truck craine* ukur Rp1.050.000,00;
 - e. Penerimaan dari pemanfaatan sewa *Bulldozer* Rp90.000.000,00; dan
 - f. Penerimaan dari pemanfaatan sewa gedung kantor KF Bupati Rp50.000.000,00
3. Jasa Giro senilai Rp701.384.977,69 terdiri atas:
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah Rp609.380.614,07; dan
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara Rp92.004.363,62;
4. Pendapatan Bunga senilai Rp2.101.524.273,76 terdiri atas :
 - a. Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemda pada Deposito Bank BRI senilai Rp1.099.185.987,00
 - b. Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemda pada Deposito Bank NTT senilai Rp515.526.015,95;
 - c. Bunga dana cadangan pilkada sebesar Rp483.009.383,81; dan
 - d. Remunerasi dana TDF triwulan I 2024 sebesar Rp3.802.887,00
5. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah senilai Rp221.249.370,21 merupakan penerimaan yang berasal dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain terdiri atas:
 - a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara senilai Rp29.102.533,00; dan
 - b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain senilai Rp192.146.837,21.
6. Pendapatan Denda Keterlambatan senilai Rp1.099.266.437,47 merupakan pendapatan denda yang berasal dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

7. Pendapatan denda pajak daerah senilai Rp883.832,00 merupakan pendapatan denda pajak daerah yang berasal dari keterlambatan pembayaran pajak daerah;
8. Pendapatan dari pengembalian senilai Rp377.936.695,24 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja perjalanan dinas baik berupa kelebihan biaya tiket, hotel maupun uang harian senilai Rp91.814.209,00;
 - b. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran JKN senilai Rp12.969.002,00;
 - c. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN senilai Rp19.676.930,00;
 - d. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN senilai Rp3.794.705,00;
 - e. Pendapatan dari Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa senilai Rp237.891.350,00; dan
 - f. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung senilai Rp11.790.499,24.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan dan dana desa dan juga dari pemerintah provinsi berupa dana bagi hasil pajak yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi. Realisasi pendapatan transfer tahun 2024 senilai Rp615.361.652.553,00 dari target Rp614.299.858.825,00 atau 100,17%. Jumlah ini mengalami penurunan senilai Rp2.183.322.315,00 atau 0,35% dari realisasi pendapatan transfer tahun 2023 senilai Rp617.544.974.868,00.

Pendapatan transfer tahun 2024 dan 2023 secara jelas dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.6 Pendapatan Transfer

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
PENDAPATAN TRANSFER	614.299.858.825,00	615.361.652.553,00	100,17	617.544.974.868,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	503.895.239.582,00	506.169.841.263,00	100,45	513.050.666.741,00
Dana Bagi Hasil Pajak	1.923.176.000,00	2.255.257.000,00	117,27	2.553.362.775,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.096.773.000,00	2.112.952.000,00	100,77	2.658.452.068,00
Dana Alokasi Umum	375.480.211.000,00	373.274.825.957,00	99,41	353.576.035.296,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	68.132.328.326,00	68.132.328.326,00	100,00	98.108.941.054,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	56.262.751.256,00	60.394.477.980,00	107,34	56.153.875.548,00
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	87.724.457.000,00	89.946.353.980,00	102,53	86.859.427.550,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	18.501.542.000,00
Dana Desa	60.575.288.000,00	62.797.184.980,00	103,67	62.145.670.550,00
Insentif Fiskal	27.149.169.000,00	27.149.169.000,00	100,00	6.212.215.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	22.680.162.243,00	19.245.457.310,00	84,86	17.634.880.577,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.680.162.243,00	19.245.457.310,00	84,86	17.634.880.577,00

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pencatatan tersebut berupa dana transfer umum-dana bagi hasil, dana transfer umum-dana alokasi umum, dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik, dan dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.

Realisasi Dana Perimbangan tahun 2024 senilai Rp506.169.841.263,00 dari target anggaran senilai Rp503.895.239.582,00 atau 100,45%. Jumlah tersebut mengalami penurunan senilai Rp6.880.825.478,00 atau 1,34% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp513.050.666.741,00.

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat TA 2024 dan TA 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

5.1.1.2.1a Dana Bagi Hasil Pajak	TA 2024	TA 2023
	Rp2.255.257.000,00	Rp2.553.362.775,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2024 senilai Rp2.255.257.000,00 dari target anggaran senilai Rp1.923.176.000,00 atau 117,27%. Jumlah tersebut mengalami pengurangan senilai Rp298.105.775,00 atau 11,68% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp2.553.362.775,00. Dana bagi hasil pajak tersebut berasal dari penerimaan DBH pajak bumi dan bangunan, DBH PPh pasal 21, dan DBH cukai hasil tembakau. Realisasi pendapatan bagi hasil pajak ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 5.7 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	1.923.176.000,00	2.255.257.000,00	117,27	2.553.362.775,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	389.569.000,00	452.792.000,00	116,23	927.733.588,00
DBH PPh Pasal 21	1.427.411.000,00	1.682.416.000,00	117,86	1.429.547.843,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON	0,00	0,00	0,00	54.647.130,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	106.196.000,00	120.049.000,00	113,04	141.434.214,00

5.1.1.2.1b Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	TA 2024	TA 2023
	Rp2.112.952.000,00	Rp2.658.452.068,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam tahun 2024 senilai Rp2.112.952.000,00 dari target anggaran senilai Rp2.096.773.000,00 atau 100,77%. Jumlah tersebut mengalami penurunan senilai Rp545.500.068,00 atau 20,52% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp2.658.452.068,00. Dana bagi hasil sumber daya alam tersebut berasal dari DBH SDA perusahaan panas bumi, DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalti dan DBH SDA perikanan. Realisasi pendapatan bagi hasil pajak ini dapat digambarkan sebagai berikut.

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.8 Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.096.773.000,00	2.112.952.000,00	100,77	2.658.452.068,00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	30.996.000,00	46.751.000,00	150,83	49.953.850,00
DBH SDA Mineral dan Batubara- <i>Landrent</i>	0,00	0,00	0,00	9.943.467,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalti	37.969.000,00	38.393.000,00	101,12	2.933.485,00
DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	6.055,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.027.808.000,00	2.027.808.000,00	100,00	2.595.615.211,00

5.1.1.2.1c Dana Alokasi Umum (DAU) **TA 2024**
Rp373.274.825.957,00 **TA 2023**
Rp353.576.035.296,00

Dana Alokasi Umum adalah dana dari Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi Dana Alokasi Umum tahun 2023 senilai Rp373.274.825.957,00 dari target anggaran senilai Rp375.480.211.000,00 atau 99,41%. Jumlah tersebut mengalami penambahan senilai Rp19.698.790.661,00 atau 5,57% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp353.576.035.296,00.

5.1.1.2.1d Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik **TA 2024**
Rp68.132.328.326,00 **TA 2023**
Rp98.108.941.054,00

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan dari penyaluran DAK Fisik antara lain:

- a. Mempercepat penyediaan infrastruktur publik dan penguatan kualitas SDM, terutama melalui bidang pendidikan, kesehatan, air minum, perlindungan sosial, dan konektivitas antar wilayah.
- b. Meningkatkan daya saing melalui inovasi, kemudahan berusaha, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan insentif yang mendukung iklim investasi.
- c. Meningkatkan produktivitas terutama berorientasi ekspor melalui pengembangan potensi ekonomi daerah.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2024 senilai Rp68.132.328.326,00 dari target anggaran senilai Rp68.132.328.326,00 atau 100,00%. Jumlah tersebut mengalami penurunan senilai Rp29.976.612.728,00 atau 30,55% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp98.108.941.054,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi penerimaan dana alokasi khusus fisik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 5.9 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Alokasi Khusus Fisik	68.132.328.326,00	68.132.328.326,00	100,00	98.108.941.054,00
Bidang Pendidikan	12.234.104.208,00	12.234.104.208,00	100,00	23.564.119.573,00
Bidang Kesehatan	10.901.242.668,00	10.901.242.668,00	100,00	14.106.652.481,00
Bidang Jalan	13.981.300.000,00	13.981.300.000,00	100,00	31.210.500.000,00
Bidang Air Minum	11.301.906.200,00	11.301.906.200,00	100,00	3.636.864.000,00
Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Sanitasi	6.060.680.000,00	6.060.680.000,00	100,00	3.184.140.000,00
Bidang Transportasi Perairan	3.306.595.250,00	3.306.595.250,00	100,00	11.909.320.000,00
Bidang Transportasi Perdesaan	10.346.500.000,00	10.346.500.000,00	100,00	10.497.345.000,00

5.1.1.2.1e Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik **TA 2024** **TA 2023**
Rp60.394.477.980,00 **Rp56.153.875.548,00**

Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik Daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

Realisasi DAK Non Fisik tahun 2024 senilai Rp60.394.477.980,00 dari target anggaran senilai Rp56.262.751.256,00 atau 107,34%. Jumlah tersebut mengalami kenaikan senilai Rp4.240.602.432,00 atau 7,55% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp56.153.875.548,00.

Realisasi penerimaan DAK Non Fisik tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.10 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	56.262.751.256,00	60.394.477.980,00	107,34	56.153.875.548,00
BOS Reguler	21.312.360.000,00	21.303.536.124,00	99,96	16.145.360.047,00
BOS Kinerja	435.000.000,00	435.000.000,00	100,00	490.000.000,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD	17.478.756.700,00	21.746.674.000,00	124,42	16.740.941.000,00
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	568.229.000,00	1.524.000.000,00	268,20	1.392.000.000,00
Tunjangan Khusus Guru	4.919.550.700,00	4.668.873.000,00	94,90	3.733.697.000,00
BO Penyelenggaraan PAUD	2.711.960.000,00	2.693.850.000,00	99,33	2.676.847.000,00
BO Pendidikan Kesetaraan	301.880.000,00	287.530.000,00	95,25	288.220.000,00
BOKKB-BOK	5.616.021.849,00	4.816.021.849,00	85,76	10.604.967.501,00
BOKKB-BOKB	1.780.041.375,00	1.780.041.375,00	100,00	2.064.316.000,00
Fasilitasi Penanaman Modal	190.746.769,00	190.746.769,00	100,00	346.853.600,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	376.483.949,00	376.483.949,00	100,00	369.616.400,00
Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	571.720.914,00	571.720.914,00	100,00	880.687.000,00
K2UMK	0,00	0,00	0,00	420.370.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

a. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya**5.1.1.2.a Dana Insentif****Daerah****TA 2024****TA 2023****Rp0,00****Rp18.501.542.000,00**

Insentif Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Realisasi Dana Insentif Daerah tahun 2024 senilai Rp0,00 dari target anggaran senilai Rp0,00 atau 0,00%. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp18.501.542.000,00 karena di tahun 2024 Kabupaten Sabu Raijua tidak mendapat alokasi DID.

5.1.1.2.b Dana Desa**TA 2024****TA 2023****Rp62.797.184.980,00****Rp62.145.670.550,00**

Transfer pemerintah pusat lainnya merupakan penerimaan Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang peruntukan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Realisasi Dana Desa tahun 2024 senilai Rp62.797.184.980,00 dari target anggaran senilai Rp60.575.288.000,00 atau 103,67%. Jumlah tersebut mengalami penambahan senilai Rp651.514.430,00 atau 1,05% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp62.145.670.550,00. Rincian dana desa tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.11 Dana Desa

No	Nama Desa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Desa Menia	1.342.170.000,00	1.205.666.000,00	89,83	1.342.170.000,00
2	Desa Raeloro	918.293.000,00	1.177.603.000,00	128,24	918.293.000,00
3	Desa Nadawawi	1.227.887.000,00	1.368.776.000,00	111,47	1.227.887.000,00
4	Desa Teriwu	1.110.792.000,00	1.097.373.000,00	98,79	1.110.792.000,00
5	Desa Raenalulu	1.215.155.000,00	1.206.067.000,00	99,25	1.215.155.000,00
6	Desa Raedewa	1.060.115.000,00	1.283.565.000,00	121,08	1.010.195.550,00
7	Desa Ledean	911.677.000,00	910.491.000,00	99,87	911.677.000,00
8	Desa Depe	1.067.082.000,00	1.165.986.000,00	109,27	1.067.082.000,00
9	Desa Raemude	1.188.322.000,00	1.182.551.000,00	99,51	1.188.322.000,00
10	Desa Raekore	1.145.565.000,00	1.146.489.000,00	100,08	1.145.565.000,00
11	Desa Raenyale	1.123.292.000,00	1.126.241.000,00	100,26	1.123.292.000,00
12	Desa Raemadia	1.133.115.000,00	1.400.475.000,00	123,60	1.266.938.000,00
13	Desa Delo	1.059.602.000,00	1.048.090.000,00	98,91	1.047.241.800,00
14	Desa Roboaba	959.712.000,00	1.072.591.000,00	111,76	1.093.535.000,00
15	Desa Djadu	926.143.000,00	1.041.031.000,00	112,40	1.059.966.000,00
16	Desa Ledekapak	942.406.000,00	936.444.000,00	99,37	942.406.000,00
17	Desa Titinalede	931.860.000,00	926.402.000,00	99,41	931.860.000,00
18	Desa Bebae	975.675.000,00	960.721.000,00	98,47	1.109.498.000,00
19	Desa Tada	949.195.000,00	1.058.190.000,00	111,48	949.195.000,00
20	Desa Matei	976.149.000,00	965.370.000,00	98,90	976.149.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Desa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
21	Desa Loboaju	1.080.253.000,00	1.071.757.000,00	99,21	1.080.253.000,00
22	Desa Eimadake	1.014.009.000,00	1.001.397.000,00	98,76	981.008.100,00
23	Desa Jiwuwu	1.002.883.000,00	1.115.265.000,00	111,21	1.002.883.000,00
24	Desa Eilode	1.222.878.000,00	1.220.007.000,00	99,77	1.222.878.000,00
25	Desa Eimau	934.987.000,00	1.240.214.000,00	132,65	934.987.000,00
26	Desa Lobodei	879.915.000,00	981.208.000,00	111,51	879.915.000,00
27	Desa Bodae	914.616.000,00	1.075.393.000,00	117,58	914.616.000,00
28	Desa Keduru	1.083.860.000,00	828.352.000,00	76,43	1.083.860.000,00
29	Desa Kujiratu	812.759.000,00	911.377.000,00	112,13	812.759.000,00
30	Desa Loborai	759.257.000,00	765.109.000,00	100,77	759.257.000,00
31	Desa Huwaga	993.160.000,00	833.214.000,00	83,90	947.844.000,00
32	Desa Eiada	828.834.000,00	929.141.000,00	112,10	828.834.000,00
33	Desa Keliha	876.484.000,00	977.331.000,00	111,51	876.484.000,00
34	Desa Raerobo	1.008.774.000,00	993.345.000,00	98,47	1.008.774.000,00
35	Desa Mehona	1.173.618.000,00	1.167.024.000,00	99,44	1.307.441.000,00
36	Desa Waduwalla	826.298.000,00	1.053.727.000,00	127,52	826.298.000,00
37	Desa Ledeke	980.784.000,00	972.575.000,00	99,16	980.784.000,00
38	Desa Eilogo	928.723.000,00	921.388.000,00	99,21	928.723.000,00
39	Desa Deme	1.101.189.000,00	866.284.980,00	78,67	1.081.070.100,00
40	Desa Kotahawu	975.532.000,00	970.013.000,00	99,43	1.109.355.000,00
41	Desa Dainao	1.004.038.000,00	997.181.000,00	99,32	1.004.038.000,00
42	Desa Eikare	878.010.000,00	881.478.000,00	100,39	869.409.000,00
43	Desa Loborui	960.015.000,00	940.790.000,00	98,00	960.015.000,00
44	Desa Hallapadji	1.104.732.000,00	942.496.000,00	85,31	1.238.555.000,00
45	Desa Ledetalo	949.782.000,00	918.587.000,00	96,72	1.083.605.000,00
46	Desa Lobohe	1.193.160.000,00	1.184.668.000,00	99,29	1.193.160.000,00
47	Desa Molie	1.213.605.000,00	1.326.934.000,00	109,34	1.213.605.000,00
48	Desa Daieko	1.219.930.000,00	1.460.588.000,00	119,73	1.219.930.000,00
49	Desa Pedarro	1.498.867.000,00	1.492.937.000,00	99,60	1.498.867.000,00
50	Desa Tanajawa	1.171.482.000,00	1.270.903.000,00	108,49	1.305.305.000,00
51	Desa Ledee	1.292.508.000,00	1.250.501.000,00	96,75	1.426.331.000,00
52	Desa Wadumaddi	1.074.273.000,00	1.068.672.000,00	99,48	1.074.273.000,00
53	Desa Lederaga	980.001.000,00	975.793.000,00	99,57	980.001.000,00
54	Desa Gurimonearu	885.979.000,00	890.873.000,00	100,55	885.979.000,00
55	Desa Ramedue	1.117.035.000,00	1.103.975.000,00	98,83	1.117.035.000,00
56	Desa Bolua	1.307.723.000,00	1.400.077.000,00	107,06	1.441.546.000,00
57	Desa Kolorae	1.138.894.000,00	1.239.316.000,00	108,82	1.272.717.000,00
58	Desa Ballu	1.022.234.000,00	1.277.172.000,00	124,94	1.156.057.000,00
TOTAL		60.575.288.000,00	62.797.184.980,00	103,67	62.145.670.550,00

5.1.1.2c Insentif

TA 2024

TA 2023

Fiskal

Rp27.149.169.000,00

Rp6.212.215.000,00

Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan meliputi kategori penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah. Besaran alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 tahun 2024. Tahun 2024 Kabupaten Sabu Raijua mendapat penghargaan di 2 (dua) kategori yakni kategori kinerja penurunan stunting sebesar Rp5.841.812.000,00 dan kategori kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp5.700.351.000,00. Sedangkan nilai sebesar Rp15.607.006.000,00 merupakan Insentif Fiskal yang di berikan tidak melalui PMK khusus dan diberikan lewat alokasi TKDD Kabupaten Sabu Raijua.

Realisasi Dana Insentif Fiskal tahun 2024 senilai Rp27.149.169.000,00 dari target anggaran senilai Rp27.149.169.000,00 atau 100,00%. Jumlah tersebut mengalami penambahan senilai Rp20.936.954.000,00 atau 337,03% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp6.212.215.000,00.

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Provinsi

5.1.1.2.3a Pendapatan Bagi Hasil	TA 2024	TA 2023
	Rp19.245.457.310,00	Rp17.634.880.577,00

Realisasi pendapatan bagi hasil pajak provinsi tahun 2024 senilai Rp19.245.457.310,00 dari target anggaran senilai Rp22.680.162.243,00 atau 84,86%. Jumlah tersebut mengalami penambahan senilai Rp1.610.576.733,00 atau 9,13% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp17.634.880.577,00. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.12 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
DBH Pajak Kendaraan Bermotor	4.885.506.677,00	3.612.650.044,00	73,95	2.123.224.481,00
DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.526.286.934,00	1.963.168.362,00	77,71	2.254.735.407,00
DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.101.198.706,00	5.888.740.591,00	82,93	5.774.124.896,00
DBH Pajak Air Permukaan	2.817.092,00	2.337.546,00	82,98	2.637.495,00
DBH Pajak Rokok	8.164.352.834,00	7.778.560.767,00	95,27	7.480.158.298,00
Jumlah	22.680.162.243,00	19.245.457.310,00	84,86	17.634.880.577,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	TA 2024	TA 2023
	Rp5.912.156.897,00	Rp7.238.483.220,00

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2024 senilai Rp5.912.156.897,00 dari target senilai Rp7.591.973.593,00 atau 77,87%. Jumlah tersebut mengalami pengurangan senilai Rp1.326.326.323,00 atau 18,32% dibanding realisasi tahun 2023 senilai Rp7.238.483.220,00. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini merupakan realisasi pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan yang sah secara rinci terdiri atas:

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.1.3a Pendapatan Hibah	TA 2024	TA 2023
		Rp874.951.500,00

Pendapatan hibah termasuk sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Pendapatan Hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2024 berupa sumbangan pihak ketiga.

Realisasi pendapatan hibah tahun 2024 senilai Rp874.951.500,00 dari target anggaran senilai Rp1.315.800.000,00 atau 66,50%. Jumlah tersebut mengalami penurunan senilai Rp454.597.500,00 atau 34,19% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp1.329.549.000,00.

Sumbangan pihak ketiga senilai Rp874.951.500,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari:

- 1) Penjualan Bawang Merah senilai Rp1.490.000,00;
- 2) KSU Sandi Mandiri pengelola Bus Transdes senilai Rp82.000.000,00;
- 3) Penjualan Rumput Laut Kering Rp717.066.500,00; dan
- 4) Proses pengadaan barang dan jasa senilai Rp74.395.000,00.

5.1.1.3b Lain-lain Pendapatan	TA 2024	TA 2023
		Rp5.037.205.397,00

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah pendapatan hibah dana BOSP, pendapatan atas pengembalian hibah dan pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD.

Realisasi pendapatan lainnya tahun 2024 senilai Rp5.037.205.397,00 dari target anggaran senilai Rp6.276.173.593,00 atau 80,26%. Jumlah tersebut mengalami pengurangan senilai Rp871.728.823,00 atau 14,75% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp5.908.934.220,00.

- 1) Pendapatan atas pengembalian hibah senilai Rp110.878.833,00 berasal dari pengembalian dana hibah KPA tahun 2023 senilai Rp640,00, pengembalian dana hibah Dekranasda tahun 2023 senilai Rp275.383,00, pengembalian dana hibah PKK Kabupaten tahun 2023 senilai Rp110.602.810,00.
- 2) Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Rincian pendapatan dana kapitasi tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.13 Pendapatan Dana Kapitasi

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Puskesmas Seba	2.642.588.738,00	1.698.178.263,00	93,14	2.262.787.574,00
2	Puskesmas Bolou	634.276.470,00	509.324.127,00	85,05	589.528.457,00
3	Puskesmas Eilogo	602.891.059,00	624.728.389,00	67,69	568.427.646,00
4	Puskesmas Daieko	1.064.347.429,00	964.203.627,00	76,12	1.047.656.800,00
5	Puskesmas Ledunu	660.366.478,00	558.213.542,00	103,23	708.505.856,00
6	Puskesmas Eimadake	560.824.586,00	571.678.616,00	90,31	590.517.694,00
	Jumlah	6.165.294.760,00	4.926.326.564,00	86,35	5.767.424.027,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.2 Belanja

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II huruf B poin 5, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp665.029.611.849,33 dari anggaran senilai Rp738.332.362.739,10 atau 90,07%. Jumlah tersebut mengalami penambahan senilai Rp34.051.908.018,33 atau 5,40% dari realisasi belanja tahun 2023 senilai Rp630.977.703.831,00.

Belanja daerah tahun 2024 yang disajikan dalam LRA pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mencakup belanja yang dibayarkan dari RKUD dan tidak melalui rekening umum daerah (non RKUD). Belanja non RKUD terdapat pada sekolah (dana BOSP), puskesmas (dana JKN dan BOK), lembaga PAUD dan Kesetaraan (BOP) dan desa (dana desa). Belanja non RKUD tahun 2024 yang tidak dibayarkan melalui kas umum daerah senilai Rp98.029.231.526,96 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja dana BOS reguler dan kinerja SD senilai Rp13.783.484.723,00;
2. Belanja dana BOS reguler dan kinerja SMP senilai Rp7.982.772.500,00;
3. Belanja dana kapitasi JKN senilai Rp5.521.467.453,96;
4. Belanja dana BOK senilai Rp4.952.441.870,00;
5. Dana desa senilai Rp62.797.184.980,00;
6. Dana BOP PAUD dan Kesetaraan senilai Rp2.704.350.000,00; dan
7. Dana BOP Kesetaraan senilai Rp287.530.000,00.

Realisasi belanja tahun anggaran 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.14 Realisasi Belanja

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja	738.332.362.739,10	665.029.611.849,33	90,07	630.977.703.831,00
Belanja Operasi	489.851.679.064,10	426.909.601.857,96	87,15	387.560.224.506,00
Belanja Modal	143.706.621.695,00	136.951.565.031,37	95,30	144.716.363.178,00
Belanja Tak Terduga	5.200.000.000,00	99.500.000,00	1,91	208.951.900,00
Belanja Transfer	99.574.061.980,00	101.068.944.960,00	101,50	98.492.164.247,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua yang dapat memberi manfaat jangka pendek. Realisasi

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

belanja operasi tahun 2024 senilai Rp426.909.601.857,96 dari anggaran senilai Rp489.851.679.064,10 atau 87,15%. Jumlah tersebut mengalami penambahan senilai Rp39.349.377.351,96 atau 10,15% dari realisasi belanja tahun 2023 senilai Rp387.560.224.506,00.

Belanja operasi non RKUD tahun 2024 yang disajikan dalam LRA pemerintah Kabupaten Sabu Raijua senilai Rp26.891.982.446,96 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dana BOS SD senilai Rp10.399.883.723,00;
2. Dana BOS SMP senilai Rp6.622.520.900,00;
3. Dana Kapitasi JKN senilai Rp4.917.135.953,96; dan
4. Dana BOK senilai Rp4.952.441.870,00.

Realisasi belanja operasi tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.15 Belanja Operasi

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
BELANJA OPERASI	489.851.679.064,10	426.909.601.857,96	87,15	387.560.224.506,00
Belanja Pegawai	279.472.751.098,10	238.912.266.079,00	85,49	187.907.607.342,00
Belanja Barang dan Jasa	176.595.982.446,00	156.233.030.557,96	88,47	179.516.498.520,00
Belanja Hibah	29.607.195.520,00	27.662.555.221,00	93,43	14.681.600.644,00
Belanja Bantuan Sosial	4.175.750.000,00	4.101.750.000,00	98,23	5.454.518.000,00

Rincian jenis belanja operasi tahun 2024 dan tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	TA 2024	TA 2023
	Rp238.912.266.079,00	Rp187.907.607.342,00

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 senilai Rp238.912.266.079,00 dari anggaran Rp279.472.751.098,10 atau 85,49%. Jumlah tersebut mengalami penambahan senilai Rp51.004.658.737,00 atau 27,14% dibandingkan realisasi tahun 2023 senilai Rp187.907.607.342,00.

Belanja Pegawai non RKUD tahun 2024 yang disajikan dalam LRA pemerintah Kabupaten Sabu Raijua senilai Rp3.485.200.300,00 dapat dirinci sebagai berikut.

1. Dana BOSP SD senilai Rp2.255.900.300,00;
2. Dana BOSP SMP senilai Rp1.195.100.000,00; dan
3. Dana Kapitasi JKN senilai Rp34.200.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Belanja Pegawai digunakan untuk mencatat belanja gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dan Belanja Pegawai BOSP. Secara lebih rinci realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 dan 2023 dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 5.16 Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Pegawai	279.472.751.098,10	238.912.266.079,00	85,49	187.907.607.342,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	177.008.193.187,10	150.791.332.242,00	85,19	21.987.490.159,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	50.204.014.758,00	39.020.713.722,00	77,72	28.996.066.529,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40.891.363.719,00	37.893.240.219,00	92,67	26.644.128.425,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.309.823.274,00	7.201.619.538,00	98,52	7.150.150.973,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	178.016.160,00	173.206.169,00	97,30	172.591.256,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	410.880.000,00	381.153.889,00	92,77	410.880.000,00
Belanja Pegawai BOSP	3.470.460.000,00	3.451.000.300,00	99,44	2.546.300.000,00

Rincian realisasi Belanja Pegawai per SKPD dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.17 Realisasi Belanja Pegawai per SKPD

No	Nama Unit Organisasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	138.224.825.370,10	118.181.329.708,00	85,50	92.539.600.663,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	227.506.512,00	151.879.455,00	66,76	8.597.967.577,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	53.083.919.017,00	45.818.805.730,00	86,31	22.711.587.294,00
4	Puskesmas Ledunu	156.190.000,00	127.045.027,00	81,34	5.700.000,00
5	Puskesmas Daieko	189.444.000,00	171.020.232,00	90,27	5.700.000,00
6	Puskesmas Eilogo	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	5.700.000,00
7	Puskesmas Seba	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	5.700.000,00
8	Puskesmas Eimadake	139.023.000,00	127.010.868,00	91,36	5.700.000,00
9	Puskesmas Bolou	148.287.000,00	123.520.592,00	83,30	5.700.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.711.544.098,00	3.893.379.346,00	82,63	3.735.246.673,00
11	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	1.926.640.557,00	1.444.188.140,00	74,96	1.473.889.251,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	3.351.435.030,00	2.913.632.349,00	86,94	2.913.215.530,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.721.864.433,00	1.205.662.513,00	70,02	916.709.535,00
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.023.937.700,00	1.621.511.792,00	80,12	1.628.555.036,00
15	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil	2.152.754.327,00	2.079.677.569,00	96,61	1.730.936.813,00

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Unit Organisasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Menengah Dan Tenaga Kerja				
16	Dinas Pertanian Dan Pangan	7.359.141.309,00	7.017.911.895,00	95,36	3.375.969.598,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	1.811.509.800,00	1.534.411.121,00	84,70	1.505.993.264,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.243.601.001,00	1.987.480.863,00	88,58	1.530.644.776,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.126.305.937,00	2.501.556.144,00	80,02	1.999.202.484,00
20	Dinas Perhubungan	1.918.655.565,00	1.386.246.165,00	72,25	1.507.925.501,00
21	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.040.287.590,00	1.602.825.984,00	78,56	1.483.955.853,00
22	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Perdagangan	2.163.549.266,00	1.909.520.473,00	88,26	2.015.393.396,00
23	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.489.552.794,00	1.303.810.617,00	87,53	1.133.775.251,00
24	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.852.037.630,00	1.468.833.979,00	79,31	1.195.090.719,00
25	Dinas Pariwisata	1.326.417.982,00	1.208.669.254,00	91,12	1.054.297.901,00
26	Bagian Pemerintahan	52.950.000,00	51.340.000,00	96,96	49.333.000,00
27	Bagian Kesejahteraan Rakyat	61.544.000,00	58.662.000,00	95,32	66.260.500,00
28	Bagian Hukum	37.644.000,00	36.644.000,00	97,34	38.844.000,00
29	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	37.810.000,00	37.810.000,00	100,00	26.880.000,00
30	Bagian Administrasi Pembangunan	289.958.000,00	285.455.000,00	98,45	313.539.000,00
31	Bagian Umum	9.448.266.642,00	7.134.433.241,00	75,51	7.157.999.990,00
32	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	38.444.000,00	38.444.000,00	100,00	38.969.000,00
33	Bagian Organisasi	36.644.000,00	36.644.000,00	100,00	39.975.000,00
34	Sekretariat DPRD	9.648.757.701,00	9.057.803.543,00	93,88	8.916.033.312,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.968.429.568,00	1.584.290.197,00	80,48	1.427.172.437,00
36	Badan Keuangan Daerah	4.822.060.341,00	3.561.204.396,00	73,85	3.245.261.090,00
37	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan	2.381.864.708,00	2.118.815.187,00	88,96	1.859.389.282,00
38	Inspektorat Daerah	2.079.350.108,00	1.743.651.341,00	83,86	1.669.927.347,00
39	Kecamatan Sabu Barat	2.623.332.977,00	2.131.958.780,00	81,27	1.756.017.420,00
40	Kecamatan Sabu Timur	3.238.180.498,00	2.972.082.938,00	91,78	2.219.656.349,00
41	Kecamatan Sabu Liae	1.801.321.043,00	1.700.120.643,00	94,38	1.108.229.422,00
42	Kecamatan Hawu Mehara	1.878.308.086,00	1.784.040.233,00	94,98	1.348.986.293,00
43	Kecamatan Raijua	2.796.982.570,00	2.238.660.319,00	80,04	1.429.137.102,00
44	Kecamatan Sabu Tengah	1.869.007.442,00	1.635.570.827,00	87,51	1.311.768.976,00
45	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	962.065.496,00	913.305.618,00	94,93	800.070.707,00
	Total	279.472.751.098,10	238.912.266.079,00	85,49	187.907.607.342,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pada tahun 2024 terdapat Belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang tidak dapat direalisasikan disebabkan karena dokumen TPP yang disampaikan ke Badan Keuangan Daerah diambil oleh Kejaksaan Negeri Sabu Raijua pada tanggal 26 April 2024 untuk proses penyidikan, sampai batas waktu terakhir berkas tersebut belum juga dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Sabu Raijua dan Dinas PKKO tidak bisa memproses pencairan TPP sebelum ada Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kejaksaan.

	TA 2024	TA 2023
5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	Rp156.233.030.557,96	Rp179.516.498.520,00

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 senilai Rp156.233.030.557,96 dari anggaran Rp176.595.982.446,00 atau 88,47%. Jumlah tersebut mengalami pengurangan senilai Rp23.283.467.962,04 atau 12,97% dibandingkan realisasi tahun 2023 senilai Rp179.516.498.520,00. Belanja barang dan jasa non RKUD tahun 2023 yang disajikan dalam LRA pemerintah Kabupaten Sabu Raijua senilai Rp23.406.782.146,96 dapat dirinci sebagai berikut.

1. Dana BOSP SD senilai Rp8.143.983.423,00;
2. Dana BOSP SMP senilai Rp5.427.420.900,00;
3. Dana Kapitasi JKN senilai Rp4.882.935.953,96; dan
4. Dana BOK senilai Rp4.952.441.870,00.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk mencatat belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan belanja barang dan jasa dana BOSP. Secara lebih rinci realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 dan 2023 dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 5.18 Realisasi Belanja Barang Jasa

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	176.595.982.446,00	156.233.030.557,96	88,47	179.516.498.520,00
Belanja Barang	35.945.238.468,00	30.955.207.427,00	86,12	53.022.550.004,00
Belanja Jasa	65.390.994.274,00	57.166.778.255,96	87,42	65.394.191.923,00
Belanja Pemeliharaan	15.362.361.977,00	14.281.150.646,00	92,96	12.506.794.845,00
Belanja Perjalanan Dinas	45.164.951.000,00	39.264.699.786,00	86,94	37.253.788.902,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	970.064.639,00	961.697.737,00	99,14	322.516.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	13.572.109.088,00	13.571.404.323,00	99,99	11.016.656.846,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	190.263.000,00	32.092.383,00	16,86	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.19 Realisasi Belanja Barang Jasa per SKPD

No	Nama Unit Organisasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	36.113.205.793,00	34.441.420.514,00	95,37	36.075.951.261,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	10.901.096.502,00	8.557.718.158,00	78,50	9.132.788.617,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	19.257.235.750,00	16.578.522.190,00	86,09	18.572.521.866,00
4	Puskesmas Ledunu	1.211.738.640,00	1.099.807.204,00	90,76	1.471.864.785,00
5	Puskesmas Daieko	1.868.833.385,00	1.721.748.618,00	92,13	2.489.953.831,00
6	Puskesmas Eilogo	1.412.050.892,00	1.354.920.600,96	95,95	1.839.431.545,00
7	Puskesmas Seba	3.576.529.852,00	2.900.164.066,00	81,09	3.644.814.121,00
8	Puskesmas Eimadake	1.188.667.806,00	1.140.582.229,00	95,95	1.471.232.124,00
9	Puskesmas Bolou	1.241.488.166,00	1.092.358.387,00	87,99	1.609.112.214,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.306.909.270,00	3.400.239.164,00	78,95	4.618.850.466,00
11	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	1.733.748.700,00	1.604.522.249,00	92,55	1.135.447.905,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	3.170.622.800,00	3.108.850.989,00	98,05	2.484.749.887,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.462.139.000,00	1.452.597.840,00	99,35	1.445.610.292,00
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.590.838.000,00	2.480.905.226,00	95,76	2.817.805.447,00
15	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	1.636.114.000,00	1.540.515.119,00	94,16	2.708.079.674,00
16	Dinas Pertanian Dan Pangan	4.926.173.550,00	4.901.227.833,00	99,49	8.404.884.823,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	1.847.900.098,00	1.552.150.138,00	84,00	1.326.398.140,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	815.670.875,00	814.507.119,00	99,86	868.860.536,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	985.895.700,00	968.139.616,00	98,20	1.007.866.903,00
20	Dinas Perhubungan	5.272.680.900,00	4.426.349.386,00	83,95	4.447.258.817,00
21	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.833.295.200,00	2.524.308.220,00	89,09	2.747.667.769,00
22	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Perdagangan	3.607.184.000,00	3.138.459.512,00	87,01	10.619.291.525,00
23	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	735.180.000,00	715.205.828,00	97,28	875.348.498,00
24	Dinas Kelautan Dan Perikanan	4.666.820.000,00	2.768.502.834,00	59,32	7.204.898.455,00
25	Dinas Pariwisata	2.808.744.500,00	2.738.654.972,00	97,50	3.286.931.980,00
26	Bagian Pemerintahan	1.031.442.400,00	1.015.834.176,00	98,49	894.747.745,00
27	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.417.054.200,00	1.375.961.217,00	97,10	1.191.561.018,00
28	Bagian Hukum	855.987.300,00	776.658.876,00	90,73	674.057.794,00
29	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	386.310.900,00	353.001.734,00	91,38	420.407.433,00
30	Bagian Administrasi Pembangunan	554.980.900,00	527.325.869,00	95,02	595.873.939,00
31	Bagian Umum	13.002.336.666,00	11.606.177.594,00	89,26	12.292.216.553,00

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Unit Organisasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
32	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	502.734.100,00	463.394.109,00	92,17	587.716.607,00
33	Bagian Organisasi	572.894.800,00	568.172.442,00	99,18	479.205.439,00
34	Sekretariat DPRD	17.619.816.400,00	14.146.101.201,00	80,29	12.713.773.095,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.923.927.300,00	3.775.941.032,00	96,23	3.213.928.310,00
36	Badan Keuangan Daerah	4.356.418.401,00	3.730.777.800,00	85,64	2.936.966.420,00
37	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan	3.566.543.200,00	2.937.860.783,00	82,37	2.553.857.306,00
38	Inspektorat Daerah	1.510.192.900,00	1.053.364.013,00	69,75	884.592.497,00
39	Kecamatan Sabu Barat	760.506.200,00	744.486.930,00	97,89	723.627.610,00
40	Kecamatan Sabu Timur	1.213.449.100,00	1.208.880.660,00	99,62	1.338.056.000,00
41	Kecamatan Sabu Liae	478.662.600,00	442.347.764,00	92,41	400.687.180,00
42	Kecamatan Hawu Mehara	624.384.400,00	610.767.000,00	97,82	500.692.947,00
43	Kecamatan Raijua	1.558.957.000,00	1.535.322.300,00	98,48	1.848.957.000,00
44	Kecamatan Sabu Tengah	380.909.600,00	370.354.033,00	97,23	460.961.380,00
45	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.107.710.700,00	1.967.923.013,00	93,37	2.496.990.766,00
Total		176.595.982.446,00	156.233.030.557,96	88,47	179.516.498.520,00

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Realisasi 2024 Realisasi 2023
Rp27.662.555.221,00 Rp14.681.600.644,00

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi belanja hibah tahun 2024 senilai Rp27.662.555.221,00 dari anggaran Rp29.607.195.520,00 atau 93,43%. Jumlah tersebut mengalami penambahan senilai Rp12.980.954.577,00 atau 88,42% dibandingkan realisasi tahun 2023 senilai Rp14.681.600.644,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja hibah tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.20 Realisasi Belanja Hibah

Penerima Hibah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.722.460.000,00	2.704.350.000,00	99,33	2.666.347.000,00
BOP Pendidikan Kesetaraan	301.880.000,00	287.530.000,00	95,25	288.220.000,00
Dharma Wanita Persatuan (DWP)	250.000.000,00	233.016.305,00	93,21	222.454.478,00
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	245.000.000,00	245.000.000,00	100	245.000.000,00
Komite Olahraga Nasional Indonesia	1.000.000.000,00	787.000.400,00	78,7	997.360.000,00
Kwarcab Gerakan Pramuka	300.000.000,00	219.739.900,00	73,25	274.978.000,00
Palang Merah Indonesia (PMI)	1.000.000.000,00	890.965.611,00	89,1	904.097.414,00
Partai Politik	599.855.520,00	522.871.000,00	87,17	483.310.000,00
Dewan Kerajinan Nasional Daerah	500.000.000,00	483.572.595,00	96,71	500.000.000,00
Perpustakaan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	930.000.000,00	886.373.410,00	95,31	930.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Penerima Hibah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Panitia Pembangunan Gedung Serba Guna Sinode GMIT XXXV Tahun 2023	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (LP3K)	100.000.000,00	100.000.000,00	100	100.000.000,00
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	100.000.000,00	99.990.000,00	99,99	97.908.000,00
Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (LPPD)	123.000.000,00	121.666.000,00	98,92	125.000.000,00
Dana Hibah Pilkada	9.810.000.000,00	9.810.000.000,00	100	6.240.000.000,00
Pelayanan Kerohanian dan Pengembangan Spiritualitas pada RSUD	70.000.000,00	70.000.000,00	100	70.000.000,00
Hibah Pelaksanaan Kegiatan Kajian Studi Kelayakan Pendirian (PSDKU) Politeknik Negeri Jember di Kab. Sabu Raijua	1.500.000.000,00	184.552.000,00	12,3	236.925.752,00
Dana Hibah Kepolisian Resor Sabu Raijua	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	100	0,00
Hibah Bawaslu	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	100	0,00
Hibah Yayasan Kusuma Cahaya Global	225.000.000,00	185.928.000,00	82,63	0,00
Kelompok Sanggar Tari	30.000.000,00	30.000.000,00	100	0,00
Jumlah	29.607.195.520,00	27.662.555.221,00	93,43	14.681.600.644,00

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial Realisasi 2024 Realisasi 2023
Rp4.101.750.000,00 **Rp5.454.518.000,00**

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Bantuan sosial berupa transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan agama.

Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2024 senilai Rp4.101.750.000,00 dari anggaran senilai Rp4.175.750.000,00 atau 98,23%. Jumlah tersebut mengalami pengurangan senilai Rp1.352.768.000,00 atau 24,80% dari realisasi belanja bantuan sosial tahun 2023 senilai Rp5.454.518.000,00.

Rincian belanja bantuan sosial tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Bantuan kepada kelompok usaha pandai besi sesuai SK Nomor 100.3.3.2/631/SHK-SR/2024 tanggal 19 November 2024 senilai Rp10.000.000,00;
2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
 - a. Bantuan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sebesar Rp130.000.000,00, terdiri atas SK Nomor 261/KEP/HK/2024 tanggal 21 Mei 2024 senilai Rp125.000.000,00 dan SK Nomor 100.3.3.2/605/SHK-SR/2024 tanggal 24 Oktober 2024 senilai Rp5.000.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- b. Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebesar Rp1.080.000.000,00, terdiri atas SK Nomor 432/KEP/HK/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 senilai Rp920.000.000,00, SK Nomor 100.3.3.2/629/SHK-SR/2024 tanggal 19 November 2024 senilai Rp120.000.000,00 dan SK Nomor 100.3.3.2/652/SHK-SR/2024 tanggal 18 Desember 2024 senilai Rp40.000.000,00;
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Bantuan Rumah Swadaya Kabupaten (Bansos BRSK) Dana Insentif Fiskal sebesar Rp440.000.000,00, terdiri atas SK Nomor 296/KEP/HK/2024 Tanggal 5 Juni 2024 senilai Rp240.000.000,00 dan SK Nomor 392/KEP/HK/2024 Tanggal 17 Juli 2024 senilai Rp200.000.000,00;
4. Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja
 - a. Bantuan bagi individu dan kelompok pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebesar Rp1.342.250.000,00, terdiri atas SK Nomor 394/KEP/HK/2024 tanggal 17 Juli 2024 senilai Rp1.115.750.000,00 dan SK Nomor 100.3.3.2/633/SHK-SR/2024 tanggal 19 November 2024 senilai Rp226.500.000,00;
 - b. Bantuan Sosial uang yang direncanakan bagi individu dan kelompok pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sebesar Rp547.000.000,00 terdiri atas SK Nomor 394/KEP/HK/2024 tanggal 17 Juli 2024 senilai Rp475.000.000,00 dan SK Nomor 100.3.3.2/633/SHK-SR/2024 tanggal 19 November 2024 senilai Rp72.000.000,00;
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - a. Bantuan mahasiswa kedokteran sesuai SK Nomor 162/KEP/HK/2024 tanggal 14 Februari 2024 senilai Rp160.000.000,00;
 - b. Bantuan bagi Masyarakat tidak layak huni dan mahasiswa sesuai SK Nomor 148/KEP/HK/2024 tanggal 12 Februari 2024 senilai Rp332.500.000,00;
 - c. Bantuan bagi Mahasiswa sesuai SK Nomor 100.3.3.2/585/SHK-SR/2024 Tanggal 8 Oktober 2024 senilai Rp10.000.000,00;
 - d. Bantuan Sosial yang direncanakan bagi Lembaga Non Pemerintah Bidang Keagamaan sesuai SK Nomor 401/KEP/HK/2024 Tgl 23 Juli 2024 senilai Rp50.000.000,00.

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut. berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai manfaat lebih dari satu tahun, nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri/karakteristik Aset Lainnya adalah: tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, nilainya relatif material.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah;
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan anggaran dalam Belanja Modal senilai Rp143.706.621.695,00 yang direalisasikan senilai Rp136.951.565.031,37 atau 95,30%. Realisasi belanja modal tahun 2024 berkurang senilai Rp7.764.798.146,63 atau 5,37% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp144.716.363.178,00. Belanja Modal Kabupaten Sabu Raijua terdiri atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja modal aset tetap lainnya. Anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2024 dan 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.21 Realisasi Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
BELANJA MODAL	143.706.621.695,00	136.951.565.031,37	95,30	144.716.363.178,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.918.656.498,00	18.526.761.862,00	93,01	22.836.344.170,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	21.804.791.354,00	19.844.122.737,37	91,01	32.522.108.837,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	99.037.187.243,00	97.259.462.732,00	98,20	87.803.912.171,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.945.986.600,00	1.321.217.700,00	44,85	1.547.998.000,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

TA 2024

TA 2023

Rp0,00

Rp6.000.000,00

Belanja modal tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tidak mengalokasikan anggaran Belanja Modal Tanah tahun 2024 sedangkan realisasi tahun 2023 senilai Rp6.000.000,00.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

TA 2024

TA 2023

Rp18.526.761.862,00

Rp22.836.344.170,00

Belanja modal peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan anggaran Belanja Modal Peralatan Mesin tahun 2024 senilai Rp19.918.656.498,00 yang direalisasikan senilai Rp18.526.761.862,00 atau 93,01%. Realisasi tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp4.309.582.308,00 atau 18,87% dibanding realisasi tahun 2023 senilai Rp22.836.344.170,00.

Belanja modal peralatan dan mesin non RKUD tahun 2024 dalam LRA pemerintah Kabupaten Sabu Raijua senilai Rp4.072.085.400,00, dapat dirinci sebagai berikut.

1. Dana BOSP SD senilai Rp2.591.396.400,00;
2. Dana BOSP SMP senilai Rp876.357.500,00; dan
3. Dana Kapitasi JKN senilai Rp604.331.500,00.

Anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 22 Rincian Belanja Modal Peralatan Mesin

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Alat Besar	1.256.384.000,00	1.144.740.081,00	91,11	34.800.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	8.038.412.000,00	7.245.654.000,00	90,14	11.329.770.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	56.145.000,00	54.440.925,00	96,96	34.700.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	33.243.000,00	33.167.000,00	99,77	18.005.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.453.960.940,00	2.330.228.213,00	94,96	2.241.746.570,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	80.041.000,00	79.108.600,00	98,84	128.807.514,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.662.165.462,00	1.357.172.643,00	81,65	4.929.114.806,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	260.840.000,00	260.734.000,00	99,96	70.742.375,00
Belanja Modal Komputer	2.592.395.200,00	2.545.763.500,00	98,20	2.005.556.567,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	16.865.796,00	7.999.000,00	47,43	990.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	206.798.425,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.468.204.100,00	3.467.753.900,00	99,99	1.835.312.913,00
Jumlah	19.918.656.498,00	18.526.761.862,00	93,01	22.836.344.170,00

Tabel 5.23 Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin per SKPD

No	Nama Unit Organisasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	4.370.723.100,00	4.368.928.900,00	99,96	2.481.668.178,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	1.562.387.893,00	1.560.595.343,00	99,89	1.272.909.564,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.997.758.596,00	2.671.224.725,00	89,11	3.929.427.374,00
4	Puskesmas Ledunu	89.595.860,00	60.822.500,00	67,89	87.125.000,00
5	Puskesmas Daieko	81.813.691,00	78.241.000,00	95,63	133.671.250,00
6	Puskesmas Eilogo	37.309.000,00	37.300.000,00	99,98	62.743.700,00
7	Puskesmas Seba	374.019.700,00	320.431.000,00	85,67	276.950.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Unit Organisasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
8	Puskesmas Eimadake	37.042.000,00	37.042.000,00	100,00	51.598.030,00
9	Puskesmas Bolou	96.643.768,00	70.495.000,00	72,94	44.068.768,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	141.610.000,00	69.210.000,00	48,87	291.151.015,00
11	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	605.902.000,00	605.660.000,00	99,96	0,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	15.885.750,00	15.800.000,00	99,46	7.500.000,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00	35.252.670,00
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	53.649.000,00	53.610.000,00	99,93	129.388.500,00
15	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	404.920.000,00	353.940.000,00	87,41	33.890.000,00
16	Dinas Pertanian Dan Pangan	152.723.000,00	142.611.500,00	93,38	265.333.500,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	324.864.128,00	324.237.800,00	99,81	77.483.000,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	192.729.000,00	192.729.000,00	100,00	10.060.000,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	78.152.600,00	77.945.600,00	99,74	71.207.220,00
20	Dinas Perhubungan	570.583.000,00	565.652.676,00	99,14	11.518.232.550,00
21	Dinas Komunikasi Dan Informatika	153.639.800,00	152.185.800,00	99,05	281.306.104,00
22	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Perdagangan	195.988.476,00	194.989.000,00	99,49	82.644.081,00
23	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	818.892.521,00
24	Dinas Kelautan Dan Perikanan	100.918.600,00	100.866.600,00	99,95	82.605.000,00
25	Dinas Pariwisata	219.796.600,00	217.694.000,00	99,04	174.223.575,00
26	Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	30.700.000,00
27	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Bagian Hukum	12.057.000,00	4.000.000,00	33,18	38.600.000,00
29	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
30	Bagian Administrasi Pembangunan	8.450.000,00	8.450.000,00	100,00	0,00
31	Bagian Umum	4.132.752.928,00	3.423.855.400,00	82,85	174.701.050,00
32	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	34.273.000,00	33.873.000,00	98,83	8.750.000,00
33	Bagian Organisasi	9.390.600,00	9.120.000,00	97,12	22.450.000,00
34	Sekretariat DPRD	2.066.188.208,00	1.996.237.660,00	96,61	1.460.000,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26.664.000,00	26.650.000,00	99,95	46.362.500,00
36	Badan Keuangan Daerah	249.700.000,00	241.936.358,00	96,89	135.830.000,00
37	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan	38.857.000,00	38.828.000,00	99,93	17.600.000,00
38	Inspektoraat Daerah	257.904.700,00	248.975.000,00	96,54	16.000.000,00
39	Kecamatan Sabu Barat	17.750.000,00	17.750.000,00	100,00	21.723.000,00
40	Kecamatan Sabu Timur	49.349.000,00	49.300.000,00	99,90	0,00
41	Kecamatan Sabu Liae	40.732.500,00	40.732.000,00	100,00	12.984.000,00
42	Kecamatan Hawu Mehara	0,00	0,00	0,00	4.860.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Unit Organisasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
43	Kecamatan Raijua	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00	44.302.520,00
44	Kecamatan Sabu Tengah	43.383.000,00	43.383.000,00	100,00	30.447.500,00
45	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	22.549.000,00	21.459.000,00	95,17	10.242.000,00
Total		19.918.656.498,00	18.526.761.862,00	93,01	22.836.344.170,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

TA 2024	TA 2023
Rp19.844.122.737,37	Rp32.522.108.837,00

Belanja modal gedung dan bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan anggaran belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 senilai Rp21.804.791.354,00 yang direalisasikan senilai Rp19.844.122.737,37 atau 91,01%. Realisasi tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp12.677.986.099,63 atau 38,98% dibanding realisasi tahun 2023 senilai Rp32.522.108.837,00.

Rincian belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.24 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.030.626.440,00	1.024.089.800,00	99,37	5.934.906.316,00
Belanja Modal Bangunan Gudang	471.381.750,00	433.106.730,00	91,88	0,00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	8.647.187.371,00	7.724.283.400,00	89,33	8.656.080.669,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	9.758.784.447,00	8.811.748.982,00	90,30	7.206.070.257,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	995.291.346,00	995.291.346,00	100,00	8.690.752.608,00
Belanja Modal Bangunan Industri	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	128.280.550,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	274.000.000,00
Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	465.520.000,00	423.564.479,37	90,99	1.521.736.317,00
Belanja Modal Gedung Tempat Tinggal Lainnya	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Pagar	266.000.000,00	262.038.000,00	98,51	110.282.120,00
Jumlah	21.804.791.354,00	19.844.122.737,37	91,01	32.522.108.837,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.25 Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan per SKPD

No	Nama Unit Organisasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	9.754.784.447,00	8.803.796.517,00	90,25	7.167.304.377,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	95.500.000,00	95.185.782,00	99,67	1.731.616.510,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8.551.687.371,00	7.629.097.618,00	89,21	6.924.464.159,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	277.916.440,00	271.370.265,00	97,64	3.518.316.316,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	471.381.750,00	433.106.730,00	91,88	0,00
6	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
7	Dinas Perhubungan	852.710.000,00	852.710.000,00	100,00	2.690.590.000,00
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Perdagangan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
9	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	995.291.346,00	995.291.346,00	100,00	8.765.252.608,00
10	Dinas Pariwisata	465.520.000,00	423.564.479,37	90,99	1.575.516.867,00
11	Kecamatan Sabu Timur	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	149.048.000,00
12	Kecamatan Raijua	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00	0,00
Total		21.804.791.354,00	19.844.122.737,37	91,01	32.522.108.837,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

	TA 2024	TA 2023
	Rp97.259.462.732,00	Rp87.803.912.171,00

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2024 senilai Rp99.037.187.243,00 yang direalisasikan senilai Rp97.259.462.732,00 atau 98,20%. Realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan senilai Rp9.455.550.561,00 atau 10,77% dibanding realisasi tahun 2023 senilai Rp87.803.912.171,00. Rincian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.26 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Jalan	62.287.674.812,00	62.271.420.559,00	99,97	64.488.242.331,00
Belanja Modal Jembatan	8.167.893.045,00	8.167.893.044,00	100,00	7.452.750.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	9.731.344.226,00	9.422.761.776,00	96,83	5.149.008.000,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	12.420.775.160,00	11.229.932.722,00	90,41	5.317.585.340,00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	6.429.500.000,00	6.167.454.631,00	95,92	3.128.300.000,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	99,53	2.201.500.000,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	100,00	66.526.500,00
Jumlah	99.037.187.243,00	97.259.462.732,00	98,20	87.803.912.171,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.27 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan per SKPD

No	Nama Unit Organisasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	24.690.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	98.539.937.243,00	96.763.464.732,00	98,20	85.524.185.671,00
3	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	264.250.000,00	262.998.000,00	99,53	336.000.000,00
4	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	53.536.500,00
6	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	1.165.500.000,00
7	Kecamatan Sabu Timur	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
8	Kecamatan Raijua	208.000.000,00	208.000.000,00	100,00	0,00
	TOTAL	99.037.187.243,00	97.259.462.732,00	98,20	87.803.912.171,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap **TA 2024** **TA 2023**
Lainnya **Rp1.321.217.700,00** **Rp1.547.998.000,00**

Belanja modal aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan anggaran belanja modal aset tetap lainnya tahun 2024 senilai Rp2.945.986.600,00 yang direalisasikan senilai Rp1.321.217.700,00 atau 44,85%. Realisasi tahun 2024 mengalami pengurangan senilai Rp226.780.300,00 atau 14,65% dibanding realisasi tahun 2023 senilai Rp1.547.998.000,00.

Belanja modal peralatan dan mesin non RKUD tahun 2023 dalam LRA pemerintah Kabupaten Sabu Raijua senilai Rp1.276.098.700,00, dapat dirinci sebagai berikut.

1. Dana BOSP SD senilai Rp792.204.600,00;
2. Dana BOSP SMP senilai Rp483.894.100,00.

Rincian belanja modal aset tetap lainnya tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.28 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00	981.600,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	199.999.800,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.664.284.600,00	45.119.000,00	2,71	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	74.900.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	1.281.702.000,00	1.276.098.700,00	99,56	1.272.116.600,00
Jumlah	2.945.986.600,00	1.321.217.700,00	44,85	1.547.998.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.29 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Nama Unit Organisasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	1.281.702.000,00	1.276.098.700,00	99,56	1.272.116.600,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	74.900.000,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	199.999.800,00
4	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.664.284.600,00	45.119.000,00	2,71	981.600,00
Total		2.945.986.600,00	1.321.217.700,00	44,85	1.547.998.000,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

TA 2024 **TA 2023**
Rp99.500.000,00 **Rp208.951.900,00**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan anggaran belanja tak terduga tahun 2024 senilai Rp5.200.000.000,00 yang direalisasikan senilai Rp99.500.000,00 atau 1,91%. Realisasi tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp109.451.900,00 atau 52,38% dibanding realisasi tahun 2023 senilai Rp208.951.900,00.

Rincian realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2024 dibayarkan untuk belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.30 Rincian Belanja Tak Terduga

Uraian	Jumlah (Rp)
Biaya Pengobatan (7 penerima)	37.500.000,00
Biaya Pendidikan (1 penerima)	7.000.000,00
Biaya fasilitasi pemulangan jenazah	10.000.000,00
Modal usaha (5 penerima)	45.000.000,00
Jumlah	99.500.000,00

5.1.2.4 Belanja Transfer

TA 2024 **TA 2023**
Rp101.068.944.960,00 **Rp98.492.164.247,00**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan anggaran belanja transfer tahun 2024 senilai Rp99.574.061.980,00 yang direalisasikan senilai Rp101.068.944.960,00 atau 101,50%. Realisasi tahun 2024 mengalami penambahan senilai Rp2.576.780.713,00 atau 2,62% dibanding realisasi tahun 2023 senilai Rp98.492.164.247,00.

Rincian belanja transfer dapat dirinci sebagai berikut.

5.1.2.4a Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa tahun 2024 dialokasikan untuk pembayaran bagi hasil tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

mengalokasikan anggaran belanja bagi hasil tahun 2024 senilai Rp676.324.680,00 yang direalisasikan senilai Rp676.324.680,00 atau 100,00%. Realisasi tahun 2024 mengalami penambahan senilai Rp237.446.120,00 atau 54,10% dibanding realisasi tahun 2023 senilai Rp438.878.560,00.

Belanja bagi hasil pajak/retribusi kepada Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagian Bagi Hasil Pajak kepada Desa di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 serta Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2023 tentang Perubahan atas Lampiran Bupati Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2024 tanggal 5 Januari 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024.

Rincian anggaran dan realisasi belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada Pemerintah Desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.31 Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa	676.324.680,00	676.324.680,00	100,00	438.878.560,00
Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	676.324.680,00	676.324.680,00	100,00	438.878.560,00

5.1.2.4b Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

a. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersumber dari APBN

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi Desa, yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa, dilaporkan dalam APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Realisasi belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBN tahun 2024 senilai Rp62.797.184.980 atau 102,44% dari anggaran Rp61.302.302.000,00. Realisasi tahun 2024 mengalami penambahan senilai Rp651.514.430,00 atau 1,05% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp62.145.670.550,00. Rincian Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang bersumber dari APBN tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.32 Dana Desa APBN

No	Nama Desa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Desa Menia	1.085.236.000,00	1.205.666.000,00	111,10	1.342.170.000,00
2	Desa Raeloro	1.177.603.000,00	1.177.603.000,00	100,00	918.293.000,00
3	Desa Nadawawi	1.368.776.000,00	1.368.776.000,00	100,00	1.227.887.000,00
4	Desa Teriwu	1.097.373.000,00	1.097.373.000,00	100,00	1.110.792.000,00
5	Desa Raenalulu	1.206.067.000,00	1.206.067.000,00	100,00	1.215.155.000,00
6	Desa Raedewa	1.163.135.000,00	1.283.565.000,00	110,35	1.010.195.550,00
7	Desa Ledeanana	910.491.000,00	910.491.000,00	100,00	911.677.000,00
8	Desa Depe	1.165.986.000,00	1.165.986.000,00	100,00	1.067.082.000,00
9	Desa Raemude	1.182.551.000,00	1.182.551.000,00	100,00	1.188.322.000,00
10	Desa Raekore	1.146.489.000,00	1.146.489.000,00	100,00	1.145.565.000,00
11	Desa Raenyale	1.126.241.000,00	1.126.241.000,00	100,00	1.123.292.000,00
12	Desa Raemadia	1.280.045.000,00	1.400.475.000,00	109,41	1.266.938.000,00
13	Desa Delo	1.048.090.000,00	1.048.090.000,00	100,00	1.047.241.800,00
14	Desa Roboaba	952.161.000,00	1.072.591.000,00	112,65	1.093.535.000,00
15	Desa Djadu	920.601.000,00	1.041.031.000,00	113,08	1.059.966.000,00
16	Desa Ledekapaka	936.444.000,00	936.444.000,00	100,00	942.406.000,00
17	Desa Titinalede	926.402.000,00	926.402.000,00	100,00	931.860.000,00
18	Desa Bebae	960.721.000,00	960.721.000,00	100,00	1.109.498.000,00
19	Desa Tada	937.760.000,00	1.058.190.000,00	112,84	949.195.000,00
20	Desa Matei	965.370.000,00	965.370.000,00	100,00	976.149.000,00
21	Desa Loboaju	1.071.757.000,00	1.071.757.000,00	100,00	1.080.253.000,00
22	Desa Eimadake	1.001.397.000,00	1.001.397.000,00	100,00	981.008.100,00
23	Desa Jiwuwu	994.835.000,00	1.115.265.000,00	112,11	1.002.883.000,00
24	Desa Eilode	1.220.007.000,00	1.220.007.000,00	100,00	1.222.878.000,00
25	Desa Eimau	1.240.214.000,00	1.240.214.000,00	100,00	934.987.000,00
26	Desa Lobodei	981.208.000,00	981.208.000,00	100,00	879.915.000,00
27	Desa Bodae	1.075.393.000,00	1.075.393.000,00	100,00	914.616.000,00
28	Desa Keduru	828.352.000,00	828.352.000,00	100,00	1.083.860.000,00
29	Desa Kujiratu	911.377.000,00	911.377.000,00	100,00	812.759.000,00
30	Desa Loborai	765.109.000,00	765.109.000,00	100,00	759.257.000,00
31	Desa Huwaga	833.214.000,00	833.214.000,00	100,00	947.844.000,00
32	Desa Eiada	929.141.000,00	929.141.000,00	100,00	828.834.000,00
33	Desa Keluha	977.331.000,00	977.331.000,00	100,00	876.484.000,00
34	Desa Raerobo	993.345.000,00	993.345.000,00	100,00	1.008.774.000,00
35	Desa Mehona	1.167.024.000,00	1.167.024.000,00	100,00	1.307.441.000,00
36	Desa Waduwalla	1.053.727.000,00	1.053.727.000,00	100,00	826.298.000,00
37	Desa Ledeke	972.575.000,00	972.575.000,00	100,00	980.784.000,00
38	Desa Eilogo	921.388.000,00	921.388.000,00	100,00	928.723.000,00
39	Desa Deme	936.992.000,00	866.284.980,00	92,45	1.081.070.100,00
40	Desa Kotahawu	970.013.000,00	970.013.000,00	100,00	1.109.355.000,00
41	Desa Dainao	997.181.000,00	997.181.000,00	100,00	1.004.038.000,00
42	Desa Eikare	881.478.000,00	881.478.000,00	100,00	869.409.000,00
43	Desa Loborui	940.790.000,00	940.790.000,00	100,00	960.015.000,00
44	Desa Hallapadji	942.496.000,00	942.496.000,00	100,00	1.238.555.000,00
45	Desa Ledetalo	918.587.000,00	918.587.000,00	100,00	1.083.605.000,00
46	Desa Lobohede	1.184.668.000,00	1.184.668.000,00	100,00	1.193.160.000,00
47	Desa Molie	1.206.504.000,00	1.326.934.000,00	109,98	1.213.605.000,00
48	Desa Daieko	1.460.588.000,00	1.460.588.000,00	100,00	1.219.930.000,00
49	Desa Pedarro	1.492.937.000,00	1.492.937.000,00	100,00	1.498.867.000,00
50	Desa Tanajawa	1.150.473.000,00	1.270.903.000,00	110,47	1.305.305.000,00
51	Desa Ledeeae	1.130.071.000,00	1.250.501.000,00	110,66	1.426.331.000,00
52	Desa Wadumaddi	1.068.672.000,00	1.068.672.000,00	100,00	1.074.273.000,00
53	Desa Lederaga	975.793.000,00	975.793.000,00	100,00	980.001.000,00
54	Desa Gurimonearu	890.873.000,00	890.873.000,00	100,00	885.979.000,00
55	Desa Ramedue	1.103.975.000,00	1.103.975.000,00	100,00	1.117.035.000,00
56	Desa Bolua	1.279.647.000,00	1.400.077.000,00	109,41	1.441.546.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Desa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
57	Desa Kolorae	1.118.886.000,00	1.239.316.000,00	110,76	1.272.717.000,00
58	Desa Ballu	1.156.742.000,00	1.277.172.000,00	110,41	1.156.057.000,00
TOTAL		61.302.302.000,00	62.797.184.980,00	102,44	62.145.670.550,00

b. Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBD

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua kepada pemerintah desa, bersumber dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten paling sedikit 10%. Alokasi dana desa digunakan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan masyarakat desa melalui ADD, tunjangan aparat desa yang khusus diperuntukkan bagi Kepala Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 58 desa se-Kabupaten Sabu Raijua.

Belanja bantuan keuangan alokasi dana desa yang bersumber dari APBD tahun 2023 direalisasikan senilai Rp37.595.435.300,00 atau 100,00% dari anggaran Rp37.595.435.300,00. Realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan senilai Rp1.717.248.200,00 atau 4,79% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp35.878.187.100,00. Adapun realisasi pembayaran dana Rincian belanja bantuan keuangan ADD yang Bersumber dari APBD tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.33 Alokasi Dana Desa APBD

No	Nama Desa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Anggaran 2023 (Rp)
1	Desa Menia	713.067.298,00	713.067.298,00	100,00	683.459.571,00
2	Desa Raeloro	561.315.298,00	561.315.298,00	100,00	531.707.571,00
3	Desa Nadawawi	696.267.298,00	696.267.298,00	100,00	666.659.571,00
4	Desa Teriwu	698.667.298,00	698.667.298,00	100,00	669.059.571,00
5	Desa Raenalulu	713.067.298,00	713.067.298,00	100,00	683.459.571,00
6	Desa Raedewa	713.067.298,00	713.067.298,00	100,00	683.459.571,00
7	Desa Ledeanan	713.067.298,00	713.067.298,00	100,00	683.459.571,00
8	Desa Depe	713.067.298,00	713.067.298,00	100,00	683.459.571,00
9	Desa Raemude	713.067.298,00	713.067.298,00	100,00	683.459.571,00
10	Desa Raekore	713.067.298,00	713.067.298,00	100,00	683.459.571,00
11	Desa Raenyale	698.667.298,00	698.667.298,00	100,00	669.059.571,00
12	Desa Raemadia	584.715.298,00	584.715.298,00	100,00	555.107.571,00
13	Desa Delo	637.191.298,00	637.191.298,00	100,00	607.583.571,00
14	Desa Roboaba	713.067.298,00	713.067.298,00	100,00	683.459.571,00
15	Desa Djadu	485.439.298,00	485.439.298,00	100,00	455.831.571,00
16	Desa Ledekpaka	637.191.298,00	637.191.298,00	100,00	607.583.571,00
17	Desa Titinalede	546.915.298,00	546.915.298,00	100,00	517.307.571,00
18	Desa Bebae	622.791.298,00	622.791.298,00	100,00	593.183.571,00
19	Desa Tada	622.791.298,00	622.791.298,00	100,00	593.183.571,00
20	Desa Matei	622.791.298,00	622.791.298,00	100,00	593.183.571,00
21	Desa Loboaju	469.515.298,00	469.515.298,00	100,00	439.907.571,00
22	Desa Eimadake	622.791.298,00	622.791.298,00	100,00	593.183.571,00
23	Desa Jiwuwu	622.791.298,00	622.791.298,00	100,00	593.183.571,00
24	Desa Eilode	622.791.298,00	622.791.298,00	100,00	593.183.571,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Desa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Anggaran 2023 (Rp)
25	Desa Eimau	581.715.298,00	581.715.298,00	100,00	552.107.571,00
26	Desa Lobodei	698.667.298,00	698.667.298,00	100,00	669.059.571,00
27	Desa Bodae	622.791.298,00	622.791.298,00	100,00	593.183.571,00
28	Desa Keduru	622.791.298,00	622.791.298,00	100,00	593.183.571,00
29	Desa Kujiratu	546.915.298,00	546.915.298,00	100,00	517.307.571,00
30	Desa Loborai	622.791.298,00	622.791.298,00	100,00	593.183.571,00
31	Desa Huwaga	622.791.298,00	622.791.298,00	100,00	593.183.571,00
32	Desa Eiada	622.791.298,00	622.791.298,00	100,00	593.183.571,00
33	Desa Keliha	622.791.298,00	622.791.298,00	100,00	593.183.571,00
34	Desa Raerobo	622.791.298,00	622.791.298,00	100,00	593.183.571,00
35	Desa Mehona	698.667.298,00	698.667.298,00	100,00	669.059.571,00
36	Desa Waduwalla	698.667.298,00	698.667.298,00	100,00	669.059.571,00
37	Desa Ledeke	622.791.298,00	622.791.298,00	100,00	593.183.571,00
38	Desa Eilogo	698.667.298,00	698.667.298,00	100,00	669.059.571,00
39	Desa Deme	698.667.298,00	698.667.298,00	100,00	669.059.571,00
40	Desa Kotahawu	546.915.298,00	546.915.298,00	100,00	517.307.571,00
41	Desa Dainao	622.791.298,00	622.791.298,00	100,00	593.183.571,00
42	Desa Eikare	562.515.298,00	562.515.298,00	100,00	532.907.571,00
43	Desa Loborui	622.791.298,00	622.791.298,00	100,00	593.183.571,00
44	Desa Hallapadji	698.667.298,00	698.667.298,00	100,00	669.059.571,00
45	Desa Ledetalo	546.915.298,00	546.915.298,00	100,00	517.307.571,00
46	Desa Lohohede	561.315.298,00	561.315.298,00	100,00	531.707.571,00
47	Desa Molie	713.067.298,00	713.067.298,00	100,00	683.459.571,00
48	Desa Daieko	713.067.298,00	713.067.298,00	100,00	683.459.571,00
49	Desa Pedarro	723.267.298,00	723.267.298,00	100,00	693.659.571,00
50	Desa Tanajawa	713.067.298,00	713.067.298,00	100,00	683.459.571,00
51	Desa Ledeeae	698.667.298,00	698.667.298,00	100,00	669.059.571,00
52	Desa Wadumaddi	698.667.298,00	698.667.298,00	100,00	669.059.571,00
53	Desa Lederaga	637.191.298,00	637.191.298,00	100,00	607.583.571,00
54	Desa Gurimonearu	713.067.298,00	713.067.298,00	100,00	683.459.571,00
55	Desa Ramedue	622.791.298,00	622.791.298,00	100,00	593.183.571,00
56	Desa Bolua	713.067.303,00	713.067.303,00	100,00	683.459.571,00
57	Desa Kolorae	713.067.303,00	713.067.303,00	100,00	683.459.571,00
58	Desa Ballu	713.067.304,00	713.067.304,00	100,00	683.459.553,00
TOTAL		37.595.435.300,00	37.595.435.300,00	100,00	35.878.187.100,00

	TA 2024	TA 2023
5.1.3 Surplus/(Defisit)	(Rp24.703.576.079,96)	Rp18.381.829.001,40

Surplus/Defisit merupakan selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja dalam satu periode pelaporan. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2024, mengalami defisit anggaran senilai (Rp24.703.576.079,96) atau sebesar 26,95% dari yang ditargetkan senilai (Rp91.649.948.001,10). defisit tahun 2024 mengalami pengurangan Rp43.085.405.081,36 atau 234,39% dibanding surplus tahun 2023 senilai Rp18.381.829.001,40.

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kecuali untuk SiLPA, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

Pengukuran akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), sedangkan pengukuran akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Sehingga berdasarkan data realisasi anggaran per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan	TA 2024	TA 2023
	Rp98.518.425.724,10	Rp95.948.118.999,70

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran dan pencairan dana cadangan.

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan anggaran penerimaan pembiayaan daerah senilai Rp98.649.948.001,10 yang direalisasikan senilai Rp98.518.425.724,10 atau 99,87%. Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2023 senilai Rp95.948.118.999,70. Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.34 Penerimaan Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	76.329.948.001,10	76.398.425.724,10	100,09	55.025.137.051,62
Pencairan Dana Cadangan	22.120.000.000,00	22.120.000.000,00	100,00	40.922.981.948,08
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	98.649.948.001,10	98.518.425.724,10	99,87	95.948.118.999,70

- SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya merupakan SiLPA tahun 2023 yang digunakan kembali tahun 2024 senilai Rp76.398.425.724,10. Untuk realisasi SiLPA tahun 2024, dilakukan koreksi terhadap saldo awal dana BOS dari SD Negeri Kale Muri sebesar Rp68.477.723,00. Nilai sebesar Rp68.477.732,00 merupakan nilai saldo per 31 Desember 2023. SD Subsidi Kale Muri berubah status sesuai dengan Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 250/KEP/HK/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Perubahan Nama dan Status Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Subsidi Kale Muri menjadi Sekolah Dasar Negeri Kale Muri.
- Realisasi pencairan dana cadangan tahun 2024 sesuai Surat Nomor 900/154/BAKEUDA-SR/VI/2024 senilai Rp22.120.000.000,00 yang merupakan Dana Cadangan Pilkada Sabu Raijua.

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	TA 2024	TA 2023
5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp7.000.000.000,00	Rp38.000.000.000,00

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2024 senilai Rp7.000.000.000,00 dari target anggaran senilai Rp7.000.000.000,00 atau 100,00%. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2023 senilai Rp38.000.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan TA 2024 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah NTT sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua pada PT Bank NTT senilai Rp7.000.000.000,00.

	TA 2024	TA 2023
5.1.4.3 Pembiayaan Neto	Rp91.518.425.724,10	Rp57.948.118.999,70

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan neto.

Pembiayaan neto tahun 2024 senilai Rp91.518.425.724,10 atau 99,86% dari yang ditargetkan senilai Rp91.649.948.001,10. Realisasi pembiayaan neto tahun 2024 mengalami peningkatan senilai Rp33.570.306.724,40 atau 57,93% dibanding yang tahun 2023 senilai Rp57.948.118.999,70.

	TA 2024	TA 2023
5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp66.814.849.644,14	Rp76.329.948.001,10

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa sisa lebih/(kurang) pembiayaan anggaran merupakan selisih lebih/(kurang) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. SiLPA/SiKPA dapat dihitung dari nilai pada pos surplus/defisit ditambah dengan pos pembiayaan neto. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 dan 2023 SiLPA Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua senilai Rp66.814.849.644,14 yang berasal dari defisit senilai (Rp24.703.576.079,96) ditambah pembiayaan neto senilai Rp91.518.425.724,10. Jika dibanding SiLPA tahun 2023 senilai Rp76.329.948.001,10, SiLPA tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp9.515.098.356,96 atau 12,47%.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran senilai Rp66.814.849.644,14 terdiri atas:

1 Dana Kapitasi JKN	Rp45.258.786,34
2 Dana Kapitasi BOK PUSKESMAS	Rp742.340.130,00
3 Dana BOS	Rp75.371.812,00
4 DAU SG	
Bidang Kesehatan	Rp2.494.255.420,00
Bidang Pendidikan	Rp11.426.907.784,00
DAU Kelurahan	Rp202.800,00
5 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-PAUD	Rp3.773.133,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SD	Rp19.762.821,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMP	Rp18.834.181,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SKB	
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting	Rp0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Sistem Kesehatan	Rp746.461.649
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	Rp0,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	Rp20.000,00
	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi	Rp7.350.000,00
	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi	Rp14.400.000,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-Air Minum	Rp1.028.604.888,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-Sanitasi	Rp11.605.000,00
6	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	Rp181.527.400,00
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Rp231.250.000,00
	DAK Non Fisik-TKG PNSD	Rp44.564.700,00
	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Rp0,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Rp292.908.226,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rp228.174.686,00
	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Rp123.805.900,00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp54.953.400,00
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Rp651.000,00
	DAK Non Fisik-PK2UMK	Rp24.257.000,00
7	D I F	Rp4.512.850.290,00
8	SiLPA Lainnya	Rp44.484.758.637,80
		Rp66.814.849.644,14

Dalam SiLPA lainnya, terdapat juga SiLPA DAK Fisik Bidang Pendidikan yang rinciannya belum diketahui dikarenakan masih sementara dilakukan reviu dari Inspektorat Daerah

5.1 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, sisa



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan Saldo Anggaran Lebih akhir periode.

Tabel 5.35 Perubahan SAL

Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	76.329.948.001,10	55.038.160.787,26
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	76.398.425.724,10	55.025.137.051,62
Sub Total	(68.477.723,00)	13.023.735,64
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	66.814.849.644,14	76.329.948.001,10
Sub Total	66.746.371.921,14	76.342.971.736,74
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	68.477.723,00	(13.023.735,64)
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	66.814.849.644,14	76.329.948.001,10

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp76.329.948.001,10 **Rp55.038.160.787,26**

Saldo Anggaran Lebih merupakan gabungan saldo anggaran lebih yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian yang diperkenankan. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua memiliki Saldo Anggaran Lebih Awal senilai Rp76.329.948.001,10 mengalami peningkatan senilai Rp21.291.787.213,84 atau 38,69% dibandingkan Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2023 senilai Rp55.038.160.787,26.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp76.398.425.724,10 **Rp55.025.137.051,62**

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2024 senilai Rp76.398.425.724,10 mengalami peningkatan senilai Rp21.373.288.672,48 atau 38,84% dibandingkan penggunaan SAL tahun 2023 senilai Rp55.025.137.051,62.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp66.814.849.644,14 **Rp76.329.948.001,10**

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA Rp640.326.035.769,37 dan belanja Rp665.029.611.849,33 serta pembiayaan neto tahun 2024 Rp91.518.425.724,10. SiLPA tahun 2024 senilai Rp66.814.849.644,14 mengalami penurunan senilai Rp9.515.098.356,96 atau 12,47% dibandingkan SiLPA tahun 2023 senilai Rp76.329.948.001,10.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp68.477.723,00 **(Rp13.023.735,64)**

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yakni koreksi tambah SiLPA atas sisa kas di bank bendahara BOS SD Kale Muri TA 2023 senilai Rp68.477.723,00. Koreksi ini dilakukan berdasarkan perubahan nama dan status SD Subsidi Kale Muri menjadi SD

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Negeri Kale Muri sesuai dengan Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 250/KEP/HK/2023 tentang Perubahan Nama dan Status Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Subsidi Kale Muri menjadi Sekolah Dasar Negeri Kale Muri tanggal 31 Mei 2023.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir	31 Desember 2024 Rp66.814.849.644,14	31 Desember 2023 Rp76.329.948.001,10
---	---	---

Saldo Anggaran Lebih adalah jumlah total saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

5.3 Neraca

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa Neraca merupakan gambaran posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Data neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan neraca hasil konsolidasi neraca SKPD sebagai entitas pelaporan.

Neraca Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua per 31 Desember 2024 dan 2023 menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos yang digambarkan atau dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Aset	31 Desember 2024 Rp1.480.528.549.051,72	31 Desember 2023 Rp1.486.820.267.597,74
-------------------	--	--

Aset adalah sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kegiatan usaha. Aset per 31 Desember 2024 senilai Rp1.480.491.554.054,72, berkurang senilai Rp6.291.718.546,02 atau 0,42% dibanding per 31 Desember 2023 senilai Rp1.486.820.267.597,74.

Kenaikan dan penurunan aset tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.36 Rincian Aset

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Aset Lancar	79.228.069.836,25	96.662.265.649,54	(17.434.195.813,29)	(18,04)
Investasi Jangka Panjang	56.709.559.274,79	49.709.559.274,79	7.000.000.000,00	14,08
Aset Tetap	1.236.784.232.146,21	1.212.821.176.630,15	23.963.055.516,01	1,98
Dana Cadangan	0,00	22.120.000.000,00	(22.120.000.000,00)	(100,00)
Properti Investasi	13.365.000,00	13.365.000,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	107.793.322.794,47	105.493.901.043,26	2.299.421.751,26	2,18
Jumlah	1.480.528.549.051,72	1.486.820.267.597,74	(6.291.718.546,02)	(0,42)

Dengan penjelasan masing-masing rincian aset diungkapkan sebagai berikut:

5.3.1.1 Aset Lancar	31 Desember 2024 Rp79.228.069.836,25	31 Desember 2023 Rp96.662.265.649,54
----------------------------	---	---

Aset lancar per 31 Desember 2024 senilai Rp79.228.069.836,25 berkurang senilai Rp17.434.195.813,29 atau 18,04% dibanding per 31 Desember 2023 senilai Rp96.662.265.649,54. Sesuai standar akuntansi aset lancar diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kenaikan dan penurunan aset lancar Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.37 Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Kas di Kas Daerah	65.951.878.915,80	44.062.099.800,98	21.889.779.114,82	49,68
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kas Di Bendahara BOS	75.371.812,00	45.115.188,00	30.256.624,00	67,07
5	Kas Di Bendahara FKTP	45.258.786,34	2.222.637.191,30	(2.177.378.404,96)	(97,96)
6	Kas Dana BOK Puskesmas	742.340.130,00	0,00	742.340.130,00	100,00
7	Kas Lainnya	5.070.487,00	73.628.536,56	(68.558.049,56)	(93,11)
8	Setara Kas	0,00	30.000.000.000,00	(30.000.000.000,00)	(100,00)
9	Piutang Pajak Daerah	1.507.794.700,16	1.664.279.544,00	(156.484.843,84)	(9,40)
10	Piutang Retribusi	3.330.456.248,00	4.656.995.548,00	(1.326.539.300,00)	(28,48)
11	Piutang Lain - lain PAD yang sah	3.635.873.696,63	3.333.207.053,30	302.666.643,33	9,08
12	Piutang Transfer Antar Daerah	2.844.241.907,00	4.350.576.705,00	(1.506.334.798,00)	(34,62)
13	Penyisihan Piutang	(7.346.882.396,28)	(7.272.551.673,60)	(74.330.722,68)	1,02
14	Beban Dibayar Di muka	23.970.500,00	31.080.000,00	(7.109.500,00)	(22,87)
15	Persediaan	8.412.695.049,60	13.495.197.756,00	(5.082.502.706,40)	(37,66)
	Jumlah Aset Lancar	79.228.069.836,25	96.662.265.649,54	(17.434.195.813,29)	(18,04)

Rincian Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, sebagai berikut:

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp65.951.878.915,80	Rp44.062.099.800,98

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp65.951.878.915,80 bertambah senilai Rp21.889.779.114,82 atau 49,68% jika dibanding saldo Kas Di Kas Daerah per 31 Desember 2023 senilai Rp44.062.099.800,98. Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dikelola oleh Bendahara Umum/Kuasa BUD dan disimpan pada rekening PT Bank NTT Cabang Sabu dan BRI Unit Sabu.

Rincian saldo Kas di Kas Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.38 Rekening Kas di Kas Daerah

Rekening	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)
Rekening Giro Bank NTT 021-01.05.000027-1 RKUD	29.346.196.141,64	40.454.915.047,59
Rekening Giro Bank NTT 021-01.05.000039-6 PAD	5.186.360,16	11.063.886,13
Rekening Tabungan BRI 4673-01-007436-53-2	36.604.363.420,00	3.620.813.868,00
Jumlah Kas di Kas Daerah	65.955.745.921,80	44.086.792.801,72

Berdasarkan hasil rekonsiliasi bank yang dilakukan oleh Kuasa BUD, ditemukan perbedaan antara saldo buku kas umum ditemukan selisih kurang senilai Rp3.867.006,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Saldo buku kas umum senilai Rp65.951.878.915,80 dan saldo buku bank Rp65.955.745.921,80. Perbedaan tersebut merupakan pengeluaran yang telah dicatat oleh buku dan belum dicatat oleh bank yaitu kurang debet SP2D Nomor 53.20/04.0/000064/LS/5.03.5.04.0.00.31.0000/P4/8/2024 sebesar Rp6,00, tanggal 14 Agustus 2024 (LS Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan). Adapun penerimaan yang telah dicatat oleh Bank, tetapi belum dicatat oleh Buku yang terdiri dari Temuan Inspektorat atas Belanja Dana BOS 2023 SMP N 2 Sabu Tengah sebesar Rp2.205.000,00 dan Temuan Inspektorat atas Belanja DD Desa Bodae sebesar Rp1.662.000,00

Saldo RKUD Kab. Sabu Raijua senilai Rp65.955.745.921,80 terdiri atas:

1. Kas di Kas Daerah senilai Rp65.951.878.915,80;
2. Pengeluaran yang telah dicatat dalam pembukuan namun belum dicatat oleh Bank senilai Rp6,00; dan
3. Temuan Inspektorat terkait Dana BOSP TA 2023 pada SMPN 2 Sabu Tengah senilai Rp2.205.000,00 dan temuan belanja dana desa Desa Bodae senilai Rp1.662.000,00 selanjutnya harus ditransfer ke Rekening Kas Umum Negara.

Rekonsiliasi saldo kas daerah dengan bank dapat dilihat pada **Lampiran N.1**

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2024 Rp0,00	31 Desember 2023 Rp0,00
--	--	--

Tidak terdapat saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023. Seluruh penerimaan tahun 2024 telah disetorkan ke Kas Daerah sebelum 31 Desember 2024.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2024 Rp0,00	31 Desember 2023 Rp0,00
---	--	--

Tidak terdapat saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023. Seluruh sisa kas di bendahara pengeluaran tahun 2024 telah disetorkan ke Kas Daerah sebelum 31 Desember 2024. Rincian Kasi di Bendahara Pengeluaran pada **Lampiran N.2**.

1.3.1.1.3 Kas di Bendahara BOSP	31 Desember 2024 Rp75.371.812,00	31 Desember 2023 Rp45.115.188,00
--	---	---

Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2024 senilai Rp75.371.812,00, bertambah Rp30.256.624,00 atau 67,07% dibanding saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp45.115.188,00. Saldo kas di bendahara BOSP tahun 2024 merupakan sisa kas yang tidak habis digunakan dalam tahun berjalan, yang merupakan kas di bendahara BOSP senilai Rp75.371.812,00,

Dana BOSP merupakan dana hibah dari Pemerintah Pusat yang ditransfer langsung ke sekolah-sekolah penerima dana BOSP. Rekapitulasi Dana BOSP Tahun Anggaran 2024 pada **Lampiran 2**.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rincian saldo kas di bendahara BOS dapat dilihat pada **Tabel 5.39**.

Tabel 5.39 Rincian Kas Di Bendahara BOS

No	Nama Sekolah	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SMP Negeri 1 Sabu Barat	0,00	3.055.876,00	(3.055.876,00)	(100,00)
2	SMP Negeri 3 Sabu Barat	19.361.600,00	22.885.600,00	(3.524.000,00)	(15,40)
3	SMP Negeri 5 Menia	1.871,00	371,00	1.500,00	404,31
4	SMP Negeri 1 Sabu Tengah	66.199,00	66.199,00	0,00	0,00
5	SMP Negeri 2 Sabu Tengah	159,00	159,00	0,00	0,00
6	SMP Negeri 2 Hawu Mehara	36,00	36,00	0,00	0,00
7	SD Negeri 3 Seba	360.097,00	360.097,00	0,00	0,00
8	SD Inpres Delo	33,00	33,00	0,00	0,00
9	SD Negeri Raemude	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00
10	SD Negeri Teriwu	3.131.000,00	0,00	3.131.000,00	0,00
11	SD Negeri Ledekpaka	26.119.100,00	2.404.100,00	23.715.000,00	986,44
12	SD Negeri Jiwuwu	400,00	400,00	0,00	0,00
13	SD Negeri Matei	165.084,00	135.084,00	30.000,00	22,21
14	SD Inpres Eimau	2.057.000,00	2.057.000,00	0,00	0,00
15	SD Negeri Lobohede	242,00	242,00	0,00	0,00
16	SD Negeri Lederaga	912,00	912,00	0,00	0,00
17	SD Inpres Tanajawa	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
18	SD Negeri Gelenalalu	55,00	55,00	0,00	0,00
19	SD Inpres Daiae	226.006,00	226.006,00	0,00	0,00
20	SD Negeri Dainao	876,00	876,00	0,00	0,00
21	SD Negeri 1 Ledeke	23.389,00	23.389,00	0,00	0,00
22	SD Negeri Lokojuji	0,00	2.241.000,00	(2.241.000,00)	(100,00)
23	SD Negeri Boko	1.157.753,00	1.157.753,00	0,00	0,00
24	PAUD SKB	0,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)	(100,00)
	Jumlah	75.371.812,00	45.115.188,00	30.256.624,00	67,07

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara FKTP	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp45.258.786,34	Rp2.222.637.191,30

Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2024 senilai Rp787.598.916,34, berkurang senilai Rp2.177.378.404,96 atau 97,96% dibanding tahun 2023 senilai Rp2.222.637.191,30. Saldo tahun 2023 merupakan kas di bendahara FKTP dan Kas di bendahara BOK, tetapi pada tahun 2024 Kas di bendahara BOK direklas ke akun sesuai kodefikasi. Sehingga, saldo kas di bendahara FKTP tahun 2024 merupakan sisa kas yang tidak habis digunakan dalam tahun berjalan.

Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana kapitasi ditransfer langsung oleh BPJS Kesehatan ke rekening masing-masing FKTP/puskesmas.

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara BOK	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp742.340.130,00	Rp0,00

Kas di Bendahara BOK per 31 Desember 2024 senilai Rp742.340.130,00, bertambah senilai Rp742.340.130,00 dibanding tahun 2023 senilai Rp0,00. Saldo tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

sebelumnya dicatat pada kas di bendahara FKTP. Saldo kas di bendahara BOK tahun 2024 merupakan sisa kas yang tidak habis digunakan dalam tahun berjalan.

Dana BOK Puskesmas adalah Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut adalah dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Daerah, pengelolaan Dana BOK Puskesmas dilaksanakan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka penyediaan informasi keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian saldo kas di bendahara FKTP dan BOK dapat dilihat pada **Tabel 5.40**.

Tabel 5.40 Rincian Kas di Bendahara FKTP dan BOK

No	Nama Puskesmas	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kas di Bendahara FKTP					
1	Puskesmas Seba	156.446,49	468.087.180,49	(467.930.734,00)	(99,97)
2	Puskesmas Bolou	70.785,00	61.602.028,00	(61.531.243,00)	(99,89)
3	Puskesmas Eilogo	22.530.435,05	243.704,01	22.286.731,04	9.145,00
4	Puskesmas Daieko	10.522.350,27	47.489.897,27	(36.967.547,00)	(77,84)
5	Puskesmas Ledunu	324.743,00	49.839.908,00	(49.515.165,00)	(99,35)
6	Puskesmas Eimadake	11.654.026,53	167.956,53	11.486.070,00	6.838,72
	Jumlah Kas JKN	45.258.786,34	627.430.674,30	(582.171.887,96)	(92,79)
Kas di Bendahara BOK					
1	Puskesmas Seba	253.474.745,00	485.989.212,00	(232.514.467,00)	(47,84)
2	Puskesmas Bolou	136.623.855,00	239.506.761,00	(102.882.906,00)	(42,96)
3	Puskesmas Eilogo	56.689.890,00	70.216.000,00	(13.526.110,00)	(19,26)
4	Puskesmas Daieko	118.873.973,00	315.472.520,00	(196.598.547,00)	(62,32)
5	Puskesmas Ledunu	117.211.998,00	379.518.533,00	(262.306.535,00)	(69,12)
6	Puskesmas Eimadake	59.465.669,00	104.503.491,00	(45.037.822,00)	(43,10)
	Jumlah Kas BOK	742.340.130,00	1.595.206.517,00	(852.866.387,00)	(53,46)
	Total	787.598.916,34	2.222.637.191,30	(1.435.038.274,96)	(64,56)

5.3.1.1.7 Kas Lainnya 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp5.070.487,00 **Rp73.628.536,56**

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 senilai Rp5.070.487,00, bertambah senilai Rp68.558.049,56 atau 93,11% dibanding kas lainnya tahun 2023 senilai Rp73.628.536,56. Saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran tahun 2024 terdiri atas:

1. Utang pajak pada 7 sekolah senilai Rp4.784.417,00 yang telah disetorkan per tanggal 27 Maret 2025.
2. Utang pajak PPh Pasal 23 atas Puskesmas Eimadake senilai Rp285.000,00 yang telah disetorkan tanggal 20 Januari 2024 dan Puskesmas Bolou senilai Rp1.070,00 yang telah disetorkan tanggal 15 Januari 2024.

Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.41 Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
A	Utang pajak yang masih di tangan bendahara	5.070.487,00	48.839.765,00	(43.769.278,00)	(89,62)
1	Puskesmas Eimadake	285.000,00	12.636,00	272.364,00	2.155,46
2	Puskesmas Bolou	1.070,00	0,00	1.070,00	100,00
3	SMP Negeri 1 Sabu Barat	0,00	1.268.171,00	(1.268.171,00)	(100,00)
4	SMP Negeri 3 Sabu Barat	0,00	776.790,00	(776.790,00)	(100,00)
5	SMP Negeri 7 Sabu Barat	0,00	4.001,00	(4.001,00)	(100,00)
6	SMP Satu Atap Teriwu	0,00	6.000,00	(6.000,00)	(100,00)
7	SMP Negeri 3 Sabu Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SMP Negeri 1 Sabu Timur	0,00	24.000,00	(24.000,00)	(100,00)
9	SMP Negeri 1 Hawu Mehara	469.500,00	342.000,00	127.500,00	37,28
10	SMP Negeri 3 Hawu Mehara	0,00	10.344.336,00	(10.344.336,00)	(100,00)
11	SMP Satu Atap Eirobo	0,00	492.000,00	(492.000,00)	(100,00)
12	SMP Negeri 1 Raijua	0,00	1.576.000,00	(1.576.000,00)	(100,00)
13	SMP Negeri 2 Raijua	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
14	SD Negeri 1 Seba	0,00	202.162,00	(202.162,00)	(100,00)
15	SD Negeri 3 Seba	0,00	642.161,00	(642.161,00)	(100,00)
16	SD Negeri Mapipa	26.000,00	709.000,00	(683.000,00)	(96,33)
17	SD Negeri Leoge	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00
18	SD Negeri 4 Seba	679.189,00	0,00	679.189,00	100,00
19	SD Inpres Tanajawa	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00
20	SD Negeri Maballa	0,00	265.500,00	(265.500,00)	(100,00)
21	SD Negeri Luipau	0,00	27.000,00	(27.000,00)	(100,00)
22	SD Negeri Raemude	0,00	543.400,00	(543.400,00)	(100,00)
23	SD Negeri Teriwu	0,00	150.000,00	(150.000,00)	(100,00)
24	SD Inpres Ledean	0,00	822.000,00	(822.000,00)	(100,00)
25	SD Negeri Raenalulu	0,00	322.500,00	(322.500,00)	(100,00)
26	SD Negeri 5 Sabu Barat	0,00	1.388.744,00	(1.388.744,00)	(100,00)
27	SD Negeri Kejoboloko	0,00	541.500,00	(541.500,00)	(100,00)
28	SD Inpres Kujiratu	0,00	994.909,00	(994.909,00)	(100,00)
29	SD Negeri Padadue	0,00	5.188.407,00	(5.188.407,00)	(100,00)
30	SD Inpres Pedarro	0,00	6.483.295,00	(6.483.295,00)	(100,00)
31	SD Negeri Lobolauw	0,00	1.355.500,00	(1.355.500,00)	(100,00)
32	SD Negeri Ledee	0,00	107.900,00	(107.900,00)	(100,00)
33	SD Negeri Lokojuli	0,00	504.000,00	(504.000,00)	(100,00)
34	SD Negeri Bolua	0,00	10.006.098,00	(10.006.098,00)	(100,00)
35	SD Negeri Boko	3.341.228,00	3.739.755,00	(398.527,00)	(10,66)
B	Sisa saldo dalam rekening bendahara (jasa giro)	0,00	95.820,82	(95.820,82)	(100,00)
1	TK Negeri Pembina	0,00	8.176,11	(8.176,11)	(100,00)
2	SKB Sabu Raijua	0,00	87.644,71	(87.644,71)	(100,00)
3	Puskesmas Ledeeunu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Puskesmas Daieko	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Puskesmas Eilogo	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Puskesmas Seba	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Puskesmas Eimadake	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Puskesmas Bolou	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo kas yang harus ditransfer ke RKUN	0,00	24.692.950,74	(24.692.950,74)	(100,00)
1	Pengembalian Dana BOP PAUD Rubadara	0,00	6.452.950,74	(6.452.950,74)	(100,00)
2	Temuan Irjen SMPN 1 Sabu Tengah	0,00	12.240.000,00	(12.240.000,00)	(100,00)
3	SD Negeri Ledemera	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah (A+B+C)	5.070.487,00	73.628.536,56	(68.558.049,56)	(93,11)

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.1.8 Setara Kas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	Rp30.000.000.000,00

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Saldo setara kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp30.000.000.000,00. Setara Kas pada tahun 2023 berupa saldo pada rekening deposito berjangka yang terdiri dari Deposito Bank BRI 467.301.000.051.404 senilai Rp20.000.000.000,00 dan Deposito BRI 4673-01-000308-40-3 senilai Rp10.000.000.000,00.

5.3.1.1.9 Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp1.507.794.700,16	Rp1.664.279.544,00

Piutang pajak daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp1.507.794.700,16, berkurang senilai Rp156.484.843,84 atau 9,40% dibanding tahun 2023 senilai Rp1.664.279.544,00. Rincian mutasi piutang pajak daerah adalah sebagai berikut.

Saldo awal	Rp1.664.279.544,00
Koreksi	(Rp691.836,84)
SKP/Penambahan	Rp2.159.553.783,00
Pelunasan	(Rp2.315.346.790,00)
Saldo akhir	Rp1.507.794.700,16

Piutang pajak daerah berdasarkan jenis dan SKPD pengelola dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.42 Piutang Pajak Daerah

Uraian	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.382.697.279,16	1.535.009.359,00	(152.312.079,84)	(9,92)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.382.697.279,16	1.535.009.359,00	(152.312.079,84)	(9,92)
Badan Keuangan Daerah	125.097.421,00	129.270.185,00	(4.172.764,00)	(3,23)
Pajak Hotel	270.000,00	13.156.600,00	(12.886.600,00)	(97,95)
Pajak Rumah Makan	4.549.500,00	315.000,00	4.234.500,00	1.344,29
Pajak Reklame	8.085.600,00	4.825.600,00	3.260.000,00	67,56
Pajak Bumi dan Bangunan	112.192.321,00	110.972.985,00	1.219.336,00	1,10
TOTAL	1.507.794.700,16	1.664.279.544,00	(156.484.843,84)	(9,40)

5.3.1.1.10 Piutang Retribusi Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp3.330.456.248,00	Rp4.656.995.548,00

Piutang retribusi daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.330.456.248,00, berkurang sebesar Rp1.326.539.300,00 atau 28,48% jika dibanding dengan tahun 2023 sebesar Rp4.656.995.548,00.

Piutang retribusi daerah terdapat piutang retribusi daerah yang sebagian besar sudah macet dan tidak ada peluang tertagih. Piutang retribusi los pasar dan pelayanan pasar yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Perdagangan, mengalami kendala ketika banyak pedagang yang meninggalkan Pulau Sabu saat terjadi insiden yang mengarah ke SARA pada tanggal 13 Desember 2016.

Piutang Retribusi Pemakaian jukung dan lampara yang tidak dapat diangsur oleh nelayan karena saat itu hasil yang diperoleh nelayan tidak menguntungkan, disertai kendala dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat.

Piutang garam pada neraca tahun 2022 dicatat dalam piutang lain-lain PAD yang sah, dengan adanya perubahan pada kodifikasi dan nomenklatur perencanaan, piutang garam direklas ke piutang retribusi penjualan hasil usaha daerah sesuai dengan rekening yang mencatat penerimaan hasil penjualan garam saat ini. Reklas piutang garam tersebut senilai Rp1.344.198.900,00.

Piutang retribusi daerah berdasarkan jenis dan SKPD pengelola dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.43 Piutang Retribusi

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Rumah Sakit Umum Daerah	197.084.400,00	1.620.128.200,00	(1.423.043.800,00)	(87,84)
Pelayanan Kesehatan	197.084.400,00	1.620.128.200,00	(1.423.043.800,00)	(87,84)
Dinas PMPTSP, Perindustrian dan Perdagangan	1.483.642.400,00	1.417.087.900,00	66.554.500,00	4,70
Retribusi Los Pasar (Macet)	47.517.000,00	47.517.000,00	0,00	0,00
Retribusi Los Pasar	91.926.500,00	25.372.000,00	66.554.500,00	262,31
Retribusi penjualan hasil usaha daerah	1.344.198.900,00	1.344.198.900,00	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.398.384.448,00	1.398.384.448,00	0,00	0,00
Pemakaian Jukung	217.200.000,00	217.200.000,00	0,00	0,00
Pemakaian Lampara 2011	1.181.184.448,00	1.181.184.448,00	0,00	0,00
Badan Keuangan Daerah	251.345.000,00	221.395.000,00	29.950.000,00	13,53
Klaim BPJS Puskesmas	197.945.000,00	188.445.000,00	9.500.000,00	5,04
Sewa Mess	53.400.000,00	32.950.000,00	20.450.000,00	62,06
TOTAL	3.330.456.248,00	4.656.995.548,00	(1.326.539.300,00)	(28,48)

**5.3.1.1.11 Piutang Lain-Lain
PAD yang Sah****31 Desember 2024
Rp3.635.873.696,63****31 Desember 2023
Rp3.333.207.053,30**

Piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp3.635.873.696,63 berkurang senilai 302.666.643,33 atau 9,08% dibanding per 31 Desember 2023 senilai Rp3.333.207.053,30. Piutang lain-lain PAD yang sah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.44 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	31-Des-2024 Rp	31-Des-2023 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.346.165.270,53	1.075.647.677,30	270.517.593,23	25,15
Piutang Hasil Sewa BMD	2.550.000,00	4.550.000,00	(2.000.000,00)	(43,96)
Piutang denda pajak MBLB	1.073.753.149,66	1.071.097.677,30	2.655.472,36	0,25
Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	269.862.120,87	0,00	269.862.120,87	100,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	51.875.983,10	0,00	51.875.983,10	100,00
Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	51.875.983,10	0,00	51.875.983,10	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31-Des-2024 Rp	31-Des-2023 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
Dinas PMPTSP, Perindustrian dan Perdagangan	2.116.000.000,00	2.116.000.000,00	0,00	0,00
Piutang Kerja sama Pemanfaatan BMD	2.116.000.000,00	2.116.000.000,00	0,00	100,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	121.832.443,00	141.559.376,00	(19.726.933,00)	(13,94)
Piutang hasil pengelolaan dana bergulir	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	100,00
Piutang TP TGR	109.627.825,00	126.359.376,00	(16.731.551,00)	(13,24)
Piutang Taspen	0	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
Piutang Bunga atas Penempatan Uang	4.618,00	0,00	4.618,00	100,00
Jumlah	3.635.873.696,63	3.333.207.053,30	302.666.643,33	9,08

- Piutang hasil sewa BMD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.550.000,00 bersumber dari piutang hasil sewa tronton;
- Piutang denda pajak MBLB pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp1.073.753.149,66 merupakan piutang denda atas piutang pajak MBLB;
- Piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan senilai Rp321.738.103,97 terdiri dari keterlambatan paket pekerjaan SPAM Tada Rp45.037.117,12, SPAM Tanajawa Rp22.528.787,64, SPAM Logoadju Rp134.188.108,11, Embung Lokore Rp68.108.108,00, SDG Ligu Rp3.803.226,34, dan SDI Eirobo Rp48.072.756,76;
- Piutang lain-lain PAD yang sah lainnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp2.116.000.000,00 piutang kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua dengan PT Tunas Jaya Lancar tentang Pengelolaan Pabrik Pengolahan Rumput Laut senilai Rp2.116.000.000,00;
- Piutang hasil pengelolaan dana bergulir senilai Rp12.200.000,00 adalah bunga pinjaman lunak yang belum dibayar;
- Piutang TPTGR senilai Rp109.627.825,00, merupakan Piutang TGR pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan; dan
- Piutang pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah senilai Rp4.618,00 yang merupakan piutang remun atas TDF TA 2024.

5.3.1.1.12 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp2.844.241.907,00	Rp4.350.576.705,00

Piutang transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp2.844.241.907,00, berkurang senilai Rp1.506.334.798,00 atau 34,62% jika dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp4.350.576.705,00. Piutang transfer pemerintah daerah lainnya merupakan piutang dana bagi hasil dari provinsi sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 230/KEP/HK/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rincian piutang transfer pemerintah daerah lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.45 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Uraian	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dana bagi hasil PKB	888.309.280,00	1.553.294.046,00	(664.984.766,00)	(42,81)
Dana bagi hasil BBNKB	570.085.677,00	623.713.702,00	(53.628.025,00)	(8,60)
Dana bagi hasil PPBKB	1.385.475.922,00	2.172.670.047,00	(787.194.125,00)	(36,23)
Dana bagi hasil pajak rokok	0,00	0,00	0,00	0,00
DBH pajak air permukaan	371.028	898.910,00	(527.882,00)	(58,72)
Jumlah	2.844.241.907,00	4.350.576.705,00	(1.506.334.798,00)	(34,62)

Rincian Piutang pada **Lampiran N.3**.

5.3.1.1.13 Penyisihan Piutang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp7.346.882.396,28)	(Rp7.272.551.673,60)

Penyisihan piutang per 31 Desember 2024 senilai (Rp7.346.882.396,28) bertambah senilai (Rp74.330.722,68) atau 1,02% jika dibanding per 31 Desember 2023 senilai (Rp7.272.551.673,60). Nilai tersebut merupakan nilai penyisihan piutang pajak daerah senilai (Rp1.275.076.455,60), penyisihan piutang retribusi senilai (Rp2.865.694.100,50) dan penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah senilai (Rp3.206.111.840,18).

Rincian penyisihan piutang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.46 Penyisihan Piutang

Uraian	31-Des-2024	31-Des-2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(1.275.076.455,60)	(1.238.173.148,30)	(36.903.307,30)	2,98
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.164.162.599,42)	(1.127.549.596,80)	(36.613.002,62)	3,25
Badan Keuangan Daerah	(110.913.856,18)	(110.623.551,50)	(290.304,68)	0,26
Penyisihan Piutang Retribusi	(2.865.694.100,50)	(2.835.080.848,00)	(30.613.252,50)	1,08
Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	(1.437.801.152,50)	(1.413.988.900,00)	(23.812.252,50)	1,68
Dinas Kelautan dan Perikanan	(1.398.384.448,00)	(1.398.384.448,00)	(0,00)	0,00
Badan Keuangan Daerah	(29.508.500,00)	(22.707.500,00)	(6.801.000,00)	29,95
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(3.206.111.840,18)	(3.199.297.677,30)	(6.887.638,29)	0,22
Badan Keuangan Daerah	(12.200.000,00)	(12.200.000,00)	(0,00)	0,00
Dinas Pendidikan, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	(259.379,92)	(0,00)	(259.379,92)	100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.077.652.460,26)	(1.071.097.677,30)	(6.628.258,37)	0,62
DPM dan PTSP, Perindag	(2.116.000.000,00)	(2.116.000.000,00)	(0,00)	0,00
Jumlah	(7.346.882.396,28)	(7.272.551.673,60)	(74.404.198,09)	1,02

Rincian penyisihan piutang dapat dilihat pada **Lampiran N.4.1**



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.1.14 Beban dibayar di muka	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp23.970.500,00	Rp31.080.000,00

Beban dibayar di muka per 31 Desember 2024 senilai Rp23.970.500,00 berkurang senilai Rp7.109.500,00 atau 22,87% jika dibanding per 31 Desember 2023 senilai Rp31.080.000,00. Beban dibayar di muka terdiri dari belanja persediaan senilai Rp23.970.500,00 dengan masa kadaluwarsa yang cepat, sehingga dibayar di muka dan saat akan dimanfaatkan baru diambil dari gudang toko, sehingga menghindari kemungkinan persediaan tersebut akan kadaluwarsa di tangan dinas teknis.

5.3.1.1.15 Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp8.412.695.049,60	Rp13.495.197.756,00

Nilai persediaan per 31 Desember 2024 senilai Rp8.412.695.049,60, berkurang senilai Rp5.082.502.706,40 atau 37,66% jika dibanding per 31 Desember 2023 senilai Rp13.495.197.756,00. Nilai persediaan merupakan jumlah persediaan yang masih terdapat pada SKPD per 31 Desember 2024. Persediaan tersebut berupa bahan bangunan dan konstruksi, bahan kimia, bahan bakar dan pelumas, bahan/bibit tanaman, bahan lainnya, suku cadang, alat tulis kantor, kertas dan *cover*, bahan cetak, benda pos, alat listrik, cendera mata, peralatan dan bahan pembersih, obat, persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan pakan sesuai hasil *stock opname* per 31 Desember 2024.

Rincian persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.47 Rincian Persediaan per Jenis

Uraian	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bahan Bangunan dan Konstruksi	16.083.900,00	28.866.300,00	(12.782.400,00)	(44,28)
Bahan Kimia	171.074.242,00	0,00	171.074.242,00	100,00
Bahan Bakar dan Pelumas	96.076.500,00	72.510.000,00	23.566.500,00	32,50
Bahan/Bibit Tanaman	77.604.500,00	118.560.000,00	(40.955.500,00)	(34,54)
Bahan Lainnya	2.020.012.487,16	3.247.493.105,00	(1.227.480.617,84)	(37,80)
Suku Cadang Lainnya	104.399.000,00	183.852.040,00	(79.453.040,00)	(43,22)
Alat Tulis Kantor	94.509.475,00	90.335.265,00	4.174.210,00	4,62
Kertas dan <i>Cover</i>	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	100,00
Bahan Cetak	422.657.105,00	390.007.200,00	32.649.905,00	8,37
Benda Pos	1.460.000,00	1.370.000,00	90.000,00	6,57
Alat Listrik	7.013.000,00	3.100.000,00	3.913.000,00	126,23
Souvenir/ Cendera Mata	17.680.000,00	23.280.000,00	(5.600.000,00)	(24,05)
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	41.583.233,00	33.713.333,00	7.869.900,00	23,34
Obat	2.237.194.022,94	3.027.808.249,00	(790.614.226,06)	(26,11)
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	3.104.338.584,50	6.274.302.264,00	(3.169.963.679,50)	(50,52)
Jumlah	8.412.695.049,60	13.495.197.756,00	(5.082.502.706,40)	(37,66)



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Nilai persediaan masih termasuk persediaan garam yang sudah dibayar tetapi belum diangkut dan persediaan blangko yang sudah tidak terpakai tetapi belum dimusnahkan.

1. Persediaan garam yang telah dibayar tetapi belum diangkut sebanyak 5.900 kg atau senilai Rp11.800.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan;
2. Persediaan barang cetakan STTS, SPPT, DHKP, DPPKAD yang sudah tidak berlaku lagi senilai Rp38.891.500,00; dan
3. Persediaan blangko akta perkawinan, akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian, akta pengakuan anak, kartu keluarga dan blangko kutipan pengesahan anak senilai Rp84.595.200,00 yang sudah tidak digunakan lagi.

Selain persediaan yang tersaji dalam neraca terdapat juga persediaan obat kedaluwarsa dan bahan habis pakai kedaluwarsa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang masing-masing senilai Rp27.772.785,00 dan Rp1.638.000,00.

Rincian persediaan dapat dilihat pada **Lampiran N.5**.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp56.709.559.274,79	Rp49.709.559.274,79

Investasi Jangka Panjang merupakan pos yang berasal dari kegiatan pembiayaan yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat bagi masyarakat dan diharapkan dapat dikembalikan kepada pemerintah.

Investasi jangka panjang per 31 Desember 2024 senilai Rp56.709.559.274,79, bertambah senilai Rp7.000.000.000,00 atau 14,08% dibanding tahun 2023 senilai Rp49.709.559.274,79.

Investasi Jangka Panjang diantaranya dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.2 Investasi Non Permanen	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	Rp0,00

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, tidak terdapat kenaikan/penurunan atau saldo pada 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Saldo Investasi Non Permanen terdiri dari Investasi Non Permanen Lainnya berupa dan penyisihan sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp13.423.178.753,00	Rp13.423.178.753,00

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, tidak terdapat kenaikan/penurunan atau saldo pada 31 Desember 2023 senilai Rp0,00. Saldo Investasi Non Permanen terdiri dari Investasi Non Permanen Lainnya berupa dan penyisihan sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.48 Investasi Non Permanen Lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dana Koperasi 2000-2008	328.750.000,00	328.750.000,00	0,00	0,00
Dana Pemberdayaan 2007	4.489.339.000,00	4.489.339.000,00	0,00	0,00
Dana Pemberdayaan 2008	4.815.140.500,00	4.815.140.500,00	0,00	0,00
KSU HE WUE ADE 2010	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
KSU SALIKO 2010	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
KSU HE WUE ADE 2011	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00
PINJAMAN LUNAK	66.791.277,00	66.791.277,00	0,00	0,00
FORUM KEPALA DESA/LURAH	747.058.000,00	747.058.000,00	0,00	0,00
KSU MANNO WADA	213.999.976,00	213.999.976,00	0,00	0,00
KSU KOLO HARRU 2013	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	0,00
PENGELOLA PABRIK RL	2.339.600.000,00	2.339.600.000,00	0,00	0,00
Jumlah	13.423.178.753,00	13.423.178.753,00	0,00	0,00

Rincian investasi non permanen lainnya dapat dilihat di **Lampiran N.6**

5.3.1.2.2 Penyisihan Investasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Non Permanen Lainnya	(Rp13.423.178.753,00)	(Rp13.423.178.753,00)

Penyisihan investasi non permanen lainnya per 31 Desember 2024 senilai (Rp13.423.178.753,00) tidak terdapat perubahan Penyisihan investasi non permanen lainnya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.49 Penyisihan Investasi Non Permanen

Uraian	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dana Koperasi 2000-2008	(328.750.000,00)	(328.750.000,00)	0,00	0,00
Dana Pemberdayaan 2007	(4.489.339.000,00)	(4.489.339.000,00)	0,00	0,00
Dana Pemberdayaan 2008	(4.815.140.500,00)	(4.815.140.500,00)	0,00	0,00
KSU HE WUE ADE 2010	(9.000.000,00)	(9.000.000,00)	0,00	0,00
KSU SALIKO 2010	(5.500.000,00)	(5.500.000,00)	0,00	0,00
KSU HE WUE ADE 2011	(23.000.000,00)	(23.000.000,00)	0,00	0,00
PINJAMAN LUNAK	(66.791.277,00)	(66.791.277,00)	0,00	0,00
FORUM KEPALA DESA/LURAH	(747.058.000,00)	(747.058.000,00)	0,00	0,00
KSU MANNO WADA	(213.999.976,00)	(213.999.976,00)	0,00	0,00
KSU KOLO HARRU 2013	(385.000.000,00)	(385.000.000,00)	0,00	0,00
PENGELOLA PABRIK RL	(2.339.600.000,00)	(2.339.600.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	(13.423.178.753,00)	(13.423.178.753,00)	0,00	0,00

Rincian penyisihan investasi non permanen lainnya dapat dilihat di **Lampiran N.4.2**

5.3.1.2.2 Investasi Permanen	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp56.709.559.274,79	Rp49.709.559.274,79

Investasi permanen per 31 Desember 2024 senilai Rp56.709.559.274,79, bertambah Rp7.000.000.000,00 atau 14,08% jika dibanding tahun 2023 senilai Rp49.709.559.274,79.

Investasi permanen Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua terdiri atas:

- Investasi pada PT Bank Nusa Tenggara Timur dengan nilai investasi tahun 2024 senilai Rp56.492.830.000,00, bertambah senilai Rp7.000.000.000,00 atau 14,08% jika



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

dibanding nilai investasi tahun 2023 senilai Rp49.492.830.000,00. Penyertaan modal pada Bank NTT sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; dan

- b. Investasi pada Perusahaan Daerah Rai Hawu dengan nilai investasi tahun 2023 senilai Rp216.729.274,78 yang nilainya sama dengan tahun 2023 karena pada tahun 2023 telah dilakukan audit likuidasi oleh Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dengan Laporan Hasil Auditor Independen Nomor 00097/2.1274/AU.2/05/0463-1/1/XII/2023, tanggal 22 Desember 2023. Audit likuidasi merupakan langkah awal yang akan dilanjutkan dengan proses pembubaran yang akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pembubaran PD Raihawu.

Rincian Penyertaan Modal (Investasi Daerah) pada **Lampiran N.9**.

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp1.236.784.232.146,21	Rp1.212.821.176.630,14

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua per 31 Desember 2024 bersumber dari hasil penyerahan P3D oleh Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai kabupaten induk, pembelian dari APBD, dan ada juga yang berasal dari hibah.

Penambahan dan pengurangan dari nilai aset tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 secara komparatif disajikan pada Tabel 5.50.

Tabel 5.50 Rincian Aset Tetap

Uraian	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Tanah	21.731.652.462,00	21.737.683.938,00	(6.031.476,00)	(0,03)
Peralatan dan Mesin	349.193.299.339,60	339.123.654.009,42	10.069.645.330,18	2,97
Gedung dan Bangunan	614.368.957.812,64	562.644.595.694,50	51.724.362.118,14	9,19
Jalan, Irigasi, Jaringan	963.850.283.590,44	802.330.108.849,04	161.520.174.741,40	20,13
Aset Tetap Lainnya	30.560.778.327,68	29.524.484.359,68	1.036.293.968,00	3,51
Konstruksi Dalam Pengerjaan	41.569.049.040,22	76.686.758.606,85	(35.117.709.566,63)	(45,79)
Akumulasi Penyusutan	(784.489.788.426,37)	(619.226.108.827,35)	(165.263.679.599,02)	26,69
Ak. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(292.700.795.305,39)	(271.880.057.665,21)	(20.820.737.640,18)	7,66
Ak. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(103.591.850.618,91)	(78.039.214.049,07)	(25.552.636.569,86)	32,74
Ak. Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(388.197.142.502,07)	(269.306.837.113,07)	(118.890.305.389,00)	44,15
Jumlah	1.236.784.232.146,21	1.212.821.176.630,14	23.963.055.516,07	1,98

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap dapat dilihat di **Lampiran N.7**.

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Komponen-komponen aset tetap secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp21.731.652.462,00	Rp21.737.683.938,00

Tanah per 31 Desember 2024 Rp21.731.652.462,00, di mana berkurang senilai Rp6.031.476,00 atau sebesar 0,03% dibanding tahun sebelumnya. Tanah per 31 Desember 2024 merupakan nilai aset tetap tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang diperoleh dari hasil penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai kabupaten induk sesuai data dokumen P3D, pembelian dan hibah masyarakat pemilik tanah.

Rincian aset tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5.51 Aset Tetap Tanah per SKPD

Uraian	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.645.579.784,00	1.645.579.784,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	126.885.036,00	126.885.036,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	19.619.852.027,00	19.625.883.503,00	(6.031.476,00)	(0,03)
Dinas Pertanian & Pangan	23.450.000,00	23.450.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	58.883.600,00	58.883.600,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.825.000,00	6.825.000,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan	81.073.760,00	81.073.760,00	0,00	0,00
Kecamatan Sabu Barat	128.099.255,00	128.099.255,00	0,00	0,00
Kecamatan Sabu Timur	18.794.000,00	18.794.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Hawu Mehara	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Raijua	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Sabu Tengah	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	21.731.652.462,00	21.737.683.938,00	(6.031.476,00)	(0,03)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penatausahaan aset tetap diketahui masih terdapat permasalahan dalam penatausahaan aset tetap tanah yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah yaitu bukti kepemilikan tanah atas SDN Padadue hanya berupa Berita Acara Hibah Tanah Suku, adapun SMPN 2 Sabu Barat yang bersertifikat tanah atas nama Departemen Pendidikan Wilayah Provinsi NTT. Selain itu sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Sabu Raijua yang berlokasi di Kelurahan Lasiana Kota Kupang yang tidak dapat dimanfaatkan karena terjadi sengketa lahan. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah dan akan segera diproses agar penatausahaan aset dapat berjalan dengan baik.

Data penambahan dan pengurangan aset tetap tanah secara rinci digambarkan dalam Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah pada **Lampiran N.7.1.**



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	31 Desember 2024	31 Desember 2023
--	-------------------------	-------------------------

Rp349.193.299.339,60

Rp339.123.654.009,42

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 senilai Rp349.193.299.339,60, bertambah senilai Rp10.069.645.330,18 atau 2,97%, jika dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp339.123.654.009,42. Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 merupakan akumulasi nilai peralatan dan mesin termasuk kendaraan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. Terdapat aset tetap peralatan mesin yang berasal dari P3D senilai Rp2.825.009.666,00 yang telah dicatat dalam neraca masing-masing SKPD pengguna.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap peralatan dan mesin dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo Awal (1 Jan 2024)		339.123.654.009,42
Mutasi Tambah:		
- Koreksi	26.884.000,00	
- Belanja Modal	18.526.761.862,00	
- Kapitalisasi	26.919.900,00	
- Hibah	537.757.938,00	
- Reklasifikasi	110.720.600,00	
- Mutasi antar SKPD	25.229.750,00	
Total Mutasi Tambah		19.254.274.050,00
Mutasi Kurang:		
-BM yang tidak dikapitalisasi	(975.888.150,00)	
- Reklasifikasi	(7.875.427.283,82)	
- Ekstrakom	(308.083.536,00)	
- Mutasi antar SKPD	(25.229.750,00)	
Total Mutasi Kurang		(9.184.628.719,82)
Saldo Akhir (31 Des 2024)		349.193.299.339,60

1. Koreksi senilai Rp26.884.000,00 merupakan koreksi atas pengembalian motor hibah sesuai Tindak Lanjut BPK saat Pemeriksaan Manajemen Aset pada Dinas Lingkungan Hidup.
2. Belanja Modal senilai Rp18.526.761.862,00 merupakan akumulasi nilai belanja modal dari seluruh SKPD, yang di dalamnya termasuk belanja modal peralatan dan mesin non RKUD senilai Rp4.072.085.400,00 yang bersumber dari:
 - a. Dana BOSP SD senilai Rp1.841.095.500,00;
 - b. Dana BOSP SMP senilai Rp869.412.500,00; dan
 - c. Dana Kapitasi JKN senilai Rp604.331.500,00.
 - d. Dana BOSP Swasta yang salah penganggaran menjadi Belanja Modal senilai Rp757.245.900,00, sehingga aset tersebut tidak dikapitalisasi.
3. Kapitalisasi senilai Rp26.919.900,00 terdapat pada SKPD berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp3.500.000,00 berupa aset dana BOSP;
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belanja bahan lainnya berupa kasur senilai Rp7.500.000,00;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, dari belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya berupa troli senilai Rp919.900,00;
 - d. Sekretariat DPRD berupa papan nama senilai Rp15.000.000,00.
4. Hibah masuk senilai Rp537.757.938,00 terdapat pada SKPD berikut.
- a. Dinas Perhubungan berupa Bis Sekolah senilai Rp497.406.900,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk Digunakan dalam Tugas-tugas Operasional Nomor KV.003/165.B/BAST0/BS/SHTKER/DAJ/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 oleh Kementerian Perhubungan;
 - b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa motor honda verza senilai Rp19.991.038,00 dan box motor senilai Rp9.955.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Motor Perpustakaan Keliling (MPK) Nomor 6190/4.2/PLK.03.03/XII.2021 tanggal 13 Desember 2021;
 - c. Badan Keuangan Daerah berupa kendaraan roda dua senilai Rp7.520.000,00, kulkas senilai Rp1.500.000,00 dan *air cooler* senilai Rp1.385.000,00 sesuai Surat Keterangan telah menerima barang dari PT Bank BRI.
5. Reklasifikasi masuk senilai Rp110.720.600,00, berasal dari gedung bangunan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya. Reklasifikasi keluar peralatan mesin disebabkan karena adanya kesalahan penganggaran pada SKPD juga progres dari penelusuran kembali aset yang tidak ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi, pencatatan aset yang tidak sesuai jenisnya dan dampak dari perbaikan kebijakan akuntansi pada aplikasi Simda BMD. Reklas masuk peralatan mesin berdasarkan asalnya dapat diuraikan sebagai berikut.
- a. Gedung bangunan senilai Rp12.000.000,00 yang terdapat pada Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja berupa pilar papan nama senilai Rp12.000.000,00;
 - b. Aset tetap lainnya terdapat pada SKPD berikut.
 - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan (belanja dana BOSP), berupa rak buku, kursi kerja, kipas angin, meja setengah biro. Papan pengumuman, matras, printer, *fingerprint*, timbangan dan gitar senilai Rp17.950.000;
 - Badan Keuangan Daerah berupa partisi senilai Rp22.175.000,00.
 - c. Aset lainnya pada Badan Keuangan Daerah yang merupakan progres penelusuran kembali barang yang tidak ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi senilai Rp58.595.600,00; dan
6. Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi senilai Rp975.888.150,00 merupakan belanja modal yang tidak menjadi aset yang terdapat pada:
- a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp924.163.500,00 yang terdiri dari Alat Praktik dan Peraga Siswa (IPA) dan mesin jahit senilai Rp137.247.600,00, pelunasan utang pengadaan mebel pada



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- SDG Wuiray senilai Rp25.000.000,00 dan alat pemotong kertas, tongkat mayoret, atap seng papa gugus depan dan kostum sepak bola pada 3 sekolah senilai Rp3.050.000,00, dan peralatan tiang bendera senilai Rp1.400.000,00 dan *connectors* senilai Rp220.000,00. Adapun belanja modal BOS Swasta yang seharusnya dianggarkan pada belanja hibah, namun salah penganggaran rekening belanja modal peralatan mesin BOS sebesar Rp757.245.900,00;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah berupa keranjang obat, mortir dan stamper obat, mangkok dan piring senilai Rp4.337.000,00;
 - c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa barang medis habis pakai senilai Rp36.575.075,00 yang terdiri dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp11.855.925,00, Puskesmas Ledunu senilai Rp1.399.000,00, Puskesmas Daieko senilai Rp1.226.150,00, Puskesmas Seba senilai Rp7.789.000, Puskesmas Eilogo senilai Rp5.850.000,00, Puskesmas Bolou senilai Rp4.545.000,00 dan Puskesmas Eimadake senilai Rp1.860.000,00. Adapun pelunasan utang belanja pengadaan alat set KAI KB pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp2.050.000,00
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berupa flashdisk dan suku cadang senilai Rp1.122.575,00; dan
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika berupa kabel dan konektor senilai Rp9.690.000,00.
7. Reklasifikasi keluar senilai Rp7.875.427.283,82 ke jalan irigasi dan jaringan, gedung bangunan dan aset lainnya. Reklasifikasi keluar peralatan mesin atas barang yang telah diserahkan kepada masyarakat namun masih dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah, kesalahan penganggaran, disebabkan pencatatan aset yang tidak sesuai jenisnya, aset yang dikuasai atau dimanfaatkan namun belum ada dokumen hibah, perubahan kondisi barang ke rusak berat dan dampak dari perbaikan kebijakan akuntansi pada aplikasi Simda BMD. Reklas keluar peralatan mesin dapat diuraikan sebagai berikut.
- a. Gedung bangunan terdiri dari bangunan lampu penerang jalan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp568.260.000,00 dan Dinas Perhubungan senilai Rp153.900.000,00, dan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan berupa bak penampung air senilai Rp5.128.590.858,00;
 - b. Jalan irigasi dan jaringan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp3.500.000,00, berupa pemasangan meteran listrik SMPN 2 Liae;
 - c. Aset lainnya senilai Rp2.021.176.425,82 yang merupakan Barang dalam kondisi rusak berat sesuai hasil penelitian.

Tabel 5.52 Reklas Barang Rusak Berat

No	SKPD	Nomor Dokumen	Nilai
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	032/135/Penelitian BMD/Bakeuda-SR/XII/2024	161.331.064,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	032/114/Penelitian BMD/BAKEUDA-SR/VIII/2024	120.713.014,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	Nomor Dokumen	Nilai
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	032/134/Penelitian BMD/Bakeuda-SR/XI/2024	42.564.650,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	032/122/Penelitian BMD/Bakeuda-SR/IX/2024	69.311.350,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	032/120/Penelitian BMD/BAKEUDA-SR/IX/2024	228.182.226,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	032/118/Penelitian BMD/BAKEUDA-SR/IX/2024	28.416.000,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	032/119/Penelitian BMD/Bakeuda-SR/IX/2024	254.452.884,00
8	Bagian Administrasi Pembangunan	032/126/Penelitian BMD/BAKEUDA-SR/X/2024	110.704.985,00
9	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	032/133/PENELITIAN BMD/BAKEUDA-SR/XII/2024	30.785.000,00
10	Inspektorat Daerah	032/131/Penelitian BMD/Bakeuda-SR/XI/2024	87.650.000,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	032/132/PENELITIAN BMD/BAKEUDA-SR/XI/2024	195.224.932,82
12	Sekretariat DPRD	032/129/Penelitian BMD/BAKEUDA-SR/X/2024	65.195.000,00
13	Kecamatan Sabu Barat	032/375.a/Inventarisasi/kec-Sabar/X/2024	67.629.938,00
14	Kecamatan Sabu Liae	032/118/Penelitian BMD/BAKEUDA-SR/IX/2024	133.908.544,00
15	Kecamatan Hawu Mehara	032/171.a/Inventarisasi/HM-SR/XI/2024	144.067.088,00
16	Kecamatan Raijua	032/125/Penelitian BMD/Bakeuda-SR/IX/2024	245.245.500,00
17	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	032/127/Penelitian BMD/Bakeuda-SR/X/2024	35.794.250,00
Total			2.021.176.425,82

8. Ekstrakom sebesar Rp308.083.536,00 yang terdapat pada SKPD berikut.
 - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp155.562.200;
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp60.987.900,00;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp17.420.000,00;
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp1.397.436,00;
 - e. Dinas Pariwisata senilai Rp1.500.000,00;
 - f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp4.116.000,00;
 - g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp1.320.000,00;
 - h. Dinas Pertanian dan Pangan senilai Rp26.880.000,00;
 - i. Kecamatan Sabu Timur senilai Rp8.500.000,00;
 - j. Sekretariat DPRD senilai Rp30.400.000,00.
9. Mutasi antar SKPD yang dari Sekretariat DPRD ke Dinas Perhubungan berupa *AC Window* dan *AC Split* senilai Rp25.229.750,00 sesuai Berita Acara Mutasi dan Reklasifikasi Pencatatan Barang Nomor 032/179/SETWAN-SR/XI/2023 tanggal 13 November 2023.

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rincian aset tetap peralatan mesin tahun 2024 dan tahun 2023 pada setiap SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.53 Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD

Uraian	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga	62.152.228.075,48	59.006.405.939,48	3.145.822.136,00	5,33
Rumah Sakit Umum Daerah	54.404.770.250,00	52.986.644.921,00	1.418.125.329,00	2,68
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	56.265.531.709,80	53.080.038.459,80	3.185.493.250,00	6,00
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	12.713.811.209,00	12.687.165.859,00	26.645.350,00	0,21
Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	766.478.850,00	798.390.200,00	(31.911.350,00)	(4,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	3.188.577.820,00	3.172.777.820,00	15.800.000,00	0,50
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.527.500.677,00	6.507.000.677,00	20.500.000,00	0,32
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2.154.743.072,00	2.101.133.072,00	53.610.000,00	2,55
Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah & Tenaga Kerja	1.052.757.409,00	686.817.409,00	365.940.000,00	53,28
Dinas Pertanian & Pangan	8.752.523.477,10	8.636.791.977,10	115.731.500,00	1,34
Dinas Lingkungan Hidup	1.959.448.435,00	1.608.326.635,00	351.121.800,00	21,83
Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	2.277.802.075,00	2.314.377.876,00	(36.575.801,00)	(1,58)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	3.591.351.790,00	3.541.822.190,00	49.529.600,00	1,40
Dinas Perhubungan	25.206.527.361,00	24.272.138.035,00	934.389.326,00	3,85
Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.592.471.228,00	3.705.825.748,00	(113.354.520,00)	(3,06)
Dinas Penanaman Modal & PTSP, Perindustrian & Perdagangan	46.758.395.119,00	51.696.112.977,00	(4.937.717.858,00)	(9,55)
Dinas Perpustakaan & Kearsipan	2.577.863.731,00	2.549.237.693,00	28.626.038,00	1,12
Dinas Kelautan & Perikanan	1.606.687.390,00	1.505.820.790,00	100.866.600,00	6,70
Dinas Pariwisata	1.813.069.275,00	1.596.875.275,00	216.194.000,00	13,54
Bagian Pemerintahan	506.037.500,00	506.037.500,00	0,00	0,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat	606.892.150,00	606.892.150,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	543.287.800,00	539.287.800,00	4.000.000,00	0,74
Bagian Perekonomian & Sumber Daya Alam	530.318.450,00	525.318.450,00	5.000.000,00	0,95
Bagian Administrasi Pembangunan	1.056.301.500,00	1.158.556.485,00	(102.254.985,00)	(8,83)
Bagian Umum	21.583.459.643,00	18.159.604.243,00	3.423.855.400,00	18,85
Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	527.702.577,00	524.614.577,00	3.088.000,00	0,59
Bagian Organisasi	615.191.095,00	606.071.095,00	9.120.000,00	1,50
Inspektorat Daerah	1.320.210.963,00	1.158.885.963,00	161.325.000,00	13,92
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.960.012.065,70	2.128.586.998,52	(168.574.932,82)	(7,92)
Badan Keuangan Daerah	5.034.887.158,00	4.701.775.200,00	333.111.958,00	7,08
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan & Pelatihan	2.457.658.706,02	2.417.910.806,02	39.747.900,00	1,64
Sekretariat DPRD	8.002.849.704,00	6.112.436.794,00	1.890.412.910,00	30,93
Kecamatan Sabu Barat	615.239.376,00	665.119.314,00	(49.879.938,00)	(7,50)
Kecamatan Sabu Timur	833.878.214,00	793.078.214,00	40.800.000,00	5,14



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kecamatan Sabu Liae	695.868.000,00	789.044.544,00	(93.176.544,00)	(11,81)
Kecamatan Hawu Mehara	1.341.996.616,00	1.486.063.704,00	(144.067.088,00)	(9,69)
Kecamatan Raijua	2.451.394.119,00	2.672.139.619,00	(220.745.500,00)	(8,26)
Kecamatan Sabu Tengah	727.323.498,50	683.940.498,50	43.383.000,00	6,34
Kantor Kesatuan Bangsa & Politik	420.251.251,00	434.586.501,00	(14.335.250,00)	(3,30)
Jumlah	349.193.299.339,60	339.123.654.009,42	10.069.645.330,18	2,97

Data penambahan dan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin digambarkan dalam Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 pada **Lampiran N.7.2.**

**5.3.1.3.3 Gedung dan
Bangunan**

31 Desember 2024
Rp614.368.957.812,64

31 Desember 2023
Rp562.644.595.694,50

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 senilai Rp614.368.957.812,64, bertambah senilai Rp51.724.362.118,09 atau 9,19% jika dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp562.644.595.694,50. Gedung dan Bangunan merupakan akumulasi aset tetap gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. Nilai perolehan gedung dan bangunan ini memenuhi klasifikasi aset tetap yang diperoleh dengan maksud tertentu untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua dan dalam kondisi siap pakai.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap gedung dan bangunan dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo Awal (1 Jan 2024)		562.644.595.694,50
Mutasi Tambah:		
- Koreksi	235.717.508,00	
- Belanja Modal	19.844.122.737,42	
- Utang Belanja	3.800.000,00	
- Kapitalisasi	8.439.234.948,00	
- Reklasifikasi	5.850.750.858,00	
- Hibah	6.994.701.569,00	
- KDP yang selesai	19.403.730.378,00	
Jumlah mutasi tambah		60.772.057.998,42
Mutasi Kurang:		
- BM Tidak Dikapitalisasi	(436.033.302,47)	
- Reklasifikasi	(463.104.861,81)	
- Ekstrakom	(927.110.000,00)	
- KDP	(7.221.447.716,00)	
Jumlah mutasi kurang		(9.047.695.880,28)
Saldo Akhir (31 Des 2024)		614.368.957.812,64

1. Koreksi senilai Rp235.717.508,00 terdapat pada SKPD:



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana senilai Rp185.720.000,00 yang merupakan koreksi kurang catat bangunan rawat jalan dan mess PKM Eimadake sesuai hasil penilaian.
- b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp49.997.508,00 yang merupakan koreksi kurang catat perencanaan Gedung Logistik yang berasal dari belanja barang dan jasa TA 2023.
2. Belanja Modal Gedung Bangunan Rp19.844.122.737,42 merupakan belanja modal yang seluruhnya ada pada SKPD.
3. Utang Belanja Rp3.800.000,00, merupakan pengawasan pembangunan pagar di SDN 1 Seba yang telah selesai dikerjakan, namun belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya tahun 2024.
4. Kapitalisasi Rp8.439.234.948,00 merupakan kapitalisasi dari belanja barang habis pakai, belanja jasa, dan belanja pemeliharaan, yang ada pada:
 - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Rp4.874.386.167,00, dari belanja pemeliharaan;
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp531.306.630,00 dari belanja pemeliharaan;
 - c. Dinas Perhubungan Rp2.846.345.251,00, dari belanja pemeliharaan;
 - d. Kecamatan Hawu Mehara Rp127.171.900,00 dari belanja barang habis pakai dan Rp60.025.000,00 dari belanja jasa.
5. Reklasifikasi masuk dari peralatan mesin terdapat pada SKPD:
 - a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp568.260.000,00 dan Dinas Perhubungan Rp153.900.000,00 berupa lampu jalan tenaga surya.
 - b. Dinas Penanaman Modal & PTSP, Perindustrian & Perdagangan Rp5.128.590.858,00 berupa bak penampung air.
6. Hibah senilai Rp6.994.701.569,00 terdapat pada Dinas Perhubungan sesuai Berita Acara Serah Terima Hibah berupa Dermaga Penyeberangan Seba dari Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 17.a/BAST/PEM-SR/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 berupa Bangunan Parkir Terbuka Permanen, Rumah Negara Gol. II Tipe D Permanen, Rambu Suar, Rambu Suar Lainnya, Bangunan Gedung Terminal, Pagar Permanen, Bangunan Rumah Genset dan Gedung Pos Jaga Permanen.
7. KDP selesai senilai Rp19.403.730.378,00 terdapat pada:
 - a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Rp6.476.355.954,00, bangunan rawat jalan dan mess Puskesmas Bolou;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Rp1.298.801.816,00, pekerjaan pembangunan Kantor Camat Sabu Barat;
 - c. Dinas Perhubungan Rp2.937.820.000,00 yang terdiri dari pekerjaan pembangunan gedung uji senilai Rp2.843.820.000,00 dan Perencanaan Sisi Darat Pelabuhan Penyeberangan Seba senilai Rp94.000.000,00;
 - d. Dinas Perpustakaan & Kearsipan Rp8.690.752.608,00, pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan.
8. Belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap Rp436.033.302,47 terdapat pada:



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp328.033.302,47 yang merupakan pelunasan utang belanja tahun 2023.
- b. Kecamatan Raijua senilai Rp108.000.000,00 yang merupakan rumah tidak layak huni yang diserahkan kepada masyarakat.
9. Reklasifikasi keluar senilai Rp463.104.861,81 berdasarkan akun tujuan terdiri atas
 - a. Perlatan dan mesin senilai Rp12.000.000,00 yang terdapat pada Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja berupa papan nama;
 - b. Jalan irigasi dan jaringan senilai Rp173.943.080,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga berupa MCK di Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar senilai Rp173.943.080,00;
 - c. Aset Lainnya senilai Rp277.161.781,81 terdapat pada SKPD berikut.
 - 1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga berupa kekurangan volume pekerjaan yang terdiri dari Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 1 Sabu Tengah senilai Rp7.658.745,68, Pembangunan Rumah Dinas SMPN 1 Sabu Tengah senilai Rp9.094.977,77, Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) SKB senilai Rp8.479.001,96, Pembangunan Gedung SMPN 8 Sabu Barat senilai Rp8.242.435,63, dan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Inpres Eirobo senilai Rp6.483.300,25;
 - 2) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana berupa gedung dalam kompleks Puskesmas Eimadake yang dimusnahkan pada saat pembangunan gedung puskesmas yang baru, gedung tersebut senilai Rp185.720.000,00;
 - 3) Kecamatan Sabu Barat berupa bangunan P3D yang dalam kondisi rusak berat senilai Rp29.000.000,00;
 - 4) Dinas Perhubungan berupa nilai kekurangan volume pekerjaan Jalan Lingkungan dan Area Parkir Pelabuhan Penyebrangan Seba pada senilai Rp15.088.912,15;
 - 5) Dinas Pariwisata berupa kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Aula Gedung Kesenian di Kecamatan Sabu Timur senilai Rp7.394.408,37.
 - d. Ekstrakom sebesar Rp927.110.000,00 terdapat pada SKPD berikut.
 - 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp568.260.000,00;
 - 2) Dinas Perhubungan senilai Rp153.900.000,00;
 - 3) Kecamatan Sabu Barat senilai Rp117.450.000,00;
 - 4) Kecamatan Sabu Liae senilai Rp87.500.000,00.
10. Konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp7.221.447.716,00 yang terdapat pada:
 - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp594.187.800,00 yang merupakan KDP pekerjaan RKB SDI Eirobo;
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana senilai Rp6.527.269.451,00 yang merupakan KDP pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Eimadake;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang senilai Rp99.990.465,00 yang merupakan KDP pekerjaan Gedung Kampus Pusat Luar Studi.

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5.54 Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD

Unit Organisasi	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	131.895.871.979,05	119.350.011.938,81	12.545.860.040,24	10,51
Rumah Sakit Umum Daerah	33.189.725.924,31	33.094.540.142,31	95.185.782,00	0,29
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	84.186.216.199,00	76.076.725.448,00	8.109.490.751,00	10,66
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	138.395.736.312,67	136.925.554.696,67	1.470.181.616,00	1,07
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	64.847.000,00	64.847.000,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	483.104.238,00	0,00	483.104.238,00	100,00
Dinas Pertanian Dan Pangan	10.915.484.913,00	10.915.484.913,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	14.731.346.907,85	1.114.859.000,00	13.616.487.907,85	1.221,36
Dinas Penanaman Modal & PTSP, Perindustrian & Perdagangan	126.187.089.636,71	121.008.498.778,71	5.178.590.858,00	4,28
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	9.910.062.954,00	224.019.000,00	9.686.043.954,00	4.323,76
Dinas Kelautan Dan Perikanan	2.403.018.954,00	2.403.018.954,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata	40.034.781.688,00	39.618.611.617,00	416.170.071,00	1,05
Bagian Umum	89.797.000,00	89.797.000,00	0,00	0,00
Badan Keuangan Daerah	54.353.050,00	54.353.050,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Sabu Barat	2.807.527.774,00	2.953.977.774,00	(146.450.000,00)	(4,96)
Kecamatan Sabu Timur	4.421.014.473,00	4.251.014.473,00	170.000.000,00	4,00
Kecamatan Sabu Liae	2.899.904.747,00	2.987.404.747,00	(87.500.000,00)	(2,93)
Kecamatan Hawu Mehara	2.348.310.983,00	2.161.114.083,00	187.196.900,00	8,66
Kecamatan Raijua	7.118.855.759,00	7.118.855.759,00	0,00	0,00
Kecamatan Sabu Tengah	1.776.907.320,00	1.776.907.320,00	0,00	0,00
Jumlah	614.368.957.812,59	562.644.595.694,50	51.724.362.118,09	9,19

Data penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan secara terinci terdapat pada **Lampiran N.7.3**.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan**31 Desember 2024**
Rp963.850.283.590,44**31 Desember 2023**
Rp802.330.108.849,04

Jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2024 senilai Rp963.850.283.590,44 bertambah senilai Rp161.520.227.875,40 atau 20,13% dibanding per 31 Desember 2023 senilai Rp802.330.108.849,04.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dapat dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Saldo Awal (1 Jan 2024)		802.330.108.849,04
Mutasi Tambah:		
- Koreksi	492.000.000,00	
- Belanja Modal	97.259.462.732,00	
- Hibah	48.174.731.763,00	
- Kapitalisasi	30.467.450,00	
- Reklasifikasi	186.443.080,00	
- Ekstrakom	734.809.142,00	
- KDP yang selesai	30.240.771.300,00	
Jumlah mutasi tambah		177.118.685.467,00
Mutasi Kurang:		
- BM Tidak Dikapitalisasi	(6.860.745.000,00)	
- Reklasifikasi	(166.152.969,60)	
- KDP	(8.571.612.756,00)	
Jumlah mutasi kurang		(15.598.510.725,60)
Saldo Akhir (31 Des 2024)		963.850.283.590,44

1. Koreksi senilai Rp492.000.000,00 merupakan koreksi lebih reklas keluar jalan provinsi yang terdiri atas Jembatan Depe Kecamatan Sabu Barat senilai Rp312.000.000,00 dan Jembatan Huli I Kecamatan Sabu Barat senilai Rp180.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Belanja Modal senilai Rp97.259.462.732,00 merupakan belanja modal yang ada pada SKPD.
3. Hibah senilai Rp48.174.731.763,00 terdapat pada Dinas Perhubungan sesuai Berita Acara Serah Terima Hibah berupa Dermaga Penyeberangan Seba dari Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 17.a/BAST/PEM-SR/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023.
4. Kapitalisasi senilai Rp30.467.450,00 terdapat pada SKPD berikut.
 - a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik, yaitu belanja pemasangan listrik di mess petugas puskesmas senilai Rp3.500.000,00.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari belanja Jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air senilai yaitu pengawasan pembangunan irigasi senilai Rp26.967.450,00.
5. Reklasifikasi masuk senilai Rp186.443.080,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang terdiri dari:
 - a. Meteran listrik senilai Rp12.500.000,00 pada SMPN 1 Liae, SMPN 2 Liae dan SDN Bolua;
 - b. MCK di Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar senilai Rp173.943.080,00.
6. Ekstrakom sebesar Rp734.809.142,00 merupakan hasil perbaikan kebijakan akuntansi pada aplikasi BMD, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 176.488.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2	Rumah Sakit Umum Daerah	17.814.000,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	243.759.864,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	133.441.678,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	841.500,00
6	Dinas Pertanian dan Pangan	62.988.500,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	4.000.000,00
8	Dinas Pariwisata	13.100.000,00
9	Bagian Umum	4.478.000,00
10	Sekretariat DPRD	317.000,00
11	Kecamatan Sabu Barat	6.880.000,00
12	Kecamatan Sabu Timur	2.000.000,00
13	Kecamatan Sabu Liae	29.700.000,00
14	Kecamatan Hawu Mehara	11.000.000,00
15	Kecamatan Raijua	13.000.000,00
16	Kecamatan Sabu Tengah	15.000.000,00
7.	KDP yang selesai pada tahun 2024 senilai Rp30.240.771.300,00, terdapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari jalan, jembatan, irigasi dan embung yang telah selesai dikerjakan, dengan rincian sebagai berikut.	
1)	Peningkatan Jalan Masuk Bandara Banggu Loni Eilode 780 Meter Dan Bangunan Rp2.401.540.000,00;	
2)	Peningkatan Jalan Masuk Pelabuhan Feri Desa Raemadia A+/- 300 Meter Konstruksi Beton Bertulang Dilengkapi 1 Decker Rp2.901.360.000,00;	
3)	Pembangunan Jembatan Titimone Rp7.624.270.000,00;	
4)	Penanganan <i>Long Segment</i> Jalan Mesara – Ege Rp6.934.459.120,00;	
5)	Penanganan <i>Long Segment</i> Jalan Raedewa – Raenalulu Rp8.745.853.340,00;	
6)	Perluasan Jaringan SPAM Delo Rp843.473.840,00;	
7)	Perluasan Jaringan SPAM Raekore Rp491.815.000,00;	
8)	Pembangunan Jembatan Titimone Rp124.431.660,00;	
9)	Pembangunan Jembatan Leoge Rp96.780.180,00;	
10)	Pembangunan Jembatan Lokowalu Rp76.788.160,00.	
8.	Belanja modal yang tidak dikapitalisasi senilai Rp6.860.745.000,00 dengan rincian sebagai berikut.	
a.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp6.835.745.000,00 yang terdiri dari:	
1)	Penampung Air Hujan Desa Raemude, Penampung Air Hujan Desa Ledetalo, Perencanaan Pembangunan PAH, Pembangunan Septictank Skala Bodae, Pembangunan Septictank Skala Eilode, Pembangunan Septictank Raedewa, Pembangunan Septictank Raekore, Pembangunan Septictank Raemude, Pembangunan Septictank Loborui, Pembangunan Septictank Waduwalla, Pembangunan Septictank Ledeke, Pembangunan Septictank Ballu, dan SPAM Ledetalo yang diserahkan kepada masyarakat senilai Rp6.314.696.250,00.	



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 2) Penguatan DB survei Kondisi Jembatan, Penguatan DB Survei Kondisi Jalan, Penguatan DB Survei Kondisi Jalan Desa Strategis, dan Penguatan DB survei Kondisi Jembatan senilai Rp497.801.950,00.
- 3) Pelunasan utang belanja rehab konstruksi bangunan pelengkap jalan Raemude - Eilogo senilai Rp23.246.800,00.
- b. Kecamatan Sabu Timur senilai Rp25.000.000,00 yang merupakan bak penampung air bersih yang diserahkan kepada masyarakat.
9. Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya berupa kekurangan volume pekerjaan Jalan *Long Segment* Mesara Ege Rp65.954.054,39, Jalan Matei Eilode Rp83.639.052,96, Jalan Masuk Goa Nahoro Rp8.878.638,28, dan Peningkatan Jalan Ramedue Uba Ae Rp7.681.223,97.
10. KDP senilai Rp8.571.612.756,00 merupakan pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri atas:
 - a. Embung Lokorae Desa Raekore Rp1.482.399.000,00;
 - b. SPAM perpipaan desa tanajawa Rp1.749.890.652,00;
 - c. SPAM perpipaan Desa Loboaju Rp1.335.483.252,00;
 - d. SPAM perpipaan Desa Tada Rp3.174.419.852,00;
 - e. Perencanaan Embung tersebar Rp148.000.000,00;
 - f. Perencanaan Pembangunan SPAM Tersebar Rp146.720.000,00;
 - g. Perencanaan Pembangunan Drainase Rp290.000.000,00;
 - h. Perencanaan DED Jalan Rp244.700.000,00.

Rincian jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dirinci per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.55 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD

Uraian	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	3.759.501.073,00	3.396.569.393,00	362.931.680,00	10,69
Rumah Sakit Umum Daerah	6.391.916.182,00	6.374.102.182,00	17.814.000,00	0,28
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.501.547.108,00	2.254.287.244,00	247.259.864,00	10,97
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	869.574.376.626,44	757.491.242.192,04	112.083.134.434,40	14,80
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.915.848.900,00	2.652.850.900,00	262.998.000,00	9,91
Badan Penanggulangan Bencana	841.500,00	0,00	841.500,00	100,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.980.400,00	14.980.400,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian dan Pangan	18.170.743.941,00	18.107.755.441,00	62.988.500,00	0,35
Dinas Lingkungan Hidup	945.795.950,00	941.795.950,00	4.000.000,00	0,42
Dinas Perhubungan	54.392.139.501,00	6.217.407.738,00	48.174.731.763,00	774,84
Dinas Komunikasi dan Informatika	32.916.000,00	32.916.000,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	3.346.145.535,00	3.346.145.535,00	0,00	0,00

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	53.536.500,00	53.536.500,00	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	303.127.324,00	303.127.324,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata	411.880.550,00	398.780.550,00	13.100.000,00	3,29
Bagian Administrasi Pembangunan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
Bagian Umum	34.223.500,00	29.745.500,00	4.478.000,00	15,05
Badan Keuangan Daerah	655.766.000,00	655.766.000,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	317.000,00	0,00	317.000,00	100,00
Kecamatan Sabu Barat	21.980.000,00	15.100.000,00	6.880.000,00	45,56
Kecamatan Sabu Timur	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Kecamatan Sabu Liae	29.700.000,00	0,00	29.700.000,00	100,00
Kecamatan Raijua	241.000.000,00	20.000.000,00	221.000.000,00	1.105,00
Kecamatan Hawu Mehara	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00
Kecamatan Sabu Tengah	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
Jumlah	963.850.283.590,44	802.330.108.849,04	161.520.174.741,40	20,13

Masih terdapat pencatatan atas pekerjaan perencanaan, pengawasan dan rehabilitasi dan peningkatan jalan, irigasi, jaringan yang berdiri sendiri sebagai aset karena belum dikapitalisasi ke aset induknya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selain itu juga masih terdapat selisih nilai neraca dan rincian pada KIB jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Saat ini SKPD sedang berproses dalam menelusuri kembali selisih yang ada dan akan memperbaiki pencatatan yang masih dipisahkan perencanaan, pengawasan dan rehabilitasi.

Daftar penambahan dan pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2024 dapat dirinci pada **Lampiran N.7.4**.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp30.560.778.327,68	Rp29.524.484.359,68

Aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp30.560.778.327,68 bertambah senilai Rp1.036.293.968,00 atau 3,51% jika dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp29.524.484.359,68.

Aset tetap lainnya berupa buku-buku ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan, barang-barang bercorak kebudayaan, hewan, dan tanaman yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua per 31 Desember 2024.

Rincian mutasi aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal (1 Jan 2024)		29.524.484.359,68
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	1.321.217.700,00	
- Hibah	46.695.968,00	
Total Mutasi Tambah		1.367.913.668,00

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Mutasi Kurang:

- BM Tidak Dikapitalisasi	(237.375.700,00)	
- Reklasifikasi	(94.244.000,00)	
Total Mutasi Kurang		(331.619.700,00)
Saldo Akhir (31 Des 2024)		30.560.778.327,68

1. Belanja Modal senilai Rp1.321.217.700,00 merupakan belanja modal yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp45.119.000,00, belanja modal sekolah yang bersumber dari Dana BOSP senilai Rp1.045.323.000,00 dan BOS Swasta yang salah penganggaran senilai Rp230.775.700,00;
2. Hibah senilai Rp46.695.968,00 terdapat pada SKPD berikut.
 - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga berupa buku senilai Rp33.606.168,00;
 - b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kapitalisasi berupa koleksi buku sesuai Berita Acara Serah Terima Motor Perpustakaan Keliling (MPK) Nomor 6190/4.2/PLK.03.03/XII.2021 tanggal 13 Desember 2021 senilai Rp13.089.800,00.
3. Belanja modal yang tidak dikapitalisasi berupa belanja modal BOS Swasta yang salah penganggaran yang harusnya belanja hibah namun dianggarkan melalui belanja modal aset tetap lainnya BOS senilai Rp237.375.700,00.
4. Reklas keluar Rp94.244.000,00 berdasarkan akun tujuan terdiri atas:
 - a. Peralatan mesin senilai Rp40.125.000,00 pada SKPD berikut.
 - 1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (belanja dana BOSP), berupa rak buku, kursi kerja, kipas angin, meja setengah biro, papan pengumuman, matras, printer, *fingerprint*, timbangan dan gitar senilai Rp17.950.000,00;
 - 2) Badan Keuangan Daerah berupa partisi senilai Rp22.175.000,00.
 - b. Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa meteran listrik pada SMPN 1 Liae dan SDN Bolua senilai Rp9.000.000,00;
 - c. Konstruksi dalam Pengerjaan berupa perencanaan rehab Pabrik Es senilai Rp45.119.000,00.

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dirinci per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.56 Aset Tetap Lainnya per SKPD

Uraian	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga	26.401.054.196,00	25.355.675.028,00	1.045.379.168,00	4,12
Rumah Sakit Umum Daerah	74.152.400,00	74.152.400,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana	5.946.000,00	5.946.000,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26.001.500,00	26.001.500,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	5.087.700,00	5.087.700,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian dan Pangan	2.680.081.280,68	2.680.081.280,68	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.373.100,00	9.373.100,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.344.400,00	11.344.400,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	3.943.000,00	3.943.000,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.886.000,00	2.886.000,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	979.122.891,00	966.033.091,00	13.089.800,00	1,36
Dinas Kelautan dan Perikanan	18.779.810,00	18.779.810,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata	66.350.000,00	66.350.000,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	16.825.800,00	16.825.800,00	0,00	0,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	57.450.100,00	57.450.100,00	0,00	0,00
Bagian Perekonomian & Sumber Daya Alam	11.500.700,00	11.500.700,00	0,00	0,00
Bagian Administrasi Pembangunan	5.996.000,00	5.996.000,00	0,00	0,00
Bagian Umum	24.214.800,00	24.214.800,00	0,00	0,00
Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	15.891.850,00	15.891.850,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	11.133.200,00	11.133.200,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00
Badan Keuangan Daerah	9.875.400,00	32.050.400,00	(22.175.000,00)	(69,19)
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	13.619.400,00	13.619.400,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	14.711.300,00	14.711.300,00	0,00	0,00
Kecamatan Raijua	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Kantor Kesatuan Bangsa & Politik	15.903.500,00	15.903.500,00	0,00	0,00
Jumlah	30.560.778.327,68	29.524.484.359,68	1.036.293.968,00	3,51

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada **Lampiran N.7.5**.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2024 Rp41.569.049.040,22	31 Desember 2023 Rp76.686.758.606,85
--	---	---

Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 senilai Rp41.569.049.040,22, berkurang senilai Rp35.117.709.566,63 atau 45,79% jika dibanding 31 Desember 2023 senilai Rp76.686.758.606,85. Nilai KDP berupa pengadaan barang dan pekerjaan fisik yang masih dalam proses penyelesaian baik dalam hal pembayaran maupun penyelesaian fisik kegiatan periode 31 Desember 2024.

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan secara rinci dapat dihitung sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Saldo Awal (1 Jan 2024)		76.686.758.606,85
Mutasi Tambah:		
- Kapitalisasi	99.695.000,00	
- Reklasifikasi	45.119.000,00	
- KDP	<u>15.793.060.472,00</u>	
Total Mutasi Tambah		15.937.874.472,00
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi	(1.411.082.360,63)	
- KDP yang selesai	<u>(49.644.501.678,00)</u>	
Total Mutasi Kurang		<u>(51.055.584.038,63)</u>
Saldo Akhir (31 Des 2024)		41.569.049.040,22

1. Kapitalisasi senilai Rp99.695.000,00 berasal dari belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air berupa perencanaan bendung dan jaringan irigasi tersebar di Kabupaten Sabu Raijua.
2. Reklasifikasi masuk senilai Rp45.119.000,00 berupa perencanaan rehab Pabrik Es terdapat pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
3. KDP senilai Rp15.793.060.472,00 merupakan penambahan KDP murni dari belanja modal tahun berjalan, terdapat pada:
 - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp594.187.800,00 yang merupakan KDP pekerjaan RKB SDI Eirobo.
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana senilai Rp6.527.269.451,00 yang merupakan pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Eimadake;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang senilai Rp8.671.603.221,00 yang terdiri atas:
 - 1) Pekerjaan Gedung Kampus Pusat Luar Studi Rp99.990.465,00
 - 2) Embung Lokorae Desa Raekore Rp1.482.399.000,00;
 - 3) SPAM perpipaan desa tanajawa Rp1.749.890.652,00;
 - 4) SPAM perpipaan Desa Loboaju Rp1.335.483.252,00;
 - 5) SPAM perpipaan Desa Tada Rp3.174.419.852,00;
 - 6) Perencanaan Embung tersebar Rp148.000.000,00;
 - 7) Perencanaan Pembangunan SPAM Tersebar Rp146.720.000,00;
 - 8) Perencanaan Pembangunan Drainase Rp290.000.000,00;
 - 9) Perencanaan DED Jalan Rp244.700.000,00.
4. Reklasifikasi keluar ke aset lainnya senilai Rp1.411.082.360,63 terdapat pada SKPD sebagai berikut
 - a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berupa:
 - 1) KDP Peralatan Mesin yang merupakan uang muka pengadaan motor trail pada tahun 2019 yang wanprestasi Rp125.152.500,00 dan telah disetorkan kembali ke Kas Daerah pada tanggal 16 September 2020 sebesar Rp17.000.000,00;
 - 2) Kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Eimadake senilai Rp56.690.478,06;



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 3) Perencanaan Puskesmas yang telah kadaluwarsa (lebih dari 5 tahun) yang terdiri dari Perencanaan Rehabilitasi PKM Bolou dan Sarana Pendukung Rp211.096.000,00, Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas Ledeunu dan Sarana Pendukung Rp331.111.000,00, Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas Rawat Jalan Eimadake Rp49.500.000,00, Perencanaan Renovasi /Rehab Berat PKM Seba & Sarana Pendukung Lainnya Rp261.253.000,00, Perencanaan Pembangunan Mes Dinas PKM Seba Rp48.479.000,00, Perencanaan Penambahan Gedung Puskesmas Daieko Rp255.170.000,00, dan Perencanaan Pembangunan Mess Dinas PKM Daieko Rp49.300.000,00.
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa kekurangan volume pekerjaan Pembangunan SPAM Perpipaan Desa Tanajawa senilai Rp13.330.382,57.
- c. Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan berupa perencanaan pembangunan gudang di daratan Sabu tahun 2017 senilai Rp10.000.000,00.
5. KDP yang selesai senilai Rp49.644.501.678,00 merupakan pekerjaan tahun sebelumnya yang telah diselesaikan, yang terdapat pada:
 - a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Rp6.476.355.954,00, bangunan rawat jalan dan mess Puskesmas Bolou; dan
 - b. Dinas Perhubungan Rp2.937.820.000,00 yang terdiri dari pekerjaan pembangunan gedung uji senilai Rp2.843.820.000,00 dan Perencanaan Sisi Darat Pelabuhan Penyeberangan Seba senilai Rp94.000.000,00.
 - c. Dinas Perpustakaan & Kearsipan Rp8.690.752.608,00, pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan.
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp31.539.573.116,00 yang terdiri atas:
 - 1) Kantor Camat Sabu Barat Rp1.298.801.816,00;
 - 2) Peningkatan Jalan Masuk Bandara Bangngu Loni Eilode 780 Meter Dan Bangunan Rp2.401.540.000,00;
 - 3) Peningkatan Jalan Masuk Pelabuhan Feri Desa Raemadia A+- 300 Meter Konstruksi Beton Bertulang Dilengkapi 1 Deker Rp2.901.360.000,00;
 - 4) Pembangunan Jembatan Titimone Rp7.624.270.000,00;
 - 5) Penanganan *Long Segment* Jalan Mesara – Ege Rp6.934.459.120,00;
 - 6) Penanganan *Long Segment* Jalan Raedewa – Raenalulu Rp8.745.853.340,00;
 - 7) Perluasan Jaringan SPAM Delo Rp843.473.840,00;
 - 8) Perluasan Jaringan SPAM Raekore Rp491.815.000,00;
 - 9) Pembangunan Jembatan Titimone Rp124.431.660,00;
 - 10) Pembangunan Jembatan Leoge Rp96.780.180,00;
 - 11) Pembangunan Jembatan Lokowalu Rp76.788.160,00.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dirinci per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.57 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Unit Organisasi	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga	594.187.800,00	0,00	594.187.800,00	100,00
Rumah Sakit Umum Daerah	44.999.955,00	44.999.955,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.505.579.047,94	7.842.417.529,00	(1.336.838.481,06)	(17,05)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.746.352.318,28	46.527.957.595,85	(22.781.605.277,57)	(48,96)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	74.019.525,00	74.019.525,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	2.937.820.000,00	(2.937.820.000,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	10.534.391.394,00	10.544.391.394,00	(10.000.000,00)	(0,09)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	8.690.752.608,00	(8.690.752.608,00)	(100,00)
Dinas Kelautan dan Perikanan	45.119.000,00	0,00	45.119.000,00	100,00
Jumlah	41.569.049.040,22	76.686.758.606,85	(35.117.709.566,63)	(45,79)

Daftar konstruksi dalam pengerjaan tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada **Lampiran N.7.6.**

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Tetap	(Rp784.489.788.426,37)	(Rp619.226.108.827,35)

Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 senilai (Rp784.489.788.426,37) bertambah senilai (Rp165.263.679.599,02) atau 26,69% jika dibanding per 31 Desember 2023 senilai (Rp619.226.108.827,35).

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 5.58 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Uraian	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Peralatan dan Mesin	(292.700.795.305,39)	(271.880.057.665,21)	(20.820.737.640,18)	7,66
2	Gedung dan Bangunan	(103.591.850.618,91)	(78.039.214.049,07)	(25.552.636.569,84)	32,74
3	Jalan, Irigasi & Jaringan	(388.197.142.502,07)	(269.306.837.113,07)	(118.890.305.389,00)	44,15
	Jumlah	(784.489.788.426,37)	(619.226.108.827,35)	(165.263.679.599,02)	26,69

5.3.1.4 Properti Investasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp13.365.000,00	Rp13.365.000,00

Properti Investasi menurut PSAP Nomor 17 adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua memiliki properti investasi senilai Rp13.365.000,00, yang terdiri atas properti investasi senilai Rp48.365.000,00 dan akumulasi penyusutan properti investasi senilai Rp35.000.000,00.

Rincian properti investasi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua terdiri atas:

1. Tanah senilai Rp7.695.000,00 dengan luas 5.130m² yang beralamat di Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua. Properti tersebut

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

disewakan dalam periode sewa (10 tahun) menurut surat perjanjian kerja sama Nomor 151 Tahun 2016 dan Nomor 10/UD.PJ/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditujukan/digunakan untuk Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;

2. Tanah senilai Rp5.670.000,00 dengan luas 3.650m² yang beralamat di Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua. Properti tersebut disewakan ke pihak Bank Rakyat Indonesia sebagai Kantor Unit BRI Sabu; dan
3. Bangunan senilai Rp35.000.000,00 yang beralamat Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua. Properti tersebut disewakan ke pihak Bank Rakyat Indonesia sebagai Kantor Unit BRI Sabu.

5.3.1.5 Dana Cadangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	Rp22.120.000.000,00

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan terbentuk melalui pengeluaran pembiayaan yaitu pembentukan dana cadangan dan hasil pengelolaan dana cadangan berupa bunga deposito atau jasa giro.

Dana Cadangan per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, berkurang senilai Rp22.120.000.000,00 atau 100% jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 senilai Rp22.120.000.000,00. Dana cadangan pada tahun 2024 telah dicairkan sehingga tidak terdapat saldo di Dana Cadangan.

Tabel 5.59 Dana Cadangan

Uraian	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pemilikada	0,00	22.120.000.000,00	(22.120.000.000,00)	0,00
Pembangunan Pabrik Karung	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	22.120.000.000,00	(22.120.000.000,00)	0,00

Untuk lebih jelasnya Dana Cadangan Per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran N.8**

5.3.1.6 Aset Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp107.793.322.794,47	Rp105.493.901.043,27

Aset lainnya merupakan bagian dari non lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah. Aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua per 31 Desember 2024 senilai Rp107.793.322.794,47 bertambah Rp2.299.427.751,20 atau 2,18% jika dibanding per 31 Desember 2023 senilai Rp105.493.901.043,27. Rincian aset lainnya sebagai berikut.

5.3.1.6.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp330.658.138,00	Rp373.682.411,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tuntutan ganti kerugian daerah tahun 2024 senilai Rp330.658.138,00, merupakan tagihan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan bukan bendahara atau pejabat lain yang SKTJMnya sudah sejak tahun 2012. Rincian tuntutan ganti kerugian daerah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.60 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

No	Inisial/SKPD	Tanggal SKTJM	Jenis/Tahun	Nilai (Rp)
1	FK/Sekretariat DPRD	05/09/2012	TP/2011	37.060.000
2	FR/Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	07/06/2021	TP/2021	115.697.638,00
3	AS/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	08/10/2012	TGR/2011	14.110.500,00
4	WGB/SD Inpres Tanajawa	18/06/2012	TGR/2011	7.000.000,00
5	TBK/Desa Eimadake	28/01/2012	TGR/2011	156.790.000,00
TOTAL				330.658.138,00

5.3.1.6.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2024 Rp4.412.826.270,00	31 Desember 2023 Rp4.412.826.270,00
--	--	--

Kemitraan dengan pihak ketiga Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua per 31 Desember 2024 senilai Rp4.412.826.270,00 di mana nilainya masih sama dengan saldo per 31 Desember 2023, yang merupakan pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan berupa uang (sewa). Kemitraan pihak ketiga merupakan gedung mess Pemda yang disewakan kepada pegawai lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

5.3.1.6.3 Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2024 Rp0,00	31 Desember 2023 Rp0,00
--------------------------------------	--	--

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 yang nilainya sama dengan saldo per 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan aset tak berwujud yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tidak memenuhi syarat sebagai aset tidak berwujud sehingga dihapuskan.

5.3.1.6.4 Aset Lain-lain	31 Desember 2024 Rp103.014.929.386,47	31 Desember 2023 Rp100.372.985.362,27
---------------------------------	--	--

Jumlah Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 senilai Rp103.014.929.386,47, bertambah senilai Rp2.641.944.024,20 atau 2,63% jika dibanding per 31 Desember 2023 senilai Rp100.372.985.362,27. Aset lain-lain berupa barang dalam kondisi rusak berat, aset P3D yang tidak ditemukan saat verifikasi yang menunggu penghapusan, aset yang akan dihibahkan kepada pihak lain dan aset yang tidak ditemukan dan hilang saat inventarisasi,



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

aset yang sudah dikelola namun belum ada dokumen hibah dan aset yang masih dalam penelusuran dan kekurangan volume pekerjaan yang belum disetorkan kembali.

Rincian aset lain-lain per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.61 Aset Lain-Lain

Unit Organisasi	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	12.790.134.492,90	(3.066.305.906,00)	9.723.828.586,90
Rumah Sakit Umum Daerah	13.600.437.143,23	(9.503.620.569,00)	4.096.816.574,23
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.583.748.192,73	(47.562.073,00)	1.536.186.119,73
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.666.403.083,03	(32.293.128.459,00)	18.373.274.624,03
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	95.251.550,00	(86.632.500,00)	8.619.050,00
Satuan Polisi Pamong Praja	245.278.750,00	(201.038.959,00)	44.239.791,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.100.980.000,00	(1.074.052.117,00)	26.927.883,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	92.448.150,00	(81.265.418,00)	11.182.732,00
Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	39.120.000,00	(3.568.768,00)	35.551.232,00
Dinas Pertanian dan Pangan	3.764.696.562,90	(3.403.518.024,00)	361.178.538,90
Dinas Lingkungan Hidup	680.000,00	0,00	680.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	891.781.790,00	(804.521.460,00)	87.260.330,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	219.943.250,00	(208.645.575,00)	11.297.675,00
Dinas Perhubungan	10.097.536.012,15	(5.857.753.779,00)	4.239.782.233,15
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.416.279.684,00	(1.279.455.966,00)	136.823.718,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan	54.918.424.150,29	(6.319.563.235,27)	48.598.860.915,02
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.200.500,00	(15.100.500,00)	100.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	12.316.598.475,00	(5.082.523.283,00)	7.234.075.192,00
Dinas Pariwisata	915.730.408,37	(219.345.763,00)	696.384.645,37
Bagian Pemerintahan	41.354.450,00	(41.354.450,00)	0,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
Bagian Administrasi Pembangunan	303.562.485,00	(216.623.794,00)	86.938.691,00
Bagian Umum	777.078.658,00	(758.550.158,00)	18.528.500,00
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	34.373.000,00	(34.373.000,00)	0,00
Bagian Organisasi	58.524.975,00	(47.013.379,00)	11.511.596,00
Inspektorat Daerah	101.122.250,00	(98.212.250,00)	2.910.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	335.657.862,96	(281.145.666,82)	54.512.196,14
Badan Keuangan Daerah	8.627.492.917,00	(1.389.750.700,00)	7.237.742.217,00
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	180.673.104,00	(155.284.574,00)	25.388.530,00
Sekretariat DPRD	1.097.392.290,00	(851.364.381,00)	246.027.909,00
Kecamatan Sabu Barat	110.964.888,00	(94.969.271,00)	15.995.617,00
Kecamatan Sabu Timur	295.371.807,00	(295.371.807,00)	0,00
Kecamatan Sabu Liae	142.563.144,00	(140.570.544,00)	1.992.600,00
Kecamatan Hawu Mehara	220.889.213,00	(219.186.437,00)	1.702.776,00
Kecamatan Raijua	435.103.875,00	(417.026.161,00)	18.077.714,00
Kecamatan Sabu Tengah	76.645.000,00	(51.687.500,00)	24.957.500,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	78.147.950,00	(35.794.250,00)	42.353.700,00
Jumlah	177.690.810.063,56	(74.675.880.677,09)	103.014.929.386,47

Aset lain-lain terdiri atas:



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain tahun 2024 senilai Rp177.690.810.063,56 bertambah senilai Rp4.076.262.791,02 atau 2,35% jika dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp173.614.547.272,54. Rincian mutasi aset lain-lain tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Saldo Awal (1 Jan 2024)		173.614.547.272,54
Mutasi Tambah:		
- Koreksi	(507.000.000,00)	
- Reklasifikasi	4.272.911.724,04	
- Hibah	554.666.667,00	
Total Mutasi Tambah		4.320.578.391,04
Mutasi Kurang:		
- Progres barang tidak ditemukan	(58.595.600,00)	
- Penghapusan	(185.720.000,00)	
Total Mutasi Kurang		(244.315.600,00)
Saldo Akhir (31 Des 2024)		177.690.810.063,58

1. Koreksi nilai saldo awal terdiri dari koreksi lebih catat tahun sebelumnya senilai Rp507.000.000,00 yang merupakan koreksi lebih reklas keluar jalan provinsi yang terdiri atas Jembatan Depe Kecamatan Sabu Barat senilai Rp312.000.000,00 dan Jembatan Huli I Kecamatan Sabu Barat senilai Rp180.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan reklas keluar ke ekstrakom berupa gedung bangunan senilai Rp15.000.000,00.
2. Reklasifikasi masuk senilai Rp4.272.911.724,04 berdasarkan akun sumber terdiri atas:
 - a. Tanah senilai Rp6.031.476,00 berupa sertifikat sekolah swasta yang akan dihibahkan.
 - b. Peralatan dan mesin senilai Rp2.021.176.425,82 barang dalam kondisi rusak berat sesuai hasil penelitian TA 2024;
 - c. Gedung dan bangunan senilai Rp277.161.781,78 terdapat pada SKPD berikut.
 - 1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga berupa kekurangan volume pekerjaan yang terdiri dari Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 1 Sabu Tengah senilai Rp7.658.745,68, Pembangunan Rumah Dinas SMPN 1 Sabu Tengah senilai Rp9.094.977,77, Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) SKB senilai Rp8.479.001,96, Pembangunan Gedung SMPN 8 Sabu Barat senilai Rp8.242.435,60, dan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Inpres Eirobo senilai Rp6.483.300,25;
 - 2) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana berupa gedung dalam kompleks Puskesmas Eimadake yang



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- dimusnahkan pada saat pembangunan gedung puskesmas yang baru, gedung tersebut senilai Rp185.720.000,00;
- 3) Kecamatan Sabu Barat berupa bangunan P3D yang dalam kondisi rusak berat senilai Rp29.000.000,00;
 - 4) Dinas Perhubungan berupa nilai kekurangan volume pekerjaan Jalan Lingkungan dan Area Parkir Pelabuhan Penyeberangan Seba pada senilai Rp15.088.912,15;
 - 5) Dinas Pariwisata berupa kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Aula Gedung Kesenian di Kecamatan Sabu Timur senilai Rp7.394.408,37.
- d. Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp166.152.969,60 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa kekurangan volume pekerjaan yang terdiri dari Jalan *Long Segment* Mesara Ege Rp65.954.054,39, Jalan Matei Eilode Rp83.639.052,96, Jalan Masuk Goa Nahoro Rp8.878.638,28, dan Peningkatan Jalan Ramedue Uba Ae Rp7.681.223,97.
- e. Konstruksi dalam Pengerjaan senilai Rp1.394.082.360,63 terdapat pada SKPD sebagai berikut:
- 1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berupa:
 - KDP Peralatan Mesin yang merupakan uang muka pengadaan motor trail pada tahun 2019 yang wanprestasi Rp125.152.500,00 dan telah disetorkan kembali ke Kas Daerah pada tanggal 16 September 2020 sebesar Rp17.000.000,00;
 - Kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Eimadake senilai Rp56.690.478,06;
 - Perencanaan Puskesmas yang telah kadaluwarsa (lebih dari 5 tahun) yang terdiri dari Perencanaan Rehabilitasi PKM Bolou dan Sarana Pendukung Rp211.096.000,00, Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas Ledunu dan Sarana Pendukung Rp331.111.000,00, Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas Rawat Jalan Eimadake Rp49.500.000,00, Perencanaan Renovasi /Rehab Berat PKM Seba & Sarana Pendukung Lainnya Rp261.253.000,00, Perencanaan Pembangunan Mes Dinas PKM Seba Rp48.479.000,00, Perencanaan Penambahan Gedung Puskesmas Daieko Rp255.170.000,00, dan Perencanaan Pembangunan Mess Dinas PKM Daieko Rp49.300.000,00.
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa kekurangan volume pekerjaan Pembangunan SPAM Perpipaian Desa Tanajawa senilai Rp13.330.382,57.
 - 3) Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan berupa perencanaan pembangunan gudang di daratan Sabu tahun 2017 senilai Rp10.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- f. Koreksi atas Beban Jasa Pelayanan Kesehatan karena adanya temuan kelebihan pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada 6 Puskesmas dan 1 RSUD senilai Rp186.330.686,21.
 - g. Koreksi Beban Jasa honorarium karena adanya temuan kelebihan pembayaran honorarium 5 SKPD senilai Rp38.653.750,00.
 - h. Koreksi Beban Perjalanan Dinas karena adanya temuan kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas senilai Rp183.322.274,00.
3. Hibah masuk berupa Mesin TCM (Ganexpert) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Rumah Sakit Umum Daerah yang belum ada dokumen hibah senilai Rp554.666.667,00.
 4. Reklasifikasi keluar berupa progres barang yang ditemukan pada Badan Keuangan Daerah sesuai Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Nomor 032/446.a/Inventarisasi/BAKEUDA-SR/XII/2024 pada tanggal 18 Desember 2024 senilai Rp58.595.600,00.
 5. Penghapusan senilai Rp185.720.000,00 yang merupakan bangunan rawat jalan dan mess Puskesmas Eimadake yang dimusnahkan pada saat pembangunan gedung puskesmas baru.

2. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2024 senilai (Rp74.675.880.677,09) bertambah senilai (Rp1.434.318.766,82) atau 1,96% jika dibanding dengan per 31 Desember 2023 senilai (Rp73.241.561.910,27). Akumulasi penyusutan aset lain-lain merupakan akumulasi penyusutan dari barang dalam kondisi rusak berat, aset P3D yang tidak ditemukan saat verifikasi yang menunggu penghapusan, aset yang akan dihibahkan kepada pihak lain dan aset yang tidak ditemukan dan hilang saat inventarisasi, dan aset yang sudah dikelola namun belum ada dokumen hibah dan aset yang masih dalam penelusuran.

Akumulasi penyusutan Aset Lain-Lain per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.62 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Unit Organisasi	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	(3.066.305.906,00)	(2.904.974.842,00)	(161.331.064,00)	5,55
Rumah Sakit Umum Daerah	(9.503.620.569,00)	(9.399.328.798,00)	(104.291.771,00)	1,11
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(47.562.073,00)	(47.562.073,00)	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(32.293.128.459,00)	(32.742.563.809,00)	449.435.350,00	(1,37)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(86.632.500,00)	(17.321.150,00)	(69.311.350,00)	400,15
Satuan Polisi Pamong Praja	(201.038.959,00)	(201.038.959,00)	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.074.052.117,00)	(1.074.052.117,00)	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(81.265.418,00)	(81.265.418,00)	0,00	0,00
Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	(3.568.768,00)	(3.568.768,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Unit Organisasi	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pertanian dan Pangan	(3.403.518.024,00)	(3.403.518.024,00)	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(804.521.460,00)	(580.142.272,00)	(224.379.188,00)	38,68
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(208.645.575,00)	(180.229.575,00)	(28.416.000,00)	15,77
Dinas Perhubungan	(5.857.753.779,00)	(5.857.753.779,00)	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.279.455.966,00)	(1.049.674.609,00)	(229.781.357,00)	21,89
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan	(6.319.563.235,27)	(6.319.563.235,27)	(0,00)	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(15.100.500,00)	(15.100.500,00)	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	(5.082.523.283,00)	(5.082.523.283,00)	0,00	0,00
Dinas Pariwisata	(219.345.763,00)	(219.345.763,00)	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	(41.354.450,00)	(41.354.450,00)	0,00	0,00
Bagian Administrasi Pembangunan	(216.623.794,00)	(107.235.476,00)	(109.388.318,00)	102,01
Bagian Umum	(758.550.158,00)	(758.550.158,00)	0,00	0,00
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	(34.373.000,00)	(3.588.000,00)	(30.785.000,00)	858,00
Bagian Organisasi	(47.013.379,00)	(47.013.379,00)	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	(98.212.250,00)	(13.472.250,00)	(84.740.000,00)	629,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(281.145.666,82)	(85.920.734,00)	(195.224.932,82)	227,22
Badan Keuangan Daerah	(1.389.750.700,00)	(1.448.346.300,00)	58.595.600,00	(4,05)
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	(155.284.574,00)	(155.284.574,00)	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	(851.364.381,00)	(791.772.298,00)	(59.592.083,00)	7,53
Kecamatan Sabu Barat	(94.969.271,00)	(8.876.000,00)	(86.093.271,00)	969,96
Kecamatan Sabu Timur	(295.371.807,00)	(295.371.807,00)	0,00	0,00
Kecamatan Sabu Liae	(140.570.544,00)	(6.662.000,00)	(133.908.544,00)	2.010,04
Kecamatan Hawu Mehara	(219.186.437,00)	(75.119.349,00)	(144.067.088,00)	191,78
Kecamatan Raijua	(417.026.161,00)	(171.780.661,00)	(245.245.500,00)	142,77
Kecamatan Sabu Tengah	(51.687.500,00)	(51.687.500,00)	0,00	0,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	(35.794.250,00)	0,00	(35.794.250,00)	0,00
Jumlah	(74.675.880.677,09)	(73.241.561.910,27)	(1.434.318.766,82)	1,96

Rincian penambahan pengurangan Aset Lainnya dapat dilihat di **Lampiran N.7.7**

5.3.1.5.5 Dana TDF	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp34.909.000,00	Rp334.407.000,00

Trehal 189asury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Dana TDF Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua senilai Rp34.909.000,00 berkurang senilai Rp299.498.000,00 atau 89,56% jika dibanding dengan Dana TDF per 31 Desember 2023 senilai Rp334.407.000,00.

5.3.2 Kewajiban	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp4.885.855.916,03	Rp8.788.275.822,88

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua periode 31 Desember 2024 senilai Rp4.885.855.916,03



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

berkurang senilai Rp3.902.419.906,85 atau 44,40% jika dibanding per 31 Desember 2023
senilai Rp8.788.275.822,88.

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua dapat dirinci sebagai berikut.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp4.885.855.916,03	Rp8.788.275.822,88

Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban Pemerintah Daerah yang dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan per 31 Desember 2024 yang terdiri dari utang PFK, pendapatan diterima di muka dan utang belanja.

5.3.2.1.1 Utang PFK	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp5.070.487,00	Rp73.532.715,74

Utang PFK per 31 Desember 2024 senilai Rp5.070.487,00, berkurang senilai Rp68.462.228,74 atau 93,10% jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp73.532.715,74. Nilai Rp5.070.487,00 termasuk utang pajak pada 7 sekolah senilai Rp4.784.417,00, sampai dengan 17 Maret 2024 baru 4 Sekolah yang menyetorkan dan sisanya belum karena terkendala pembayaran pajak melalui *Coretax*, dan utang pajak PPh Pasal 23 atas Puskesmas Eimadake senilai Rp285.000,00 yang telah disetorkan tanggal 20 Januari 2024 dan Puskesmas Bolou senilai Rp1.070,00 yang telah disetorkan tanggal 15 Januari 2024.

Tabel 5.63 Utang PFK

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
PFK BUD :				
BPJS Kesehatan	0,00	7.992.167,00	7.992.167,00	0,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	28.998.371,00	28.998.371,00	0,00
Iuran Jaminan Kematian	0,00	71.652.392,00	71.652.392,00	0,00
Iuran Jaminan Kesehatan (4%)	0,00	1.011.560.373,00	1.011.560.373,00	0,00
Iuran Wajib Pegawai 1%	0,00	255.183.692,00	255.183.692,00	0,00
Iuran Wajib Pegawai 8%	0,00	621.561.839,00	621.561.839,00	0,00
Lainnya	0,00	718.101.599,01	718.101.599,01	0,00
PPh Pasal 21	0,00	1.649.242.862,00	1.649.242.862,00	0,00
PPh Pasal 22	0,00	138.406.716,80	138.406.716,80	0,00
PPh Pasal 23	0,00	29.723.956,00	29.723.956,00	0,00
PPh Pasal 4 (2)	0,00	895.555.454,00	895.555.454,00	0,00
PPN	0,00	6.387.423.779,54	6.387.423.779,54	0,00
Jumlah I	0,00	11.815.403.201,35	11.815.403.201,35	0,00
PFK Bendahara BOSP :				
PPh Pasal 21	13.030.032,00	110.927.999,00	122.197.031,00	1.761.000,00
PPh Pasal 23	2.023.100,00	29.680.791,00	31.302.791,00	401.100,00
PPN	24.177.397,00	555.798.427,00	577.943.007,00	2.032.817,00
PFK Lainnya	9.596.600,00	88.336.800,00	97.343.900,00	589.500,00
Jumlah II	48.827.129,00	784.744.017,00	828.786.729,00	4.784.417,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
PFK Bendahara FKTP :				
PPh Pasal 21	0,00	24.741.451,00	24.456.451,00	285.000,00
PPh Pasal 22	0,00	19.546.179,86	19.546.179,86	0,00
PPh Pasal 23	12.636,00	79.636.911,00	79.648.477,00	1.070,00
PPN	0,00	184.565.842,00	184.565.842,00	0,00
PFK Lainnya		27.847.500,00	27.847.500,00	0,00
Jumlah III	12.636,00	336.337.883,86	336.064.449,86	286.070,00
Jumlah(I + II + III + IV)	48.839.765,00	12.936.485.102,21	12.980.254.380,21	5.070.487,00

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima di Muka	31 Desember 2024 Rp61.799.999,67	31 Desember 2023 Rp31.799.999,67
--	---	---

Pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2024 senilai Rp61.799.999,67 bertambah senilai Rp30.000.000,00 atau 94,34% jika dibanding per 31 Desember 2023 senilai Rp31.799.999,67. Pendapatan diterima di muka bersumber dari sewa pemakaian tanah untuk SPBU dan uang muka pembelian garam curah. Uang muka pembelian garam dihitung berdasarkan harga saat dilakukan pembayaran, nilai tersebut masih dapat berubah sesuai perkembangan harga garam dan kesepakatan dengan pembeli. Rincian pendapatan diterima di muka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.64 Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Pembayaran (Rp)	Akumulasi s.d. 2023 (Rp)	Pendapatan 2024 (Rp)	Pendapatan di Terima di Muka (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =2-3-4
Sewa Tanah Lokasi SPBU (APMS Niti S) 10 Tahun NPS No 151 Tahun 2016/29 Des 2016	100.000.000,00	80.000.000,33	10.000.000,00	9.999.999,67
Sewa Ruang Kantor Bupati (Bank NTT) 5 Tahun SPSG No 032/85/Bakeuda- SR/IV/2024/17 April 2024	50.000.000,00	0,00	10.000.000,00	40.000.000,00
Melkianus Djami Modjo (Garam)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Hengky Edison Balla (Garam)	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00
Jumlah	161.800.000,00	80.000.000,33	20.000.000,00	61.799.999,67

5.3.2.1.3 Utang Belanja	31 Desember 2024 Rp4.798.064.932,00	31 Desember 2023 Rp8.682.943.107,47
--------------------------------	--	--

Utang belanja per 31 Desember 2024 senilai Rp4.798.064.932,00 berkurang senilai Rp3.884.878.175,47 atau 44,74% jika dibanding per 31 Desember 2023 senilai Rp8.682.943.107,47.

Utang belanja secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.65 Utang Belanja

Unit Organisasi	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Utang Belanja Pegawai	4.029.704.352,00	8.212.752.870,00	(4.183.048.518,00)	(50,93)
Utang Belanja Barang dan Jasa	764.560.580,00	85.959.179,00	678.601.401,00	789,45
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	2.050.000,00	(2.050.000,00)	(100,00)
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.800.000,00	358.934.258,47	(355.134.258,47)	(98,94)
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	23.246.800,00	(23.246.800,00)	(100,00)
Jumlah	4.798.064.932,00	8.682.943.107,47	(3.884.878.175,47)	(44,74)

1. Utang Belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp4.029.704.352,00 yang tidak dibayarkan karena keterbatasan waktu dan volume pencairan saat akhir tahun yang begitu padat, Pada tahun 2024 tidak dapat dilakukan pencairan karena adanya proses hukum pemeriksaan dari Kejaksaan di mana Pihak Kejaksaan mengambil berkas terkait TPP dan sampai dengan akhir tahun anggaran tidak ada Surat Penghentian Penyidikan dari Kejaksaan. Oleh karena itu, pada tahun 2024 masih tetap dicatat utang dan akan dibayarkan pada tahun 2025.
2. Utang Belanja Barang dan Jasa senilai Rp764.560.580,00 terdiri dari utang belanja pengadaan ayunan dan perosotan untuk PAUD Swasta yang masing-masing senilai Rp244.020.000,00 dan Rp244.020.000,00, dan utang jasa pelayanan kesehatan pada RSUD dan Puskesmas senilai Rp276.520.580,00.
3. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp3.800.000,00 pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga berupa pengawasan pembangunan pagar di SD Negeri 1 Seba.

**5.3.2.1.4 Bagian Jangka
Pendek Lainnya****31 Desember 2024
Rp20.920.497,36****31 Desember 2023
Rp0,00**

Bagian jangka pendek lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp20.920.497,36, sedangkan di tahun 2023 senilai Rp0,00. Bagian jangka pendek lainnya terdiri dari:

1. Utang kelebihan pembayaran pajak galian C (CV Sinar Raya) senilai Rp6.335.535,00;
2. Utang kelebihan pembayaran PBBP2 senilai Rp1.508.093,00;
3. Utang kelebihan pembayaran sewa mess Pemda atas nama Yunike D Hau senilai Rp250.000,00;
4. Utang kelebihan pembayaran penjualan bokasi pada Dinas Pertanian dan Pangan atas nama Rae Edin Saputra Manoe Lado senilai Rp280.000,00;
5. Reklas piutang Pajak MBLB yang bernilai minus ke utang kelebihan pembayaran senilai Rp9.891.397,00;
6. Koreksi Piutang Denda MBLB (yang minus), Penyisihan dan Penyisihan Piutang Sewa BMD senilai Rp2.655.472,36.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
5.3.3 Ekuitas	Rp1.475.642.693.135,69	Rp1.478.031.991.774,86

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas per 31 Desember 2024 senilai Rp1.475.642.693.135,69 berkurang senilai Rp2.389.298.639,17 atau 0,16% jika dibanding per 31 Desember 2023 senilai Rp1.478.031.991.774,86.

5.4 Laporan Operasional

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua per 31 Desember 2024 dan 2023 memuat pendapatan - LO, beban, surplus/defisit dari operasi, kegiatan non operasional, surplus/defisit dari pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit LO yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.66 Laporan Operasional

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pendapatan - LO	575.221.014.723,34	592.667.653.217,86	(17.446.638.494,52)	(2,94)
PAD – LO	17.793.072.317,34	28.900.674.940,86	(11.107.602.623,52)	(38,43)
Pendapatan Transfer - LO	550.758.634.775,00	555.114.919.194,00	(4.356.284.419,00)	(0,78)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	6.669.307.631,00	8.652.059.083,00	(1.982.751.425,00)	(22,92)
Beban dan Transfer	560.439.669.482,83	512.970.309.915,42	47.469.359.567,41	9,25
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	14.781.345.240,51	79.697.343.302,44	(64.915.998.061,93)	(81,45)
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(135.575.600,00)	58.166.522,00	(193.742.122,00)	(333,08)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	14.645.769.640,51	79.755.509.824,44	(65.109.740.183,93)	(81,64)
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	0,00	(13.196.900,00)	13.196.900,00	(100,0)
Surplus/Defisit - LO	14.645.769.640,51	79.742.312.924,44	(65.096.543.283,93)	(81,63)

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
5.4.1 Pendapatan - LO	Rp575.221.014.723,34	Rp592.667.653.217,86

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Pendapatan - LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.67 Pendapatan - LO

SKPD	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17.793.072.317,34	28.900.674.940,86	(11.107.602.623,52)	(38,56)
Rumah Sakit Umum Daerah	2.893.584.006,00	6.474.388.700,00	(3.580.804.694,00)	(55,31)
Dinas Pekerjaan Umum & PR	1.869.311.595,87	2.269.309.532,00	(399.997.936,13)	(17,63)
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	51.875.983,10	0,00	51.875.983,10	100,00
Dinas Pertanian dan Pangan	798.321.000,00	281.494.000,00	516.827.000,00	183,60
Dinas Perhubungan	138.540.000,00	47.252.500,00	91.287.500,00	193,19
Dinas PM PTSP, Perindag	794.249.916,00	7.801.296.567,00	(7.007.046.651,00)	(89,82)
Badan Keuangan Daerah	11.247.189.816,37	12.026.933.641,86	(779.743.825,49)	(6,48)
Pendapatan Transfer	550.758.634.775,00	555.114.919.194,00	(4.356.284.419,00)	(0,78)
Badan Keuangan Daerah	550.758.634.775,00	555.114.919.194,00	(4.356.284.419,00)	(0,78)
Lain-lain Pendapatan yang Sah	6.669.307.631,00	8.652.059.083,00	(1.982.751.452,00)	(22,92)
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	39.810.573,00	0,00	39.810.573,00	100,00
Dinas Kesehatan, PP & KB	715.955.161,00	1.407.253.523,00	(691.298.362,00)	(49,12)
Dinas Pertanian & Pangan	1.490.000,00	642.315.340,00	(640.825.340,00)	(99,77)
Dinas Perhubungan	82.000.000,00	85.000.000,00	(3.000.000,00)	(3,53)
Dinas Kelautan Dan Perikanan	717.066.500,00	522.621.000,00	194.445.500,00	37,21
Badan Keuangan Daerah	5.112.985.397,00	5.993.469.220,00	(880.483.823,00)	(14,69)
Kecamatan Sabu Timur	0,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	(100,00)
Jumlah	575.221.014.723,34	592.667.653.217,86	(17.446.638.494,52)	(2,94)

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

31 Desember 2024
Rp17.793.072.317,3431 Desember 2023
Rp28.900.674.940,86

Pendapatan Asli Daerah - LO Kabupaten Sabu Raijua untuk per 31 Desember 2024 senilai Rp17.793.072.317,34 dapat dirinci berdasarkan SKPD dalam tabel berikut:

Tabel 5.68 Pendapatan Asli Daerah - LO

SKPD	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pajak Daerah	4.778.103.970,00	4.974.859.240,80	(196.755.270,80)	(3,95)
Dinas Pekerjaan Umum & PR	1.358.665.643,00	2.199.309.532,00	(840.643.889,00)	(38,22)
Badan Keuangan Daerah	3.419.438.327,00	2.775.549.708,80	643.888.618,20	23,20
Retribusi Daerah	5.671.156.422,00	15.956.806.718,00	(10.285.650.296,00)	(64,46)
Rumah Sakit Umum Daerah	2.893.584.006,00	6.474.388.700,00	(3.580.804.694,00)	(55,31)
Dinas Pertanian & Pangan	798.321.000,00	281.494.000,00	516.827.000,00	183,60
Dinas Perhubungan	138.540.000,00	47.252.500,00	91.287.500,00	193,19
Dinas PMPTSP, Perindag	794.249.916,00	7.801.296.567,00	(7.007.046.651,00)	(89,82)
Badan Keuangan Daerah	1.046.461.500,00	1.352.374.951,00	(305.913.451,00)	(22,62)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan	2.306.016.815,00	4.304.652.548,00	(1.998.635.733,00)	(46,43)
Badan Keuangan Daerah	2.306.016.815,00	4.304.652.548,00	(1.998.635.733,00)	(46,43)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.037.795.110,34	3.664.356.434,06	1.373.438.676,28	37,48
Dinas Pekerjaan Umum & PR	510.645.952,87	70.000.000,00	440.645.952,87	629,49

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

SKPD	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	51.875.983,10	0,00	51.875.983,10	100,00
Badan Keuangan Daerah	4.475.273.174,37	3.594.356.434,06	880.916.740,31	24,51
Jumlah	17.793.072.317,34	28.900.674.940,86	(11.107.602.623,52)	(38,43)

Pendapatan Asli Daerah - LO terdiri atas :

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp4.778.103.970,00	Rp4.974.859.240,80

Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun 2024 Rp4.778.103.970,00 mengalami penurunan senilai Rp196.755.270,80 atau 3,95% dibanding Pajak Daerah – LO tahun 2023 senilai Rp4.974.859.240,80. Pendapatan Pajak Daerah – LO dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.69 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pajak Hotel – LO	35.900.000,00	40.780.000,00	(4.880.000,00)	(11,97)
Pajak Restoran – LO	837.878.550,00	732.857.027,80	105.021.522,20	14,33
Pajak Reklame – LO	108.739.500,00	89.590.000,00	19.149.500,00	21,37
Pajak Penerangan Jalan – LO	1.813.637.549,00	1.246.401.536,00	567.236.013,00	45,51
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	1.358.665.643,00	2.199.309.532,00	(840.643.889,00)	(38,22)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	618.082.728,00	564.543.645,00	53.539.083,00	9,48
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	5.200.000,00	101.377.500,00	(96.177.500,00)	(94,87)
Jumlah	4.778.103.970,00	4.974.859.240,80	(196.755.270,80)	(3,95)

Selisih Pendapatan Pajak LRA dan Pendapatan Pajak LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah-LRA	4.934.625.570,00
Pendapatan Pajak Daerah-LO	4.778.103.970,00
Selisih	<u>156.521.600,00</u>
Penambahan	
- Piutang Pajak Hotel/Penginapan dan Pajak Rumah Makan Ta 2024	4.040.000,00
- Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	5.760.000,00
- Piutang PBB Ta. 2024	1.219.336,00
- Kekurangan Piutang Pajak Hotel/Penginapan dan Pajak Rumah Makan Ta 2024	779.500,00
Total Penambahan	<u>11.798.836,00</u>
Pengurangan	

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Pelunasan piutang Pajak Hotel TA 2023	315.000,00	
- Pelunasan piutang Pajak Rumah Makan	13.156.600,00	
- Pelunasan Pajak Reklame	2.500.000,00	
- Pelunasan piutang galian C	150.840.743,00	
- Pelunasan PBB dan Pendapatan di terima di muka	1.508.093,00	
Total Pengurangan		168.320.436,00
Total Mutasi		(156.521.600,00)

5.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp5.671.156.422,00	Rp15.956.806.718,00

Pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2024 senilai Rp5.671.156.422,00 mengalami penurunan senilai Rp10.285.650.296,00 atau 64,46% dibanding tahun 2023 senilai Rp15.956.806.718,00. Retribusi Daerah - LO dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.70 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	4.384.124.506,00	7.755.883.651,00	(3.371.759.145,00)	(43,47)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.300.000,00	3.500.000,00	(2.200.000,00)	(62,86)
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	116.541.500,00	63.562.500,00	52.979.000,00	83,35
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	15.940.000,00	(15.940.000,00)	(100,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	152.850.000,00	143.900.000,00	8.950.000,00	6,22
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO	0,00	40.494.000,00	(40.494.000,00)	(100,00)
Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	400,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	137.240.000,00	27.812.500,00	109.427.500,00	393,45
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	12.964.000,00	0,00	12.964.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	768.381.050,00	7.880.219.450,00	(7.111.838.400,00)	(90,25)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	0,00	25.294.617,00	(25.294.617,00)	(100,00)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	96.755.366,00	0,00	96.755.366,00	0,00
Jumlah	5.671.156.422,00	15.956.806.718,00	(10.285.650.296,00)	(64,46)

Selisih Pendapatan Retribusi – LRA dan Pendapatan Retribusi - LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah -LRA	7.000.775.722,00
Pendapatan Retribusi Daerah -LO	5.671.156.422,00
Selisih	1.329.619.300,00
Penambahan	

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Piutang klaim BPJS TA. 2024	197.084.400,00	
- Piutang sewa pasar 2024	65.894.500,00	
- Piutang non kapitasi FKTP TA. 2023	181.975.000,00	
- Koreksi kurang catat piutang sewa mess Pemda TA 2020 s/d 2023	38.400.000,00	
- Kekurangan piutang retribusi Los pasar	2.520.000,00	
- Mencatat koreksi tambah atas piutang dan utang BPJS TA. 2024	15.970.000,00	
Total Penambahan		501.843.900,00
Pengurangan		
- Pelunasan sewa retribusi pasar 2023	1.860.000,00	
- Pelunasan piutang klaim BPJS TA 2023	1.620.128.200,00	
- Pelunasan piutang non kapitasi FKTP TA. 2023	188.445.000,00	
- Pelunasan Piutang Mess	20.500.000,00	
- Pendapatan diterima di muka Mess Pemda	250.000,00	
- Pendapatan diterima di muka retribusi penjualan bokasi	280.000,00	
Total Pengurangan		1.831.463.200,00
Total Mutasi		(1.329.619.300,00)

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp2.306.016.815,00	Rp4.304.652.548,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO merupakan pembagian laba atau deviden atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua pada PT Bank Pembangunan Daerah NTT tahun 2024. Pembagian deviden yang diterima Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2024 senilai Rp2.306.016.815,00 berkurang senilai Rp1.998.635.733,00 atau 46,43% dibandingkan pembagian deviden yang diterima tahun 2023 senilai Rp4.304.652.548,00.

5.4.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp5.037.795.110,34	Rp3.664.356.434,06

Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO tahun 2024 senilai Rp5.037.795.110,34 mengalami penambahan senilai Rp1.373.438.676,28 atau 37,48% dibanding tahun 2023 senilai Rp3.664.356.434,06. Lain-lain pendapatan asli daerah - LO yang sah dirincikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.71 Lain - lain PAD yang Sah - LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	16.662.626,00	0,00	16.662.626,00	100,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	259.900.000,00	84.583.333,33	175.316.666,67	207,27
Penerimaan Jasa Giro - LO	701.384.977,69	1.384.200.928,09	(682.815.950,40)	(49,33)
Pendapatan Bunga - LO	2.101.528.891,76	791.279.782,00	1.310.249.109,76	165,59
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	161.493.546,21	(39.381.461,33)	200.875.007,54	(510,08)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	1.421.004.541,44	797.088.306,67	623.916.234,77	78,27
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	883.832,00	0,00	883.832,00	0,00
Pendapatan Pengembalian -LO	374.936.695,24	646.585.545,30	(271.648.850,06)	(42,01)
Jumlah	5.037.795.110,34	3.664.356.434,06	1.373.438.676,28	37,48

Selisih Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LRA)	4.810.808.212,37
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LO)	5.037.795.110,34
Selisih	(226.986.897,97)
Mutasi Penambahan	

- Penyesuaian Pendapatan diterima di muka sewa tanah SPBU	10.000.000,00	
- Denda keterlambatan pada 6 paket pekerjaan	321.738.103,97	
- Piutang remun atas TDF TA 2024	4.618,00	
Total Mutasi Penambahan		331.742.721,97

Mutasi Pengurangan		
- Pelunasan Piutang TPTGR a.n. Ferderika Kaho, sesuai LHP Nomor 5.b.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012, 4/08/2012	6.480.000,00	
- Pelunasan Piutang TPTGR a.n. Ferdinan Riwu, sesuai LHP Nomor 700/22/INSPEK-SR/LHA/XII/2020, 17/12/2020	13.727.756,00	
- Pelunasan Piutang TGR a.n. Wellem Gale Banggu sesuai LHP No 645/43/ID/2011,12/08/2011	22.816.517,00	
- Pelunasan Piutang pengembalian kelebihan gaji a.n. Yapi Herianus Radja Raga	3.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Pelunasan piutang sewa alat TA 2021 dan pajak galian C	2.000.000,00	
- Pelunasan piutang TP a.n. VTBD, sesuai LHP Nomor 700/08/INSPEK-SR/LHP.K/II/2023, 27/02/2023	16.731.551,00	
- Pendapatan diterima di muka atas sewa ruangan Kantor Bupati (Bank NTT)	40.000.000,00	
Total Mutasi Pengurangan		104.755.824,00
Total Mutasi		226.986.897,97

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp550.758.634.775,00 **Rp555.114.919.194,00**

Pendapatan transfer - LO tahun 2024 senilai Rp550.758.634.775,00 mengalami penurunan senilai Rp4.356.284.419,00 atau 0,78% dibanding pendapatan transfer-LO tahun 2023 senilai Rp555.114.919.194,00. Pendapatan transfer - LO dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.72 Pendapatan Transfer - LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Transfer Pemerintah Pusat	505.870.343.263,00	512.397.627.578,00	(6.527.284.315,00)	(1,27)
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	27.149.169.000,00	24.713.757.000,00	2.435.412.000,00	9,85
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	17.739.122.512,00	18.003.534.616,00	(264.412.104,00)	(1,47)
Jumlah	550.758.634.775,00	555.114.919.194,00	(4.356.284.419,00)	(0,78)

Pendapatan Transfer - LO dapat dirinci sebagai berikut:

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp505.870.343.263,00 **Rp512.397.627.578,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO tahun 2024 senilai Rp505.870.343.263,00 mengalami penurunan senilai Rp6.527.284.315,00 atau 1,27% dibanding tahun 2023 senilai Rp512.397.627.578,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.73 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Bagi Hasil Pajak – LO	1.955.759.000,00	2.136.420.680,00	(180.661.680,00)	(8,46)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	2.112.952.000,00	2.422.355.000,00	(309.403.000,00)	(12,77)
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	373.274.825.957,00	353.576.035.296,00	19.698.790.661,00	5,57
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	128.526.806.306,00	154.262.816.602,00	(25.736.010.296,00)	(16,68)
Jumlah	505.870.343.263,00	512.397.627.578,00	(6.527.284.315,00)	(1,27)



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (LO)		505.835.434.263,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan (LRA)		505.870.343.263,00
Selisih		<u>(34.909.000,00)</u>
Koreksi TDF 2024 berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan	34.909.000,00	
Mutasi		<u>34.909.000,00</u>

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	<u>Rp27.149.169.000,00</u>	<u>Rp24.713.757.000,00</u>

Pendapatan transfer pemerintah Pusat lainnya - LO tahun 2024 senilai Rp27.149.169.000,00 mengalami penambahan senilai Rp2.435.412.000,00 atau 9,85% sedangkan di tahun 2023 senilai Rp24.713.757.000,00. Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya - LO berupa Insentif Fiskal LO dan TKDD senilai Rp27.149.169.000,00 pada tahun 2024 sesuai KMK RI Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp11.542.163.000,00, dan juga berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024 yang menyatakan Kabupaten Sabu Raijua memperoleh Insentif Fiskal sebesar Rp15.607.006.000,00.

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	<u>Rp17.739.122.512,00</u>	<u>Rp18.003.534.616,00</u>

Pendapatan transfer pemerintah provinsi lainnya - LO tahun 2024 senilai Rp17.739.122.512,00 mengalami penurunan senilai Rp264.412.104,00 atau 1,47% dibanding tahun 2023 senilai Rp18.003.534.616,00. Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya - LO berupa alokasi dana bagi hasil pajak dari provinsi yang terdiri atas bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak pemanfaatan air permukaan.

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

– LRA dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LRA		19.245.457.310,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi -LO		17.739.122.512,00
		1.506.334.798,00
Penambahan		
- Koreksi kurang catat piutang bagi hasil pajak provinsi (PKB, BBNKB, PBBKB dan PAP)	2.844.241.907,00	
Total mutasi penambahan		2.844.241.907,00
Pengurangan		
- Pelunasan piutang DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi TA 2023	623.713.702,00	
- Pelunasan piutang DBH Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi TA 2022	1.553.294.046,00	
- Pelunasan piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2022	2.172.670.047,00	
- Pelunasan Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	898.910,00	
Total mutasi pengurangan		4.350.576.705,00
Total Mutasi		(1.506.334.798,00)

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp6.669.307.631,00	Rp8.652.059.083,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2024 senilai Rp6.669.307.631,00 mengalami penurunan senilai Rp1.982.751.452,00 atau 22,92% dibanding tahun 2023 senilai Rp8.652.059.083,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO terdiri atas Pendapatan Hibah Rp1.632.102.234,00 dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Rp5.037.205.397,00.

Pendapatan Hibah senilai Rp1.632.102.234,00 terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapatkan hibah berupa barang medis habis pakai dan obat senilai Rp715.955.161,00 dari Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dan Perwakilan BKKBN Provinsi NTT.
2. Badan Keuangan Daerah mendapat hibah berupa Air Cooler senilai Rp1.385.000,00 dari Bank BRI sesuai Surat Keterangan Nomor 002/470/BAKEUDA/XII/2024.
3. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mendapatkan hibah berupa buku dan blangko senilai Rp39.810.573,00 dari Kementerian Pendidikan.
4. Sumbangan pihak ketiga senilai Rp874.951.500,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari:

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- a. Penjualan ternak dan hasil pertanian senilai Rp1.490.000,00;
- b. KSU Sandi Mandiri pengelola Bus Transdes senilai Rp82.000.000,00;
- c. Penjualan Rumput Laut Kering Rp717.066.500,00; dan
- d. Proses pengadaan barang dan jasa senilai Rp74.395.000,00.

Pendapatan Lainnya senilai Rp5.037.205.397,00 yang terdiri dari:

1. Pendapatan atas pengembalian hibah senilai Rp110.878.833,00 berasal dari pengembalian dana hibah TP PKK tahun 2023 senilai Rp110.602.810,00, pengembalian hibah Dekranasda tahun 2023 senilai Rp275.383,00 dan pengembalian hibah KPA tahun 2023 senilai Rp640,00; dan
2. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan senilai Rp4.926.326.564,00.

Rincian pendapatan dana kapitasi tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.74 Pendapatan Dana Kapitasi

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Puskesmas Seba	2.642.588.738,00	1.698.178.263,00	64,26	2.262.787.574,00
2	Puskesmas Bolou	634.276.470,00	509.324.127,00	80,30	589.528.457,00
3	Puskesmas Eilogo	602.891.059,00	624.728.389,00	103,62	568.427.646,00
4	Puskesmas Daieko	1.064.347.429,00	964.203.627,00	90,59	1.047.656.800,00
5	Puskesmas Ledeunu	660.366.478,00	558.213.542,00	84,53	708.505.856,00
6	Puskesmas Eimadake	560.824.586,00	571.678.616,00	101,94	590.517.694,00
	Jumlah	6.165.294.760,00	4.926.326.564,00	79,90	5.767.424.027,00

5.4.2 Beban

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, beban adalah hak pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Beban Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp560.439.669.482,83 mengalami peningkatan senilai Rp47.469.359.567,41 atau 9,25% dibandingkan beban tahun 2023 senilai Rp512.970.309.915,42 dengan rincian realisasi beban daerah sebagai berikut.

Tabel 5.75 Beban Daerah

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Pegawai - LO	233.820.935.175,00	191.617.950.301,00	42.202.984.874,00	22,02
Beban Persediaan	55.622.942.526,40	67.645.178.915,98	(12.022.236.389,58)	(17,77)
Beban Jasa	58.517.126.636,75	65.067.591.223,00	(6.550.464.586,25)	(10,07)
Beban Pemeliharaan	5.901.371.099,00	9.582.714.993,00	(3.681.343.894,00)	(38,42)
Beban Perjalanan Dinas	39.081.377.512,00	37.253.788.902,00	1.827.588.610,00	4,91



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Hibah	32.342.285.221,00	14.731.600.644,00	17.610.684.577,00	119,54
Beban Bantuan Sosial	4.153.750.000,00	5.600.273.000,00	(1.446.523.000,00)	(25,83)
Beban Penyisihan Piutang	66.358.109,12	37.492.228,75	28.865.880,37	76,99
Beban Penyusutan dan Amortisasi	92.661.763.223,56	85.045.794.124,98	7.615.969.098,58	8,96
Beban Transfer	38.271.759.980,00	36.346.493.697,00	1.925.266.283,00	5,30
Beban Lain-lain	0,00	41.431.885,71	(41.431.885,71)	(100,00)
TOTAL	560.439.669.482,83	512.970.309.915,42	47.469.359.567,41	9,25

Rincian Beban Daerah per SKPD dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 5.76 Beban Daerah per SKPD

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	157.014.615.895,92	143.017.729.004,63	13.996.886.891,29	9,79
Rumah Sakit Umum Daerah	15.065.435.333,36	25.034.907.373,77	(9.969.472.040,41)	(39,82)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	69.719.808.850,00	49.375.172.116,00	20.344.636.734,00	41,20
Puskesmas Ledunu	1.344.669.783,60	1.489.500.180,00	(144.830.396,40)	(9,72)
Puskesmas Daieko	1.849.148.511,26	2.777.346.722,72	(928.198.211,46)	(33,42)
Puskesmas Eilogo	1.445.842.944,75	1.850.873.939,00	(405.030.994,25)	(21,88)
Puskesmas Seba	3.187.169.876,20	3.610.264.801,00	(423.094.924,80)	(11,72)
Puskesmas Eimadake	1.289.683.512,48	1.503.665.121,00	(213.981.608,52)	(14,23)
Puskesmas Bolou	1.270.227.417,00	1.618.270.267,00	(348.042.850,00)	(21,51)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.839.775.340,02	58.879.396.411,36	18.960.378.928,66	32,20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.275.185.429,00	2.877.631.717,00	1.397.553.712,00	48,57
Satuan Polisi Pamong Praja	6.069.257.051,00	5.352.444.275,00	716.812.776,00	13,39
Badan Penanggulangan Bencana	3.266.339.912,00	3.123.323.627,00	143.016.285,00	4,58
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.548.598.279,00	6.952.989.137,00	(1.404.390.858,00)	(20,20)
Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	6.668.307.861,00	7.563.990.755,00	(895.682.894,00)	(11,84)
Dinas Pertanian dan Pangan	13.260.791.459,00	12.901.421.723,00	359.369.736,00	2,79
Dinas Lingkungan Hidup	3.274.218.589,00	3.033.043.642,00	241.174.947,00	7,95
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.868.762.149,00	2.978.740.467,00	(109.978.318,00)	(3,69)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.495.127.331,00	4.080.846.420,00	414.280.911,00	10,15
Dinas Perhubungan	8.255.801.392,00	6.441.254.590,00	1.814.546.802,00	28,17
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.579.698.989,00	4.697.828.411,00	(118.129.422,00)	(2,51)
Dinas Penanaman Modal & PTSP, Perindag	10.711.320.782,00	18.479.957.686,00	(7.768.636.904,00)	(42,04)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.513.259.634,00	2.246.366.275,00	266.893.359,00	11,88
Dinas Kelautan dan Perikanan	4.607.342.849,00	8.387.499.089,00	(3.780.156.240,00)	(45,07)
Dinas Pariwisata	4.907.449.283,00	5.271.470.554,00	(364.021.271,00)	(6,91)
Bagian Pemerintahan	1.083.745.010,00	1.226.553.825,00	(142.808.815,00)	(11,64)



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Bagian Kesejahteraan Rakyat	2.867.738.455,00	2.737.801.931,00	129.936.524,00	4,75
Bagian Hukum	840.732.042,00	733.706.794,00	107.025.248,00	14,59
Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam	416.452.568,00	477.818.496,00	(61.365.928,00)	(12,84)
Bagian Administrasi Pembangunan	848.807.376,00	984.552.697,00	(135.745.321,00)	(13,79)
Bagian Umum	19.615.974.396,00	20.329.990.735,00	(714.016.339,00)	(3,51)
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	509.741.112,00	668.034.027,00	(158.292.915,00)	(23,70)
Bagian Organisasi	606.102.216,00	541.179.391,00	64.922.825,00	12,00
Inspektorat Daerah	2.898.004.470,00	2.651.726.791,00	246.277.679,00	9,29
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.446.848.204,00	4.785.001.262,00	661.846.942,00	13,83
Badan Keuangan Daerah	40.247.888.234,24	42.930.090.616,48	(2.682.202.382,24)	(6,25)
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	5.083.094.397,00	4.671.260.853,00	411.833.544,00	8,82
Sekretariat DPRD	23.462.403.086,00	22.047.253.752,00	1.415.149.334,00	6,42
Kecamatan Sabu Barat	2.949.115.535,00	2.501.166.608,00	447.948.927,00	17,91
Kecamatan Sabu Timur	4.358.088.924,00	3.627.285.053,00	730.803.871,00	20,15
Kecamatan Sabu Liae	2.251.784.147,00	1.548.802.251,72	702.981.895,28	45,39
Kecamatan Hawu Mehara	2.348.132.925,00	2.073.904.906,00	274.228.019,00	13,22
Kecamatan Raijua	4.176.690.235,00	3.461.815.474,43	714.874.760,57	20,65
Kecamatan Sabu Tengah	2.072.177.352,00	1.384.283.033,31	687.894.318,69	49,69
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	23.028.310.345,00	10.042.147.114,00	12.986.163.231,00	129,32
TOTAL	560.439.669.482,83	512.970.309.915,42	47.469.359.567,41	9,25

5.4.2.1 Beban Pegawai

31 Desember 2024
Rp233.820.935.175,00

31 Desember 2023
Rp191.617.950.301,00

Beban pegawai untuk tahun 2024 senilai Rp233.820.935.175,00 mengalami peningkatan senilai Rp42.202.984.874,00 atau 22,02% dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp191.617.950.301,00. Beban pegawai dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.77 Beban Pegawai - LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	150.791.332.242,00	121.987.490.159,00	28.803.842.083,00	23,61
Beban Tambahan Penghasilan ASN	38.933.049.318,00	28.688.940.888,00	10.244.108.430,00	35,71
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	33.798.624.019,00	30.661.597.025,00	3.137.026.994,00	10,23
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.201.619.538,00	7.150.150.973,00	51.468.565,00	0,72
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	173.206.169,00	172.591.256,00	614.913,00	0,36
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	381.153.889,00	410.880.000,00	(29.726.111,00)	(7,23)
Beban Pegawai BOSP	2.541.950.000,00	2.546.300.000,00	(4.350.000,00)	(0,17)
TOTAL	233.820.935.175,00	191.617.950.301,00	42.202.984.874,00	22,02

Selisih Beban Pegawai dan Belanja Pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Beban Pegawai – LO	233.820.935.175,00
Belanja Pegawai – LRA	238.912.266.079,00
Selisih	<u>(5.091.330.904,00)</u>
Pengurangan	
- Pelunasan Utang Belanja Pegawai TPP Bulan November dan Desember 2023 pada Kecamatan Hawu Mehara	58.541.600,00
- Pelunasan Belanja Pegawai TPP Bulan Desember 2023 pada Kecamatan Sabu Tengah	29.122.804,00
- Pelunasan Utang Belanja Non Sertifikasi TW III dan IV Tahun 2023 pada Dinas PKKO	557.000.000,00
- Pelunasan Utang TPG TW. IV Tahun 2023 pada Dinas PKKO	3.537.616.200,00
- Reklas keluar Beban Pegawai Dana BOS Swasta ke Beban Hibah karena kesalahan Penganggaran	909.050.300,00
Total Pengurangan	<u>5.091.330.904,00</u>
Total Mutasi	<u>(5.091.330.904,00)</u>

5.4.2.2 Beban Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	<u>Rp55.622.942.526,40</u>	<u>Rp67.645.178.915,98</u>

Beban Persediaan tahun 2024 senilai Rp55.622.945.526,40 berkurang senilai Rp12.022.236.389,58 atau 17,77% dibandingkan tahun 2023 senilai Rp67.645.178.915,98. Untuk lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.78 Beban Persediaan

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.070.176.005,00	1.955.868.693,00	(885.692.688,00)	(45,28)
Beban Bahan-Bahan Kimia	31.926.183,00	400.351.500,00	(368.425.317,00)	(92,03)
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	788.211.000,00	706.345.378,00	81.865.622,00	11,59
Beban Bahan Baku	17.645.000,00	43.165.000,00	(25.520.000,00)	(59,12)
Beban Bahan-Barang dalam Proses	0,00	18.485.000,00	(18.485.000,00)	(100,00)
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	277.180.150,00	316.846.740,00	(39.666.590,00)	(12,52)
Beban Bahan-lsi Tabung Gas	202.209.986,00	181.235.000,00	20.974.986,00	11,57
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	211.135.630,00	143.182.600,00	67.953.030,00	47,46
Beban Bahan-Bahan Lainnya	3.983.050.195,84	6.249.362.380,80	(2.266.312.184,96)	(36,26)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	31.600.800,00	26.812.500,00	4.788.300,00	17,86
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	119.999.776,00	120.000.000,00	(224,00)	(0,00)

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	12.784.383,00	(12.784.383,00)	(100,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	2.950.000,00	(2.950.000,00)	(100,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	79.517.240,00	104.137.996,00	(24.620.756,00)	(23,64)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	634.285.600,00	1.793.926.240,00	(1.159.640.640,00)	(64,64)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	713.461.750,00	157.403.590,00	556.058.160,00	353,27
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.814.675.810,00	1.726.555.045,00	88.120.765,00	5,10
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	148.250.000,00	145.312.000,00	2.938.000,00	2,02
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	176.442.580,00	37.790.000,00	138.652.580,00	366,90
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	83.082.748,00	(83.082.748,00)	(100,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.107.973.957,00	302.481.460,00	805.492.497,00	266,29
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	37.600.000,00	306.252.120,00	(268.652.120,00)	(87,72)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	385.126.000,00	10.075.000,00	375.051.000,00	3.722,59
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	458.410.000,00	184.148.000,00	274.262.000,00	148,94
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	956.031.817,00	433.488.726,00	522.543.091,00	120,54
Beban Obat-Obatan-Obat	3.275.749.189,06	1.847.626.509,18	1.428.122.679,88	77,29
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	193.642.557,00	1.336.995.779,00	(1.143.353.222,00)	(85,52)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.264.659.444,50	16.411.247.147,00	(2.146.587.702,50)	(13,08)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.986.227.464,00	9.577.495.698,00	(7.591.268.234,00)	(79,26)
Beban Natura dan Pakan-Natura	3.475.000,00	350.501.500,00	(347.026.500,00)	(99,01)
Beban Natura dan Pakan-Pakan	224.367.560,00	24.650.000,00	199.717.560,00	810,21
Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	50.560.000,00	(50.560.000,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	4.729.742.667,00	5.082.557.928,00	(352.815.261,00)	(6,94)
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.030.462.000,00	2.479.358.000,00	(448.896.000,00)	(18,11)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	90.572.000,00	0,00	90.572.000,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.877.289.424,00	1.442.676.206,00	434.613.218,00	30,13
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	281.046.000,00	461.042.000,00	(179.996.000,00)	(39,04)
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	485.505.500,00	259.857.000,00	225.648.500,00	86,84
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	28.600.000,00	29.250.000,00	(650.000,00)	(2,22)
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	320.400.000,00	27.150.000,00	293.250.000,00	1.080,11
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	661.590.000,00	885.978.000,00	(224.388.000,00)	(25,33)
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	244.578.000,00	98.947.500,00	145.630.500,00	147,18
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	29.500.000,00	11.800.000,00	17.700.000,00	150,00
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	33.140.000,00	7.500.000,00	25.640.000,00	341,87
Beban Pakaian Teknik	6.800.000,00	3.750.000,00	3.050.000,00	81,33
Beban Pakaian Pelatihan Kerja	15.000.000,00	108.000.000,00	(93.000.000,00)	(86,11)
Beban Pakaian Adat Daerah	128.450.000,00	0,00	128.450.000,00	0,00
Beban Pakaian Olahraga	14.800.000,00	39.275.000,00	(24.475.000,00)	(62,32)
Beban Pakaian Paskibraka	578.048.130,00	452.470.090,00	125.578.040,00	27,75
Beban Komponen-Komponen Peralatan	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
Beban Komponen-Komponen Lainnya	4.060.000,00	17.021.000,00	(12.961.000,00)	(76,15)
Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	13.080.000,00	0,00	13.080.000,00	0,00
Beban Pipa-Pipa Lainnya	34.759.505,00	2.306.000,00	32.453.505,00	1.407,35
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Beban Barang dan Jasa dari BOSP	10.788.296.223,00	11.175.121.459,00	(386.825.236,00)	(3,46)
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	32.092.383,00	0,00	32.092.383,00	0,00
Jumlah	55.622.942.526,40	67.645.178.915,98	(12.022.236.389,58)	(17,77)

Selisih Beban Persediaan dan Belanja Persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Beban Persediaan – LO	55.622.942.526,40	
Belanja Persediaan – LRA	(44.558.704.133,00)	
Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	8.412.695.049,60	
Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	(13.495.197.756,00)	
Selisih		5.981.735.687,00
Penjelasan Selisih		
Pelunasan Utang Beban Barang	38.471.179,00	
Kapitalisasi Barjas Dana BOS	3.500.000,00	
Reklas keluar Belanja Barjas ke Beban hibah sekolah swasta	2.782.658.100,00	
Kapitalisasi Barjas Bahan Bangunan dan Konstruksi (127.171.900) dan Belanja Jasa Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (60.025.000) yang Merupakan Swakelola Rehab Gedung Kantor Camat Hawu Mehara	127.171.900,00	
Belanja Habis Pakai yang dikapitalisasi ke ATB/Aset Tetap	8.419.900,00	
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi (ekstrakom 2023)	(966.017.700,00)	
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	(6.538.668.500,00)	
Utang Belanja Pengadaan APE Luar (Ayunan Ganda Bulan dan Perosotan) TA 2024	(488.040.000,00)	
Hibah barang persediaan ke Dinkes	(715.955.161,00)	
Reklas Rumah Tidak Layak Huni yang Diserahkan kepada Masyarakat sesuai Berita Acara Serah Terima Bangunan No 648/336- 339/LDK/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024	(108.000.000,00)	
Beban Persediaan yang di catat ke beban pemeliharaan BBM dan Suku Cadang	(127.741.500,00)	
Hibah persediaan dari Kementerian Pendidikan	(6.204.405,00)	
Koreksi Peralatan Mesin yang di bawah batas kapitalisasi	(1.620.000,00)	
Kapitalisasi papan nama DPRD	15.000.000,00	
Kapitalisasi blender obat di RSUD	2.400.000,00	
Koreksi beban Dibayar di Muka atas Barang (Persediaan) yang Sudah Dibayar Namun Masih Terdapat pada Gudang Toko	(7.109.500,00)	
Total		(5.981.735.687,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.2.3 Beban Jasa

31 Desember 2024
Rp57.507.928.899,75

31 Desember 2023
Rp65.067.591.223,00

Beban Jasa tahun 2024 senilai Rp57.507.928.899,75 mengalami penurunan senilai Rp7.237.146.323,25 atau 11,18% dibandingkan beban jasa tahun 2023 senilai Rp64.745.075.223,00. Beban jasa yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.79 Beban Jasa

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Jasa Kantor	48.943.493.344,75	55.359.443.593,00	(6.415.950.248,25)	(11,59)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	3.572.741.582,00	3.506.614.800,00	66.126.782,00	1,89
Beban Sewa Tanah	130.869.500,00	86.644.500,00	44.225.000,00	51,04
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	532.600.000,00	1.119.500.000,00	(586.900.000,00)	(52,43)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	618.357.500,00	660.400.000,00	(42.042.500,00)	(6,37)
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	58.740.695,00	155.305.650,00	(96.564.955,00)	(62,18)
Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	2.154.683.972,00	641.304.471,00	1.513.379.501,00	235,98
Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	656.750.000,00	748.587.500,00	(91.837.500,00)	(12,27)
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	688.371,00	1.948.348.851,00	(1.947.660.480,00)	(99,96)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	480.429.635,00	262.447.771,00	217.981.864,00	83,06
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	314.670.000,00	227.478.087,00	87.191.913,00	38,33
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	43.729.100,00	29.000.000,00	14.729.100,00	50,79
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	175.200,00	0,00	175.200,00	0,00
TOTAL	57.507.928.899,75	64.745.075.223,00	(7.237.146.323,25)	(11,18)

Selisih Beban Jasa dan Belanja Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Jasa	57.166.778.255,96
Beban Jasa	57.507.928.899,75
Selisih	(341.150.643,79)

Penjelasan Selisih

Kapitalisasi Rehab Gedung Kantor Camat Hawu Mehara	(60.025.000,00)
Kapitalisasi Belanja Barang Jasa ke Meteran Listrik	(3.500.000,00)
Kapitalisasi Belanja Barang Jasa Pengawasan Pembangunan Irigasi	(26.967.450,00)
Kapitalisasi Belanja Barang Jasa Perencanaan Bendung dan Jaringan Irigasi	(99.695.000,00)

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Modal JIJ yang tidak dikapitalisasi (Survei Penguatan DB Jalan)	497.801.950,00	
Pelunasan Utang Belanja Jasa Kantor-Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	(18.000.000,00)	
Koreksi Beban Jasa Pelayanan Kesehatan karena adanya temuan kelebihan pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada 6 Puskesmas dan 1 RSUD koreksi tambah atas Utang Pelayanan kesehatan pada Puskesmas	(186.330.686,21)	
Utang Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD	138.561.500,00	
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	137.959.080,00	
	(38.653.750,00)	
Total		341.150.643,79

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp5.901.317.099,00	Rp9.582.714.993,00

Beban Pemeliharaan tahun 2024 senilai Rp5.901.317.099,00 mengalami penurunan senilai Rp3.681.343.894,00 atau 38,42% dibanding tahun 2023 yang mencapai Rp9.582.714.993,00. Beban pemeliharaan dimaksud terdiri atas:

Tabel 5.80 Beban Pemeliharaan – LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.657.232.099,00	5.731.735.258,00	(74.503.159,00)	(1,30)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	244.139.000,00	3.137.694.735,00	(2.893.555.735,00)	(92,22)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	713.285.000,00	(713.285.000,00)	(100,00)
TOTAL	5.901.371.099,00	9.582.714.993,00	(3.681.343.894,00)	(38,42)

Selisih Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Beban Pemeliharaan	5.901.371.099,00
Belanja Pemeliharaan	(14.281.150.646,00)
Selisih	(8.379.779.547,00)

Penjelasan Selisih

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kapitalisasi Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Bangunan yang Merupakan Rehab Area Parkir (2.285.386.262), Pengawasan Rehab Parkir (99.949.950), dan Rehab Pagar (364.183.738)	(2.749.519.950,00)	
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan JIJ yang Merupakan Rehab Rambu Suar 13 Unit	(96.825.300,00)	
Kapitalisasi Barang dan Jasa yang Merupakan Rehab Sekolah	(4.874.386.167,00)	
Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan yang Merupakan Rehab Pustu	(531.306.630,00)	
Persediaan dari Belanja Pemeliharaan	(127.741.500,00)	
Total		(8.379.779.547,00)

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp39.081.377.512,00	Rp37.253.788.902,00

Beban Perjalanan Dinas tahun 2024 senilai Rp39.081.377.512,00 bertambah senilai Rp1.827.588.610,00 atau 4,91% dibanding dengan beban perjalanan dinas tahun 2023 senilai Rp37.253.788.902,00. Beban perjalanan dinas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.81 Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	(%)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	24.293.985.625,00	21.168.893.013,00	3.125.092.612,00	14,76
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.003.700.855,00	14.561.925.889,00	(558.225.034,00)	(3,83)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	783.691.032,00	1.522.970.000,00	(739.278.968,00)	(48,54)
TOTAL	39.081.377.512,00	37.253.788.902,00	1.827.588.610,00	4,91

5.4.2.6 Beban Uang dan/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp1.009.197.737,00	Rp0,00

Beban Uang dan/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2024 senilai Rp1.009.197.737,00 sedangkan pada tahun 2023 senilai Rp0,00. Beban Uang dan/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.82 Beban Uang dan/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	(%)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	882.700.000,00	0,00	882.700.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	(%)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	126.497.737,00	0,00	126.497.737,00	100,00
TOTAL	1.009.197.737,00	0,00	1.009.197.737,00	100,00

5.4.2.7 Beban Hibah 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp32.342.285.221,00 **Rp14.731.600.644,00**

Beban Hibah tahun 2024 senilai Rp32.342.285.221,00 bertambah senilai Rp17.610.684.577,00 atau 119,54% dibanding tahun 2023 senilai Rp14.731.600.644,00.

Rincian beban hibah tersebut dapat dilihat pada berikut:

Tabel 5.83 Beban Hibah

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.704.350.000,00	2.666.347.000,00	38.003.000,00	1,43
BOP Pendidikan Kesetaraan	287.530.000,00	288.220.000,00	(690.000,00)	(0,24)
Dharma Wanita Persatuan (DWP)	233.016.305,00	222.454.478,00	10.561.827,00	4,75
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00
Komite Olahraga Nasional Indonesia	787.000.400,00	997.360.000,00	(210.359.600,00)	(21,09)
Kwarcab Gerakan Pramuka	219.739.900,00	274.978.000,00	(55.238.100,00)	(20,09)
Palang Merah Indonesia (PMI)	890.965.611,00	904.097.414,00	(13.131.803,00)	(1,45)
Partai Politik	522.871.000,00	483.310.000,00	39.561.000,00	8,19
Dewan Kerajinan Nasional Daerah	483.572.595,00	500.000.000,00	(16.427.405,00)	(3,29)
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	886.373.410,00	930.000.000,00	(43.626.590,00)	(4,69)
Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon PMI Yayasan Kusuma Cahaya Global	185.928.000,00	300.000.000,00	(114.072.000,00)	(38,02)
Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (LP3K)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	99.990.000,00	97.908.000,00	2.082.000,00	2,13
Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (LPPD)	121.666.000,00	125.000.000,00	(3.334.000,00)	(2,67)
Hibah Pelaksanaan Kegiatan Kajian Studi Kelayakan Pendirian (PSDKU) Politeknik Negeri Jember di Kab. Sabu Raijua	184.552.000,00	236.925.752,00	(52.373.752,00)	(22,11)
Dana Hibah Pilkada	19.610.000.000,00	6.240.000.000,00	13.370.000.000,00	214,26
Pelayanan Kerohanian dan Pengembangan Spiritualitas pada RSUD	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
Kelompok Sanggar Tari	30.000.000,00	50.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)
Belanja Dana BOS Sekolah Swasta	4.679.730.000,00	0	4.679.730.000,00	0,00
Jumlah	32.342.285.221,00	14.731.600.644,00	17.610.684.577,00	119,54

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pembentuk beban hibah tahun 2024 terdiri atas:

Belanja hibah	Rp27.662.555.221,00
Belanja Pegawai, Barang Jasa, Modal PM dan ATL Dana BOS	
Swasta ke Beban Hibah (Salah Penganggaran)	<u>Rp4.679.730.000,00</u>
Total beban hibah	Rp32.342.285.221,00

5.4.2.8 Beban Bantuan Sosial	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp4.153.750.000,00	Rp5.600.273.000,00

Beban Bantuan Sosial tahun 2024 senilai Rp4.153.750.000,00 berkurang senilai Rp1.446.523.000,00 atau 25,83% dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp5.600.273.000,00. Beban bantuan sosial tahun 2024 terdiri atas :

1. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu senilai Rp2.464.250.000,00;
2. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat senilai Rp1.639.500.000,00; dan
3. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) senilai Rp50.000.000,00.

Pembentuk beban bantuan sosial TA 2024 terdiri atas:

Belanja Bantuan Sosial	4.101.750.000,00
Pembebanan Belanja Tidak Terduga berupa Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan	52.000.000,00
Total	4.153.750.000,00

5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp66.358.109,12	Rp37.492.228,75

Beban Penyisihan piutang tahun 2024 senilai Rp66.358.109,12 bertambah senilai Rp28.865.880,37 atau 76,99% dibanding tahun 2023 senilai Rp37.492.228,75. Rincian beban penyisihan piutang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.84 Penyisihan Piutang – LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Penyisihan Piutang Pajak	34.136.166,10	33.436.853,75	699.312,35	2,09
Penyisihan Piutang Retribusi	30.613.252,50	4.055.375,00	26.557.877,50	654,88
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.608.690,52	0,00	1.608.690,52	100,00
TOTAL	66.358.109,12	37.492.228,75	28.865.880,37	76,99

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp92.661.763.223,56	Rp85.045.794.124,98

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 senilai Rp92.661.763.223,56 bertambah senilai Rp7.615.969.098,58 atau 15,68% dibanding tahun 2023 senilai Rp85.045.794.124,98. Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.85 Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Penyusutan Peralatan dan Mesin	22.186.291.495,00	24.006.025.745,01	(1.819.734.250,01)	(7,58)
Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.306.970.270,56	9.800.030.546,59	1.506.939.723,97	15,38
Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan	59.168.501.458,00	51.239.737.833,38	7.928.763.624,62	15,47
TOTAL	92.661.763.223,56	85.045.794.124,98	7.615.969.098,58	8,96

5.3.2.13 Beban Transfer	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp38.271.759.980,00	Rp36.346.493.697,00

Beban bantuan keuangan untuk tahun 2024 senilai Rp38.271.759.980,00 bertambah senilai Rp1.925.266.283,00 atau 5,30% dibandingkan tahun 2023 senilai Rp36.346.493.697,00. Beban transfer dimaksud dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.86 Beban Bantuan Keuangan

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	676.324.680,00	438.878.560,00	237.446.120,00	54,10
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	37.595.435.300,00	35.907.615.137,00	1.687.820.163,00	4,70
Jumlah	38.271.759.980,00	36.346.493.697,00	1.925.266.283,00	5,30

Pembentuk beban transfer tahun 2024 terdiri atas:

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	676.324.680,00
Belanja Alokasi Dana Desa	37.595.435.300,00
Belanja Dana Desa yang bersumber dari APBD	62.797.184.980,00
Belanja Dana Desa yang tidak dibebankan dalam LO	(62.797.184.980,00)
Total	38.271.759.980,00

5.3.2.12 Beban Lain-lain	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	Rp41.431.885,71

Beban lain-lain tahun 2024 merupakan rugi bersih PD Raihawa tahun 2024 senilai Rp0,00. Pada tahun 2023 telah dilakukan audit likuidasi oleh Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dengan Laporan Hasil Auditor Independen Nomor 00097/2.1274/AU.2/05/0463-1/1/XII/2023, tanggal 22 Desember 2023. Audit likuidasi merupakan langkah awal yang akan dilanjutkan dengan proses pembubaran yang akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pembubaran PD Raihawa.

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi	31 Desember 2024 Rp14.781.345.240,51	31 Desember 2023 Rp79.697.343.302,44
---	---	---

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara Pendapatan – LO dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi tahun 2024 senilai Rp14.781.345.240,51 mengalami penurunan senilai Rp64.915.998.061,93 atau 81,45% dibanding tahun 2023 senilai Rp79.697.343.302,44. Rincian surplus/defisit dari operasi tersebut dapat kami sajikan secara komparatif sebagai berikut:

Tabel 5.87 Surplus/Defisit LO dari Operasi

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pendapatan	575.221.014.723,34	592.667.653.217,86	(17.446.638.494,52)	(2,94)
Beban	560.439.669.482,83	512.970.309.915,42	47.469.359.567,41	9,25
Surplus/Defisit	14.781.345.240,51	79.697.343.302,44	(64.915.998.061,93)	(81,45)

5.4.4 Kegiatan Non Operasional

5.3.4.1 Defisit Kegiatan Non Operasional	31 Desember 2024 (Rp135.575.600,00)	31 Desember 2023 Rp58.166.522,00
---	--	---

Kegiatan non operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin seperti surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mencatat defisit dari kegiatan non operasional lainnya senilai Rp135.575.600,00 berkurang senilai Rp193.742.122,00 atau 333,08% dibanding surplus kegiatan non operasional tahun 2023 senilai Rp58.166.522,00.

Surplus/defisit kegiatan non operasional TA 2024 merupakan Defisit kegiatan non operasional berupa Penghapusan Bangunan PKM Eimadake yang Dimusnahkan senilai Rp135.575.600,00.

5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	31 Desember 2024 Rp14.645.769.640,51	31 Desember 2023 Rp79.755.509.824,44
---	---	---

Surplus sebelum pos luar biasa senilai Rp14.645.769.640,51 adalah selisih lebih antara surplus dari operasional senilai Rp14.781.345.240,51 dan defisit dari kegiatan non operasional senilai Rp135.575.600,00. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mencatat surplus sebelum pos luar biasa senilai Rp79.755.509.824,44.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.6 Pos Luar Biasa	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	Rp13.196.900,00

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pada tahun 2024 beban luar biasa senilai Rp0,00 menurun senilai Rp13.196.900,00 atau 100,00% dibanding tahun 2023 senilai Rp13.196.900,00.

5.4.7 Surplus/Defisit - LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp14.645.769.640,51	Rp79.742.312.924,44

Surplus/defisit- LO adalah selisih antara pendapatan-LO senilai Rp575.221.014.723,34 dan beban selama satu periode pelaporan Rp560.439.669.482,83, diperhitungkan dengan defisit dari kegiatan non operasional Rp135.575.600,00. Surplus-LO tahun 2024 senilai Rp14.645.769.640,51 berkurang senilai Rp65.096.543.283,93 atau 81,63% dibanding tahun 2023 senilai Rp79.742.312.924,44.

5.5 Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu tahun anggaran yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan non-anggaran, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas menyajikan aliran uang masuk dan keluar melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua menyajikan semua aliran uang masuk dan keluar Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Rekening Lainnya (Non RKUD) dalam Laporan Arus Kas. Aliran uang masuk dan keluar Rekening Lainnya yang dimaksud dianggarkan dalam APBD, penerimaan dan pengeluarannya disahkan oleh Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah mengakui sebagai pendapatan dan belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua menyajikannya juga dalam Laporan Arus Kas.

Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat digambarkan sebagai berikut.

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aktivitas Operasi	Rp640.309.373.143,37	Rp649.359.532.832,40

Arus kas masuk dari aktivitas operasi merupakan jumlah penerimaan dari kegiatan operasional yang masuk ke Kas Umum Daerah atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah. Arus kas masuk dari aktivitas operasi tahun 2024 senilai Rp640.309.373.143,37 berkurang Rp9.050.159.689,03 atau 1,39% dibanding tahun 2023 senilai Rp649.359.532.832,40.

Arus kas masuk dari aktivitas operasi diperoleh dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.88 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Arus Masuk Kas	640.309.373.143,37	649.359.532.832,40
Penerimaan Pajak Daerah	4.934.625.570,00	4.978.159.604,80
Penerimaan Retribusi Daerah	7.000.775.722,00	11.716.654.568,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.306.016.815,00	4.304.652.548,00
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	4.794.145.586,37	3.576.608.023,60
Penerimaan Dana Bagi Hasil	4.368.209.000,00	5.211.814.843,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	373.274.825.957,00	353.576.035.296,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	68.132.328.326,00	98.108.941.054,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	60.394.477.980,00	56.153.875.548,00
Penerimaan Dana Insentif	0,00	18.501.542.000,00
Penerimaan Dana Desa	62.797.184.980,00	62.145.670.550,00
Penerimaan Insentif Fiskal	27.149.169.000,00	6.212.215.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	19.245.457.310,00	17.634.880.577,00
Penerimaan Hibah	874.951.500,00	1.329.549.000,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.037.205.397,00	5.908.934.220,00

Penerimaan daerah Non RKUD tahun 2024 senilai Rp97.395.869.538,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Penerimaan BOSP reguler Sekolah Dasar senilai Rp13.537.342.000,00;
2. Penerimaan BOSP kinerja Sekolah Dasar senilai Rp225.000.000,00;
3. Penerimaan BOSP reguler Sekolah Menengah Pertama senilai Rp7.766.194.124,00;
4. Penerimaan BOSP kinerja Sekolah Menengah Pertama senilai Rp210.000.000,00;
5. Penerimaan BOP Pendidikan Anak Usia Dini senilai Rp2.693.850.000,00;
6. Penerimaan BOP Kesetaraan senilai Rp287.530.000,00;
7. Penerimaan Kapitasi JKN senilai Rp4.926.326.564,00;
8. Penerimaan BOK senilai Rp4.952.441.870,00 dan
9. Penerimaan Dana Desa senilai Rp62.707.184.980,00.

5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aktivitas Operasi	Rp528.078.046.817,96	Rp486.261.340.653,00

Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan jumlah arus kas keluar dari Bendahara Umum Daerah yang telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran atau



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

disahkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk membiayai seluruh operasional Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. Arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2024 senilai Rp528.078.046.817,96 bertambah senilai Rp41.816.706.164,96 atau 8,60% jika dibanding arus kas keluar tahun 2023 senilai Rp486.261.340.653,00.

Arus kas keluar dari aktivitas operasi digunakan untuk Belanja Pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tak terduga, bagi hasil pajak ke kabupaten/kota dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.89 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
<i>Arus Keluar Kas</i>	528.078.046.817,96	486.261.340.653,00
Pembayaran Pegawai	238.912.266.079,00	187.907.607.342,00
Pembayaran Barang dan Jasa	156.233.030.557,96	179.516.498.520,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Belanja Hibah	27.662.555.221,00	14.681.600.644,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	4.101.750.000,00	5.454.518.000,00
Pembayaran Tak Terduga	99.500.000,00	208.951.900,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	676.324.680,00	438.878.560,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	100.392.620.280,00	98.053.285.687,00

Belanja operasi Non RKUD tahun 2024 senilai Rp98.018.731.526,96 yang terdiri dari atas:

1. Belanja operasi BOS Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, senilai Rp13.783.484.723,00;
2. Belanja operasi BOS Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, senilai Rp7.982.772.500,00;
3. Belanja hibah BOP Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, senilai Rp2.693.850.000,00;
4. Belanja hibah BOP Kesetaraan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, senilai Rp287.530.000,00;
5. Belanja operasi Kapitasi JKN pada enam puskesmas, senilai Rp5.521.467.453,96;
6. Belanja operasi BOK pada enam puskesmas, senilai Rp4.952.441.870,00; dan
7. Belanja bantuan keuangan Dana Desa kepada 58 desa senilai Rp62.797.184.980,00.

**5.5.1.3 Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Operasi**

31 Desember 2024
Rp112.231.326.325,41

31 Desember 2023
Rp163.098.192.179,40

Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2024 senilai Rp112.231.326.325,41 berkurang senilai Rp50.866.865.853,99 atau 31,19% jika dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2023 senilai Rp163.098.192.179,40.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi senilai Rp112.231.326.325,41 merupakan selisih antara arus masuk kas senilai Rp640.309.373.143,37 dan arus kas keluar kas Rp528.078.046.817,96.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp22.136.662.626	Rp40.922.981.948,08

Arus kas masuk dari aktivitas investasi berupa pencairan dana cadangan dan penjualan aset lainnya. Arus kas masuk dari aktivitas investasi tahun 2024 senilai Rp22.136.662.626,00 berkurang senilai Rp18.786.319.322,08 atau 45,91% jika dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp40.922.981.948,08 dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.90 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
<i>Arus Kas Masuk</i>	22.136.662.626,00	40.922.981.948,08
Pencairan Dana Cadangan	22.120.000.000,00	40.922.981.948,08
Penjualan Aset Lainnya	16.662.626,00	0,00

5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp143.951.565.031,37	Rp182.716.363.178,00

Arus kas keluar dari aktivitas investasi adalah kas keluar yang langsung dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Arus kas keluar dari aktivitas investasi dapat berupa pembentukan dana cadangan, perolehan tanah, perolehan peralatan dan mesin, perolehan gedung dan bangunan, perolehan jalan, irigasi dan jaringan, perolehan aset lainnya dan penyertaan modal pemerintah. Arus kas keluar dari aktivitas investasi tahun 2024 senilai Rp143.951.565.031,37 berkurang senilai Rp38.764.798.146,63 atau 21,22% jika dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp182.716.363.178,00. Arus kas keluar aktivitas investasi dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.91 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
<i>Arus Kas Keluar</i>	143.951.565.031,37	182.716.363.178,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	31.000.000.000,00
Perolehan Tanah	0,00	6.000.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	18.526.761.862,00	22.836.344.170,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	19.844.122.737,37	32.522.108.837,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	97.259.462.732,00	87.803.912.171,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.321.217.700,00	1.547.998.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00

Arus kas keluar investasi Non RKUD tahun 2024 senilai Rp5.384.184.100,00 terdiri atas:



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1. Belanja modal BOS Sekolah Dasar senilai Rp3.383.601.000,00;
2. Belanja modal BOS Sekolah Menengah Pertama senilai Rp1.360.251.600,00; dan
3. Belanja modal JKN senilai Rp604.331.500,00.

5.5.2.3 Arus Kas Bersih dari	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aktivitas Investasi	(Rp121.814.902.405,37)	(Rp141.793.381.229,92)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2024 berjumlah negatif senilai (Rp121,814.902.405,37) merupakan selisih antara arus kas masuk senilai Rp22.136.662.626,00 dengan arus kas keluar senilai Rp143.951.565.031,37. Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2024 bertambah senilai Rp19.978.478.824,55 atau 14,09% dibandingkan dengan tahun 2023 senilai (Rp141.793.381.229,92)

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian utang dan/atau pelunasan utang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang dan utang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan dan pemberian pinjaman.

5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aktivitas Pendanaan	Rp0,00	Rp0,00

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan dari utang dan penerimaan kembali pemberian pinjaman, tahun 2024 dan 2023 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tidak memiliki arus kas masuk dari aktivitas pendanaan.

5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aktivitas Pendanaan	Rp0,00	Rp0,00

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan berasal dari pembayaran pokok utang dan pengeluaran kas untuk dipinjamkan, tahun 2024 dan 2023 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tidak memiliki arus kas keluar dari aktivitas pendanaan.

5.5.3.3 Arus Kas Bersih dari	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aktivitas Pendanaan	Rp0,00	Rp0,00

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah selisih antara arus kas masuk dari aktivitas pendanaan dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tidak memiliki aliran kas masuk dan keluar dari aktivitas pendanaan pada 2024 dan 2023.

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi perhitungan pihak ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan TASPEN dan BPJS Kesehatan. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2024 Rp12.602.827.135,35	31 Desember 2023 Rp41.338.723.891,94
--	---	---

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK pada Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara BOSP, Bendahara JKN dan Bendahara BOK. Arus kas masuk dari aktivitas transitoris tahun 2024 senilai Rp12.602.827.135,35 berkurang senilai Rp28.735.896.756,59 atau 69,51% dari arus kas masuk tahun 2023 senilai Rp41.338.723.891,94. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.92 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
<i>Arus Kas Masuk</i>	12.602.827.135,35	41.338.723.891,94
Penerimaan PFK BUD	2.717.444.280,01	38.830.226.796,00
Penerimaan PFK Bendahara Pengeluaran	9.100.352.768,34	1.313.427.897,00
Penerimaan PFK BOSP	784.744.017,00	791.052.815,00
Penerimaan PFK Bendahara JKN	286.070,00	280.686.581,00
Penerimaan PFK Bendahara BOK	0,00	98.636.852,20
Penerimaan PFK Lainnya	0,00	24.692.950,74

5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2024 Rp12.671.289.364,09	31 Desember 2023 Rp41.335.060.357,20
---	---	---

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran. Arus kas keluar dari aktivitas transitoris tahun 2024 senilai Rp12.671.289.364,09 berkurang senilai Rp28.663.770.993,11 atau 69,34% dari tahun 2023 senilai Rp41.335.060.357,20. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.93 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
<i>Arus Kas Keluar</i>	12.671.289.364,09	41.335.030.357,20
Penerimaan PFK BUD	2.717.444.280,01	38.830.226.796,00
Penerimaan PFK Bendahara Pengeluaran	9.100.352.768,34	1.327.165.168,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Penerimaan PFK BOSP	828.786.729,00	761.185.440,00
Penerimaan PFK Bendahara JKN	12.636,00	317.816.101,00
Penerimaan PFK Bendahara BOK	0,00	98.636.852,20
Penerimaan PFK Lainnya	24.692.950,74	0,00

**5.5.4.3 Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Transitoris**

31 Desember 2024
(Rp68.462.228,74)

31 Desember 2023
Rp3.663.534,74

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris senilai (Rp68.462.228,74) yang merupakan selisih arus kas masuk dari aktivitas transitoris senilai Rp12.602.827.135,35 dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris senilai Rp12.671.289.364,09. Arus kas bersih transitoris tahun 2024 berkurang senilai Rp72.125.763,48 atau 1.968,75% dari tahun 2023 senilai Rp3.663.534,74.

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas

Kenaikan atau penurunan kas bersih merupakan akumulasi dari arus kas bersih seluruh aktivitas. Saldo awal kas tahun 2024 senilai Rp76.403.480.716,84 ditambah kenaikan kas bersih senilai (Rp9.652.038.308,70) dan koreksi Silpa Rp68.477.723,00, sehingga saldo akhir kas menjadi Rp66.819.920.131,14 yang terdiri atas:

- 1) Kas di BUD senilai Rp65.951.878.915,80, bertambah senilai Rp21.889.779.114,82 atau 49,68% dibanding tahun 2023 senilai Rp44.062.099.800,98;
- 2) Kas di Bendahara Dana BOS senilai Rp75.371.812,00, bertambah senilai Rp30.256.624,00 atau 67,07% dibanding tahun 2023 senilai Rp45.115.188,00; Kas di bendahara BOSP tahun 2024 terdiri atas Kas BOS Rp75.371.812,00 dan Kas BOP PAUD senilai Rp0,00;
- 3) Kas di Bendahara FKTP senilai Rp45.258.786,34, berkurang senilai Rp2.177.378.404,96 atau 97,96% dibanding tahun 2023 senilai Rp2.222.637.191,30
- 4) Kas di Bendahara BOK senilai Rp742.340.130,00 bertambah senilai Rp742.340.130,00 atau 100% dibandingkan tahun 2023 senilai Rp0,00;
- 5) Kas Lainnya senilai Rp5.070.487,00 berkurang senilai Rp68.558.049,56 atau 93,11% dibanding tahun 2023 senilai Rp73.628.536,56.

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasi tahun 2024 dan tahun 2023. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
5.6.1 Ekuitas Awal	Rp1.478.031.991.774,86	Rp1.368.316.690.640,08

Ekuitas awal tahun 2024 sebesar Rp1.478.031.991.774,86, bertambah sebesar Rp109.715.301.134,78 atau 8,02% dari ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp1.368.316.690.640,08.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
5.6.2 Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO)	Rp14.645.769.640,51	Rp79.742.312.924,44

Penambahan Ekuitas bersumber dari Surplus-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.645.769.640,51, berkurang sebesar Rp65.096.543.283,93 atau 81,63% dari surplus-LO tahun 2023 sebesar Rp79.742.312.924,44. Surplus Laporan Operasional merupakan selisih lebih dari surplus dari operasional sebesar Rp14.781.345.240,51, defisit kegiatan non operasional sebesar (Rp135.575.600,00) dan defisit dari pos luar biasa sebesar Rp0,00.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(Rp17.035.068.279,68)	Rp29.972.988.210,34

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada tahun 2024 sebesar (Rp17.035.068.279,68) berkurang senilai Rp47.008.056.490,02 atau 156,83% jika dibanding dampak kumulatif tahun 2023 sebesar Rp29.972.988.210,34. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.94 Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	31-Des-2024	31-Des-2023
	(Rp)	(Rp)
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	185.720.000,00	13.578.650.894,00
Tanah	0,00	8.726.645.250,00
Peralatan Mesin	0,00	157.770.000,00
Gedung Bangunan	185.720.000,00	4.694.235.644,00
LAIN-LAIN	(17.220.788.279,68)	16.394.337.316,34
Dampak Perubahan Kas	68.477.723,00	(36.270.535,64)
Dampak Perubahan Piutang	(16.785.347,40)	(545.830.515,00)
Dampak Perubahan Penyisihan Piutang	0,00	(16.348.802,57)
Dampak Perubahan Aset Tetap	56.109.374.385,00	6.186.481.794,00
Dampak Perubahan Investasi Permanen	0,00	3.666.666,68
Dampak Perubahan Aset Lain-Lain	647.819.167,00	(7.285.039.626,18)
Dampak Perubahan Penyusutan dan Amortisasi	(74.059.495.542,28)	18.079.739.366,09



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31-Des-2024	31-Des-2023
	(Rp)	(Rp)
Dampak Perubahan Utang PFK	0,00	0,00
Dampak Perubahan Utang Belanja	29.821.335,00	7.938.968,96
TOTAL	(17.035.068.279,68)	29.972.988.210,34

5.6.3.1 Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp185.720.000,00 merupakan pemberian nilai atas bangunan rawat jalan dan 1 unit gedung mess pegawai yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kupang pada tahun 2010 dan tetap digunakan sampai saat ini. Bangunan tersebut tidak tercatat dalam Aset Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dikarenakan tidak dilakukan gelar penyerahan dokumen kontrak gedung dan berita acara serah terima gedung sehingga tidak diketahui nilai perolehannya. Pada tahun 2024 bangunan tersebut dinilai menggunakan nilai kontrak bangunan gedung pada Dinas Kesehatan, PP dan KB yakni Gedung Rawat Inap Puskesmas Seba pada tahun 2010 dengan nilai perolehan Rp250.000.000,00 yang mana rincian per meter persegi adalah Rp1.000.000,00, sehingga nilai perolehan untuk bangunan rawat jalan UPTD Puskesmas Eimadake adalah Rp137.720.000,00 dan nilai perolehan bangunan mess pegawai adalah Rp48.000.000,00.

5.6.3.2 Koreksi Lain-Lain

a. Dampak Perubahan Kas

Koreksi lain-lain yang berdampak pada Kas tahun 2024 sebesar Rp68.477.723,00 yang mengalami peningkatan sebesar Rp104.748.258,64 atau 288,80% dari tahun sebelumnya sebesar (Rp36.270.535,64). Koreksi lain-lain yang berdampak pada Kas BOS merupakan koreksi atas saldo awal Kas di Bendahara BOS SD Subsidi Kale Muri senilai Rp68.477.723,00 yang berubah status menjadi SD Negeri Kale Muri sesuai dengan Keputusan Bupati Sabu Raijua No 250/KEP/HK/2023 tentang Perubahan Nama dan Status Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Subsidi Kale Muri menjadi Sekolah Dasar Negeri Kale Muri tanggal 31 Mei 2023.

b. Dampak Perubahan Piutang

Koreksi ekuitas yang berdampak pada piutang sebesar pada tahun 2024 senilai (Rp16.785.347,40) yang mengalami peningkatan sebesar Rp529.045.167,60 atau 96,92% dari tahun 2023 sebesar (Rp545.830.515,00). Koreksi ekuitas yang berdampak perubahan piutang terdiri atas sebagai berikut.

1. Koreksi saldo awal atas piutang retribusi mess pemda atas nama Laurensius G Mosa Ola, S.Pt sebesar Rp2.550.000,00, hal ini disebabkan kurang informasinya dari yang bersangkutan.
2. Koreksi saldo awal piutang pajak gaji C sebesar Rp13.273.887,84 yang merupakan koreksi kurang piutang disebabkan pada tahun 2024 CV Fajar Karya mengajukan kelebihan bayar pajak atas pembayaran tahun 2023, sehingga Dinas PUPR mengeluarkan surat ketetapan lebih bayar. Oleh



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

karena itu terjadi koreksi kurang piutang pajak galian C sesuai perhitungan yang baru sebesar Rp13.273.887,84.

3. Koreksi atas kelebihan bayar pajak galian C yang diakui sebagai pengurang piutang atas CV Tujuh Jaya dan Lodyatama Rotenusa sebesar Rp1.911.154,00.
4. Koreksi atas kekurangan pencatatan penyisihan piutang senilai Rp7.972.613,56

c. Dampak Perubahan Aset Tetap

Koreksi ekuitas yang berdampak pada aset tetap tahun 2024 sebesar Rp56.109.374.385,00 mengalami peningkatan sebesar Rp49.922.892.591,00 atau 806,97% dibanding tahun 2023 sebesar Rp6.186.481.794,00. Koreksi ekuitas yang berdampak pada aset tetap tahun 2024 terdiri atas:

- a. Dampak perubahan aset tetap peralatan mesin sebesar Rp472.147.102,00.
- b. Dampak perubahan aset tetap gedung bangunan sebesar Rp55.206.363.119,00.
- c. Dampak perubahan aset tetap jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp542.926.864,00.
- d. Dampak perubahan aset tetap lainnya sebesar Rp13.089.800,00
- e. Dampak perubahan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar (Rp125.152.500,00)

d. Dampak Perubahan Aset Lain-lain

Koreksi ekuitas yang berdampak pada perubahan nilai aset lain-lain tahun 2024 sebesar Rp647.819.167,00 mengalami peningkatan sebesar Rp7.932.858.793,18 atau 108,89% dibanding tahun sebelumnya sebesar (Rp7.285.039.626,18). Koreksi ekuitas yang berdampak pada perubahan nilai aset lain-lain terdiri dari koreksi atas aset rusak berat (bangunan Dinas PUPR) yang merupakan barang ekstrakom senilai Rp15.000.000,00, Hibah mesin TCM (Ganexpert) dari Kementerian Kesehatan senilai Rp554.666.667,00 dan reklas keluar KDP Peralatan Mesin berupa uang muka uang muka pengadaan motor trail pada tahun 2019 yang wanprestasi senilai Rp125.152.500,00 dan telah disetorkan kembali ke Kas Daerah pada tanggal 16 September 2020 sebesar Rp17.000.000,00.

e. Dampak Perubahan Penyusutan

Koreksi ekuitas yang berdampak pada penyusutan tahun 2024 sebesar (Rp74.059.495.542,28) mengalami penurunan sebesar Rp92.139.234.908,37 atau 509,63% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp18.079.739.366,09. Koreksi ekuitas yang berdampak pada penyusutan tahun 2024 berupa selisih nilai akumulasi awal tahun 2024 sesuai hasil perhitungan aplikasi BMD dan perubahan masa manfaat karena adanya perpindahan jenis aset. Koreksi ekuitas yang berdampak pada akumulasi penyusutan dan amortisasi terdiri atas:



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- a. Dampak perubahan penambahan akumulasi penyusutan peralatan mesin sebesar (Rp515.417.579,00)
- b. Dampak perubahan penambahan akumulasi penyusutan gedung bangunan sebesar (Rp14.314.274.032,28)
- c. Dampak perubahan penambahan akumulasi penyusutan jalan, irigasi, jaringan sebesar (Rp59.229.803.931,00).

f. Dampak utang belanja

Koreksi ekuitas yang berdampak pada utang belanja tahun 2024 sebesar Rp29.821.335,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp21.882.366,04 atau 275,63% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp7.938.968,96. Koreksi ekuitas yang berdampak pada utang belanja tahun 2024 merupakan koreksi kurang utang belanja yang terdapat pada SKPD berikut:

- a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp8.000,00, merupakan koreksi lebih catat utang pengadaan mebel ruang laboratorium komputer SDG Wuiray TA 2023.
- b. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp30.900.956,00, merupakan penghapusan utang karena diterbitkan surat pernyataan tidak menagih utang dari penyedia.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.335.535,00 merupakan koreksi utang belanja atas pendapatan di muka karena adanya kelebihan bayar pajak galian C oleh CV. Sinar Raya TA.2023.
- d. Kecamatan Hawu Mehara Rp734.314,00 dan Kecamatan Sabu Tengah Rp33.600,00 yang merupakan koreksi lebih catat utang Belanja Pegawai TPP PNSD.
- e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp4.480.000,00 yang merupakan koreksi utang belanja iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN karena tidak ada tagihan dari BPJS selama tahun anggaran 2024.

5.6.4 Ekuitas Akhir	TA 2024	TA 2023
	Rp1.475.642.693.135,69	Rp1.478.031.991.774,86

Ekuitas akhir merupakan akumulasi dari ekuitas awal di tambah surplus - LO juga koreksi ekuitas lainnya. Ekuitas akhir tahun 2024 sebesar Rp1.475.642.693.135,69 yang mengalami penurunan sebesar Rp2.389.298.639,17 atau 0,16% dibanding tahun 2023 sebesar Rp1.478.031.991.774,86.

Tabel 5.95 Ekuitas Akhir

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Saldo Awal sebesar	1.478.031.991.774,86	1.368.316.690.640,08
2	Surplus – LO	14.645.769.640,51	79.742.312.924,44
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(17.035.068.279,68)	29.972.988.210,34
	TOTAL	1.475.642.693.135,69	1.478.031.991.774,86



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Informasi Tambahan

Menyajikan informasi tambahan yang dipandang perlu diketahui oleh *stakeholders* Menyajikan informasi tambahan yang dipandang perlu diketahui oleh *stakeholders* terutama untuk mencegah kesalahan interpretasi atas laporan keuangan.

Sampai dengan 14 Maret 2025 terdapat pengembalian atas belanja tahun 2024 sebesar Rp1.127.892,00, yang terdiri atas:

1. Pengembalian selisih gaji dan tunjangan bulan Januari 2024 a.n. Cristine A. Victorya Manafe Rp317.056,00
2. Pengembalian selisih gaji dan tunjangan bulan Januari 2024 a.n. Vera Adina Kay Rp317.056,00
3. Pengembalian selisih gaji dan tunjangan bulan Januari 2024 a.n. Desen Selimang Rp136.378,00
4. Pengembalian selisih gaji dan tunjangan bulan Januari 2024 a.n. Junus Bangngu Rp357.402,00

Pengembalian tersebut dicatat sebagai lain-lain PAD yang sah.

6.1.1 Domisili

Luas wilayah Kabupaten Sabu Raijua ± 460,47 Km² atau 46,04 Ha yang terdiri dari dua pulau yang berpenghuni yaitu pulau Sabu dan pulau Raijua serta dua pulau yang tidak berpenghuni yaitu pulau Wadu Mea dan pulau Dana. Kabupaten Sabu Raijua terdiri dari enam kecamatan, masing-masing: Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Timur, Kecamatan Hawu Mehara, Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Raijua, dan Kecamatan Sabu Tengah. Pada tahun 2024, rata-rata temperatur udara di Sabu Raijua mencapai 28,70C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan November 30,20C dan terendah pada bulan Juli 27,20C.

Secara geografis Kabupaten Sabu Raijua terletak antara 10025' 7,12'' – 10049' 45,83'' Lintang Selatan dan antara 121016' 10,78'' - 12200' 30,26'' Bujur Timur dengan batas-batas Kabupaten Sabu Raijua sebelah Utara, Timur dan Barat dengan Laut Sabu dan Selatan dengan Samudera Hindia serta panjang garis pantai ±1.026,36Km². Dari segi topografi, rata-rata ketinggian wilayah-wilayah di Kabupaten Sabu Raijua berada pada rata-rata antara 0-100 meter di atas permukaan laut dengan permukaan tanahnya berbukit-bukit dengan rata-rata kemiringan 45 dengan beberapa puncak yang menjulang. Jenis tanah yang dominan di wilayah Kabupaten Sabu Raijua adalah Alluvial, Grumosol, Litosol dan Mediteran dengan tekstur tanah halus sampai kasar. Selain itu, terdapat juga gunung-gunung kapur yang terbentang di sepanjang kawasan kabupaten ini.

Jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2024 berdasarkan publikasi dari Badan Pusat Statistik yang termuat dalam Sabu Raijua dalam Angka 2025 sebanyak 94.787 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 103,76 dan kepadatan penduduk rata-rata 206 jiwa/km².



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kabupaten Sabu Raijua beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan musim hujan yang pendek. Sedangkan potensi flora sebagian besar terdiri dari padang rumput yang luas, pohon lontar, pohon pinus, pohon gewang, pohon kelapa, hutan Mangrove dan lain-lain. Keadaan fauna terdiri dari kerbau, sapi, kuda, hewan kecil seperti kambing, domba, babi dan berbagai aneka unggas. Sebagai daerah agraris maka Kabupaten Sabu Raijua memiliki potensi pertanian dan peternakan, baik potensi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan serta peternakan, sedangkan potensi non pertanian seperti pertambangan galian bahan mineral bukan logam dan batuan. Sehingga mata pencaharian utama dari penduduk Kabupaten Sabu Raijua adalah tenaga usaha pertanian dan peternakan.

Kondisi alam Sabu Raijua yang kering dengan curah hujan yang rendah berdampak pada masih rendahnya produksi berbagai tanaman pangan di Kabupaten Sabu Raijua, kondisi ini semakin diperparah dengan El Nino. Padi merupakan tanaman pangan dengan produksi tertinggi mencapai 4.780,82 ton, disusul jagung 3.905,59 ton dan kacang hijau 481,45 ton. Hewan ternak besar yang banyak terdapat di kabupaten ini adalah kerbau, kuda dan sapi dan ternak kecil kambing, babi dan domba sedangkan produksi perikanan laut dalam hal ini hasil rumput laut sebesar 77.452,5 ton.

Produksi pertanian Sabu Raijua meliputi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan sorgum, hortikultura, buah-buahan, dengan unggulan pada sektor pertanian tanaman jagung. Di bidang peternakan Kabupaten Sabu Raijua memiliki potensi peternakan Sapi, Kuda, Kerbau, Domba, Kambing dan Babi serta berbagai jenis Unggas.

Pada tahun 2024 terdapat 4.478 industri di Sabu Raijua yang terdiri dari dua industri menengah, 34 industri kecil dan 4.442 industri rumah tangga. Berdasarkan sub sektornya industri di kabupaten ini didominasi industri makanan, minuman dan tembakau yang sebagian besar berupa gula air dan industri barang dari logam, mesin dan peralatan.

Wilayah Kabupaten Sabu Raijua memiliki infrastruktur perhubungan darat dengan panjang jalan hingga tahun 2024 adalah 655,27 km yang terdiri dari 45,27 km (6,9%) jalan Negara, 39 km (5,95%) jalan Provinsi dan 571 km (87,13%) jalan Kabupaten. Menurut jenis permukaannya sepanjang 257,47 km merupakan jalan aspal, 156,40 km merupakan jalan kerikil, 241,40 km masih berupa jalan tanah. Sementara itu, berdasarkan kondisi jalan, terdapat sepanjang 394,8 km jalan di kabupaten ini yang dalam keadaan rusak berat, dan 218,87 km dalam keadaan baik. Sisanya dalam kondisi rusak dan sedang untuk menghubungkan satu kecamatan dan kecamatan lainnya, infrastruktur perhubungan udara dengan satu buah lapangan terbang perintis Tardamu di Seba yang dapat dilayani oleh maskapai penerbangan Susi Air dan infrastruktur perhubungan laut yang terdiri dari dua pelabuhan laut di Seba Kecamatan Sabu Barat, satu Pelabuhan laut Biu Kecamatan Sabu Timur dan dua Pelabuhan laut di Raijua (satu belum beroperasi) sebagai tempat berlabuh/bersandarnya kapal perintis, kapal ferry, kapal motor/perahu layar lainnya yang dapat mengangkut manusia, hewan, barang, dan berbagai komoditi lainnya.

Bidang pariwisata sebagai primadona, Kabupaten Sabu Raijua memiliki potensi pariwisata yang tinggi, baik wisata budaya dengan kebudayaan turun temurun yang masih dipelihara keasliannya yaitu perkampungan adat tradisional, rumah adat,



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

wisata pantai dan taman laut, maupun wisata alam dengan panorama alam pantai dan gunung yang mempesona. Potensi pariwisata telah dilakukan penataan secara baik dan bertahap melalui intervensi anggaran dari Pemda yang disalurkan melalui Dinas Pariwisata. Selain itu masih ada kendala penyediaan fasilitas pendukung seperti alat transportasi, hotel/penginapan, restoran/rumah makan, dan fasilitas pendukung lainnya masih sangat terbatas.

6.1.2 Ketentuan Perundang-Undangan yang menjadi landasan kegiatan operasi

- a) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 3);
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 4).

6.1.3 Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dipimpin oleh Bupati Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si, Wakil Bupati Yohanis Uly Kale A.Md dengan masa kerja sampai tanggal 20 Februari 2025 dan di lanjutkan oleh Krisman Bernard Riwu Kore, S.E.,M.M dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan dibantu oleh Sekretaris Daerah Septenius M. Bule Logo, SH, M.Hum, 2 orang Staf Ahli, 3 orang Asisten dengan total aparatur PNS sebanyak 1.816 orang, dan PPPK sebanyak 647 orang. Total ASN tahun 2024 sebanyak 2.463 orang yang terdiri dari 21 orang pimpinan tinggi pratama, 100 orang administrator, 127 orang pengawas, 1026 orang fungsional guru, 584 orang fungsional medis, 220 orang fungsional teknis, dan 385 orang fungsional umum/pelaksana.

ASN tersebar pada Unit Dinas, Unit Badan, satu Unit Kantor, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Unit Bagian pada Sekretariat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), enam Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), 57 Puskesmas Pembantu (Pustu), enam Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), 266 unit Kelompok Bermain (Kober/PAUD), 42 unit Satuan PAUD Sejenis (SPS), 15 unit Taman Kanak-kanak (TKK), 77 unit Sekolah Dasar (SD), 24 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), enam unit Kantor Kecamatan, Kelurahan dan dibantu dengan aparatur tingkat desa pada 58 Desa, 244 Dusun, 484 Rukun Warga (RW) dan 975 Rukun Tetangga (RT) dalam memberikan pelayanan



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

dan menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Sabu Raijua.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua; Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua; Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sabu Raijua; Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Sabu Raijua; Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua; Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua; Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua.

Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri atas 39 SKPD yaitu:

Tabel 6.1 Daftar SKPD

No	SKPD
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga
2	Rumah Sakit Umum Daerah
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
6	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
9	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja
10	Dinas Pertanian dan Pangan
11	Dinas Lingkungan Hidup
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Dinas Perhubungan
15	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian Dan Perdagangan
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Dinas Kelautan dan Perikanan
19	Dinas Pariwisata
20	Bagian Pemerintahan
21	Bagian Kesejahteraan Rakyat
22	Bagian Hukum
23	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
24	Bagian Administrasi Pembangunan
25	Bagian Umum



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD
26	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
27	Bagian Organisasi
28	Inspektorat Daerah
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
30	Badan Keuangan Daerah
31	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan
32	Sekretariat DPRD
33	Kecamatan Sabu Barat
34	Kecamatan Sabu Timur
35	Kecamatan Sabu Liae
36	Kecamatan Hawu Mehara
37	Kecamatan Raijua
38	Kecamatan Sabu Tengah
39	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

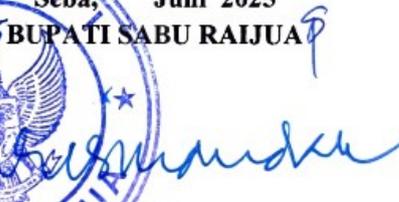
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian penyajian Catatan atas Laporan Keuangan sebagai penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas yang merupakan satu kesatuan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 dan 2023 untuk melaksanakan dan memenuhi amanat peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seba, Juni 2025
BUPATI SABU RAIJUA



KRISMAN BERNARD RIWU KORE, S.E., M.M



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENCAPAIAN KINERJA APBD TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian Urusan. Organisasi.	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1.01	Pendidikan				
1.01.01	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	194.069.580.710,10	171.070.194.639,00	22.999.386.071,10	88,15
1.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	134.754.365.370,10	114.730.329.408,00	20.024.035.962,10	85,14
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	436.140.300,00	431.473.011,00	4.667.289,00	98,93
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
1.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	62.859.100,00	58.028.000,00	4.831.100,00	92,31
1.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	122.390.000,00	122.374.186,00	15.814,00	99,99
1.01.02.2.01	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	25.746.975.850,00	24.718.912.010,00	1.028.063.840,00	96,01
1.01.02.2.02	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	16.658.266.041,00	15.761.095.729,00	897.170.312,00	94,61
1.01.02.2.03	Pengelolaan pendidikan anak usia dini (paud)	11.786.857.050,00	11.168.912.735,00	617.944.315,00	94,76
1.01.02.2.04	Pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	1.360.589.400,00	1.322.437.080,00	38.152.320,00	97,20
1.01.03.2.02	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	84.226.700,00	79.246.700,00	4.980.000,00	94,09
1.01.05.2.02	Penerbitan izin paud dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	105.950.700,00	83.110.700,00	22.840.000,00	78,44
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114.697.900,00	69.356.900,00	45.341.000,00	60,47
2.19.03.2.01	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada Jenjang pendidikan yang menjadi Kewenangan daerah kabupaten/kota	118.776.800,00	117.264.080,00	1.512.720,00	98,73
2.19.03.2.03	Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	558.393.699,00	556.438.000,00	1.955.699,00	99,65
2.19.03.2.04	Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	1.000.000.000,00	787.000.400,00	212.999.600,00	78,70
2.19.04.2.01	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	300.000.000,00	219.739.900,00	80.260.100,00	73,25
2.22.03.2.01	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	103.788.800,00	103.788.800,00	-	100,00
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	730.303.000,00	715.687.000,00	14.616.000,00	98,00
1.02	Kesehatan				
1.02.01	Rumah Sakit Umum Daerah	12.786.490.907,00	10.365.378.738,00	2.421.112.169,00	81,07
1.02.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	129.344.000,00	123.396.000,00	5.948.000,00	95,40
1.02.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	83.956.000,00	27.194.321,00	56.761.679,00	32,39
1.02.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	754.614.716,00	701.467.968,00	53.146.748,00	92,96
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	267.330.000,00	267.000.000,00	330.000,00	99,88
1.02.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3.680.464.922,00	2.640.852.355,00	1.039.612.567,00	71,75

Kode	Uraian Urusan. Organisasi.	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
1.02.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	460.045.000,00	354.061.215,00	105.983.785,00	76,96
1.02.02.2.01	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	3.901.595.843,00	3.585.028.252,00	316.567.591,00	91,89
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	1.113.306.026,00	982.534.307,00	130.771.719,00	88,25
1.02.03.2.02	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	2.395.834.400,00	1.683.844.320,00	711.990.080,00	70,28
1.02.02	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	85.135.600.734,00	73.833.615.874,00	11.301.984.860,00	86,72
1.02.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	53.025.208.156,00	45.775.431.394,00	7.249.776.762,00	86,33
1.02.01.2.03	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	23.646.200,00	23.090.000,00	556.200,00	97,65
1.02.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	50.410.000,00	50.160.000,00	250.000,00	99,50
1.02.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	377.981.000,00	374.911.715,00	3.069.285,00	99,19
1.02.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	559.026.200,00	378.160.000,00	180.866.200,00	67,65
1.02.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	157.620.000,00	157.614.047,00	5.953,00	100,00
1.02.02.2.01	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm dan ukp kewenangan daerah kabupaten/kota	13.556.103.837,00	12.420.689.242,00	1.135.414.595,00	91,62
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	9.221.940.497,00	7.503.277.037,00	1.718.663.460,00	81,36
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	45.390.000,00	44.160.000,00	1.230.000,00	97,29
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	14.920.000,00	14.815.374,00	104.626,00	99,30
1.02.03.2.02	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk ukp dan ukm di wilayah kabupaten/kota	4.599.341.044,00	3.937.092.132,00	662.248.912,00	85,60
1.02.03.2.03	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya	456.880.300,00	379.473.808,00	77.406.492,00	83,06
1.02.04.2.01	Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	28.190.000,00	26.855.000,00	1.335.000,00	95,26
1.02.04.2.03	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor p-irt sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	82.646.000,00	75.965.276,00	6.680.724,00	91,92
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	19.934.000,00	19.100.000,00	834.000,00	95,82
1.02.04.2.06	Pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	173.955.000,00	162.668.135,00	11.286.865,00	93,51
1.02.05.2.02	Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (ukbm) tingkat daerah kabupaten/kota	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00
1.02.05.2.03	Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	19.705.400,00	16.551.400,00	3.154.000,00	83,99
2.14.02.2.02	Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	129.360.000,00	124.303.000,00	5.057.000,00	96,09

Kode	Uraian Urusan. Organisasi.	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
2.14.03.2.01	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal	921.075.000,00	828.539.000,00	92.536.000,00	89,95
2.14.03.2.02	Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	283.500.000,00	283.500.000,00	-	100,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan kb di daerah kabupaten/kota	468.333.100,00	376.471.000,00	91.862.100,00	80,39
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	146.650.000,00	141.130.000,00	5.520.000,00	96,24
2.14.04.2.01	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	328.885.000,00	275.758.314,00	53.126.686,00	83,85
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	434.700.000,00	433.700.000,00	1.000.000,00	99,77
1.02.02	Puskesmas Ledeuu	1.457.524.500,00	1.254.534.731,00	202.989.769,00	86,07
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	1.444.204.500,00	1.249.534.731,00	194.669.769,00	86,52
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	13.320.000,00	5.000.000,00	8.320.000,00	37,54
1.02.02	Puskesmas Daieko	2.140.091.076,00	1.971.009.850,00	169.081.226,00	92,10
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	2.126.771.076,00	1.966.009.850,00	160.761.226,00	92,44
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	13.320.000,00	5.000.000,00	8.320.000,00	37,54
1.02.02	Puskesmas Eilogo	1.455.059.892,00	1.397.920.600,00	57.139.292,00	96,07
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	1.441.739.892,00	1.392.920.600,00	48.819.292,00	96,61
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	13.320.000,00	5.000.000,00	8.320.000,00	37,54
1.02.02	Puskesmas Seba	3.956.249.552,00	3.226.295.066,00	729.954.486,00	81,55
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	3.942.929.552,00	3.221.295.066,00	721.634.486,00	81,70
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	13.320.000,00	5.000.000,00	8.320.000,00	37,54
1.02.02	Puskesmas Eimadake	1.364.732.806,00	1.304.635.097,00	60.097.709,00	95,60
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	1.351.412.806,00	1.299.635.097,00	51.777.709,00	96,17
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	13.320.000,00	5.000.000,00	8.320.000,00	37,54
1.02.02	Puskesmas Bolou	1.486.418.934,00	1.286.373.979,00	200.044.955,00	86,54
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	1.473.098.934,00	1.281.373.979,00	191.724.955,00	86,98
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	13.320.000,00	5.000.000,00	8.320.000,00	37,54
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				

Kode	Uraian Urusan. Organisasi.	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	107.977.917.051,00	104.397.663.507,00	3.580.253.544,00	96,68
1.03.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah	9.600.000,00	9.320.000,00	280.000,00	97,08
1.03.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	4.773.473.098,00	3.908.104.596,00	865.368.502,00	81,87
1.03.01.2.03	Administrasi barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.800.000,00	1.780.000,00	20.000,00	98,89
1.03.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	45.800.000,00	45.800.000,00	-	100,00
1.03.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	884.119.800,00	868.495.119,00	15.624.681,00	98,23
1.03.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	277.916.440,00	271.370.265,00	6.546.175,00	97,64
1.03.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	47.809.456,00	45.830.000,00	1.979.456,00	95,86
1.03.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	209.240.000,00	207.232.493,00	2.007.507,00	99,04
1.03.02.2.01	Pengelolaan sda dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (ws) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	8.740.739.726,00	8.285.060.976,00	455.678.750,00	94,79
1.03.02.2.02	pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1.827.390.000,00	1.744.043.250,00	83.346.750,00	95,44
1.03.03.2.01	pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota	13.008.411.435,00	11.586.257.227,00	1.422.154.208,00	89,07
1.03.04.2.01	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota	252.000.000,00	-	252.000.000,00	-
1.03.05.2.01	pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	6.274.383.000,00	6.251.719.631,00	22.663.369,00	99,64
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam daerah kabupaten/kota	300.000.000,00	290.000.000,00	10.000.000,00	96,67
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota	420.040.000,00	271.000.000,00	149.040.000,00	64,52
1.03.08.2.01	penyelenggaraan bangunan Gedung di wilayah daerah kabupaten/kota.	115.997.600,00	92.145.000,00	23.852.600,00	79,44
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di daerah	16.750.000,00	6.460.000,00	10.290.000,00	38,57
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	70.368.608.857,00	70.336.852.853,00	31.756.004,00	99,95
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	52.714.000,00	-	52.714.000,00	-
1.03.12.2.02	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota	16.650.000,00	16.590.000,00	60.000,00	99,64
1.03.12.2.03	Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	49.568.000,00	38.840.000,00	10.728.000,00	78,36
2.10.05.2.01	penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	284.905.639,00	120.762.097,00	164.143.542,00	42,39
1,04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.970.541.257,00	4.357.368.389,00	613.172.868,00	87,66
1.04.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	1.926.640.557,00	1.444.188.140,00	482.452.417,00	74,96
1.04.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	27.300.000,00	27.300.000,00	-	100,00
1.04.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	195.459.800,00	191.271.500,00	4.188.300,00	97,86

Kode	Uraian Urusan. Organisasi.	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
1.04.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	16.239.100,00	16.214.000,00	25.100,00	99,85
1.04.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	65.360.000,00	65.360.000,00	-	100,00
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	40.063.600,00	39.776.000,00	287.600,00	99,28
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	27.710.000,00	26.860.000,00	850.000,00	96,93
1.04.02.2.03	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi kabupaten/kota	270.462.200,00	270.461.800,00	400,00	100,00
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	81.032.000,00	80.983.200,00	48.800,00	99,94
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	875.827.000,00	751.871.649,00	123.955.351,00	85,85
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	597.317.000,00	597.204.100,00	112.900,00	99,98
1.04.05.2.01	Urusan penyelenggaraan PSU perumahan	847.130.000,00	845.878.000,00	1.252.000,00	99,85
1,05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	6.537.943.580,00	6.038.283.338,00	499.660.242,00	92,36
1.05.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	3.351.435.030,00	2.913.632.349,00	437.802.681,00	86,94
1.05.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	221.050.000,00	217.199.000,00	3.851.000,00	98,26
1.05.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	183.906.900,00	157.686.600,00	26.220.300,00	85,74
1.05.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.675.611.100,00	1.654.353.300,00	21.257.800,00	98,73
1.05.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	145.570.000,00	145.561.386,00	8.614,00	99,99
1.05.02.2.01	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	761.204.800,00	754.479.703,00	6.725.097,00	99,12
1.05.02.2.02	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota	29.805.000,00	29.465.000,00	340.000,00	98,86
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	169.360.750,00	165.906.000,00	3.454.750,00	97,96
1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.204.503.433,00	2.678.760.353,00	525.743.080,00	83,59
1.05.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	1.721.864.433,00	1.205.662.513,00	516.201.920,00	70,02
1.05.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	29.750.000,00	29.750.000,00	-	100,00
1.05.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	143.448.300,00	141.174.640,00	2.273.660,00	98,41
1.05.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	34.000.000,00	34.000.000,00	-	100,00
1.05.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	7.403.700,00	7.378.000,00	25.700,00	99,65
1.05.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	350.720.000,00	350.709.700,00	10.300,00	100,00
1.05.03.2.02	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	84.264.000,00	83.224.000,00	1.040.000,00	98,77
1.05.03.2.03	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	833.053.000,00	826.861.500,00	6.191.500,00	99,26
1,06	Sosial				

Kode	Uraian Urusan. Organisasi.	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
1.06.01	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.349.806.450,00	5.799.133.748,00	550.672.702,00	91,33
1.06.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.023.937.700,00	1.621.511.792,00	402.425.908,00	80,12
1.06.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	21.300.000,00	21.300.000,00	-	100,00
1.06.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	238.625.300,00	237.088.666,00	1.536.634,00	99,36
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	471.381.750,00	433.106.730,00	38.275.020,00	91,88
1.06.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	42.581.000,00	42.509.800,00	71.200,00	99,83
1.06.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	165.664.300,00	165.639.019,00	25.281,00	99,98
1.06.02.2.03	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	203.455.000,00	203.380.000,00	75.000,00	99,96
1.06.04.2.01	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	304.480.000,00	303.641.000,00	839.000,00	99,72
1.06.04.2.02	Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	195.572.000,00	190.633.380,00	4.938.620,00	97,47
1.06.05.2.02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	1.395.856.000,00	1.392.416.840,00	3.439.160,00	99,75
1.06.06.2.01	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	56.490.000,00	56.490.000,00	-	100,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	283.950.000,00	275.748.500,00	8.201.500,00	97,11
2.08.02.2.01	Pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	7.065.000,00	7.065.000,00	-	100,00
2.08.03.2.01	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	56.820.000,00	56.820.000,00	-	100,00
2.08.03.2.02	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	61.040.000,00	58.198.000,00	2.842.000,00	95,34
2.08.03.2.03	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	20.291.000,00	19.681.800,00	609.200,00	97,00
2.08.04.2.01	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota	161.286.000,00	136.565.769,00	24.720.231,00	84,67
2.08.05.2.01	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	26.873.600,00	25.316.000,00	1.557.600,00	94,20
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	231.288.800,00	221.674.652,00	9.614.148,00	95,84
2.08.07.2.01	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	73.180.000,00	73.100.000,00	80.000,00	99,89
2.08.07.2.02	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	240.560.000,00	199.976.000,00	40.584.000,00	83,13

Kode	Uraian Urusan. Organisasi.	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
2.08.07.2.03	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	68.109.000,00	57.270.800,00	10.838.200,00	84,09
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
2,01	Tenaga Kerja				
2.01.01	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	6.886.538.327,00	6.544.883.283,00	341.655.044,00	95,04
2.07.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.152.754.327,00	2.079.677.569,00	73.076.758,00	96,61
2.07.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00
2.07.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	232.663.900,00	228.204.342,00	4.459.558,00	98,08
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	379.200.000,00	328.800.000,00	50.400.000,00	86,71
2.07.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	7.311.800,00	7.243.000,00	68.800,00	99,06
2.07.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	61.780.000,00	61.738.412,00	41.588,00	99,93
2.07.03.2.01	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	585.037.400,00	507.400.940,00	77.636.460,00	86,73
2.07.04.2.01	Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten/kota	169.318.200,00	168.820.000,00	498.200,00	99,71
2.07.04.2.03	Pengelolaan informasi pasar kerja	4.996.400,00	4.511.000,00	485.400,00	90,29
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	29.380.000,00	28.940.000,00	440.000,00	98,50
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi. koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	85.159.100,00	82.306.000,00	2.853.100,00	96,65
2.17.04.2.01	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	48.140.000,00	42.818.400,00	5.321.600,00	88,95
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koprasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	72.950.000,00	65.779.000,00	7.171.000,00	90,17
2.17.07.2.01	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	2.760.475.200,00	2.646.229.845,00	114.245.355,00	95,86
2.17.08.2.01	Pengembangan usaha mikro dengan orintasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	94.750.000,00	93.782.000,00	968.000,00	98,98
3.32.02.2.01	Pencadangan tanah untuk Kawasan transmigrasi	109.898.000,00	108.248.024,00	1.649.976,00	98,50
3.32.03.2.01	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	63.624.000,00	61.284.751,00	2.339.249,00	96,32
2.03.01	Pangan				
2.09.01	Dinas Pertanian dan Pangan	12.438.037.859,00	12.061.751.228,00	376.286.631,00	96,97
2.09.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	7.359.141.309,00	7.017.911.895,00	341.229.414,00	95,36
2.09.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	38.100.000,00	38.100.000,00	-	100,00
2.09.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	558.377.500,00	547.918.522,00	10.458.978,00	98,13

Kode	Uraian Urusan. Organisasi.	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
2.09.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	52.977.500,00	52.925.000,00	52.500,00	99,90
2.09.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	114.180.000,00	114.180.000,00	-	100,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	52.522.200,00	52.446.600,00	75.600,00	99,86
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota	124.992.000,00	124.992.000,00	-	100,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	120.000.000,00	120.000.000,00	-	100,00
2.09.04.2.02	Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	48.064.400,00	46.144.000,00	1.920.400,00	96,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	16.299.600,00	16.299.600,00	-	100,00
3.27.02.2.01	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	1.990.296.000,00	1.988.602.626,00	1.693.374,00	99,91
3.27.02.2.03	Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota	446.985.000,00	430.952.760,00	16.032.240,00	96,41
3.27.03.2.01	Pengembangan prasarana pertanian	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00
3.27.03.2.02	Pembangunan prasarana pertanian	381.600.000,00	379.001.000,00	2.599.000,00	99,32
3.27.04.2.01	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	239.194.000,00	238.921.800,00	272.200,00	99,89
3.27.04.2.03	Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota	51.340.200,00	51.091.800,00	248.400,00	99,52
3.27.05.2.01	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	139.965.000,00	139.768.425,00	196.575,00	99,86
3.27.07.2.01	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	688.703.150,00	687.195.200,00	1.507.950,00	99,78
2,11	Lingkungan Hidup				
2.11.00	Dinas Lingkungan Hidup	3.984.274.026,00	3.410.799.059,00	573.474.967,00	85,61
2.11.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	1.811.509.800,00	1.534.411.121,00	277.098.679,00	84,70
2.11.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	105.238.000,00	96.854.745,00	8.383.255,00	92,03
2.11.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	297.369.828,00	281.417.977,00	15.951.851,00	94,64
2.11.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	15.583.300,00	15.450.000,00	133.300,00	99,14
2.11.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	101.115.450,00	100.772.182,00	343.268,00	99,66
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	500.000.000,00	328.719.407,00	171.280.593,00	65,74
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	300.000.000,00	236.704.715,00	63.295.285,00	78,90
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	206.136.000,00	196.459.482,00	9.676.518,00	95,31
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	131.249.048,00	125.391.265,00	5.857.783,00	95,54

Kode	Uraian Urusan. Organisasi.	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
2.11.06.2.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pph diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	105.832.000,00	100.585.731,00	5.246.269,00	95,04
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	42.096.000,00	37.504.657,00	4.591.343,00	89,09
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.621.600,00	41.489.600,00	132.000,00	99,68
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.350.000,00	9.970.000,00	3.380.000,00	74,68
2.11.11.2.01	Pengelolaan sampah	294.533.000,00	286.868.177,00	7.664.823,00	97,40
2.11.11.2.03	Pengelolaan Sampah	18.640.000,00	18.200.000,00	440.000,00	97,64
2,12	Administrasi Kependudukan dan Sipil				
2.12.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.252.000.876,00	2.994.716.982,00	257.283.894,00	92,09
2.12.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.243.601.001,00	1.987.480.863,00	256.120.138,00	88,58
2.12.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	24.800.000,00	24.800.000,00	-	100,00
2.12.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	99.295.100,00	98.443.895,00	851.205,00	99,14
2.12.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	5.589.400,00	5.589.400,00	-	100,00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	72.520.000,00	72.517.894,00	2.106,00	100,00
2.12.02.2.01	Pelayanan pendaftaran penduduk	445.408.475,00	445.407.150,00	1.325,00	100,00
2.12.03.2.01	Pelayanan pencatatan sipil	94.566.900,00	94.327.780,00	239.120,00	99,75
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	266.220.000,00	266.150.000,00	70.000,00	99,97
2,13	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
2.13.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.120.354.237,00	4.434.014.770,00	686.339.467,00	86,60
2.13.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	3.151.505.937,00	2.526.756.144,00	624.749.793,00	80,18
2.13.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	40.090.000,00	40.060.000,00	30.000,00	99,93
2.13.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	356.093.500,00	350.607.230,00	5.486.270,00	98,46
2.13.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	14.840.000,00	14.820.000,00	20.000,00	99,87
2.13.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	98.500.000,00	97.591.416,00	908.584,00	99,08
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan penataan desa	69.196.000,00	67.410.880,00	1.785.120,00	97,42
2.13.04.2.01	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	104.366.400,00	102.721.000,00	1.645.400,00	98,42
2.13.05.2.01	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	1.285.762.400,00	1.234.048.100,00	51.714.300,00	95,98
2,15	Perhubungan				
2.15.00	Dinas Perhubungan	8.614.629.465,00	7.230.958.227,00	1.383.671.238,00	83,94
2.15.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	1.918.655.565,00	1.386.246.165,00	532.409.400,00	72,25
2.15.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	18.800.000,00	18.800.000,00	-	100,00
2.15.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	642.255.200,00	566.926.784,00	75.328.416,00	88,27

Kode	Uraian Urusan. Organisasi.	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
2.15.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	23.450.100,00	13.519.000,00	9.931.100,00	57,65
2.15.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	154.040.000,00	151.983.445,00	2.056.555,00	98,66
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	12.240.000,00	12.240.000,00	-	100,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	27.000.000,00	26.991.000,00	9.000,00	99,97
2.15.02.2.05	Pengujian berkala kendaraan bermotor	953.494.000,00	948.363.721,00	5.130.279,00	99,46
2.15.02.2.06	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	33.996.600,00	31.266.000,00	2.730.600,00	91,97
2.15.02.2.08	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	56.310.000,00	56.010.000,00	300.000,00	99,47
2.15.02.2.09	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	258.120.000,00	216.930.000,00	41.190.000,00	84,04
2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	12.752.000,00	11.475.000,00	1.277.000,00	89,99
2.15.03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.520.000,00	12.220.000,00	2.300.000,00	84,16
2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	6.120.000,00	4.080.000,00	2.040.000,00	66,67
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	4.470.636.000,00	3.761.667.112,00	708.968.888,00	84,14
2.15.03.2.13	Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	12.240.000,00	12.240.000,00	-	100,00
2.16	Komunikasi dan Informatika				
2.16.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.027.222.590,00	4.279.320.004,00	747.902.586,00	85,12
2.16.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.040.287.590,00	1.602.825.984,00	437.461.606,00	78,56
2.16.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00
2.16.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	248.542.900,00	241.967.649,00	6.575.251,00	97,35
2.16.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	88.263.300,00	88.208.000,00	55.300,00	99,94
2.16.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	59.460.000,00	59.458.970,00	1.030,00	100,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	662.820.800,00	624.789.676,00	38.031.124,00	94,26
2.16.03.2.01	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	1.307.327.000,00	1.275.922.180,00	31.404.820,00	97,60
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	333.667.000,00	118.048.675,00	215.618.325,00	35,38
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	204.690.000,00	190.850.850,00	13.839.150,00	93,24
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	61.164.000,00	56.248.020,00	4.915.980,00	91,96

Kode	Uraian Urusan. Organisasi.	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
2,18	Penanaman Modal				
2.18.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	6.026.721.742,00	5.302.968.985,00	723.752.757,00	87,99
2.18.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.163.549.266,00	1.909.520.473,00	254.028.793,00	88,26
2.18.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00
2.18.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	225.609.700,00	202.731.773,00	22.877.927,00	89,86
2.18.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	19.085.100,00	17.296.460,00	1.788.640,00	90,63
2.18.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	210.860.000,00	210.752.450,00	107.550,00	99,95
2.18.02.2.01	Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	16.460.000,00	16.368.000,00	92.000,00	99,44
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	62.922.000,00	44.877.700,00	18.044.300,00	71,32
2.18.04.2.01	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	11.740.000,00	4.913.500,00	6.826.500,00	41,85
2.18.05.2.01	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	477.291.600,00	348.064.088,00	129.227.512,00	72,92
2.18.06.2.01	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	26.890.000,00	26.558.944,00	331.056,00	98,77
3.30.03.2.01	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	838.223.900,00	818.928.122,00	19.295.778,00	97,70
3.30.04.2.01	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/ kota	21.495.000,00	14.255.000,00	7.240.000,00	66,32
3.30.04.2.02	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	188.621.100,00	180.286.600,00	8.334.500,00	95,58
3.30.04.2.03	Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota	23.980.000,00	22.840.000,00	1.140.000,00	95,25
3.30.06.2.01	Pelaksanaan metrologi legal berupa, tera, tera ulang, dan pengawasan	93.720.000,00	76.885.974,00	16.834.026,00	82,04
3.31.02.2.01	Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	1.622.274.076,00	1.384.689.901,00	237.584.175,00	85,35
2,23	Perpustakaan				
2.23.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.220.024.140,00	3.014.307.791,00	205.716.349,00	93,61
2.23.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	1.489.552.794,00	1.303.810.617,00	185.742.177,00	87,53
2.23.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00
2.23.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	266.995.500,00	266.926.134,00	69.366,00	99,97
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.350.000,00	9.300.000,00	50.000,00	99,47
2.23.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	70.273.800,00	54.132.273,00	16.141.527,00	77,03
2.23.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	122.160.000,00	121.969.123,00	190.877,00	99,84

Kode	Uraian Urusan. Organisasi.	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
2.23.02.2.01	Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	82.875.200,00	79.575.000,00	3.300.200,00	96,02
2.23.02.2.02	Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota	1.032.048.346,00	1.031.859.016,00	189.330,00	99,98
2.24.02.2.02	Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	130.168.500,00	130.135.628,00	32.872,00	99,97
3	Urusan Pilihan				
3,25	Kelautan dan Perikanan				
3.25.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.284.060.830,00	4.383.322.413,00	3.900.738.417,00	52,91
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.720.000,00	9.720.000,00	-	100,00
3.25.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	1.900.199.630,00	1.499.870.363,00	400.329.267,00	78,93
3.25.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	19.600.000,00	19.600.000,00	-	100,00
3.25.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	465.764.100,00	442.058.729,00	23.705.371,00	94,91
3.25.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	28.116.000,00	28.114.000,00	2.000,00	99,99
3.25.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	69.346.900,00	67.070.000,00	2.276.900,00	96,72
3.25.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	88.547.000,00	88.447.875,00	99.125,00	99,89
3.25.03.2.02	Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	2.478.620.700,00	795.523.709,00	1.683.096.991,00	32,10
3.25.04.2.02	Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil	1.952.131.500,00	1.424.297.737,00	527.833.763,00	72,96
3.25.04.2.04	Pengelolaan pembudidayaan ikan	12.015.000,00	8.620.000,00	3.395.000,00	71,74
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.260.000.000,00	-	1.260.000.000,00	-
3,02	Pariwisata				
3.02.01	Dinas Pariwisata	4.850.479.082,00	4.618.582.705,37	231.896.376,63	95,22
3.26.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	1.326.417.982,00	1.208.669.254,00	117.748.728,00	91,12
3.26.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	15.500.000,00	15.500.000,00	-	100,00
3.26.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	346.095.600,00	344.625.403,00	1.470.197,00	99,58
3.25.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	39.392.000,00	39.000.000,00	392.000,00	99,00
3.26.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	7.448.600,00	7.425.000,00	23.600,00	99,68
3.26.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	90.630.000,00	90.421.030,00	208.970,00	99,77
3.26.02.2.01	Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	495.850.000,00	453.864.479,37	41.985.520,63	91,53
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	418.051.900,00	394.370.099,00	23.681.801,00	94,34
3.26.03.2.01	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	1.498.000.000,00	1.478.269.700,00	19.730.300,00	98,68
3.26.04.2.02	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	194.740.000,00	184.880.000,00	9.860.000,00	94,94
3.26.05.2.01	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	418.353.000,00	401.557.740,00	16.795.260,00	95,99
4	Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang				
4,01	Administrasi Pemerintahan				
4.01.01	Bagian Pemerintahan	1.084.392.400,00	1.067.174.176,00	17.218.224,00	98,41
4.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00
4.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	52.950.000,00	51.340.000,00	1.610.000,00	96,96
4.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	38.360.000,00	30.380.000,00	7.980.000,00	79,20

Kode	Uraian Urusan. Organisasi.	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
4.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	99.950.800,00	99.617.780,00	333.020,00	99,67
4.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	6.748.600,00	6.720.000,00	28.600,00	99,58
4.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	43.880.000,00	43.838.538,00	41.462,00	99,91
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	231.079.000,00	228.727.861,00	2.351.139,00	98,98
4.01.02.2.01	Administrasi tata pemerintahan	604.224.000,00	599.349.997,00	4.874.003,00	99,19
4.01.02	Bagian Kesejahteraan Rakyat	4.181.598.200,00	2.796.347.522,00	1.385.250.678,00	66,87
4.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	61.544.000,00	58.662.000,00	2.882.000,00	95,32
4.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00
4.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	299.857.900,00	296.143.781,00	3.714.119,00	98,76
4.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	11.492.300,00	11.478.600,00	13.700,00	99,88
4.01.02.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	47.460.000,00	47.435.900,00	24.100,00	99,95
4.01.02.2.02	Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	3.754.344.000,00	2.375.727.241,00	1.378.616.759,00	63,28
4.01.03	Bagian Hukum	905.688.300,00	817.302.876,00	88.385.424,00	90,24
4.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	37.644.000,00	36.644.000,00	1.000.000,00	97,34
4.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	55.950.000,00	55.950.000,00	-	100,00
4.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	163.809.500,00	135.976.771,00	27.832.729,00	83,01
4.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	6.684.000,00	3.648.000,00	3.036.000,00	54,58
4.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	40.300.000,00	38.730.020,00	1.569.980,00	96,10
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan koordinasi hukum	601.300.800,00	546.354.085,00	54.946.715,00	90,86
4.01.04	Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam	429.120.900,00	395.811.734,00	33.309.166,00	92,24
4.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	37.810.000,00	37.810.000,00	-	100,00
4.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00
4.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	134.453.200,00	122.535.959,00	11.917.241,00	91,14
4.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	7.866.900,00	6.956.000,00	910.900,00	88,42
4.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	43.880.000,00	42.601.235,00	1.278.765,00	97,09
4.01.03.2.01	Pelaksanaan kebijakan perekonomian	131.060.000,00	117.685.340,00	13.374.660,00	89,80
4.01.03.2.04	Pemantauan kebijakan sumber daya alam	67.450.800,00	61.623.200,00	5.827.600,00	91,36
4.01.05	Bagian Administrasi Pembangunan	853.388.900,00	821.230.869,00	32.158.031,00	96,23
4.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	19.350.000,00	14.850.000,00	4.500.000,00	76,74
4.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	44.564.000,00	44.564.000,00	-	100,00
4.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00
4.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	118.192.000,00	114.577.720,00	3.614.280,00	96,94
4.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	9.664.900,00	9.611.000,00	53.900,00	99,44
4.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	43.880.000,00	24.796.417,00	19.083.583,00	56,51
4.01.03.2.02	Pelaksanaan administrasi pembangunan	59.140.000,00	59.120.000,00	20.000,00	99,97
4.01.03.2.03	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	548.398.000,00	543.511.732,00	4.886.268,00	99,11

Kode	Uraian Urusan. Organisasi.	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
4.01.06	Bagian Umum	26.583.356.236,00	22.164.466.235,00	4.418.890.001,00	83,38
4.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	8.970.016.482,00	6.681.713.183,00	2.288.303.299,00	74,49
4.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	62.500.000,00	62.500.000,00	-	100,00
4.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	2.222.593.004,00	2.079.023.107,00	143.569.897,00	93,54
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.145.445.000,00	2.475.000.000,00	670.445.000,00	78,69
4.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	6.796.496.000,00	5.970.187.950,00	826.308.050,00	87,84
4.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1.489.195.300,00	1.488.201.874,00	993.426,00	99,93
4.01.01.2.11	Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	2.036.020.160,00	1.672.595.131,00	363.425.029,00	82,15
4.01.01.2.12	Fasilitas kerumahtanggaan sekretariat daerah	1.861.090.290,00	1.735.244.990,00	125.845.300,00	93,24
4.01.07	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	575.451.100,00	535.711.109,00	39.739.991,00	93,09
4.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	38.444.000,00	38.444.000,00	-	100,00
4.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	9.100.000,00	9.100.000,00	-	100,00
4.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	234.511.100,00	233.710.360,00	800.740,00	99,66
4.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2.496.000,00	2.496.000,00	-	100,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	43.880.000,00	43.860.749,00	19.251,00	99,96
4.01.01.2.14	Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	247.020.000,00	208.100.000,00	38.920.000,00	84,24
4.01.08	Bagian Organisasi	618.929.400,00	613.936.442,00	4.992.958,00	99,19
4.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	36.644.000,00	36.644.000,00	-	100,00
4.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00
4.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	88.333.700,00	87.613.429,00	720.271,00	99,18
4.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	9.969.500,00	9.950.000,00	19.500,00	99,80
4.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	40.300.000,00	40.162.382,00	137.618,00	99,66
4.01.01.2.13	Penataan organisasi	433.482.200,00	429.366.631,00	4.115.569,00	99,05
6,01	Pengawasan				
6.01.00	Inspektorat Daerah	3.847.447.708,00	3.045.990.354,00	801.457.354,00	79,17
6.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.079.350.108,00	1.743.651.341,00	335.698.767,00	83,86
6.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	98.098.000,00	89.174.788,00	8.923.212,00	90,90
6.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	871.191.500,00	658.470.432,00	212.721.068,00	75,58
6.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	9.742.100,00	8.965.500,00	776.600,00	92,03
6.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	117.380.000,00	116.677.168,00	702.832,00	99,40
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan pengawasan internal	354.480.000,00	246.005.043,00	108.474.957,00	69,40
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	114.510.000,00	42.055.000,00	72.455.000,00	36,73
6.01.03.2.02	Pendampingan dan asistensi	202.696.000,00	140.991.082,00	61.704.918,00	69,56
5,01	Perencanaan				
5.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.919.020.868,00	5.386.881.229,00	532.139.639,00	91,01
5.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	119.402.800,00	115.326.551,00	4.076.249,00	96,59

Kode	Uraian Urusan. Organisasi.	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
5.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	1.968.429.568,00	1.584.290.197,00	384.139.371,00	80,48
5.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	199.624.000,00	141.828.524,00	57.795.476,00	71,05
5.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	529.186.300,00	515.127.756,00	14.058.544,00	97,34
5.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	22.926.500,00	22.891.000,00	35.500,00	99,85
5.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	112.820.000,00	112.795.325,00	24.675,00	99,98
5.01.02.2.01	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	768.135.000,00	737.603.879,00	30.531.121,00	96,03
5.01.02.2.02	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	39.770.000,00	39.713.480,00	56.520,00	99,86
5.01.02.2.03	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	258.020.000,00	250.385.000,00	7.635.000,00	97,04
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	99.090.000,00	94.673.600,00	4.416.400,00	95,54
5.01.03.2.01	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	775.833.700,00	761.432.313,00	14.401.387,00	98,14
5.01.03.2.02	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sda (sumber daya alam)	213.442.000,00	213.135.491,00	306.509,00	99,86
5.01.03.2.03	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	684.445.000,00	670.692.885,00	13.752.115,00	97,99
5.05.02.2.01	Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	27.972.000,00	27.230.000,00	742.000,00	97,35
5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	99.924.000,00	99.755.228,00	168.772,00	99,83
5.02	Keuangan				
5.02.00	Badan Keuangan Daerah	114.202.240.722,00	108.702.363.514,00	5.499.877.208,00	95,18
5.02.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	4.562.088.222,00	3.471.054.396,00	1.091.033.826,00	76,08
5.02.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	206.097.000,00	173.893.637,00	32.203.363,00	84,37
5.02.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	612.305.000,00	583.443.780,00	28.861.220,00	95,29
5.02.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	40.832.700,00	38.755.542,00	2.077.158,00	94,91
5.02.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	171.020.000,00	169.343.007,00	1.676.993,00	99,02
5.02.02.2.01	Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	1.015.941.110,00	902.842.575,00	113.098.535,00	88,87
5.02.02.2.02	Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	435.759.000,00	410.777.129,00	24.981.871,00	94,27
5.02.02.2.03	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	516.645.600,00	391.212.574,00	125.433.026,00	75,72
5.02.02.2.04	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	104.774.061.980,00	101.168.444.960,00	3.605.617.020,00	96,56
5.02.03.2.01	Pengelolaan barang milik daerah	899.491.000,00	774.739.045,00	124.751.955,00	86,13
5.02.04.2.01	Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	967.999.110,00	617.856.869,00	350.142.241,00	63,83
5.03	Kepegawaian				
5.03.00	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	5.987.264.908,00	5.095.503.970,00	891.760.938,00	85,11
5.03.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.381.864.708,00	2.118.815.187,00	263.049.521,00	88,96
5.03.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	679.500.000,00	569.000.000,00	110.500.000,00	83,74
5.03.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	391.701.900,00	385.585.832,00	6.116.068,00	98,44
5.03.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	20.251.000,00	18.902.000,00	1.349.000,00	93,34

Kode	Uraian Urusan. Organisasi.	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
5.03.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	61.780.000,00	61.658.891,00	121.109,00	99,80
5.03.02.2.01	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	384.828.000,00	346.070.799,00	38.757.201,00	89,93
5.03.02.2.02	Mutasi dan promosi ASN	746.243.300,00	683.634.195,00	62.609.105,00	91,61
5.03.02.2.03	Pengembangan kompetensi ASN	682.842.000,00	550.788.315,00	132.053.685,00	80,66
5.03.02.2.04	Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	64.258.000,00	63.352.860,00	905.140,00	98,59
5.04.02.2.01	Pengembangan kompetensi teknis	4.230.000,00	3.195.000,00	1.035.000,00	75,53
5.04.02.2.02	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	569.766.000,00	294.500.891,00	275.265.109,00	51,69
4.02	Sekretariat DPRD				
4.02.00	Sekretariat DPRD	29.334.762.309,00	25.200.142.404,00	4.134.619.905,00	85,91
4.02.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	30.020.000,00	28.740.110,00	1.279.890,00	95,74
4.02.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.324.454.427,00	1.850.444.005,00	474.010.422,00	79,61
4.02.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	218.874.000,00	160.355.785,00	58.518.215,00	73,26
4.02.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	1.094.411.208,00	1.030.240.278,00	64.170.930,00	94,14
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.687.140.000,00	1.618.000.000,00	69.140.000,00	95,90
4.02.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	420.587.300,00	359.733.906,00	60.853.394,00	85,53
4.02.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	522.740.000,00	494.893.986,00	27.846.014,00	94,67
4.02.01.2.15	Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	8.333.815.274,00	8.034.775.689,00	299.039.585,00	96,41
4.02.01.2.16	Layanan administrasi DPRD	1.888.181.100,00	1.663.698.023,00	224.483.077,00	88,11
4.02.02.2.03	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	150.650.000,00	37.950.000,00	112.700.000,00	25,19
4.02.02.2.04	Peningkatan kapasitas DPRD	10.094.175.000,00	7.718.213.905,00	2.375.961.095,00	76,46
4.02.02.2.05	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	2.261.280.000,00	2.019.095.000,00	242.185.000,00	89,29
4.02.02.2.08	Fasilitasi tugas DPRD	308.434.000,00	184.001.717,00	124.432.283,00	59,66
7.01.01	Kecamatan Sabu Barat	3.401.589.177,00	2.894.195.710,00	507.393.467,00	85,08
7.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.623.332.977,00	2.131.958.780,00	491.374.197,00	81,27
7.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	74.603.200,00	70.801.600,00	3.801.600,00	94,90
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	37.077.700,00	33.768.000,00	3.309.700,00	91,07
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	54.620.000,00	47.338.530,00	7.281.470,00	86,67
7.01.02.2.01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	381.992.900,00	380.491.600,00	1.501.300,00	99,61
7.01.03.2.01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	28.220.000,00	28.220.000,00	-	100,00
7.01.03.2.02	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	201.742.400,00	201.617.200,00	125.200,00	99,94
7.01.02	Kecamatan Sabu Timur	4.695.978.598,00	4.425.263.598,00	270.715.000,00	94,24
7.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	3.238.180.498,00	2.972.082.938,00	266.097.560,00	91,78
7.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	29.200.000,00	29.200.000,00	-	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	60.831.000,00	60.734.400,00	96.600,00	99,84
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	33.242.200,00	33.227.500,00	14.700,00	99,96
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	73.608.300,00	73.602.260,00	6.040,00	99,99
7.01.02.2.01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	767.350.000,00	764.690.000,00	2.660.000,00	99,65

Kode	Uraian Urusan. Organisasi.	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
7.01.03.2.02	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	431.740.000,00	431.690.000,00	50.000,00	99,99
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	61.826.600,00	60.036.500,00	1.790.100,00	97,10
7.01.03	Kecamatan Sabu Liae	2.320.716.143,00	2.183.200.407,00	137.515.736,00	94,07
7.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	1.801.321.043,00	1.700.120.643,00	101.200.400,00	94,38
7.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	114.298.800,00	86.902.800,00	27.396.000,00	76,03
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	13.391.900,00	9.249.000,00	4.142.900,00	69,06
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	81.579.400,00	79.902.964,00	1.676.436,00	97,95
7.01.02.2.01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	89.320.000,00	86.560.000,00	2.760.000,00	96,91
7.01.03.2.01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	20.400.000,00	20.230.000,00	170.000,00	99,17
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	117.785.000,00	117.785.000,00	-	100,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	82.620.000,00	82.450.000,00	170.000,00	99,79
7.01.04	Kecamatan Hawu Mehara	2.502.692.486,00	2.394.807.233,00	107.885.253,00	95,69
7.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	1.878.308.086,00	1.784.040.233,00	94.267.853,00	94,98
7.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	23.700.000,00	23.700.000,00	-	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	77.415.100,00	66.316.000,00	11.099.100,00	85,66
7.01.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	-	#DIV/0!
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	18.566.400,00	16.075.000,00	2.491.400,00	86,58
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	284.872.900,00	284.846.000,00	26.900,00	99,99
7.01.02.2.02	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	97.330.000,00	97.330.000,00	-	100,00
7.01.03.2.01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	71.500.000,00	71.500.000,00	-	100,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	34.000.000,00	34.000.000,00	-	100,00
7.01.05	Kecamatan Rajjua	4.696.439.570,00	4.114.482.619,00	581.956.951,00	87,61
7.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.802.232.570,00	2.243.910.319,00	558.322.251,00	80,08
7.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	24.800.000,00	24.500.000,00	300.000,00	98,79
7.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	136.851.000,00	135.534.800,00	1.316.200,00	99,04
7.01.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	24.500.000,00	24.500.000,00	-	100,00
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	126.208.900,00	123.575.000,00	2.633.900,00	97,91
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	134.818.600,00	134.694.000,00	124.600,00	99,91
7.01.02.2.01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	888.400.000,00	869.140.000,00	19.260.000,00	97,83
7.01.03.2.02	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00

Kode	Uraian Urusan. Organisasi.	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	158.628.500,00	158.628.500,00	-	100,00
7.01.06	Kecamatan Sabu Tengah	2.293.300.042,00	2.049.307.860,00	243.992.182,00	89,36
7.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	1.877.057.442,00	1.643.620.827,00	233.436.615,00	87,56
7.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	19.300.000,00	19.300.000,00	-	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	90.432.600,00	83.625.800,00	6.806.800,00	92,47
7.01.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	9.854.000,00	9.854.000,00	-	100,00
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	15.350.700,00	15.340.300,00	10.400,00	99,93
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	82.045.300,00	81.181.593,00	863.707,00	98,95
7.01.02.2.01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	88.580.000,00	85.715.340,00	2.864.660,00	96,77
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	54.580.000,00	54.580.000,00	-	100,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	56.100.000,00	56.090.000,00	10.000,00	99,98
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik				
8.01.00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	23.302.180.716,00	23.035.558.631,00	266.622.085,00	98,86
8.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	962.065.496,00	913.305.618,00	48.759.878,00	94,93
8.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00
8.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	136.677.800,00	128.139.130,00	8.538.670,00	93,75
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.029.000,00	17.000.000,00	29.000,00	99,83
8.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4.181.000,00	4.181.000,00	-	100,00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	43.140.000,00	37.926.745,00	5.213.255,00	87,92
8.01.02.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	1.613.670.000,00	1.527.774.538,00	85.895.462,00	94,68
8.01.03.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan	20.314.449.120,00	20.222.041.000,00	92.408.120,00	99,55
8.01.04.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	5.560.000,00	4.460.000,00	1.100.000,00	80,22
8.01.05.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	12.020.000,00	10.230.000,00	1.790.000,00	85,11
8.01.06.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	183.188.300,00	160.300.600,00	22.887.700,00	87,51



PEMERINTAN KABUPATEN SABU RAIJUA
REKAPITULASI DANA BOSP
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Sekolah	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Pendapatan lain-lain	Penerimaan	BELANJA					Saldo Akhir	
						Pegawai	Barang Jasa	Modal	Peralatan Mesin	Aset tetap lainnya		Total
1	2	3			4	5	6	7			8=5+6+7	9=3+4-8
1	SMP Negeri 1 Sabu Barat	3.055.876,00		-	368.194.124,00	36.000.000,00	284.734.700,00	50.515.300,00	23.850.000,00	26.665.300,00	371.250.000,00	-
2	SMP Negeri 2 Sabu Barat	-		-	498.150.000,00	98.700.000,00	298.013.000,00	101.437.000,00	55.250.000,00	46.187.000,00	498.150.000,00	-
3	SMP Negeri 3 Sabu Barat	22.885.600,00		-	213.300.000,00	34.200.000,00	161.473.000,00	21.151.000,00	10.250.000,00	10.901.000,00	216.824.000,00	19.361.600,00
4	SMP Negeri 4 Sabu Barat	-		-	182.150.000,00	13.800.000,00	130.430.000,00	37.920.000,00	11.830.000,00	26.090.000,00	182.150.000,00	-
5	SMP Negeri 5 Menia	371,00		-	334.800.000,00	65.000.000,00	228.068.500,00	41.730.000,00	19.730.000,00	22.000.000,00	334.798.500,00	1.871,00
6	SMP Negeri 6 Sabu Barat	-		-	313.200.000,00	24.000.000,00	204.326.000,00	84.874.000,00	59.124.000,00	25.750.000,00	313.200.000,00	-
7	SMP Negeri 7 Sabu Barat	-		-	288.900.000,00	72.000.000,00	189.400.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	-	288.900.000,00	-
8	SMP Negeri 8 Sabu Barat	-		-	324.000.000,00	38.400.000,00	190.375.000,00	95.225.000,00	64.300.000,00	30.925.000,00	324.000.000,00	-
9	SMP Satu Atap Teriwu	-		-	166.050.000,00	24.000.000,00	110.857.300,00	31.192.700,00	26.500.000,00	4.692.700,00	166.050.000,00	-
10	SMP Negeri 1 Sabu Timur	-		-	244.350.000,00	68.400.000,00	140.295.000,00	35.655.000,00	17.100.000,00	18.555.000,00	244.350.000,00	-
11	SMP Satu Atap Kujiratu	-		-	265.950.000,00	36.600.000,00	210.158.000,00	19.192.000,00	4.250.000,00	14.942.000,00	265.950.000,00	-
12	SMP Negeri 2 Sabu Timur	-		-	162.000.000,00	48.000.000,00	94.118.000,00	19.882.000,00	3.500.000,00	16.382.000,00	162.000.000,00	-
13	SMP Negeri 1 Sabu Tengah	66.199,00		-	537.300.000,00	77.700.000,00	325.825.000,00	133.775.000,00	103.350.000,00	30.425.000,00	537.300.000,00	66.199,00
14	SMP Negeri 2 Sabu Tengah	159,00		-	98.550.000,00	12.000.000,00	80.550.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	98.550.000,00	159,00
15	SMP Negeri 3 Sabu Tengah	-		-	195.750.000,00	8.400.000,00	133.586.500,00	53.763.500,00	29.513.500,00	24.250.000,00	195.750.000,00	-
16	SMP Negeri 1 Hawu Mehara	-		-	522.350.000,00	102.000.000,00	353.442.700,00	66.907.300,00	36.800.000,00	30.107.300,00	522.350.000,00	-
17	SMP Negeri 2 Hawu Mehara	36,00		-	271.350.000,00	39.000.000,00	213.322.200,00	19.027.800,00	7.900.000,00	11.127.800,00	271.350.000,00	36,00
18	SMP Negeri 3 Hawu Mehara	-		-	630.250.000,00	123.750.000,00	435.742.000,00	70.758.000,00	60.675.000,00	10.083.000,00	630.250.000,00	-
19	SMP Satu Atap Lederaga	-		-	363.150.000,00	42.000.000,00	242.372.200,00	78.777.800,00	58.942.000,00	19.835.800,00	363.150.000,00	-
20	SMP Negeri 1 Sabu Liae	-		-	438.750.000,00	45.000.000,00	308.120.000,00	85.630.000,00	71.330.000,00	14.300.000,00	438.750.000,00	-
21	SMP Negeri 2 Liae	-		-	372.500.000,00	13.200.000,00	281.924.000,00	77.376.000,00	52.650.000,00	24.726.000,00	372.500.000,00	-
22	SMP Satu Atap Eirobo	-		-	233.550.000,00	36.600.000,00	151.763.800,00	45.186.200,00	25.668.000,00	19.518.200,00	233.550.000,00	-
23	SMP Negeri 1 Raijua	-		-	418.500.000,00	71.550.000,00	255.900.000,00	91.050.000,00	65.450.000,00	25.600.000,00	418.500.000,00	-
24	SMP Negeri 2 Raijua	-		-	430.550.000,00	42.000.000,00	329.769.000,00	58.781.000,00	27.950.000,00	30.831.000,00	430.550.000,00	-
	Total SMP	26.008.241,00			7.873.594.124,00	1.172.300.000,00	5.354.565.900,00	1.353.306.600,00	869.412.500,00	483.894.100,00	7.880.172.500,00	19.429.865,00
25	SD Negeri 1 Seba	-		-	446.220.000,00	63.750.000,00	245.467.000,00	137.003.000,00	71.500.000,00	65.503.000,00	446.220.000,00	-
26	SD Negeri 2 Seba	-		-	220.890.000,00	54.600.000,00	96.695.000,00	69.595.000,00	59.150.000,00	10.445.000,00	220.890.000,00	-
27	SD Negeri 3 Seba	360.097,00		-	455.100.000,00	30.000.000,00	242.034.200,00	183.065.800,00	98.300.000,00	84.765.800,00	455.100.000,00	360.097,00
28	SD Negeri Mapipa	-		-	156.810.000,00	12.000.000,00	101.685.000,00	43.125.000,00	43.125.000,00	-	156.810.000,00	-
29	SD Negeri Leomadamu	-		-	146.520.000,00	30.000.000,00	93.189.000,00	23.331.000,00	16.000.000,00	7.331.000,00	146.520.000,00	-
30	SD Negeri Leoge	-		-	215.340.000,00	60.000.000,00	121.158.000,00	34.182.000,00	20.300.000,00	13.882.000,00	215.340.000,00	-
31	SD Negeri 4 Seba	-		-	153.180.000,00	45.000.000,00	66.838.000,00	41.342.000,00	31.400.000,00	9.942.000,00	153.180.000,00	-
32	SD Inpres Delo	33,00		-	136.530.000,00	33.000.000,00	70.704.000,00	32.826.000,00	30.000.000,00	2.826.000,00	136.530.000,00	33,00
33	SD Negeri Maballa	-		-	218.670.000,00	55.800.000,00	132.578.200,00	30.291.800,00	15.150.000,00	15.141.800,00	218.670.000,00	-
34	SD Negeri Luipau	-		-	129.870.000,00	45.600.000,00	77.115.500,00	7.154.500,00	5.550.000,00	1.604.500,00	129.870.000,00	-
35	SD Negeri Titinalede	-		-	202.020.000,00	6.600.000,00	98.976.000,00	96.444.000,00	76.600.000,00	19.844.000,00	202.020.000,00	-
36	SD Negeri Raemude	-		-	133.500.000,00	26.400.000,00	61.000.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	-	111.000.000,00	22.500.000,00
37	SD Negeri Teriwu	-		-	205.350.000,00	24.000.000,00	95.919.000,00	82.300.000,00	82.300.000,00	-	202.219.000,00	3.131.000,00
38	SD Inpres Ledeanana	-		-	204.240.000,00	63.000.000,00	112.299.000,00	28.941.000,00	21.000.000,00	7.941.000,00	204.240.000,00	-
39	SD Negeri Raenalulu	-		-	159.840.000,00	30.000.000,00	84.349.600,00	45.490.400,00	26.000.000,00	19.490.400,00	159.840.000,00	-
40	SD Negeri 5 Sabu Barat	-		-	226.440.000,00	30.000.000,00	165.777.800,00	30.662.200,00	24.400.000,00	6.262.200,00	226.440.000,00	-
41	SD Negeri Ledekapaka	2.404.100,00		-	204.380.000,00	30.000.000,00	116.665.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	-	180.665.000,00	26.119.100,00
42	SD Negeri Kejoboloko	-		-	153.180.000,00	28.200.000,00	96.181.000,00	28.799.000,00	13.500.000,00	15.299.000,00	153.180.000,00	-
43	SD Inpres Kujiratu	-		-	170.940.000,00	39.000.000,00	102.490.000,00	29.450.000,00	29.450.000,00	-	170.940.000,00	-
44	SD Negeri Huwaga	-		-	89.910.000,00	-	62.169.000,00	27.741.000,00	23.700.000,00	4.041.000,00	89.910.000,00	-
45	SD Negeri Keliha	-		-	168.720.000,00	9.000.000,00	105.900.000,00	53.820.000,00	41.150.000,00	12.670.000,00	168.720.000,00	-



PEMERINTAN KABUPATEN SABU RAIJUA
REKAPITULASI DANA BOSP
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Sekolah	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Pendapatan lain-lain	Penerimaan	BELANJA					Saldo Akhir	
						Pegawai	Barang Jasa	Modal	Peralatan Mesin	Aset tetap lainnya		Total
1	2	3			4	5	6	7			8=5+6+7	9=3+4-8
46	SD Negeri Eilode	-		-	224.220.000,00	28.800.000,00	137.450.000,00	57.970.000,00	47.100.000,00	10.870.000,00	224.220.000,00	-
47	SD Negeri Padadue	-		-	166.500.000,00	12.000.000,00	85.520.000,00	68.980.000,00	60.000.000,00	8.980.000,00	166.500.000,00	-
48	SD Negeri Jiwuwu	400,00		-	183.150.000,00	21.000.000,00	105.009.100,00	57.140.900,00	47.016.000,00	10.124.900,00	183.150.000,00	400,00
49	SD Negeri Matei	135.084,00		-	140.970.000,00	24.000.000,00	62.502.000,00	54.438.000,00	54.438.000,00	-	140.940.000,00	165.084,00
50	SD Inpres Eimau	2.057.000,00		-	238.650.000,00	36.000.000,00	141.034.100,00	61.615.900,00	40.525.000,00	21.090.900,00	238.650.000,00	2.057.000,00
51	SD Negeri Loboaju	-		-	119.880.000,00	9.000.000,00	63.565.000,00	47.315.000,00	44.600.000,00	2.715.000,00	119.880.000,00	-
52	SD Negeri Tada	-		-	105.450.000,00	-	73.054.000,00	32.396.000,00	25.500.000,00	6.896.000,00	105.450.000,00	-
53	SD Inpres Daleko	-		-	225.330.000,00	18.000.000,00	158.708.400,00	48.621.600,00	38.800.000,00	9.821.600,00	225.330.000,00	-
54	SD Negeri Lobohele	242,00		-	254.490.000,00	29.400.000,00	144.580.900,00	80.509.100,00	66.691.100,00	13.818.000,00	254.490.000,00	242,00
55	SD Negeri Lederaga	912,00		-	261.960.000,00	26.400.000,00	133.898.000,00	101.662.000,00	93.500.000,00	8.162.000,00	261.960.000,00	912,00
56	SD Inpres Tanajawa	-		-	177.600.000,00	33.000.000,00	112.936.300,00	31.463.700,00	17.000.000,00	14.463.700,00	177.400.000,00	200.000,00
57	SD Inpres Molie	-		-	186.480.000,00	8.700.000,00	130.430.000,00	47.350.000,00	47.350.000,00	-	186.480.000,00	-
58	SD Inpres Pedarro	-		-	216.450.000,00	56.700.000,00	102.097.500,00	57.652.500,00	45.100.000,00	12.552.500,00	216.450.000,00	-
59	SD Negeri Loboalauw	-		-	140.970.000,00	38.400.000,00	66.609.800,00	35.960.200,00	30.000.000,00	5.960.200,00	140.970.000,00	-
60	SD Negeri Gelanalalu	55,00		-	167.610.000,00	28.800.000,00	104.003.000,00	34.807.000,00	11.050.000,00	23.757.000,00	167.610.000,00	55,00
61	SD Negeri Gurimonearu	-		-	197.580.000,00	49.800.000,00	126.230.000,00	21.550.000,00	21.550.000,00	-	197.580.000,00	-
62	SD Negeri Ledea	-		-	104.340.000,00	30.600.000,00	63.325.800,00	10.414.200,00	3.000.000,00	7.414.200,00	104.340.000,00	-
63	SD Inpres Daia	226.006,00		-	67.710.000,00	16.200.000,00	39.636.000,00	11.874.000,00	10.000.000,00	1.874.000,00	67.710.000,00	226.006,00
64	SD Negeri Deme	-		-	185.370.000,00	20.400.000,00	103.373.000,00	61.597.000,00	48.625.000,00	12.972.000,00	185.370.000,00	-
65	SD Inpres Ledeka	-		-	136.530.000,00	-	101.655.000,00	34.875.000,00	20.200.000,00	14.675.000,00	136.530.000,00	-
66	SD Inpres Eirobo	-		-	140.160.000,00	33.600.000,00	83.012.300,00	23.547.700,00	9.400.000,00	14.147.700,00	140.160.000,00	-
67	SD Inpres Ledemera	-		-	175.380.000,00	-	128.977.700,00	46.402.300,00	31.800.000,00	14.602.300,00	175.380.000,00	-
68	SD Negeri Dainao	876,00		-	76.590.000,00	15.000.000,00	49.698.000,00	11.892.000,00	9.000.000,00	2.892.000,00	76.590.000,00	876,00
69	SD Negeri Ledeka 1	23.389,00		-	175.380.000,00	12.000.000,00	124.026.600,00	39.353.400,00	13.125.400,00	26.228.000,00	175.380.000,00	23.389,00
70	SD Negeri Lokoju	2.241.000,00		-	226.719.000,00	13.500.000,00	182.469.000,00	32.991.000,00	30.750.000,00	2.241.000,00	228.960.000,00	-
71	SD Negeri Bolua	-		-	273.360.000,00	31.200.000,00	145.260.000,00	96.900.000,00	91.900.000,00	5.000.000,00	273.360.000,00	-
72	SD Negeri Boko	1.157.753,00		-	135.683.000,00	19.800.000,00	104.433.000,00	11.450.000,00	10.000.000,00	1.450.000,00	135.683.000,00	1.157.753,00
73	SD Negeri Ledeka 2	-		-	192.030.000,00	17.400.000,00	147.651.000,00	26.979.000,00	23.000.000,00	3.979.000,00	192.030.000,00	-
74	SD Negeri Kalemuri	-	68.477.723,00	-	91.020.000,00	24.000.000,00	63.844.523,00	71.653.200,00	63.900.000,00	7.753.200,00	159.497.723,00	-
	Total SD	8.606.947,00	68.477.723,00	-	9.185.212.000,00	1.369.650.000,00	5.434.180.323,00	2.402.524.400,00	1.841.095.500,00	561.428.900,00	9.206.354.723,00	55.941.947,00
1	SKB Sabu Raijua	10.500.000,00		-	19.100.000,00	-	-	-	-	-	29.600.000,00	-
2	TK Negeri Pembina Kec	-		-	11.100.000,00	-	-	-	-	-	11.100.000,00	-
	Total TK	10.500.000,00	-	-	30.200.000,00	-	-	-	-	-	40.700.000,00	-
	Grand Total	45.115.188,00	68.477.723,00	-	17.089.006.124,00	2.541.950.000,00	10.788.746.223,00	3.755.831.000,00	2.710.508.000,00	1.045.323.000,00	17.127.227.223,00	75.371.812,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
REKONSILIASI BANK

Periode 1 Desember s/d 31 Desember 2024

1.	Saldo Kas umum daerah Menurut Buku		65.951.878.915,80
2.	Saldo Kas umum daerah Menurut Bank :		
	Rekening Giro Bank NTT 021-01.05.000027-1 RKUD	29.346.196.141,64	
	Rekening Giro Bank NTT 021-01.05.000039-6 PAD	5.186.360,16	
	Rekening Giro Bank NTT 021-01.05.000086-4 PBB P2	-	
	Rekening Tabungan BRI 4673-01-007436-53-2	36.604.363.420,00	
			65.955.745.921,80
	<i>Selisih</i>		<i>(3.867.006,00)</i>
	Keterangan Selisih		
A.	Penerimaan yang telah dicatat oleh Buku, Belum dicatat oleh Bank :		
	-		-
	-		-
B.	Pengeluaran yang telah dicatat oleh Buku, Belum dicatat oleh Bank :		
	- Bank kurang Debet SP2D BKDPP No.	6,00	
	53.20/04.0/000064/LS/5.03.5.04.0.00.31.0000/P4/8/2024		
	Senilai 15.595.636,00		
	-		6,00
C.	Penerimaan yang telah dicatat oleh Bank, Belum dicatat oleh Buku :		
	Temuan Inspektorat atas Belanja Dana BOS 2023 SMP N 2		
	- Sabu Tengah	2.205.000,00	
	- Temuan Inspektorat atas Belanja DD Desa Bodae	1.662.000,00	3.867.000,00
D.	Pengeluaran yang telah dicatat oleh Bank, Belum dicatat oleh Buku :		
	- Pemindahbukuan untuk Deposito BNTT (16 Juli 2024)		
	- Pemindahbukuan untuk Deposito BNTT (31 Juli 2024)		
	- Pemindahbukuan untuk Deposito BNTT (23 Agustus 2024)		
	- Pemindahbukuan untuk Deposito BNTT (17 Oktober 2024)		
	- SP2D GU DINKES salah input tgl pencairan di tgl 29 Des 2024		-
			0,00



LAMPIRAN N.2

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
Per 31 Desember 2024

No	Nama SKPD	Saldo 2023	UP/GU/TU 2024			Saldo Kas
			SP2D	SPJ	Penyetoran	
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	-	146.728.087.101,00	146.312.057.416,00	416.029.685,00	-
2	Rumah Sakit Umum Daerah	-	74.178.394.558,00	73.833.615.874,00	344.778.684,00	-
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	10.379.744.045,00	10.365.378.738,00	14.365.307,00	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	104.398.440.023,00	104.397.663.507,00	776.516,00	-
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	4.374.609.544,00	4.357.368.389,00	17.241.155,00	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	6.088.642.338,00	6.038.283.338,00	50.359.000,00	-
7	Badan Penanggulangan Bencana	-	2.698.122.353,00	2.678.760.353,00	19.362.000,00	-
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	5.911.465.567,00	5.799.133.748,00	112.331.819,00	-
9	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	-	6.648.581.435,00	6.544.883.283,00	103.698.152,00	-
10	Dinas Pertanian dan Pangan	-	3.699.740.017,00	3.410.799.059,00	288.940.958,00	-
11	Dinas Lingkungan Hidup	-	12.164.997.868,00	12.061.751.228,00	103.246.640,00	-
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	3.053.264.428,00	2.994.716.982,00	58.547.446,00	-
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	4.507.513.170,00	4.434.014.770,00	73.498.400,00	-
14	Dinas Perhubungan	-	7.249.399.977,00	7.230.958.227,00	18.441.750,00	-
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	4.345.558.404,00	4.279.320.004,00	66.238.400,00	-
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	-	5.302.968.985,00	5.302.968.985,00	-	-
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	3.086.604.632,00	3.014.307.791,00	72.296.841,00	-
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	4.431.692.641,00	4.383.322.413,00	48.370.228,00	-
19	Dinas Pariwisata	-	4.677.491.656,37	4.618.582.705,37	58.908.951,00	-
20	Bagian Pemerintahan	-	1.074.282.176,00	1.067.174.176,00	7.108.000,00	-
21	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	-	2.930.545.417,00	2.796.347.522,00	134.197.895,00	-
22	Bagian Hukum	-	865.382.880,00	817.302.876,00	48.080.004,00	-
23	Bagian Administrasi Perekonomian	-	408.003.420,00	395.811.734,00	12.191.686,00	-
24	Bagian Administrasi Pembangunan	-	835.218.515,00	821.230.869,00	13.987.646,00	-
25	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	-	22.169.912.643,00	22.164.466.235,00	5.446.408,00	-
26	Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan	-	566.809.103,00	535.711.109,00	31.097.994,00	-
27	Bagian Organisasi	-	652.862.262,00	613.936.442,00	38.925.820,00	-
28	Sekretariat Dewan	-	25.333.434.737,00	25.200.142.404,00	133.292.333,00	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	5.559.844.814,00	5.386.881.229,00	172.963.585,00	-
30	Badan Keuangan Daerah	-	45.917.106.982,00	45.905.178.534,00	11.928.448,00	-
31	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	-	5.239.550.621,00	5.095.503.970,00	144.046.651,00	-
32	Inspektorat Daerah	-	3.055.562.511,00	3.045.990.354,00	9.572.157,00	-
33	Kecamatan Sabu Barat	-	2.894.196.424,00	2.894.195.710,00	714,00	-
34	Kecamatan Sabu Timur	-	4.445.039.798,00	4.425.263.598,00	19.776.200,00	-
35	Kecamatan Sabu Liae	-	2.183.505.407,00	2.183.200.407,00	305.000,00	-
36	Kecamatan Hawu Mehara	-	2.402.761.233,00	2.394.807.233,00	7.954.000,00	-
37	Kecamatan Raijua	-	4.115.642.619,00	4.114.482.619,00	1.160.000,00	-
38	Kecamatan Sabu Tengah	-	2.050.849.860,00	2.049.307.860,00	1.542.000,00	-
39	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	23.036.778.761,00	23.035.558.631,00	1.220.130,00	-
		-	569.662.608.925,37	567.000.380.322,37	2.662.228.603,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PIUTANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL	KENAIKAN/PENURUNAN PIUTANG			PIUTANG
				Koreksi	SKP/PIUTANG 2024	PELUNASAN	
PIUTANG PAJAK							
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.535.009.359,00	(1.471.336,84)	1.358.665.643,00	1.509.506.386,00	1.382.697.279,16
2	Badan Keuangan Daerah	Pajak Rumah Makan	13.156.600,00	689.500,00	42.380.000,00	51.676.600,00	4.549.500,00
3	Badan Keuangan Daerah	Pajak Hotel	315.000,00	90.000,00	35.810.000,00	35.945.000,00	270.000,00
4	Badan Keuangan Daerah	Pajak Reklame	4.825.600,00	-	108.739.500,00	105.479.500,00	8.085.600,00
5	Badan Keuangan Daerah	Pajak Bumi dan Bangunan	110.972.985,00	-	613.958.640,00	612.739.304,00	112.192.321,00
TOTAL PIUTANG PAJAK			1.664.279.544,00	(691.836,84)	2.159.553.783,00	2.315.346.790,00	1.507.794.700,16
PIUTANG RETRIBUSI							
1	Rumah Sakit Umum Daerah	Klaim BPJS	1.620.128.200,00	-	197.084.400,00	1.620.128.200,00	197.084.400,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemakaian Jukung	217.200.000,00	-	-	-	217.200.000,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemakaian Lampara 2011	1.181.184.448,00	-	-	-	1.181.184.448,00
4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	Piutang Garam	1.344.198.900,00	-	-	-	1.344.198.900,00
5	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Los Pasar	72.889.000,00	-	105.813.500,00	41.779.000,00	136.923.500,00
6	Badan Keuangan Daerah	Klaim BPJS Puskesmas	188.445.000,00	15.970.000,00	181.975.000,00	188.445.000,00	197.945.000,00
7	Badan Keuangan Daerah	Retribusi Mess Pemda	32.950.000,00	5.070.000,00	152.850.000,00	134.950.000,00	55.920.000,00
TOTAL PIUTANG RETRIBUSI			4.656.995.548,00	21.040.000,00	637.722.900,00	1.985.302.200,00	3.330.456.248,00
PIUTANG LAIN - LAIN PAD YANG SAH							
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Denda Pajak Mineral Bukan Logam	1.071.097.677,30	2.655.472,36	-	-	1.073.753.149,66
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sewa Pemanfaatan BMD	4.550.000,00	-	-	2.000.000,00	2.550.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Denda Keterlambatan Pekerjaan	-	269.862.120,87	-	-	269.862.120,87
4	Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	Denda Keterlambatan Pekerjaan	-	51.875.983,10	-	-	51.875.983,10
5	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	Piutang PAD Pabrik RL	2.116.000.000,00	-	-	-	2.116.000.000,00
6	Badan Keuangan Daerah	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	12.200.000,00	-	-	-	12.200.000,00
7	Badan Keuangan Daerah	TGR - VTBD	126.359.376,00	-	-	16.731.551,00	109.627.825,00
8	Badan Keuangan Daerah	Piutang Taspen	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-
9	Badan Keuangan Daerah	Piutang Remun TDF	-	4.618,00	-	-	4.618,00
TOTAL PIUTANG LAIN - LAIN PAD YANG SAH			3.333.207.053,30	324.398.194,33	-	21.731.551,00	3.635.873.696,63



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PIUTANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL	KENAIKAN/PENURUNAN PIUTANG			PIUTANG
				Koreksi	SKP/PIUTANG 2024	PELUNASAN	
PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA							
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Dana Bagi Hasil PKB	1.553.294.046,00	(384.547.353,00)	1.272.856.633,00	1.553.294.046,00	888.309.280,00
2	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Dana Bagi Hasil BBNKB	623.713.702,00	6.967.105,00	563.118.572,00	623.713.702,00	570.085.677,00
3	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Dana Bagi Hasil PBBKB	2.172.670.047,00	173.017.807,00	1.212.458.115,00	2.172.670.047,00	1.385.475.922,00
4	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	DBH Pajak Air Permukaan	898.910,00	(108.518,00)	479.546,00	898.910,00	371.028,00
5	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	DBH Pajak Rokok	-	(1.582.057.510,00)	1.582.057.510,00	-	-
TOTAL PIUTANG DANA BAGI HASIL			4.350.576.705,00	(1.786.728.469,00)	4.630.970.376,00	4.350.576.705,00	2.844.241.907,00
GRAND TOTAL PIUTANG PENDAPATAN			14.005.058.850,30	(1.441.982.111,51)	7.428.247.059,00	8.672.957.246,00	11.318.366.551,79



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENYISIHAN PIUTANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Dinas PU)

PIUTANG			KRITERIA PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	PIUTANG BERSIH
Tahun	Umur (Tahun)	Nilai	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
2010-2018	>5	1.036.876.611,00	-	-	-	1.036.876.611,00	1.036.876.611,00	-
2019	5	173.440.743,00	-	-	86.720.371,50	-	86.720.371,50	86.720.371,50
2020	4	35.925.879,00	-	-	17.962.939,50	-	17.962.939,50	17.962.939,50
2021	3	22.393.182,00	-	-	11.196.591,00	-	11.196.591,00	11.196.591,00
2022	2	114.057.964,00	-	11.405.796,40	-	-	11.405.796,40	102.652.167,60
2023	1	2.900,16	-	290,02	-	-	290,02	2.610,14
2024	<1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1.382.697.279,16	-	11.406.086,42	115.879.902,00	1.036.876.611,00	1.164.162.599,42	218.534.679,74

Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (BAKEUDA)

PIUTANG			KRITERIA PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	PIUTANG BERSIH
Tahun	Umur	Nilai	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
2003-2018	>5	110.271.619,00	-	-	-	110.271.619,00	110.271.619,00	-
2019	4	701.366,00	-	-	350.683,00	-	350.683,00	350.683,00
2020	3	-	-	-	-	-	-	-
2021	2	-	-	-	-	-	-	-
2022	2	-	-	-	-	-	-	-
2023	1	-	-	-	-	-	-	-
2024	<1	1.219.336,00	6.096,68	-	-	-	6.096,68	1.213.239,32
TOTAL		112.192.321,00	6.096,68	-	350.683,00	110.271.619,00	110.628.398,68	1.563.922,32

Penyisihan Piutang Pajak Reklame (BAKEUDA)

PIUTANG			KRITERIA PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	PIUTANG BERSIH
Tahun	Umur	Nilai	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
2023	1	2.325.600,00	-	232.560,00	-	-	232.560,00	2.093.040,00
2024	<1	5.760.000,00	28.800,00	-	-	-	28.800,00	5.731.200,00
TOTAL		8.085.600,00	28.800,00	232.560,00	-	-	261.360,00	7.824.240,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENYISIHAN PIUTANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Penyisihan Piutang Pajak Hotel (BAKEUDA)

PIUTANG			KRITERIA PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	PIUTANG BERSIH
Tahun	Umur	Nilai	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
2023	1	-	-	-	-	-	-	-
2024	<1	270.000,00	1.350,00	-	-	-	1.350,00	268.650,00
TOTAL		270.000,00	1.350,00	-	-	-	1.350,00	268.650,00

Penyisihan Piutang Pajak Rumah Makan (BAKEUDA)

PIUTANG			KRITERIA PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	PIUTANG BERSIH
Tahun	Umur	Nilai	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
2023	1	-	-	-	-	-	-	-
2024	<1	4.549.500,00	22.747,50	-	-	-	22.747,50	4.526.752,50
TOTAL		4.549.500,00	22.747,50	-	-	-	22.747,50	4.526.752,50

Penyisihan Piutang Sewa Los Pasar & Penjualan Garam (PERINDAG)

PIUTANG			KRITERIA PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	PIUTANG BERSIH
Tahun	Umur	Nilai	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
2017	> 12 Bulan	20.257.000,00	-	-	-	20.257.000,00	20.257.000,00	-
2018	> 12 Bulan	1.344.198.900,00	-	-	-	1.344.198.900,00	1.344.198.900,00	-
2018	> 12 Bulan	27.260.000,00	-	-	-	27.260.000,00	27.260.000,00	-
2021	> 12 Bulan	19.272.000,00	-	-	-	19.272.000,00	19.272.000,00	-
2022	> 12 Bulan	2.853.000,00	-	-	-	2.853.000,00	2.853.000,00	-
2023	> 12 Bulan	1.387.000,00	-	-	-	1.387.000,00	1.387.000,00	-
2024	> 3-12 Bulan	41.479.000,00	-	-	20.739.500,00	-	20.739.500,00	20.739.500,00
2024	>1-3 bln	17.885.000,00	-	1.788.500,00	-	-	1.788.500,00	16.096.500,00
2024	1 Bulan	9.050.500,00	45.252,50	-	-	-	45.252,50	9.005.247,50
TOTAL		1.483.642.400,00	45.252,50	1.788.500,00	20.739.500,00	1.415.227.900,00	1.437.801.152,50	45.841.247,50



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENYISIHAN PIUTANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Penyisihan Piutang Lampara & Jukung (DKP)

PIUTANG			KRITERIA PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	PIUTANG BERSIH
Tahun	Umur	Nilai	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
2011	> 12 Bulan	3.750.000,00	-	-	-	3.750.000,00	3.750.000,00	-
2012	> 12 Bulan	49.950.000,00	-	-	-	49.950.000,00	49.950.000,00	-
2013	> 12 Bulan	579.508.628,00	-	-	-	579.508.628,00	579.508.628,00	-
2014	> 12 Bulan	456.785.180,00	-	-	-	456.785.180,00	456.785.180,00	-
2015	> 12 Bulan	308.390.640,00	-	-	-	308.390.640,00	308.390.640,00	-
TOTAL		1.398.384.448,00	-	-	-	1.398.384.448,00	1.398.384.448,00	-

Penyisihan Piutang Sewa Mess (Bakeuda)

PIUTANG			KRITERIA PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	PIUTANG BERSIH
Tahun	Umur	Nilai	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
2021	> 12 Bulan	4.050.000,00	-	-	-	4.050.000,00	4.050.000,00	-
2022	> 12 Bulan	4.800.000,00	-	-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	-
2023	> 12 Bulan	6.150.000,00	-	-	-	6.150.000,00	6.150.000,00	-
2024	> 3-12 Bulan	27.550.000,00	-	-	13.775.000,00	-	13.775.000,00	13.775.000,00
2024	>1-3 bln	7.150.000,00	-	715.000,00	-	-	715.000,00	6.435.000,00
2024	1 Bulan	3.700.000,00	18.500,00	-	-	-	18.500,00	3.681.500,00
TOTAL		53.400.000,00	18.500,00	715.000,00	13.775.000,00	15.000.000,00	29.508.500,00	23.891.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENYISIHAN PIUTANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah Piutang Denda Pajak MBLB dan Sewa Alat (Dinas PU)

PIUTANG			KRITERIA PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	PIUTANG BERSIH
Tahun	Umur	Nilai	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
2012	> 5 Tahun	12.538.823,00	-	-	-	12.538.823,00	12.538.823,00	-
2013	> 5 Tahun	56.961.119,76	-	-	-	56.961.119,76	56.961.119,76	-
2014	> 5 Tahun	195.982.281,20	-	-	-	195.982.281,20	195.982.281,20	-
2015	> 5 Tahun	192.919.899,00	-	-	-	192.919.899,00	192.919.899,00	-
2016	> 5 Tahun	255.708.885,20	-	-	-	255.708.885,20	255.708.885,20	-
2017	> 5 Tahun	256.315.279,00	-	-	-	256.315.279,00	256.315.279,00	-
2018	> 5 Tahun	103.326.862,50	-	-	-	103.326.862,50	103.326.862,50	-
2021	3 Tahun	2.550.000,00	-	-	-	2.550.000,00	2.550.000,00	-
TOTAL		1.076.303.149,66	-	-	-	1.076.303.149,66	1.076.303.149,66	-

Penyisihan Lain - Lain PAD yang Sah Dinas Perindag

PIUTANG			KRITERIA PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	PIUTANG BERSIH
Tahun	Umur	Nilai	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
2017	> 12 Bulan	634.800.000,00	-	-	-	634.800.000,00	634.800.000,00	-
2019	> 12 Bulan	1.481.200.000,00	-	-	-	1.481.200.000,00	1.481.200.000,00	-
TOTAL		2.116.000.000,00	-	-	-	2.116.000.000,00	2.116.000.000,00	-

Penyisihan Lain - Lain PAD yang Sah Badan Keuangan Daerah

PIUTANG			KRITERIA PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	PIUTANG BERSIH
Tahun	Umur	Nilai	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
2013	> 12 Bulan	12.200.000,00	-	-	-	12.200.000,00	12.200.000,00	-
TOTAL		12.200.000,00	-	-	-	12.200.000,00	12.200.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENYISIHAN PIUTANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Penyisihan Lain - Lain PAD yang Sah Denda Keterlambatan Dinas PUPR

PIUTANG			KRITERIA PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	PIUTANG BERSIH
Tahun	Umur	Nilai	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
2024	>1 bulan	269.862.120,87	1.349.310,60	-	-	-	1.349.310,60	268.512.810,27
TOTAL		269.862.120,87	1.349.310,60	-	-	-	1.349.310,60	268.512.810,27

Penyisihan Lain - Lain PAD yang Sah Denda Keterlambatan Dinas PKKO

PIUTANG			KRITERIA PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	PIUTANG BERSIH
Tahun	Umur	Nilai	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
2024	>1 bulan	51.875.983,10	259.379,92	-	-	-	259.379,92	51.616.603,18
TOTAL		51.875.983,10	259.379,92	-	-	-	259.379,92	51.616.603,18



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENYISIHAN INVESTASI NON PERMANEN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

PIUTANG			KRITERIA PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	PIUTANG BERSIH
Tahun	Jenis	Nilai	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
2000-2008	Dana Koperasi 2000-2008	328.750.000,00	-	-	-	328.750.000,00	328.750.000,00	-
2007	Dana Pemberdayaan 2007	4.489.339.000,00	-	-	-	4.489.339.000,00	4.489.339.000,00	-
2008	Dana Pemberdayaan 2008	4.815.140.500,00	-	-	-	4.815.140.500,00	4.815.140.500,00	-
2010	KSU HE WUE ADE 2010	9.000.000,00	-	-	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-
2010	KSU SALIKO 2010	5.500.000,00	-	-	-	5.500.000,00	5.500.000,00	-
2011	KSU HE WUE ADE 2011	23.000.000,00	-	-	-	23.000.000,00	23.000.000,00	-
2013	PINJAMAN LUNAK	66.791.277,00	-	-	-	66.791.277,00	66.791.277,00	-
2013	FORUM KEPALA DESA/LURAH	747.058.000,00	-	-	-	747.058.000,00	747.058.000,00	-
2013	KSU MANNO WADA	213.999.976,00	-	-	-	213.999.976,00	213.999.976,00	-
2013	KSU KOLO HARRU 2013	385.000.000,00	-	-	-	385.000.000,00	385.000.000,00	-
2017	PENGELOLA PABRIK RL	2.339.600.000,00	-	-	-	2.339.600.000,00	2.339.600.000,00	-
		13.423.178.753,00	-	-	-	13.423.178.753,00	13.423.178.753	-



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Unit Organisasi	Bahan Kimia	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bahan Bakar dan Pelumas	Bahan/Bibit Tanaman	Bahan Lainnya	Suku Cadang	Alat Tulis Kantor	Kertas dan Cover	Bahan Cetak	Benda Pos	Alat Listrik	Suvenir/ Cendera Mata	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Obat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Jumlah
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	1.505.000,00	-	6.204.405,00	-	-	-	1.420.000,00	-	-	9.129.405,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	9.155.000,00	-	875.420.259,16	-	2.180.000,00	-	-	-	-	-	6.295.833,00	1.094.997.314,94	-	1.988.048.407,10
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-	-	2.557.500,00	-	917.902.240,00	-	-	-	-	-	-	-	424.036.838,00	-	-	1.344.496.578,00
4	Puskesmas Ledeuun	-	-	2.180.000,00	-	15.448.799,00	150.000,00	-	721.000,00	618.000,00	-	-	-	-	101.133.394,00	-	120.251.193,00
5	Puskesmas Daleko	-	-	-	-	103.517.029,00	-	1.428.500,00	-	-	-	-	-	-	93.450.899,00	-	198.396.428,00
6	Puskesmas Eilogo	-	-	-	-	33.534.047,00	-	387.000,00	288.000,00	-	60.000,00	456.000,00	-	2.297.000,00	46.593.869,00	-	83.615.916,00
7	Puskesmas Seba	-	-	5.820.000,00	-	22.814.218,00	20.100.000,00	8.727.000,00	-	-	-	3.383.000,00	-	13.964.000,00	48.488.392,00	-	123.296.610,00
8	Puskesmas Eimadake	-	-	-	-	29.744.982,00	-	2.016.000,00	-	-	-	-	-	2.655.200,00	118.203.606,00	-	152.619.788,00
9	Puskesmas Bolou	-	-	500.000,00	-	21.597.913,00	-	5.615.000,00	26.408.975,00	-	-	-	899.000,00	12.267.200,00	112.543.330,00	-	179.831.418,00
10	Badan Penanggulangan Bencana	-	-	15.200.000,00	-	-	5.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000.000,00
11	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.840.150,00	139.840.150,00
12	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	1.705.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.705.000,00
13	Dinas Pertanian Dan Pangan	171.074.242,00	-	3.000.000,00	77.604.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.779.380,00	31.500.000,00	480.958.122,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.136.000,00	32.136.000,00
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	6.355.000,00	-	415.834.700,00	-	-	-	-	-	-	422.189.700,00
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	5.865.000,00	-	-	-	1.280.000,00	-	-	-	-	7.145.000,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp, Perindustrian Dan Perdagangan	-	16.083.900,00	14.600.000,00	-	-	72.734.000,00	1.220.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.766.951.434,50	2.871.589.334,50
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.680.000,00	-	-	-	14.680.000,00
19	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.911.000,00	133.911.000,00
20	Bagian Hukum	-	-	-	-	-	-	1.770.000,00	-	-	160.000,00	-	-	80.000,00	-	-	2.010.000,00
21	Bagian Umum	-	-	17.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	20.400.000,00
22	Bagian Organisasi	-	-	-	-	-	-	3.385.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.385.000,00
23	Badan Keuangan Daerah	-	-	25.664.000,00	-	-	-	18.024.000,00	-	-	740.000,00	740.000,00	-	2.078.000,00	-	-	47.246.000,00
24	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	10.158.000,00	-	-	500.000,00	255.000,00	-	526.000,00	-	-	11.439.000,00
25	Kecamatan Sabu Barat	-	-	-	-	-	-	825.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	825.000,00
26	Kecamatan Hawu Mehara	-	-	-	-	-	-	165.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	165.000,00
27	Kecamatan Raijua	-	-	-	-	-	-	2.385.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.385.000,00
JUMLAH		171.074.242,00	16.083.900,00	96.076.500,00	77.604.500,00	2.019.979.487,16	104.399.000,00	93.004.475,00	1.009.000,00	416.452.700,00	1.460.000,00	7.013.000,00	17.680.000,00	40.163.233,00	2.237.227.022,94	3.104.338.584,50	8.412.695.049,60



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
INVESTASI NON PERMANEN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

KECAMATAN	DATA P3D	SALDO 2023	TAHUN 2024		
			PENAMBAHAN	PELUNASAN	SALDO
DANA PEMBERDAYAAN 2007					
SABU BARAT	1.697.240.000	1.481.980.000	-	-	1.481.980.000
SABU TENGAH	458.520.000	337.995.000	-	-	337.995.000
SABU TIMUR	803.382.000	441.119.000	-	-	441.119.000
SABU LIAE	1.050.065.000	901.465.000	-	-	901.465.000
HAWU MEHARA	1.078.500.000	998.000.000	-	-	998.000.000
RAIJUA	424.500.000	328.780.000	-	-	328.780.000
Total	5.512.207.000	4.489.339.000	-	-	4.489.339.000
DANA PEMBERDAYAAN 2008					
SABU BARAT	1.574.000.000	1.349.420.000	-	-	1.349.420.000
SABU TENGAH	634.340.000	570.760.000	-	-	570.760.000
SABU TIMUR	739.000.000	585.425.500	-	-	585.425.500
SABU LIAE	987.000.000	822.450.000	-	-	822.450.000
HAWU MEHARA	1.127.070.000	1.117.805.000	-	-	1.117.805.000
RAIJUA	425.000.000	369.280.000	-	-	369.280.000
Total	5.486.410.000	4.815.140.500	-	-	4.815.140.500
DANA KOPERASI 2000 - 2008					
SABU BARAT	345.250.000	181.750.000	-	-	181.750.000
SABU TIMUR	146.200.000	88.800.000	-	-	88.800.000
SABU LIAE	44.950.000	25.550.000	-	-	25.550.000
HAWU MEHARA	19.950.000	7.750.000	-	-	7.750.000
RAIJUA	85.400.000	24.900.000	-	-	24.900.000
Total	641.750.000	328.750.000	-	-	328.750.000
PINJAMAN MODAL					
KSU SALIKO 2010	-	5.500.000	-	-	5.500.000
KSU HE WUE ADE 2010	-	9.000.000	-	-	9.000.000
KSU HE WUE ADE 2011	-	23.000.000	-	-	23.000.000
PINJAMAN LUNAK	-	66.791.277	-	-	66.791.277
FORUM KEPALA DESA/LURAH	-	747.058.000	-	-	747.058.000
KSU MANNO WADA	-	213.999.976	-	-	213.999.976
PENGELOLA PABRIK RL	-	2.339.600.000	-	-	2.339.600.000
KSU KOLO HARRU 2013	-	385.000.000	-	-	385.000.000
Total	-	3.789.949.253	-	-	3.789.949.253
Grand Total	11.640.367.000	13.423.178.753	-	-	13.423.178.753



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	TANAH	PERALATAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN, DAN INSTALASI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
Saldo Awal	21.737.683.938,00	339.123.654.009,42	562.644.595.694,50	802.330.108.849,04	29.524.484.359,68	76.686.758.606,85
Koreksi	-	26.884.000,00	235.717.508,00	492.000.000,00	-	-
PENAMBAHAN :	-	19.227.390.050,00	60.536.340.490,42	176.626.685.467,00	1.367.913.668,00	15.937.874.472,00
Belanja Modal	-	18.526.761.862,00	19.844.122.737,42	97.259.462.732,00	1.321.217.700,00	-
Hutang Belanja	-	-	3.800.000,00	-	-	-
Kapitalisasi	-	26.919.900,00	8.439.234.948,00	30.467.450,00	-	99.695.000,00
Hibah	-	537.757.938,00	6.994.701.569,00	-	46.695.968,00	-
Reklas Masuk	-	110.720.600,00	5.850.750.858,00	186.443.080,00	-	45.119.000,00
Ekstrakom ke KIB	-	-	-	734.809.142,00	-	-
Mutasi SKPD	-	25.229.750,00	-	48.174.731.763,00	-	-
KDP	-	-	19.403.730.378,00	30.240.771.300,00	-	15.793.060.472,00
PENGURANGAN :	6.031.476,00	9.184.628.719,82	9.047.695.880,28	15.598.510.725,60	331.619.700,00	51.055.584.038,63
BM Tidak Dikapitalisasi	-	975.888.150,00	436.033.302,47	6.860.745.000,00	237.375.700,00	-
Hibah/ Lelang	6.031.476,00	-	-	-	-	-
Reklas Keluar	-	7.875.427.283,82	463.104.861,81	166.152.969,60	94.244.000,00	1.411.082.360,63
Ekstrakom	-	308.083.536,00	927.110.000,00	-	-	-
Mutasi SKPD	-	25.229.750,00	-	-	-	-
KDP	-	-	7.221.447.716,00	8.571.612.756,00	-	49.644.501.678,00
SALDO AKHIR	21.731.652.462,00	349.193.299.339,60	614.368.957.812,64	963.850.283.590,44	30.560.778.327,68	41.569.049.040,22



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP TANAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Unit Organisasi	Saldo Awal	Koreksi	PENAMBAHAN								PENGURANGAN					Saldo Akhir			
				Belanja Modal	Hutang Belanja	Kapitalisasi	Hibah	Reklas	Ekstrakom	Mutasi SKPD	KDP Selesai	BM Tidak Dikapitalisasi	Hibah/ Lelang	Reklas	Ekstrakom	Mutasi SKPD		KDP		
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.645.579.784,00																-	1.645.579.784,00	
2	Rumah Sakit Umum Daerah	1.500.000,00																	-	1.500.000,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	126.885.036,00																	-	126.885.036,00
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	19.625.883.503,00											6.031.476,00						-	19.619.852.027,00
5	Dinas Pertanian & Pangan	23.450.000,00																	-	23.450.000,00
6	Dinas Perhubungan	58.883.600,00																	-	58.883.600,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.825.000,00																	-	6.825.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan	81.073.760,00																	-	81.073.760,00
9	Kecamatan Sabu Barat	128.099.255,00																	-	128.099.255,00
10	Kecamatan Sabu Timur	18.794.000,00																	-	18.794.000,00
11	Kecamatan Hawu Mehara	300.000,00																	-	300.000,00
12	Kecamatan Raijua	2.910.000,00																	-	2.910.000,00
13	Kecamatan Sabu Tengah	17.500.000,00																	-	17.500.000,00
TOTAL		21.737.683.938,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.031.476,00	-	-	-	-	-	-	21.731.652.462,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Unit Organisasi	Saldo Awal	Koreksi	PENAMBAHAN					PENGURANGAN				Saldo Akhir	
				Belanja Modal	Kapitalisasi	Hibah	Reklas	Mutasi SKPD	BM Tidak Dikapitalisasi	Reklas	Ekstrakom	Mutasi SKPD		
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	59.006.405.939,48	-	4.368.928.900,00	3.500.000,00	-	17.950.000,00	-	-	924.163.500,00	164.831.064,00	155.562.200,00	-	62.152.228.075,48
2	Rumah Sakit Umum Daerah	52.986.644.921,00	-	1.560.595.343,00	-	-	-	-	-	4.337.000,00	120.713.014,00	17.420.000,00	-	54.404.770.250,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	53.080.038.459,80	-	3.275.556.225,00	7.500.000,00	-	-	-	-	36.575.075,00	-	60.987.900,00	-	56.265.531.709,80
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.687.165.859,00	-	69.210.000,00	-	-	-	-	-	-	610.824.650,00	-	-	12.145.551.209,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	798.390.200,00	-	605.660.000,00	-	-	-	-	-	-	69.311.350,00	-	-	1.334.738.850,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.172.777.820,00	-	15.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.188.577.820,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.507.000.677,00	-	20.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.527.500.677,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.101.133.072,00	-	53.610.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.154.743.072,00
9	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	686.817.409,00	-	353.940.000,00	-	-	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.052.757.409,00
10	Dinas Pertanian dan Pangan	8.636.791.977,10	-	142.611.500,00	-	-	-	-	-	-	-	26.880.000,00	-	8.752.523.477,10
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.608.326.635,00	26.884.000,00	324.237.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.959.448.435,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.314.377.876,00	-	192.729.000,00	-	-	-	-	-	1.122.575,00	228.182.226,00	-	-	2.277.802.075,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.541.822.190,00	-	77.945.600,00	-	-	-	-	-	-	28.416.000,00	-	-	3.591.351.790,00
14	Dinas Perhubungan	24.272.138.035,00	-	565.652.676,00	-	497.406.900,00	-	25.229.750,00	-	-	153.900.000,00	-	-	25.206.527.361,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.705.825.748,00	-	152.185.800,00	-	-	-	-	-	9.690.000,00	254.452.884,00	1.397.436,00	-	3.592.471.228,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan	51.696.112.977,00	-	194.989.000,00	-	-	-	-	-	-	5.128.590.858,00	4.116.000,00	-	46.758.395.119,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Unit Organisasi	Saldo Awal	Koreksi	PENAMBAHAN					PENGURANGAN				Saldo Akhir	
				Belanja Modal	Kapitalisasi	Hibah	Reklas	Mutasi SKPD	BM Tidak Dikapitalisasi	Reklas	Ekstrakom	Mutasi SKPD		
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.549.237.693,00	-	-	-	29.946.038,00	-	-	-	-	1.320.000,00	-	-	2.577.863.731,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.505.820.790,00	-	100.866.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.606.687.390,00
19	Dinas Pariwisata	1.596.875.275,00	-	217.694.000,00	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	1.813.069.275,00
20	Bagian Pemerintahan	506.037.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506.037.500,00
21	Bagian Kesejahteraan Rakyat	606.892.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606.892.150,00
22	Bagian Hukum	539.287.800,00	-	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543.287.800,00
23	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	525.318.450,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530.318.450,00
24	Bagian Administrasi Pembangunan	1.158.556.485,00	-	8.450.000,00	-	-	-	-	-	110.704.985,00	-	-	-	1.056.301.500,00
25	Bagian Umum	18.159.604.243,00	-	3.423.855.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.583.459.643,00
26	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	524.614.577,00	-	33.873.000,00	-	-	-	-	-	30.785.000,00	-	-	-	527.702.577,00
27	Bagian Organisasi	606.071.095,00	-	9.120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615.191.095,00
28	Inspektorat Daerah	1.158.885.963,00	-	248.975.000,00	-	-	-	-	-	87.650.000,00	-	-	-	1.320.210.963,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.128.586.998,52	-	26.650.000,00	-	-	-	-	-	195.224.932,82	-	-	-	1.960.012.065,70
30	Badan Keuangan Daerah	4.701.775.200,00	-	241.936.358,00	919.900,00	10.405.000,00	80.770.600,00	-	-	-	-	-	-	5.035.807.058,00
31	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	2.417.910.806,02	-	38.828.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.456.738.806,02
32	Sekretariat DPRD	6.112.436.794,00	-	1.996.237.660,00	15.000.000,00	-	-	-	-	65.195.000,00	30.400.000,00	25.229.750,00	-	8.002.849.704,00
33	Kecamatan Sabu Barat	665.119.314,00	-	17.750.000,00	-	-	-	-	-	67.629.938,00	-	-	-	615.239.376,00
34	Kecamatan Sabu Timur	793.078.214,00	-	49.300.000,00	-	-	-	-	-	-	8.500.000,00	-	-	833.878.214,00
35	Kecamatan Sabu Liae	789.044.544,00	-	40.732.000,00	-	-	-	-	-	133.908.544,00	-	-	-	695.868.000,00
36	Kecamatan Hawu Mehara	1.486.063.704,00	-	-	-	-	-	-	-	144.067.088,00	-	-	-	1.341.996.616,00
37	Kecamatan Raijua	2.672.139.619,00	-	24.500.000,00	-	-	-	-	-	245.245.500,00	-	-	-	2.451.394.119,00
38	Kecamatan Sabu Tengah	683.940.498,50	-	43.383.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727.323.498,50
39	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	434.586.501,00	-	21.459.000,00	-	-	-	-	-	35.794.250,00	-	-	-	420.251.251,00
		339.123.654.009,42	26.884.000,00	18.526.761.862,00	26.919.900,00	537.757.938,00	110.720.600,00	25.229.750,00	975.888.150,00	7.875.427.283,82	308.083.536,00	25.229.750,00	349.193.299.339,60	



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Unit Organisasi	Saldo Awal	Koreksi	PENAMBAHAN						PENGURANGAN				Saldo Akhir	
				Belanja Modal	Hutang Belanja	Kapitalisasi	Reklas	Hibah	KDP Selesai	BM Tidak Dikapitalisasi	Reklas	Ekstrakom	KDP		
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	119.350.011.938,81	-	8.803.796.517,05	3.800.000,00	4.874.386.167,00	-	-	-	-	328.033.302,47	213.901.541,29	-	594.187.800,00	131.895.871.979,10
2	Rumah Sakit Umum Daerah	33.094.540.142,31	-	95.185.782,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.189.725.924,31
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	76.076.725.448,00	185.720.000,00	7.629.097.618,00	-	531.306.630,00	-	-	-	6.476.355.954,00	-	185.720.000,00	-	6.527.269.451,00	84.186.216.199,00
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	136.925.554.696,67	-	271.370.265,00	-	-	-	-	-	1.298.801.816,00	-	-	-	99.990.465,00	138.395.736.312,67
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	336.000.000,00	-	-	-	-	568.260.000,00	-	-	-	-	-	568.260.000,00	-	336.000.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	64.847.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.847.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	49.997.508,00	433.106.730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483.104.238,00
9	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	-	-	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00	-	-	-
10	Dinas Pertanian & Pangan	10.915.484.913,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.915.484.913,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	29.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.000.000,00
13	Dinas Perhubungan	1.114.859.000,00	-	852.710.000,00	-	2.846.345.251,00	153.900.000,00	6.994.701.569,00	-	2.937.820.000,00	-	15.088.912,15	153.900.000,00	-	14.731.346.907,85
14	Dinas Penanaman Modal & PTSP, Perindustrian & Perdagangan	121.008.498.778,71	-	50.000.000,00	-	-	5.128.590.858,00	-	-	-	-	-	-	-	126.187.089.636,71
15	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	224.019.000,00	-	995.291.346,00	-	-	-	-	8.690.752.608,00	-	-	-	-	-	9.910.062.954,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.403.018.954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.403.018.954,00
17	Dinas Pariwisata	39.618.611.617,00	-	423.564.479,37	-	-	-	-	-	-	7.394.408,37	-	-	-	40.034.781.688,00
18	Bagian Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Bagian Umum	89.797.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.797.000,00
20	Badan Keuangan Daerah	54.353.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.353.050,00
21	Sekretariat DPRD	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000,00
22	Kecamatan Sabu Barat	2.953.977.774,00	-	-	-	-	-	-	-	-	29.000.000,00	117.450.000,00	-	-	2.807.527.774,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Unit Organisasi	Saldo Awal	Koreksi	PENAMBAHAN						PENGURANGAN				Saldo Akhir	
				Belanja Modal	Hutang Belanja	Kapitalisasi	Reklas	Hibah	KDP Selesai	BM Tidak Dikapitalisasi	Reklas	Ekstrakom	KDP		
23	Kecamatan Sabu Timur	4.251.014.473,00	-	170.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.421.014.473,00
24	Kecamatan Sabu Liae	2.987.404.747,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.500.000,00	-	-	2.899.904.747,00
25	Kecamatan Hawu Mehara	2.161.114.083,00	-	-	-	187.196.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.348.310.983,00
26	Kecamatan Raijua	7.118.855.759,00	-	108.000.000,00	-	-	-	-	-	108.000.000,00	-	-	-	-	7.118.855.759,00
27	Kecamatan Sabu Tengah	1.776.907.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.776.907.320,00
JUMLAH		562.644.595.694,50	235.717.508,00	19.844.122.737,42	3.800.000,00	8.439.234.948,00	5.850.750.858,00	6.994.701.569,00	19.403.730.378,00	436.033.302,47	463.104.861,81	927.110.000,00	7.221.447.716,00	614.368.957.812,64	



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Unit Organisasi	Saldo Awal	Koreksi	PENAMBAHAN						PENGURANGAN			Saldo Akhir
				Belanja Modal	Kapitalisasi	Reklas	Ekstrakom	Hibah	KDP Selesai	BM Tidak Dikapitalisasi	Reklas	KDP	
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	3.396.569.393,00	-	-	-	186.443.080	176.488.600,00	-	-	-	-	-	3.759.501.073,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	6.374.102.182,00	-	-	-	-	17.814.000	-	-	-	-	-	6.391.916.182,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.254.287.244,00	-	-	3.500.000	-	243.759.864	-	-	-	-	-	2.501.547.108,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	757.491.242.192,04	492.000.000	96.763.464.732	26.967.450	-	133.441.678	-	30.240.771.300,00	6.835.745.000	166.152.969,60	8.571.612.756	869.574.376.626,44
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.652.850.900,00	-	262.998.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.915.848.900,00
6	Badan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	841.500	-	-	-	-	-	841.500,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.980.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.980.400,00
8	Dinas Pertanian dan Pangan	18.107.755.441,00	-	-	-	-	62.988.500	-	-	-	-	-	18.170.743.941,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	941.795.950,00	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	945.795.950,00
10	Dinas Perhubungan	6.217.407.738,00	-	-	-	-	-	48.174.731.763	-	-	-	-	54.392.139.501,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	32.916.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.916.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	3.346.145.535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.346.145.535,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	53.536.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.536.500,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	303.127.324,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.127.324,00
15	Dinas Pariwisata	398.780.550,00	-	-	-	-	13.100.000	-	-	-	-	-	411.880.550,00
16	Bagian Administrasi Pembangunan	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000,00
17	Bagian Umum	29.745.500,00	-	-	-	-	4.478.000	-	-	-	-	-	34.223.500,00
18	Badan Keuangan Daerah	655.766.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655.766.000,00
19	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	317.000	-	-	-	-	-	317.000,00
20	Kecamatan Sabu Barat	15.100.000,00	-	-	-	-	6.880.000	-	-	-	-	-	21.980.000,00
21	Kecamatan Sabu Timur	-	-	25.000.000	-	-	2.000.000	-	-	25.000.000	-	-	2.000.000,00
22	Kecamatan Sabu Liae	-	-	-	-	-	29.700.000	-	-	-	-	-	29.700.000,00
23	Kecamatan Raijua	20.000.000,00	-	208.000.000	-	-	13.000.000	-	-	-	-	-	241.000.000,00
24	Kecamatan Hawa Mehara	-	-	-	-	-	11.000.000	-	-	-	-	-	11.000.000,00
25	Kecamatan Sabu Tengah	-	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	15.000.000,00
JUMLAH		802.330.108.849,04	492.000.000,00	97.259.462.732,00	30.467.450,00	186.443.080,00	734.809.142,00	48.174.731.763,00	30.240.771.300,00	6.860.745.000,00	166.152.969,60	8.571.612.756,00	963.850.283.590,44



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Unit Organisasi	Saldo Awal	PENAMBAHAN					PENGURANGAN				Saldo Akhir
			Belanja Modal	Hibah	Reklas	Ekstrakom	Mutasi SKPD	BM Tidak Dikapitalisasi	Reklas	Ekstrakom	Mutasi SKPD	
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga	25.355.675.028,00	1.276.098.700	33.606.168	-	-	-	237.375.700	26.950.000	-	-	26.401.054.196,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	74.152.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.152.400,00
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	37.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.800.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana	5.946.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.946.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26.001.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.001.500,00
6	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	5.087.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.087.700,00
7	Dinas Pertanian dan Pangan	2.680.081.280,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.680.081.280,68
8	Dinas Lingkungan Hidup	15.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.400.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.373.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.373.100,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.344.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.344.400,00
11	Dinas Perhubungan	3.943.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.943.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.886.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.886.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	966.033.091,00	-	13.089.800	-	-	-	-	-	-	-	979.122.891,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.779.810,00	45.119.000	-	-	-	-	-	45.119.000	-	-	18.779.810,00
16	Dinas Pariwisata	66.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.350.000,00
17	Bagian Pemerintahan	16.825.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.825.800,00
18	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.500.000,00
19	Bagian Hukum	57.450.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.450.100,00
20	Bagian Perekonomian & Sumber Daya Alam	11.500.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500.700,00
21	Bagian Administrasi Pembangunan	5.996.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.996.000,00
22	Bagian Umum	24.214.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.214.800,00
23	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00
24	Bagian Organisasi	15.891.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.891.850,00
25	Inspektorat Daerah	11.133.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.133.200,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	334.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334.000,00
27	Badan Keuangan Daerah	32.050.400,00	-	-	-	-	-	22.175.000	-	-	-	9.875.400,00
28	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	13.619.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.619.400,00
29	Sekretariat DPRD	14.711.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.711.300,00
30	Kecamatan Raijua	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000,00
31	Kantor Kesatuan Bangsa & Politik	15.903.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.903.500,00
JUMLAH		29.524.484.359,68	1.321.217.700,00	46.695.968,00	-	-	-	237.375.700,00	94.244.000,00	-	-	30.560.778.327,68



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN KDP
PER 31 DESEMBER 2024

No	Unit Organisasi	Saldo Awal	PENAMBAHAN					PENGURANGAN				Saldo Akhir	
			Hutang Belanja	Kapitalisasi	Reklas	Ekstrakom	Mutasi SKPD	KDP	Reklas	Ekstrakom	Mutasi SKPD		KDP Selesai
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga	-	-	-	-	-	-	594.187.800,00	-	-	-	-	594.187.800,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	44.999.955,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.999.955,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.842.417.529,00	-	-	-	-	-	6.527.269.451,00	1.387.751.978,06	-	-	6.476.355.954,00	6.505.579.047,94
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	46.527.957.595,85	-	99.695.000,00	-	-	-	8.671.603.221,00	13.330.382,57	-	-	31.539.573.116,00	23.746.352.318,28
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	74.019.525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.019.525,00
6	Badan Penanggulangan Bencana	24.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.400.000,00
7	Dinas Perhubungan	2.937.820.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.937.820.000,00	-
8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	10.544.391.394,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	10.534.391.394,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.690.752.608,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.690.752.608,00	-
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	45.119.000,00	-	-	-	-	-	-	-	45.119.000,00
11	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		76.686.758.606,85	-	99.695.000,00	45.119.000,00	-	-	15.793.060.472,00	1.411.082.360,63	-	-	49.644.501.678,00	41.569.049.040,22



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024

No	Unit Organisasi	Saldo Awal	Koreksi	PENAMBAHAN		PENGURANGAN		Saldo Akhir	Akumulasi Penyusutan
				Reklas Masuk	Hibah	Progress Barang Ditemukan	Penghapusan		
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	12.567.584.967,66	-	201.289.525,26	-	-	-	12.768.874.492,92	(3.066.305.906,02)
2	Rumah Sakit Umum Daerah	12.859.406.825,69	-	120.713.014,00	554.666.667,00	-	-	13.534.786.506,69	(9.503.620.569,00)
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	61.986.165,00	-	1.798.625.718,67	-	-	185.720.000,00	1.674.891.883,67	(47.562.073,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.945.323.604,86	(507.000.000,00)	394.232.447,77	-	-	-	50.832.556.052,63	(32.293.128.459,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19.120.200,00	-	69.311.350,00	-	-	-	88.431.550,00	(86.632.500,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	240.885.000,00	-	-	-	-	-	240.885.000,00	(201.038.959,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.098.100.000,00	-	-	-	-	-	1.098.100.000,00	(1.074.052.117,00)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	91.768.150,00	-	-	-	-	-	91.768.150,00	(81.265.418,00)
9	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	38.950.000,00	-	-	-	-	-	38.950.000,00	(3.568.768,00)
10	Dinas Pertanian dan Pangan	3.764.696.562,90	-	-	-	-	-	3.764.696.562,90	(3.403.518.024,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	663.599.564,00	-	228.182.226,00	-	-	-	891.781.790,00	(804.521.460,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	181.547.250,00	-	28.416.000,00	-	-	-	209.963.250,00	(208.645.575,00)
14	Dinas Perhubungan	10.077.628.650,00	-	15.088.912,15	-	-	-	10.092.717.562,15	(5.857.753.779,00)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.159.446.800,00	-	254.452.884,00	-	-	-	1.413.899.684,00	(1.279.455.966,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024

No	Unit Organisasi	Saldo Awal	Koreksi	PENAMBAHAN		PENGURANGAN		Saldo Akhir	Akumulasi Penyusutan
				Reklas Masuk	Hibah	Progress Barang Ditemukan	Penghapusan		
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan	54.905.824.150,29	-	10.000.000,00	-	-	-	54.915.824.150,29	(6.319.563.235,27)
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.200.500,00	-	-	-	-	-	15.200.500,00	(15.100.500,00)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.316.598.475,00	-	-	-	-	-	12.316.598.475,00	(5.082.523.283,00)
19	Dinas Pariwisata	900.671.000,00	-	7.394.408,37	-	-	-	908.065.408,37	(219.345.763,00)
20	Bagian Pemerintahan	41.354.450,00	-	-	-	-	-	41.354.450,00	(41.354.450,00)
21	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Bagian Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bagian Administrasi Pembangunan	192.857.500,00	-	110.704.985,00	-	-	-	303.562.485,00	(216.623.794,00)
25	Bagian Umum	774.918.658,00	-	-	-	-	-	774.918.658,00	(758.550.158,00)
26	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.588.000,00	-	30.785.000,00	-	-	-	34.373.000,00	(34.373.000,00)
27	Bagian Organisasi	48.940.880,00	-	-	-	-	-	48.940.880,00	(47.013.379,00)
28	Inspektorat Daerah	13.472.250,00	-	87.650.000,00	-	-	-	101.122.250,00	(98.212.250,00)
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	105.330.701,14	-	195.224.932,82	-	-	-	300.555.633,96	(281.145.666,82)
30	Badan Keuangan Daerah	8.681.371.017,00	-	-	-	58.595.600,00	-	8.622.775.417,00	(1.389.750.700,00)
31	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	180.673.104,00	-	-	-	-	-	180.673.104,00	(155.284.574,00)
32	Sekretariat DPRD	960.512.290,00	-	65.195.000,00	-	-	-	1.025.707.290,00	(851.364.381,00)
33	Kecamatan Sabu Barat	14.334.950,00	-	96.629.938,00	-	-	-	110.964.888,00	(94.969.271,00)
34	Kecamatan Sabu Timur	295.371.807,00	-	-	-	-	-	295.371.807,00	(295.371.807,00)
35	Kecamatan Sabu Liae	8.654.600,00	-	133.908.544,00	-	-	-	142.563.144,00	(140.570.544,00)
36	Kecamatan Hawu Mehara	76.822.125,00	-	144.067.088,00	-	-	-	220.889.213,00	(219.186.437,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024

No	Unit Organisasi	Saldo Awal	Koreksi	PENAMBAHAN		PENGURANGAN		Saldo Akhir	Akumulasi Penyusutan
				Reklas Masuk	Hibah	Progress Barang Ditemukan	Penghapusan		
37	Kecamatan Raijua	189.858.375,00	-	245.245.500,00	-	-	-	435.103.875,00	(417.026.161,00)
38	Kecamatan Sabu Tengah	76.645.000,00	-	-	-	-	-	76.645.000,00	(51.687.500,00)
39	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	41.503.700,00	-	35.794.250,00	-	-	-	77.297.950,00	(35.794.250,00)
		173.614.547.272,54	(507.000.000,00)	4.272.911.724,04	554.666.667,00	58.595.600,00	185.720.000,00	177.690.810.063,58	(74.675.880.677,11)



KABUPATEN SABU RAIJUA
DAFTAR DANA CADANGAN
Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Tujuan Pembentukan	Perda No	Tanggal	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Pembentukan	Pendapatan Bunga	Pencairan	Saldo Akhir 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8-9)
1	Dana Cadangan Lainnya	Pemilihan Kepala Daerah	Perbup Nomor 32 Tahun 2022	28/10/2022	22.120.000.000,00	-	-	22.120.000.000,00	-
					22.120.000.000,00	-	-	22.120.000.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DATA PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT	49.492.830.000,00	7.000.000.000,00	-	56.492.830.000,00
2	PERUSAHAAN DAERAH RAI HAWU	216.729.274,79	-	-	216.729.274,79
TOTAL		49.709.559.274,79	7.000.000.000,00	-	56.709.559.274,79